



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017 - 2022**

RPJMD



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2018**



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN JAPURA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2007-2027
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 (Lembaran Daeah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 21).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
DAN
BUPATI JAYAPURA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2017 - 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Jayapura.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayapura untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayapura untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 2022.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Jayapura adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Jayapura.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
16. Program adalah bentuk Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
17. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
18. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
19. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan dan program Bupati yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan
- c. Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 4

Visi dan Misi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

Visi Bupati adalah **“Kabupaten Jayapura berkualitas, sejahtera dan ramah ”**

a. Misi Bupati adalah :

1. Meningkatkan kualitas manusia
2. Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat
3. Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan
4. Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam

Pasal 5

(1) Sistematika Penuyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX : P E N U T U P

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi dan uraian Lampiran BAB VIII dan BAB IX sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017-2022 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan

- (2) Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan kemampuan keuangan daerah
- (3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perubahan tersebut dimuat dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura

pada tanggal

BUPATI JAYAPURA,

ttd

.....

Diundangkan di Jayapura

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN NOMOR

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Atas berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Kabupaten Jayapura dapat terlaksana dengan baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022, merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Jayapura yang terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Tahun 2017-2022 Kabupaten Jayapura merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jayapura setiap tahunnya. Penyusunan RPJMD Tahun 2013-2017 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan *stakeholder* pembangunan lainnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia nomor 1312);

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura 2017-2022 ini dapat di selesaikan.

Sentani, April 2018

BUPATI JAYAPURA

MATHIUS AWOITAUW, SE.M.Si

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan alir keterkaitan RPJMD Kabupaten Jayapura dengan Dokumen Perencanaan lainnya	8
Gambar 1.2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	11
Gambar 1.3	Bagan Alir Penyusunan RKPD	12
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Jayapura.....	18
Gambar 2.2	Peta Daerah Aliran Sungai	26
Gambar 2.3	Pola Arus Musim	28
Gambar 2.4	Sebaran Suhu Permukaan Laut untuk Setiap Musim di Indonesia	30
Gambar 2.5	Peta Hutan Lindung dan budidaya Kabupaten Jayapura	31
Gambar 2.6	Peta Bahaya Gempa Bumi di Kabupaten Jayapura.....	36
Gambar 2.7	Peta Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Jayapura.....	37
Gambar 2.8	Peta Bahaya Banjir di Kabupaten Jayapura	37
Gambar 2.9	Peta Rawan Bencana Kabupaten Jayapura	38
Gambar 2.10	Peta Potensi Hutan Kabupaten Jayapura.....	123
Gambar 5.1	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	213
Gambar 6.1	Arah Kebijakan Pembangunan Setiap Tahun	237
Gambar 6.2	Arsitektur Kinerja RPJMD antara Kinerja Strategis dengan Operasional.....	238

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di Kabupaten Jayapura	39
Grafik 2.2	Pertumbuhan Riil PDRB Tahun 2012-2016	51
Grafik 2.3	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jayapura tahun 2012-2016	53
Grafik 2.4	Pertumbuhan IPM Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016	54
Grafik 2.5	Angka Melek Huruf (AMH) Di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017	54
Grafik 2.6	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016	55
Grafik 2.7	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2016	56
Grafik 2.8	Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Jayapura Tahun 2016.....	57
Grafik 2.9	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Jayapura Tahun 2011 – 2016	63
Grafik 2.10	Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Jayapura Tahun 2016	64
Grafik 2.11	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Jayapura Tahun 2011-2016	65
Grafik 2.12	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2016	65
Grafik 2.13	Pencapaian Angka Rata-Rata Sekolah (RLS) Kabupaten Jayapura Tahun 2016	66
Grafik 2.14	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Jayapura Tahun 2016.....	70
Grafik 2.15	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2016	71
Grafik 2.16	Pencapaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Jayapura Tahun 2016	72
Grafik 2.17	Persentase Penduduk Kabupaten Jayapura yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Bulan Referensi, Dirinci Menurut Jenis Keluhan Kesehatan Yang Dialami Tahun 2013	81
Grafik 2.18	TPAK di Kabupaten Jayapura Dirinci Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016	92
Grafik 2.19	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jayapura Tahun 2015	94
Grafik 2.20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Perempuan Dan Laki-Laki di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2015.....	94
Grafik 2.21	Proporsi Koperasi dan Industri Kecil Menengah Menurut Jenis di Kabupaten	

Jayapura Tahun 2014	111
Grafik 2.22 Produksi (ton) dan Nilai Ikan Air Tawar dan Ikan Laut di Kabupaten Jayapura Tahun 2013 - 2016	120
Grafik 2.23 Data Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2016	121
Grafik 2.24 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Jayapura Tahun 2016.....	124
Grafik 2.25 Luas Panen dan Total Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Jayapura Tahun 2013 – 2016	124
Grafik 2.26 Luas Panen dan Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2016	125
Grafik 2.27 Populasi Ternak (ekor) Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2016	125
Grafik 2.28 Populasi Unggas di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2016	126
Grafik 2.29 Produksi Daging dan Telur di Kabupaten Jayapura Tahun 2016	126

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Hubungan antar Dokumen perencanaan	8
1.4. Maksud dan Tujuan	14
1.5. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	18
2.1. Aspek Geografis dan Demografis	18
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	45
2.3. Aspek Pelayanan Umum	61
2.4. Aspek Daya Saing	133
BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	149
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	149
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	157
3.3. Kerangka Pendanaan	161
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PEMBANGUNAN	172
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	172
4.2. Isu Strategis	192
4.3. Isu Pembangunan Daerah	198
BAB V VISI DAN MISI	207
5.1. Visi	207
5.2. Misi	210
5.3 Tujuan dan Sasaran	213

BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	223
6.1.	Strategi	223
6.2.	Arah Kebijakan	227
6.3.	Program Pembangunan Daerah	237
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	248
7.1.	Kerangka Pendanaan	248
7.2.	Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi dan Misi	249
7.3.	Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi dan Misi Serta Layanan Urusan Pemerintahan Daerah	251
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	280
BAB IX	PENUTUP	315
9.1	Pedoman Transisi	315
9.2	Kaidah Pelaksanaan	315

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Batas Wilayah administrasi Kabupaten Jayapura	18
Tabel 2.2	Luas Wilayah Masing-masing Distrik di Kabupaten Jayapura	19
Tabel 2.3	Luas Masing-masing Kelas Kemiringan pada Distrik di Kabupaten Jayapura.....	21
Tabel 2.4	Luas Masing-masing Kelas Ketinggian Pada Distrik di Kabupaten Jayapura	22
Tabel 2.5	Luas Jenis Tanah d Kabupaten Jayapura 2017	23
Tabel 2.6	Nama-Nama Sungai di Kabupaten Jayapura	25
Tabel 2.7	Beberapa musim di perairan Kabupaten Jayapura tahun 2016.....	28
Tabel 2.8	Curah Hujan di Kabupaten Jayapura 2016	29
Tabel 2.9	Rata-Rata Suhu Udara Minimum Mutlak pada Statsiun Sentani dan Genyem ..	30
Tabel 2.10	Kelembaban Udara Rata-Rata Di Kabupaten Jayapura 2012-2016	31
Tabel 2.11	Pembagian wilayah pembangunan Kabupaten Jayapura.....	35
Tabel 2.12	Sebaran Penduduk Berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Jayapura	39
Tabel 2.13	Perkembangan Jumlah penduduk	40
Tabel 2.14	Data Sebaran Penduduk di Distrik Kabupaten Jayapura Tahun 2016.....	41
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan.....	41
Tabel 2.16	Penduduk menurut suku bangsa	43
Tabel 2.17	Sebaran penduduk asli dan non asli papua	43
Tabel 2.18	Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Jayapura Tahun 2013 - 2017.....	44
Tabel 2.19	Penduduk Usia Produktif di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017.....	44
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk Usia Produktif Sesuai Status Bekerja di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2015	45
Tabel 2.21	Nilai Dan Kontribusi Lapangan Usaha Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jayapura Tahun 2012 - 2016	46
Tabel 2.22	Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha Dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jayapura Tahun 2012 - 2016	48
Tabel 2.23	Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (HK) Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016	50
Tabel 2.24	Perkembangan Inflasi Kabupaten Jayapura Tahun 2014-2016	52
Tabel 2.25	Perkembangan IPM Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016	53
Tabel 2.26	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016	57
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016.....	58
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016.....	58
Tabel 2.29	Jumlah Sanggar Seni Tari, Sanggar Seni Suara, Sanggar Seni Budaya Menurut Distrik di Kabupaten Jayapura Tahun 2015	59
Tabel 2.30	Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Kesenian Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017	59
Tabel 2.31	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Tahun 2016 di Kabupaten Jayapura.....	59
Tabel 2.32	Jumlah Klub Olahraga Tahun 2013-2017 di Kabupaten Jayapura	60
Tabel 2.33	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Jayapura Tahun 2016..	60
Tabel 2.34	Jumlah gedung sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Jayapura Tahun 2014-2015.....	61

Tabel 2.35	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013-2017.....	62
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Jayapura Tahun 2016	62
Tabel 2.37	Rasio Ketersediaan Sekolah menurut tingkat pendidikan dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 - 2016	67
Tabel 2.38	Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Distrik di Kabupaten Jayapura Tahun 2016	68
Tabel 2.39	Rasio Guru Terhadap Gedung Sekolah di Kabupaten Jayapura tahun 2013 s.d 2016	68
Tabel 2.40	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Jayapura Tahun 2014 s.d 2016	69
Tabel 2.41	Angka Kematian Bayi Kabupaten Jayapura tahun 2013-2016	73
Tabel 2.42	Jumlah Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk di Kabupaten Jayapura Periode 2015	74
Tabel 2.43	Besar Penyakit Semua Golongan Umur di Kabupaten Jayapura tahun 2016.....	75
Tabel 2.44	Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura 2012 -2016	76
Tabel 2.45	Kondisi Layanan Kesehatan berdasarkan Indikator Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2016	76
Tabel 2.46	Perkembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016	78
Tabel 2.47	Rasio Tenaga Medis Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016	79
Tabel 2.48	Persentase Penduduk Kabupaten Jayapura Dengan Keluhan Kesehatan dan Rata-Rata Lama Sakit Tahun 2016	79
Tabel 2.49	Jumlah Kasus Kesakitan atau penyakit di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016	80
Tabel 2.50	Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016.....	81
Tabel 2.51	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Di Kabupaten Jayapura Periode 2012-2016	83
Tabel 2.52	Jumlah Dokter di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016	83
Tabel 2.53	Jumlah Bidan di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017.....	84
Tabel 2.54	Panjang Ruas Jalan Menurut Kewenangan Pengelolaan di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017 (Km)	84
Tabel 2.55	Panjang dan Kondisi Jalan di Kabupaten Jayapura Tahun 2013 – 2017	85
Tabel 2.56	Panjang Ruas Jalan dan Kondisi Jalan Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017	85
Tabel 2.57	Kondisi Rumah di Kabupaten Jayapura Tahun 2014	86
Tabel 2.58	Angka Kriminalitas Tertangani Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2015	87
Tabel 2.59	Jumlah Kecelakaan Lalu lintas Di Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016	88
Tabel 2.60	Jumlah Kegiatan Pengawasan Inspektorat di Kabupaten Jayapura Tahun 2012 – 2015	88
Tabel 2.61	Keadaan PMKS di Kabupaten Jayapura Tahun 2015-2016	89
Tabel 2.62	Data Capaian bidang sosial di Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017.....	90
Tabel 2.63	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Kabupaten Jayapura menurut Jenis Kelamin tahun 2014-2016	91

Tabel 2.64	Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Jayapura Tahun 2016	91
Tabel 2.65	Perkembangan keadaan TPAK di Kabupaten Jayapura selama periode 2012-2015	92
Tabel 2.66	Persentase penduduk bekerja di Kabupagten Jayapura	93
Tabel 2.67	Data capaian bidang perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017	95
Tabel 2.68	Jumlah anak asuh organisasi sosial menurut jenis kelamin	96
Tabel 2.69	Jumlah Bangunan Lumbung Pangan menurut distrik	98
Tabel 2.70	Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017	98
Tabel 2.71	Data capaian bidang lingkungan hidup Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017	99
Tabel 2.72	Penduduk Kabupaten Jayapura Dirinci Menurut Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2013-2016	100
Tabel 2.73	Penduduk Kabupaten Jayapura Dirinci Menurut Kepemilikan Dokumen Kependudukan sesuai Distrik Tahun 2015	101
Tabel 2.74	Data capaian bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017	102
Tabel 2.75	Pemberdayaan Kampung Di Kabupaten Jayapura Tahun 2014-2016	103
Tabel 2.76	Data capaian pelayanan pemberdayaan Kampung Kabupaten Jayapura 2013-2017	103
Tabel 2.77	Jumlah Penduduk Usia Subur Tahun 2013-2015	104
Tabel 2.78	Jumlah Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Yang Digunakan Di Kabupaten Jayapura Pada Tahun 2013-2015	105
Tabel 2.79	Data capaian pelayanan Pengendalian Penduduk Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017	105
Tabel 2.80	Kendaraan Bermotor Aktif Milik Pemerintah Tahun 2014-2016	107
Tabel 2.81	Bandar Udara Aktif Di Kabupaten Jayapura Hingga Tahun 2014-2016	107
Tabel 2.82	Jumlah Armada ASDP Di Kabupaten Jayapura Tahun 2013	108
Tabel 2.83	Data capaian Pelayanan Perhubungan Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017 ..	108
Tabel 2.84	Jumlah Sarana Telekomunikasi Di Kabupaten Jayapura Tahun 2017	109
Tabel 2.85	Jumlah penjangkauan KIE	109
Tabel 2.86	Data capaian layanan Komunikasi Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017	110
Tabel 2.87	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Di Kabupaten Jayapura Tahun 2014	111
Tabel 2.88	Jumlah Aktiva Rupiah Dan Valuta Asing Bank Umum Dan BPR Menurut Kelompok Bank Di Propinsi Papua, Kota Dan Kabupaten Jayapura 2010-2014 (dalam juta)	112
Tabel 2.89	Data capaian pelayanan Penanaman modal Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017	113
Tabel 2.90	Data capaian layanan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017	114
Tabel 2.91	Statistik Kabupaten Jayapura	114
Tabel 2.92	Data persandian Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017	115
Tabel 2.93	Objek Budaya di Kabupaten Jayapura Tahun 2016	115

Tabel 2.94	Nama Tarian dan Benda Budaya di Kabupaten Jayapura	116
Tabel 2.95	Kegiatan Bidang Perpustakaan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2015	117
Tabel 2.96	Data capaian pelayanan perpustakaan Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017 ..	117
Tabel 2.97	Kegiatan Bidang Kearsipan Dan Perpustakaan di Kabupaten Jayapura Tahun 2015	118
Tabel 2.98	Produksi Perikanan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2012 s/d 2016 (000 kg)	118
Tabel 2.99	Luas Areal Budidaya Produksi Perikanan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016 (ha)	119
Tabel 2.100	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2011-2015 ..	119
Tabel 2.101	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017	120
Tabel 2.102	Potensi Pariwisata di Kabupaten Jayapura	121
Tabel 2.103	Produksi Kehutanan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2015	122
Tabel 2.104	Luas Lahan Kehutanan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2015	122
Tabel 2.105	Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Jayapura Tahun 2015	127
Tabel 2.106	Penyebaran Bahan Tambang, Mineral Dan Logam Serta bahan Galian Industri Di Kabupaten Jayapura	128
Tabel 2.107	Kontribusi Pertambangan Dan Energi Terhadap PDRB Tahun 2010-2015 Kabupaten Jayapura (dalam juta dan %)	129
Tabel 2.108	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kepemilikannya Di Kabupaten Jayapura Tahun 2014	130
Tabel 2.109	Jumlah Pasar Menurut Jenis Di Kabupaten Jayapura Tahun 2017	131
Tabel 2.110	Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Menurut Jenis Di Kabupaten Jayapura Tahun 2015	132
Tabel 2.111	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Jayapura	132
Tabel 2.112	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Jayapura	133
Tabel 2.113	Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Jayapura	133
Tabel 2.114	Angka Perkembangan Konsumsi RT per Kapita Menurut Kabupaten Jayapura Tahun 2012 s.d 2016	133
Tabel 2.115	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Jayapura	134
Tabel 2.116	Panjang Jalan dan Jumlah jenis Kendaraan di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016	134
Tabel 2.117	Jumlah Orang/Yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2017	135
Tabel 2.118	Arus lalu Lintas Penumpang Pesawat Udara melalui Pelabuhan Udara Tahun 2016	135
Tabel 2.119	Arus lalu Lintas Barang / Cargo Melalui Pelabuhan udara Sentani per-bulan tahun 2016	136
Tabel 2.120	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016	136
Tabel 2.121	Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Jayapura	137
Tabel 2.122	Luas Lahan Produktif Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016	137
Tabel 2.123	Luas Wilayah Industri	137
Tabel 2.124	Rasio Luas Wilayah Kebanjiran tahun 2013-2017 Kabupaten Jayapura	138
Tabel 2.125	Rasio Luas Wilayah Kekeringan tahun 2013-2017 Kabupaten Jayapura	138
Tabel 2.126	Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Jayapura tahun 2013-2016	139

Tabel 2.127	Jenis dan Jumlah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2106. ...	140
Tabel 2.128	Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Warung Makan Yang Terdaftar di Kabupaten Jayapura Tahun 2016.....	140
Tabel 2.129	Hotel di Kabupaten Jayapura Beserta Klasifikasi dan Jumlah Kamar	141
Tabel 2.130	Rasio Ketersediaan Listrik tahun 2013-2016	143
Tabel 2.131	Data Sambung Listrik Di Kabupaten Jayapura Tahun 2015	143
Tabel 2.132	Jumlah Sarana Telekomunikasi Di Kabupaten Jayapura Tahun 2015	144
Tabel 2.133	Jumlah Kejahatan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2016	145
Tabel 2.134	Jumlah Demo Kabupaten Jayapura	145
Tabel 2.135	Jenis Ijin dan Lama Proses Perijinan	146
Tabel 2.136	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura	147
Tabel 2.137	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Jayapura	147
Tabel 2.138	Rasio Lulusan S1/S2/S3 tahun 2013-2016 Kabupaten Jayapura.....	148
Tabel 2.139	Rasio Ketergantungan Tahun 2013- 2017 Kabupaten Jayapura.....	148
Tabel 3.1	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2012-2016 .	149
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2013-2017	151
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017	152
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016.....	155
Tabel 3.5	Analisa Neraca Keuangan Daerah	156
Tabel 3.6	Rasio Likuiditas Kabupaten Jayapura	157
Tabel 3.7	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017.....	158
Tabel 3.8	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017	159
Tabel 3.9	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jayapura 2013-2017	160
Tabel 3.10	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Riil Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2013-2017.....	160
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Pembiayaan 2013-2017	161
Tabel 3.12	Proyeksi Perkembangan Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022.....	162
Tabel 3.13	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 S/d Tahun 2022.....	164
Tabel 3.14	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018-2022	166
Tabel 3.15	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018-2022	167
Tabel 3.16	Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018-2022	168
Tabel 5.1	Perumusan Visi	208
Tabel 5.2	Penjelasan Visi	209
Tabel 5.3	Perumusan Misi	211
Tabel 5.4	Penjelasan Misi	212

Tabel 5.5	Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jayapura	214
Tabel 5.5	Tujuan dan Sasaran	215
Tabel 6.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jayapura 2017-2022.....	233
Tabel 6.2	Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022.....	239
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura 2018-2022....	249
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Jayapura 2018-2022	252
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jayapura 2018-2022.....	281
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Jayapura	286
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Jayapura Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2018-2022	307

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 5 ayat (2) bahwa yang dimaksud RPJMD adalah penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang visi, misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang merespon aspirasi masyarakat.

Dengan Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada aspek perencanaan pembangunan daerah, terjadi penataan kembali tahapan dan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah. Pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Implementasi dalam perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) selain dalam upaya untuk pencapaian target prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah dituangkan ke dalam visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, juga merupakan penjabaran dari sasaran prioritas dan program strategis provinsi dan nasional yang wajib diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Sesuai Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, maka perlu penyelarasan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, penyerasian antara prioritas nasional dengan prioritas daerah dan antara target sasaran 5 (lima) tahunan nasional dengan 5 (lima) tahunan daerah dan dalam Pasal 263 ayat (1) dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari (i) rencana pembangunan daerah yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan (ii) rencana perangkat

daerah yaitu Renstra PD dan Renja PD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Mencermati substansi antara tahapan dan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD dan ketika disusun berpedoman pada RPJMN dan RPJMD provinsi, serta berpedoman pada dokumen RTRW, Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi, kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 Februari 2017 telah melaksanakan Pemilukada serentak dan dilanjutkan dengan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pada tanggal 23 Agustus 2017, sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015. Dalam proses PSU tersebut telah terpilih secara jujur, transparan, adil dan demokratis Mathius Awoitauw, SE., M.Si. sebagai Bupati Jayapura dan Giri Wijayantoro, SH sebagai Wakil Bupati Jayapura untuk masa jabatan Tahun 2017-2022. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dilantik pada tanggal 12 Desember 2017 oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Gubernur Papua, di Jayapura.

Dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan sesuai Permendagri 86 tahun 2017, bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bab II pasal 7 Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berorientasi pada proses yang menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan Teknokratik.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

2. Pendekatan Partisipatif.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

3. Pendekatan Politis.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda agenda pembangunan yang ditawarkan Calon Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

4. Pendekatan *Bottom Up* dan *Top Down*.

Pendekatan perencanaan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Selanjutnya sesuai dengan permendagri nomor 86 tahun 2017 dalam Pasal 47 ayat (5), sistematika penyusunan RPJMD terdiri dari 9 (sembilan) bab, yaitu : Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; Bab III Gambaran Keuangan Daerah; Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran; Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Bab IX Penutup.

Periodisasi Dokumen RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 mulai berlaku efektif tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan dapat dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dan pengendalian setiap tahun dalam waktu 5 (lima) tahun. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan (i) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam regulasi; (ii) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan regulasi; (iii) terjadi perubahan yang mendasar, antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan (iv) merugikan kepentingan nasional, yaitu bertentangan dengan kebijakan nasional.

Regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022, berpedoman antara lain pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Dokumen RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati Jayapura dilantik. Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat;

2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara nomo 135 tahun 2001 tambahan lembaran Negara nomor 4151 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2008 (lembaran Negara 112 dan tambahan lembaran Negara 4884).
3. Undang-undang Nomor 26 tahun 2002 tentang pembentukan 14 kabupaten baru di Provinsi Papua.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang kajian Lingkungan hidup strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia nomor 1312);
29. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2003 dan Nomor 160a/ PMK/ 02/ 2003 tentang Penyaluran Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.

32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025.
33. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 23 tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua.
34. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2007-2027 (*dalam tahap penyesuaian tahun RPJMN 2005-2025*).
36. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang pembentukan Distrik Ravenirara, Distrik Yokari, dan Distrik Gresi Selatan. Sampai pada tahun 2017 Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 Distrik, 139 Kampung dan 5 Kelurahan.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;
38. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura.
39. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 320 Tahun 2012 tentang Pengakuan Kampung Adat.
40. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penetapan Wilayah Adat Suku.

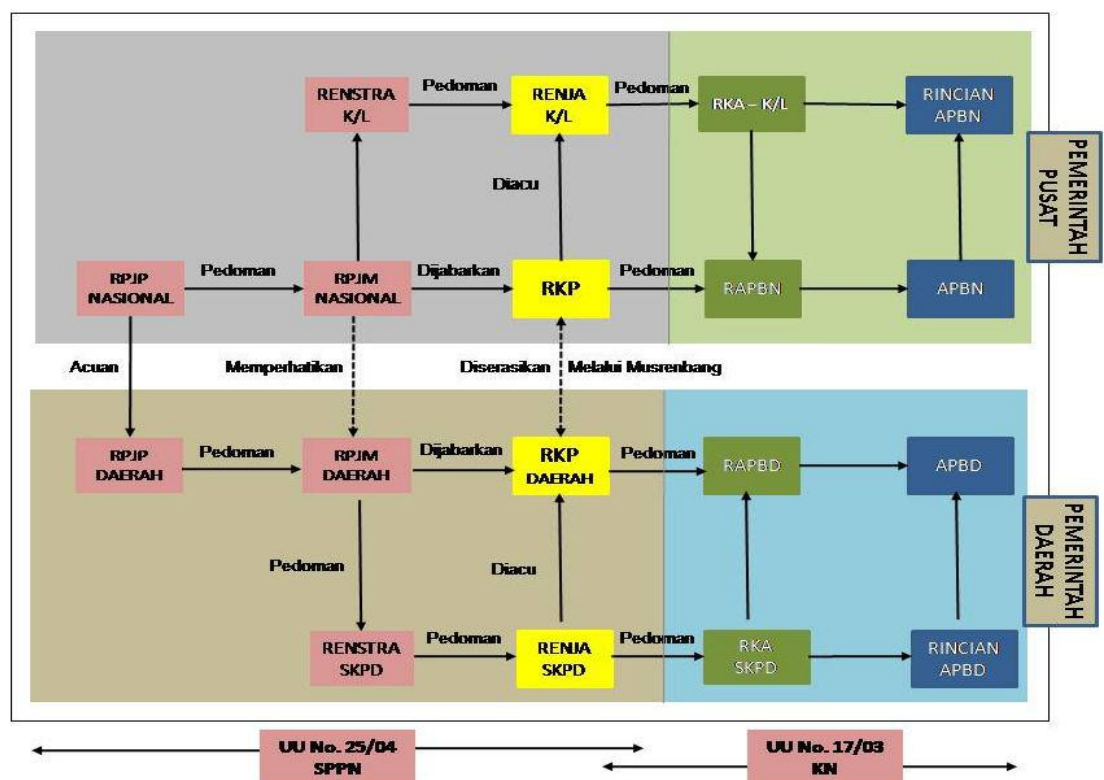
1.3. Hubungan antar dokumen

Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, telah dijadikan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017 - 2022. Dalam merumuskan kebijakan RPJMD Kabupaten Jayapura telah mengacu pada dokumen RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018, dokumen RTRW Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 serta memperhatikan dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota terdekat dengan Kabupaten Jayapura. RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan Provinsi Papua dan rencana pembangunan Kabupaten/Kota terdekat lainnya. Dengan demikian,

dokumen RPJMD harus sinkron, selaras dan bersinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran tentang keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017 - 2022 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dibawah ini disajikan gambar tentang bagan alur yang memperlihatkan keterkaitan dimaksud.

Gambar 1.1
Bagan Alir Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jayapura Dengan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.



Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah memuat visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala Daerah terpilih untuk periode 2017 -2022 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jayapura Tahun 2005-2025. Selanjutnya dokumen RPJMD Kabupaten Jayapura dijadikan sebagai landasan dalam perumusan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan seluruh Perangkat Daerah (Renstra PD), perumusan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perumusan kebijakan rencana perangkat daerah tahunan oleh seluruh Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

1.3.1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jayapura dengan RPJPD Kabupaten Jayapura

RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017 - 2022 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program juga berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Jayapura 2005-2025. Dengan kata lain, menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkekaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

1.3.2. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jayapura dengan RPJMN

Sebagaimana termuat dalam RPJMN periode 2015-2019 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Membangun dari pinggiran berarti mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan oleh pemerintah salah satunya pembanguna daerah-daerah yang masih tertinggal terutama daerah terpencil.

RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 melaksanakan rencana strategis nasional:

- 1) Pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) gratis dan terjangkau.
- 2) Pengembangan Ekonomi lokal melalui peningkatan potensi pariwisata dan budaya dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata.
- 3) Mengembangkan pelayanan transportasi udara nasional.
- 4) Pengembangan tol laut melalui pembangunan peti kemas Depapre.

1.3.3. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jayapura dengan RPJMD Provinsi

Keterkaitan RPJMD Provinsi Papua tahun 2014-2019 dengan RPJMD Kabupaten Jayapura tahun 2017-2022 sebagai berikut:

- 1) Pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) gratis dan terjangkau.
- 2) Peran masyarakat adat dan perempuan dalam pembangunan.
- 3) Pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan untuk konektivitas antar daerah.
- 4) Ketersediaan perumahan yang layak huni dan sanitasi lingkungan yang bermutu dan merata.

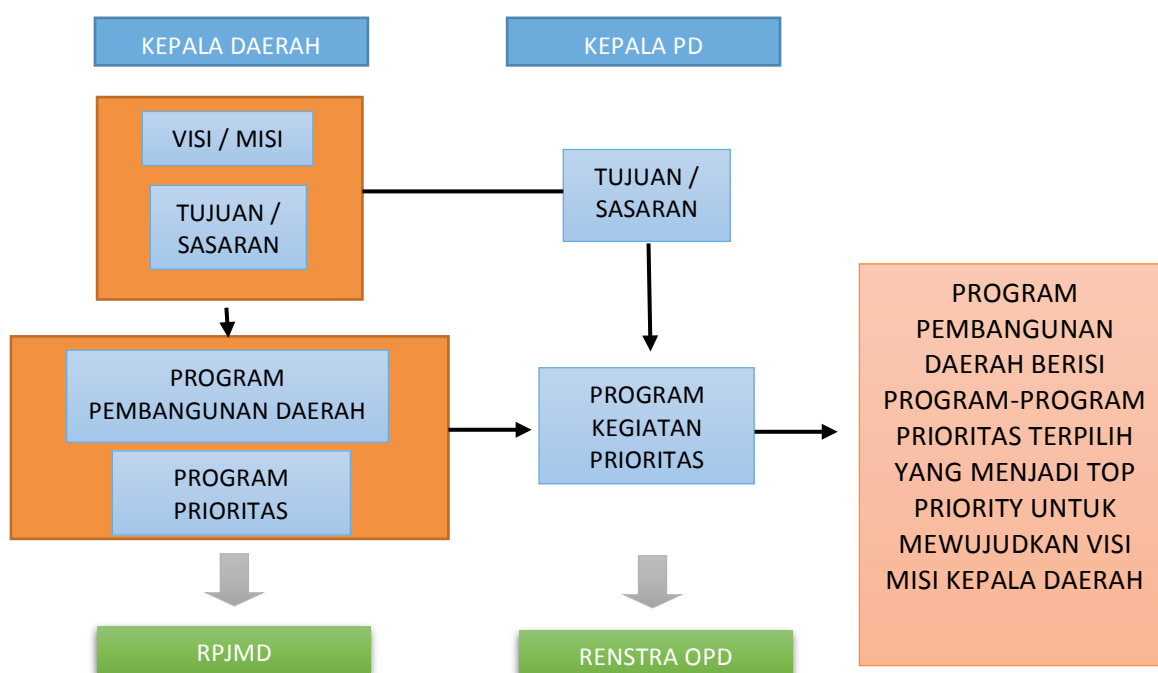
1.3.4. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jayapura dengan Renstra PD

Seperti diketahui, bahwa perumusan isi dan substansi rancangan awal RPJMD sangat menentukan kualitas dokumen RPJMD yang akan dihasilkan. Tersusunnya rancangan awal RPJMD sangat strategis untuk mengarahkan penyusunan rancangan Renstra PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif selama 5 (lima) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Sesuai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017 - 2022. Rencana strategis Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



1.3.5. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jayapura dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayapura, RPJMD Provinsi Papua, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1.3
Bagan Alir Penyusunan RKPD



1.3.6. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen RTRW Kabupaten Jayapura, Provinsi dan Nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Jayapura tahun 2017-2022 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura tahun 2008-2028, Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 23 tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-

asumsinya meliputi: 1) Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya; 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayaan baik dipusat maupun di daerah secara terpadu.

1.3.7. Keterkaitan RPJMD Dengan Hasil Evaluasi RPJMD Sebelumnya dan Dokumen KLHS.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017 dan merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Jayapura Tahun 2005-2025. Untuk menjamin agar implementasi RPJMD dapat sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya. Penyusunan dokumen RPJMD harus bersinergi dan memperhatikan data dan informasi serta mengadopsi KLHS. Dokumen KLHS dimaksud merupakan bagian penting yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adapun arahan umum kebijakan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Tertib tata ruang dan pemanfaatan sumberdaya yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis sumberdaya (SDA, SDM, dan sosial budaya) lokal, dan;
3. Meningkatkan kapasitas aparat dan dukungan kebijakan.

Dengan demikian, setiap perumusan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi tentang daya dukung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan dan kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah baik untuk 5 (lima) tahunan maupun tahunan sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (*development sustainable*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), menyatakan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam membangun suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program. Secara prinsip KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana kebijakan, rencana dan/atau program KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dapat membuat pemerintah daerah menjadi hijau. Artinya bahwa KRP tersebut *concern* terhadap permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan atau program agar dampak dan/atau resiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan. Sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan. Dalam pengintegrasian dengan RPJMD Kabupaten Jayapura, KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media pembelajaran bersama antara semua pemangku kepentingan dalam penyusunan KRP. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program.

1.3.8. Keterkaitan RPJMD dengan Penganggaran.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tegas telah menetapkan, bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sementara itu, program prioritas dan alokasi pagu anggaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022, merupakan program dan anggaran yang

masih bersifat indikatif dan untuk dapat dioperasionalkan setiap tahunnya, maka perlu dijabarkan kedalam RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. Setelah dokumen RKPD dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), perumusan PPAS dan terakhir perumusan kebijakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jayapura tahunan untuk selama 5 (lima) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 adalah untuk menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, masyarakat, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura, juga masyarakat di kabupaten/kota tetangga dan umumnya masyarakat di Provinsi Papua.

Sedangkan tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022, antara lain :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar untuk perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar proyeksi kemampuan riil kapasitas pendanaan tahunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dari tahun 2017 sampai dengan 2022, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jayapura Tahun 2005-2025;

4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
5. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
6. Mendukung koordinasi untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah maupun antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan Pemerintah Pusat dan antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan Pemerintah Provinsi Papua, serta menyediakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Renstra PD, Renja PD sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing, sekaligus merupakan landasan dalam menentukan program-program unggulan yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan program-program tahunan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun yang akan dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional;
8. Menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan dengan penganggaran serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan di Kabupaten Jayapura;
9. Menjadi landasan pemerintah dalam penyusunan APBD Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
10. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator-indikator; dan
10. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, maka kandungan nilai strategis dari RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perumusan kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dalam rangka mendorong terwujudnya pencapaian target visi dan misi kepala daerah terpilih

ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2017-2022, serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimaksud dalam bentuk program beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2017-2022.

1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 47 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017 – 2022, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya. Oleh karena itu, sistematika penulisan Bab I RPJMD meliputi : Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya; Sistematika Penulisan; serta Maksud dan Tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran kondisi daerah dari aspek Geografi, Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Oleh karena itu, sistematika penulisan pada Bab II, meliputi: Karakteristik Lokasi dan Wilayah; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang realisasi dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah, dalam 5 tahun anggaran atau sekurang-kurangnya 3 tahun dan proyeksi kemampuan pendanaan program jangka menengah untuk mencapai visi, misi dan program kepala daerah

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan hubungan antara permasalahan pembangunan dengan isu-isu strategis, meliputi : Permasalahan Pembangunan; dan Isu-isu

Strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan hubungan antara Visi dengan Misi, Tujuan dan Sasaran, meliputi : Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rumusan perencanaan komprehensif pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan berbagai program, indikator kinerja dan target kinerja *outcome* seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan arah kebijakan setiap tahun yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Jayapura merupakan Kabupaten induk yang telah dimekarkan beberapa kali. Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 1993 wilayah Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi dua wilayah administratif yaitu Kabupaten Jayapura dan Kotamadya Jayapura. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2002 tentang pembentukan 14 kabupaten baru di Provinsi Papua. Dimana Kabupaten Jayapura merupakan salah satu dari empat belas kabupaten baru yang dimekarkan menjadi Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom.

2.1. Aspek Geografis Dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

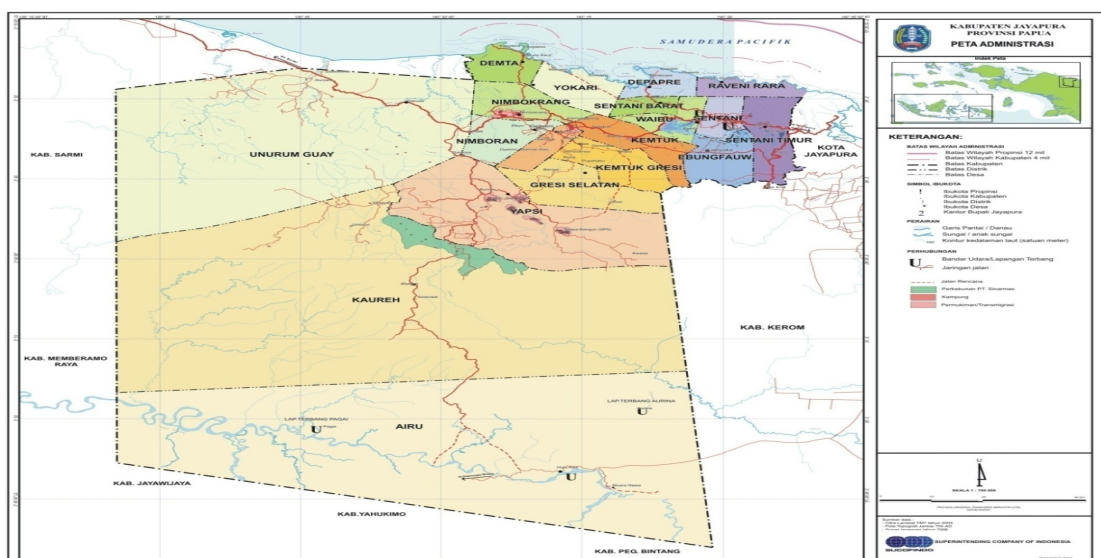
Luas wilayah Kabupaten Jayapura 17.516 Km² dengan batas-batas wilayah administratif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Batas Wilayah Administratif Kabupaten Jayapura

No.	Uraian	Batas Kabupaten
1.	Sebelah Utara	Samudera Pasifik dan Kabupaten Sarmi.
2.	Sebelah Timur	Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom
3.	Sebelah Selatan	Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Yalimo
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya

Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura Tahun 20

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Jayapura



Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 Distrik. Distrik Kaureh dengan luas wilayah 4.357,9 Km² (24,88%) merupakan distrik terluas di Kabupaten Jayapura dan Distrik Sentani Barat merupakan distrik yang luasnya terkecil dengan luas wilayah 129,2 Km² (0,74) dari luas wilayah Kabupaten Jayapura. Luas Wilayah Masing-masing Distrik di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Masing-masing Distrik di Kabupaten Jayapura

No	Distrik	Ibukota	Luas wilayah (Km ²)	%
1	Kaureh	Lapua	4.357,9	24,88
2	Unurum Guay	Garusa	3.131,3	17,88
3	Airu	Hulu Atas	3.099	17,69
4	Yapsi	Bumi Sahaja	1.291,3	7,37
5	Nimbokrang	Nimbokrang	774,8	4,42
6	Nimboran	Tabri	710,2	4,05
7	Yokari	Meukisi	519,5	2,97
8	Demta	Demta	497,5	2,84
9	Ravenirara	Necheibe	467,4	2,67
10	Depapre	Waiya	404,3	2,31
11	Ebungfauw	Khameyakha	387,4	2,21
12	Sentani timur	Nolokla	484,3	2,76
13	Kemtuk	Sama	258,3	1,48
14	Waibu	Doyo Lama	258,3	1,47
15	Sentani	Hinekombe	225,9	1,29
16	Namblong	Karya Bumi	193,7	1,11
17	Kemtuk Gresi	Sawoi	182,4	1,04
18	Gresi Selatan	Bangai	143,9	0,82
19	Sentani Barat	Waibron	129,2	0,74
Jumlah			17.514,6	100

Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura

b. Letak dan Kondisi Geografis.

1. Letak Astronomi dan Geostrategis

Secara astronomi Kabupaten Jayapura terletak pada 139° 25' 32,4" – 140° 38' 38,53" Bujur Timur dan 3° 45' 7,28" - 2° 19' 21,82" Lintang Selatan. Yang secara geografis Kabupaten Jayapura yaitu bagian barat terletak pada 139°, 15' Bujur Barat bagian timur terletak pada 140°, 45 Bujur Timur bagian utara terletak pada 2°, 15 Lintang Utara dan bagian selatan terletak pada 3°, 45' Lintang Selatan.

Kabupaten Jayapura secara geostrategis merupakan salah satu kabupaten sangat penting di Provinsi Papua, karena berfungsi sebagai pintu gerbang transportasi udara. Karakteristik yang dimiliki ini merupakan tantangan yang besar dalam pengembangan Kabupaten Jayapura dimasa yang akan datang bukan hanya sejajar, tetapi dapat melebihi kemajuan daerah lain.

Sisi lain posisi geografis tersebut dengan keragaman yang dimiliki harus tetap mendapat perhatian khusus dalam perencanaan, pengelolaan kegiatan pembangunan dan masalah kemasyarakatan lainnya.

2. Kondisi/Kawasan

Secara garis besar kondisi/kawasan Kabupaten Jayapura dapat dibedakan menjadi dua kawasan, yaitu:

a) Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah Kelurahan Sentani Kota (dengan fungsi pusat pelayanan permukiman, transportasi, jasa dan perdagangan dengan skala pelayanan yang melingkupi seluruh distrik di Kabupaten Jayapura) sebagai ibukota Distrik Sentani, dimana Distrik ini merupakan ibukota dari Kabupaten Jayapura sebagai pusat pemerintahan. Waiya juga merupakan kawasan perkotaan sebagai Ibukota Distrik Depapre dengan prioritas pengembangan pelabuhan peti kemas. Kampung Sabron di Distrik Kemtuk dimana distrik ini akan dikembangkan menjadi Kawasan Agropolitan Grime Sekori. Selain itu, Ongan Jaya (Satuan Permukiman 1) adalah kawasan perkotaan sebagai Ibukota Distrik Yapsi yang berperan sebagai sentra perkebunan.

b) Perkampungan

Kawasan perkampungan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkampungan ditetapkan semua distrik di kabupaten selain Distrik Sentani, Depapre, Kemtuk, dan Yapsi.

c. Topografi.

1) Kemiringan Lahan.

Keadaan topografi Kabupaten Jayapura pada umumnya terdiri dari lereng yang relatif terjal dengan kemiringan antara 5% - 30% serta mempunyai ketinggian aktual 0,5 m dpl – 1.500 m dpl. Daerah pesisir pantai utara pada umumnya berupa dataran rendah yang bergelombang dengan kemiringan antara 0% - 10% yang ditutupi dengan endapan alluvial. Secara fisik, maka wilayah daerah ini terdiri dari

daratan dan rawa (13,700 ha) dan sebagian besar wilayahnya (72,09%) berada pada kemiringan di atas 41%, dan sisanya berada pada kemiringan 0-15%, yakni sekitar 23,74%. Luas Masing-masing Kelas Kemiringan Pada Distrik di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.3

Luas Masing-masing Kelas Kemiringan Pada Distrik di Kabupaten Jayapura

No	Distrik	Luas Kelas Kemiringan/Elevation Class							
		Datar		Bergelombang		Curan		Sangat Curam	
		0%	2%	2-8%	8-15%	16-25%	26-40%	41-65%	.65%
1	Kaureh	0.01	0.99	8.98	19.43	97.64	18.36	15.70	1.29
2	Airu	14.93	2.56	18.79	15.38	17.65	19.02	10.47	2.00
3	Yapsi	0.24	84.93	382.79	427.44	238.75	77.16	8.02	0.20
4	Kemtuk	0.06	8.90	77.49	96.34	115.64	55.56	18.27	1.21
5	KemtukGresi	0.07	9.646	59.91	61.71	97.64	83.07	27.11	1.68
6	Gresi Selatan	0.03	0.90	12.46	20.08	35.43	42.48	17.33	1.54
7	Nimboran	0.04	9.98	44.34	30.59	37.26	21.60	4.79	0.47
8	Namblong	0.04	0.86	6.11	3.27	1.75	1.98	2.42	0.82
9	Nimbokrang	0.22	26.33	56.60	28.85	30.28	23.35	8.51	0.95
10	UnurumGuay	1.21	304.71	694.53	1986.78	1222.36	335.69	53.34	2.65
11	Demta	0.29	50.59	43.40	35.51	46.44	33.72	12.25	0.44
12	Yokari	0.01	3.20	37.97	55.59	46.37	29.55	18.04	1.97
13	Depapre	0.01	0.99	8.98	19.43	26.92	18.36	15.70	1.29
14	RaveniRara	0.01	0.25	4.70	12.42	32.17	64.32	48.99	1.92
15	Sentani Barat	0.01	5.34	22.19	20.54	27.49	27.23	13.41	1.30
16	Waibu	17.53	20.61	25.38	23.57	23.35	15.15	5.00	0.24
17	Sentani	11.48	31.40	19.50	9.66	8.45	9.12	7.37	1.32
18	Ebungfau	14.93	2.56	18.79	15.38	17.65	19.02	10.47	2.18
19	SentaniTimur	28.65	7.67	27.50	27.03	29.42	25.36	13.49	1.67
Jumlah/Total (KM ²)		89.77	572.42	1570.41	2909	2081.94	920.46	310.68	25.14

Sumber : Kabupaten Jayapura Dalam Angka Tahun 2016

2) Ketinggian Lahan

Ketinggian wilayah di Kabupaten Jayapura sebagian besar di bawah 500 m dpl, yakni mencapai 606.400 ha atau 61,01 %, kemudian wilayahnya dengan ketinggian 500 – 1000 m dpl dan ketinggian 1000 – 2.000 m dpl mencapai 149.900 ha atau 15.08 %.

Pegunungan di wilayah Kabupaten Jayapura antara lain Pegunungan Cycloop yang terbentang antara Distrik Sentani, Sentani Barat, Sentani Timur dan Depapare di sebelah Utara. Selain itu, disebelah selatan terdapat pegunungan Kramor di Distrik Kaureh. Luas Masing-masing Kelas Ketinggian Pada Distrik di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.4
Luas Masing-masing Kelas Ketinggian Pada Distrik di Kabupaten Jayapura

No	Distrik	Luas Kelas Ketinggian			
		< 100m	100 – 500m	500-1000m	1000-2000m
1	2	3	4	5	6
1	Kaureh			1,479.35	113.39
2	Airu	701.39	887.14	281.13	-
3	Yapsi	126.46	937.50	47.19	-
4	Kemtuk	103.95	82.54	-	2.79
5	Kemtuk Gresi	102.29	97.14	-	-
6	Gersi Selatan	8.70	243.77	39.50	-
7	Nimboran	86.81	104.13	6.09	-
8	Namblong	37.64	67.24	7.02	-
9	Nimbokrang	138.95	80.48	-	1.64
10	Unurum Guay	1,202.79	1,656.02	93.02	22.32
11	Demta	44.40	93.26	-	14.59
12	Yokari	60.88	90.11	-	49.08
13	Depapre	41.75	26.64	34.30	5.30
14	Raveni Rara	19.02	24.73	58.39	13.43
15	Sentani Barat	29.37	47.36	7.49	0.36
16	Waibu	77.54	45.80	14.48	4.78
17	Sentani	55.74	26.76	-	17.50
18	Ebungfau	167.55	83.45	-	-
19	Sentani Timur	150.42	40.39	31.87	28.67
Jumlah		3,155.65	4,634.46	2099.83	273.85
Presentase (%)		33.24	50.02	14.81	1.93

Sumber : Kabupaten Jayapura Dalam Angka Tahun 2017

d. Geologi

Lima faktor pembentuk tanah yaitu bahan induk, iklim, topografi, vegetasi dan waktu. Factor-faktor ini akan membentuk berbagai jenis tanah yang berbeda sifatnya. Secara garis besar jenis tanah di Kabupaten Jayapura dapat digolongkan menjadi lima jenis, yaitu : Podsolik Merah Kuning, Mediteran, organosol/Alufial, Latosol dan Padsolik Kelabu. Luas masing-masing tanah tersebut berdasarkan wilayah distrik dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.5
Luas Jenis Tanah di Kabupaten Jayapura

No	Distrik	Luas Masing-masing Jenis Tanah					
		PCK	PMK	MD	OG	LT	Total
1	Kaureh	125.70	672.60	0.00	21.60	0.00	819.90
2	Airu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Yapsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Kemtuk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Kemtuk Gresi	12.00	6.00	16.40	8.00	0.00	42.40
6	Gresi Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Nimboran	19.20	14.80	6.40	75.90	0.00	116.30
8	Namblong	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Nimbokrang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Unurumguay	208.70	154.80	0.00	0.00	0.00	363.50
11	Demta	0.00	3.20	46.80	0.00	0.00	50.00
12	Yokari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Depapre	0.00	11.00	0.00	0.00	8.80	19.80
14	Ravenirara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Sentani Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Waibu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Sentani	10.00	34.80	0.00	6.20	0.00	51.00
18	Ebungfau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Sentani Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	375.60	897.20	69.60	111.70	8.80	1,462.90

Sumber : Kabupaten Jayapura Dalam Angka Tahun 2017

1) Podsolik Coklat Kelabu

Tanah ini berkembang pada iklim dengan curah hujan diatas 1500 mm/thn, tanpa bulan kering, terletak pada topografi datar, bergelombang, landau dan bukit pada elevasi 10-2000 m dpl dengan warna kehitaman, coklat tua hingga kekuningan. Reaksi tanah masam hingga netral (pH 5,0 – 7,0) luasnya mencapai 1.343 ha atau 26% tersebar di 19 distrik. Terbesar di Distrik Unurum Guay 208,700 ha dan yang terkecil di Distrik Sentani 10,000 ha

2) Podsolik Merah Kuning

Jenis tanah ini terbentuk pada type iklim basah dengan curah hujan 2500-3500 mm tanpa bulan kering, terletak pada topografi bergelombang sampai bukit pada elevasi 20-100 m dpl, solumnya agak tebal (1-2 m) dengan warna merah hingga kuning, reaksi tanah sangat masam hingga masam

(PH 3,4-5) dan sangat peka terhadap erosi serta mempunyai tingkat kesuburan rendah. Tanah ini penyebarannya paling luas yaitu mencapai 897,20 ha, dan hampir setiap distrik mempunyai jenis tanah ini, paling luas terdapat di Distrik Kaureh seluas 627,60 ha dan yang paling kecil di Distrik Demta seluas 3,20 ha. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan, perladangan, dan perkebunan karet, kopi, kelapa sawit dengan perlakuan tambahan

3) Mediteran

Tanah ini terbentuk pada iklim dengan curah hujan 800-2500 mm/thn tersebar pada elevasi 0 – 400 m dpl. Solumnya agak tebal (1- 2 m), reaksi tanah agak masam sampai netral (pH 6.0 – 7,5) kepekaan terhadap erosi sedang hingga besar. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan, perumputan, tegalan dan buah-buahan. Jenis tanah ini terletak di Distrik Demta seluas 46.800 ha, Distrik Kemtuk Gresi seluas 16.400 ha dan Distrik Nimboran seluas 6.400 ha.

4) Organosul/alufial

Pembentukan tanah ini tidak dipengaruhi iklim, terletak pada topografi bergelombang di daerah rendah. Warna tanah abu tua atau hitam, reaksi tanah sangat masam (pH 3,5 – 5). Cocok untuk persawahan, lading, palawija, tambak dan kebun kelapa. Jenis tanah ini paling banyak di jumpai di Distrik Nimboran yaitu seluas 75.900 ha dan yang terkecil di Distrik Sentani seluas 6. 200 ha

5) Latosol

Tanah ini terbentuk pada iklim basah dengan curah hujan 2000 – 7000 mm/thn, dengan bulan kering dari 3 bulan, terletak pada topografi bergelombang, berbukitan dan bergunung pada elevasi 10 – 13 m dpl. Solumnya dalam (1,5 – 10 m) dengan warna coklat hingga kuning. Reaksi tanah sampai agak masam (pH 4,5 – 6,5) dan kepekaan terhadap erosi kecil. Jenis tanah ini cocok untuk tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, kebun karet, lada dan tegalan. Terluas di Distrik Depapre sebesar 8.800 ha.

e. Hidrologi

a) Daerah Aliran Sungai.

Sungai besar yang melintas di wilayah Kabupaten Jayapura sebanyak empat Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni DAS Grime, DAS Sentani, DAS Sermo dan DAS Wiru yang sebagian besar menuju ke pantai Utara (Samudera Pasifik). Terdapat juga sungai kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air. Kabupaten Jayapura memiliki sebuah Danau yakni Danau Sentani dengan luasan 9,630 ha yang terletak di Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu dan Distrik Ebungfauw. Bagian utara Kabupaten Jayapura terletak dipesisir pantai utara dan berhadapan langsung dengan Samudera pasifik, yang memiliki slope kedalaman curam hingga 1,000-1,500 m pada jarak 10 km dari garis pantai. Profil kedalaman perairan ke arah barat memiliki jarak kelandaian yang lebih besar hingga 35 km dengan kedalaman 500 m, setelah itu slope kedalaman semakin curam sampai kedalaman 2,500 - 4.000 m. Nama-Nama Sungai di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Nama-Nama Sungai di Kabupaten Jayapura

No	Distrik	Nama Sungai	Keterangan
1	Unurum Guay	a. S. Wiru b. S.Sifo c. S.Berian d. S.Busooof e. S.Dju f. S.Nano g. S.Pewo h. S.Nawa	Bercabang dengan sungai S.Sifo Bercabang dengan S.Busooof dan S. Berian Menuju daerah Bonggo Sebelah selatan Beneik Sebelah utara Santosa Sebelah barat S.Nano, Sebelah Selatan Guryad menuju daerah Bonggo Melewati daerah Kaureh dan Unurum Guay (Sebelah selatan Santosa)
2	Kaureh	a. S.Wanda b. S.Idenburg c. S.Waruta	Berasal dari daerah Senggi Bersambung dengan sungai Mamberamo (daerah hulu atas) dan bercabang dengan sungai Wruta di Aurina Melewati Unurun Guay dan daerah Keerom
3	Nimboran/ Nimbokrang	a. S.Samir b. S.Damar c. S.Moaif d. S.Nanggulu e. S.Grime f. S.Fuan	Merupakan anak sungai Damar (Oyengsi) Bercabang dengan S.Boarim melewati Singgiway dan Yenggu menuju ke utara. Melewati Benyom Jaya II Menuju daerah Demta Melewati Kuipons, Benyom Jaya I menuju Demta (Yakore), dan bercabang dengan S.Grime di sebelah Timur. Melewati Unurum Guay, Kemtuk, S.Pale sampai daerah Sekori, Hamonggrang, Betaf dan Bercabang dengan S.Nanggulu. daerah Sermai

Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura. Tahun 2013

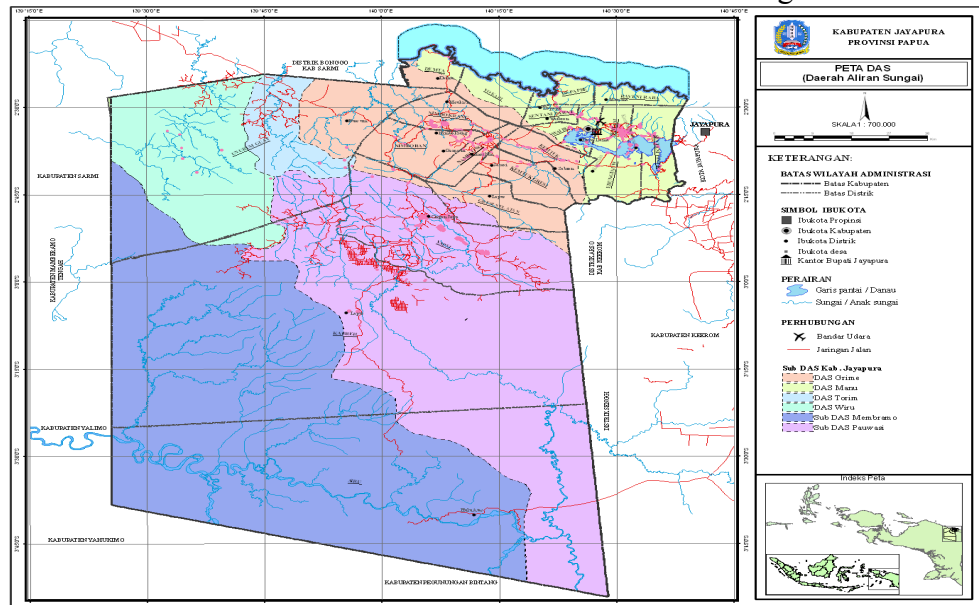
b) Sungai, Danau dan Rawa

Kabupaten Jayapura dilintasi oleh 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan 2 Sub DAS yaitu DAS Grime, DAS Sentani, DAS Wiru, DAS Sermo, dan Sub DAS Taritatu serta Sub DAS Nawa . Adapun wilayah yang dilintasi DAS ini adalah :

1. DAS Grime melalui Distrik Ebungfauw, Sentani Barat, Waibu, Demta, Yokari, Depapre, Kemtuk, Kemtuk Gresi, Nimboran, Namblong, Nimbokrang, dan Unurum Guay.
2. DAS Sentani melalui Distrik Ebungfauw, Sentani, Sentani Timur, Sentani Barat, Waibu, Demta, Yokari, Reveni Rara dan Kemtuk.
3. DAS Sermo melalui Distrik Gresi Selatan, Nimboran, Namblong, Nimbokrang, dan Unurum Guay.
4. DAS Wiru melalui Distrik Unurum Guay.
5. Sub DAS Taritatu Tengah dan Sub DAS Nawa melalui Distrik Unurum Guay, Kaureh, Yapsi, Airu.

Di Kabupaten Jayapura terdapat satu danau, yaitu Danau Sentani seluas ± 9.630 Ha yang terdapat di 4 Distrik, yaitu Sentani Timur, Ebungfauw, Waibu dan Sentani Kota.

Gambar 2.2 Peta Daerah Aliran Sungai



Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura.

c) Debit Air

Sumber air di wilayah Kabupaten Jayapura terdiri dari sungai, danau, rawa dan air tanah. Sungai besar yang melintas di wilayah Kabupaten Jayapura yaitu sungai Grime, sungai Nawa, sungai Mamberamo, sungai Sermowai dan sungai Wira sebagian besar menuju ke Pantai Utara atau Samudera Pasifik dan pada umumnya sangat tergantung pada fluktuasi air hujan. Selain itu juga terdapat sungai-sungai kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air seperti sungai yang terdapat di Distrik Sentani yaitu sungai Kemiri, sungai Jabawi, sungai Plavou, kali Doyo, kali Dosay, kali Polomo, sungai Sabron Sari serta masih banyak sumber air permukaan yang terdapat di Distrik-Distrik lain di wilayah Kabupaten Jayapura. Danau yang berada di wilayah Kabupaten Jayapura adalah Danau Sentani ± 9.630 ha terdapat di 5 Distrik yaitu Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Waibu dan Distrik Ebungfau. Sumber mata air tanah yang dapat dimanfaatkan secara baik misalnya air sumur baik secara bor maupun digali. Luas rawa yang ada di Kabupaten Jayapura adalah Distrik Kaureh seluas ± 586 ha dan Distrik Airu ± 398 Ha.

Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Keppres No. 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah menetapkan CAT di Kabupaten Jayapura termasuk dalam CAT lintas negara (Provinsi Papua – PNG), yakni CAT Jayapura; dan CAT lintas kabupaten/kota Warem Demta (Kabupaten Nabire, Waropen, Sarmi, Kabupaten Jayapura).

f. Klimatologi

1) Tipe

Perairan Utara Kabupaten Jayapura merupakan bagian dari ekuator barat Samudra Pasifik. Arus yang mengalir tetap di wilayah ini adalah Arus Khatulistiwa Selatan (*South Equatorial Current*), Arus Pantai Papua, Arus Bawah Pantai Papua, Arus Khatulistiwa Utara (*North Equatorial*

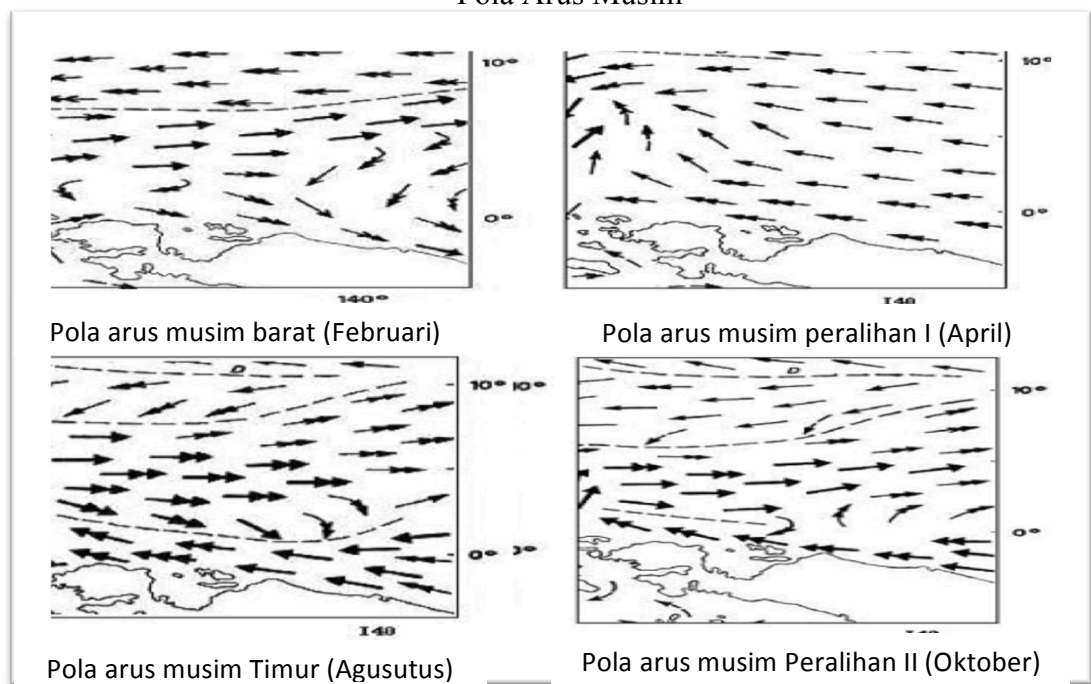
Current) dan Arus Sakal Ekuator Utara (*Counter Current*). Pada Musim Barat, Arus Khatulistiwa Utara yang berada kira-kira diatas 9^0 LU bergerak ke barat menuju Philipina. Tiba di Philipina, arus bercabang dua, sebagian besar berbelok ke arah utara dan sebagian kecil bergerak ke arah selatan sepanjang pantai Timur Mindanao (Arus Mindanao). Pada ujung selatan Pulau Mindanao, Arus Khatulistiwa Utara bercabang dua kembali. Cabang pertama melanjutkan gerak ke arah selatan sampai di utara Halmahera, sedangkan cabang yang lain berbelok ke arah barat daya dan memasuki Laut Sulawesi. Di Laut Sulawesi sebagian besar arus dibelokkan ke arah selatan menuju Selat Makasar dan sebagian kecil dibelokkan ke Timur sepanjang pantai Utara Sulawesi. Setelah melewati pantai timur Sulawesi, arus tersebut bergabung kembali dengan percabangan pertama Arus Mindanao dan bersama-sama bergerak ke Timur. Pergerakan kedua arus tersebut ke arah Timur disebut juga Arus Sakal (*Counter Current*). Di Perairan Utara Kabupaten Jayapura, Arus Sakal bercabang dua kembali, sebagian ke arah Utara Khatulistiwa bergabung dengan Arus Khatulistiwa Utara dan sebagian bergerak sepanjang Perairan Utara Kabupaten Jayapura ke arah selatan bersama Arus Musim Barat (*Monsoon Current*) yang keluar dari perairan Indonesia bergabung dengan Arus Khatulistiwa Selatan yang berada pada 140^0 BT. Pada Musim Timur, sirkulasi arus yang terjadi di wilayah ini ditandai oleh mengalirnya Arus Khatulistiwa Selatan ke Barat sepanjang Perairan Utara Kabupaten Jayapura sampai pulau Halmahera. Sampai di Utara Halmahera, arus Khatulistiwa Selatan bergabung dengan Arus Khatulistiwa Utara yang datang dari pantai Timur Mindanao dan pantai Utara Sulawesi dan kemudian bergerak bersama-sama ke Timur Laut. Arus Khatulistiwa Utara dan Arus Khatulistiwa Selatan ketika bergerak ke timur disebut juga Arus Sakal Ekuator Utara. Beberapa Musim di Perairan Kabupaten Jayapura Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Beberapa Musim di Perairan Kabupaten Jayapura Tahun 2016

No.	Musim	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Musim Timur												
2.	Musim Barat												
3.	Musim Pancaraoba I												
4.	Musim Pancaraoba II												

Sumber data: Pengolahan data dari Data Departemen

Gambar 2.3
Pola Arus Musim



Sumber data: Pengolahan data dari data Departemen Kelautan dan perikanan

2) Curah Hujan

Curah hujan di Kabupaten Jayapura berfluktuasi Curah hujan tertinggi pada bulan Desember dengan curah hujan sebesar 295 mm dan terendah pada bulan Mei 46 mm. Hari hujan tertinggi di Kabupaten Jayapura pada Bulan September 20 hari dan terendah pada bulan Agustus 11 hari. Curah Hujan di Kabupaten Jayapura 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Curah Hujan di Kabupaten Jayapura 2016

No	Bulan	Curah Hujan		Hari Hujan	
		Sentani	Genyem	Sentani	Genyem
1	Januari	148	-	19	-
2	Februari	93	-	22	-
3	Maret	180	-	23	-
4	April	90	-	16	-
5	Mei	46	-	14	-
6	Juni	108	-	17	-
7	Juli	134	-	18	-
8	Agustus	63	-	11	-
9	September	263	-	20	-
10	Oktober	70	-	15	-
11	November	107	-	19	-
12	Desember	295	-	22	-

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura 2017

3) Suhu

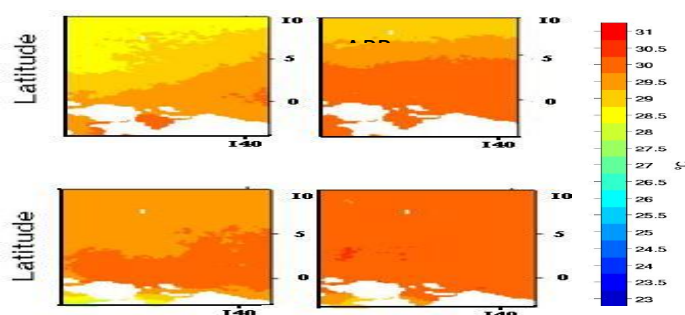
Berdasarkan hasil pencatatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah V Jayapura untuk wilayah Sentani tahun 2016 suhu udara rata-rata berkisar antara 23.7°– 24.7° Celcius.

Perairan barat Pasifik dicirikan oleh suhu permukaan laut (SPL) yang hangat (rerata 29⁰ C) dan memiliki produktivitas primer yang rendah didalamnya (*warm pool*) jika dibandingkan dengan perairan bagian Timur dan sentral Khatulistiwa Pasifik. Zona ini merupakan daerah penangkapan cakalang yang baik, terkonsentrasi pada daerah sekitar zona konvergen antara daerah hangat (> 28-29⁰ C) dengan massa air bersalinitas rendah dari *warm pool* dan air dingin dengan salinitas tinggi dari umbalan khatulistiwa (*equatorial upwelling*).

Menurut Lehodey et. al (2003) bahwa isotherm 29⁰ C merupakan indikator lokasi zona konvergen sekaligus sebagai lokasi penangkapan tuna dan cakalang. Sebagai pembanding, formasi daerah tangkapan cakalang di perairan sekitar Jepang dibatasi oleh isotherm 20⁰ C. Arus yang berkembang di perairan Pasifik diklasifikasin atas arus khatulistiwa utara (NEC) dengan aliram ke barat (8⁰ -20⁰ LU), arus khatulistiwa selatan (SEC) arah aliran ke barat (3⁰ LU-10⁰ LS), arus balik khatulistiwa utara (NECC) mengarah ke timur dengan aliran yang menyempit (3⁰ LU-8⁰ LU) dan arus bawah khatulistiwa (EUC) dengan pola aliran ke Timur bergerak di bawah lapisan permukaan (2⁰LU-2⁰LS). Sebaran Suhu

Permukaan Laut Untuk Setiap Musim Di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4
Sebaran Suhu Permukaan Laut Untuk Setiap Musim Di Indonesia



Sumber data: Balai Riset & Observasi Kelautan Departemen Kelautan. (2017)

Variasi salinitas permukaan di perairan utara Kabupaten Jayapura sangat dipengaruhi oleh arus permukaan. Pada bulan April sampai Oktober, perairan utara Kabupaten Jayapura dipengaruhi Arus Khatulistiwa Selatan yang membawa massa air dengan salinitas tinggi, sehingga menyebabkan salinitas di perairan tersebut meningkat. Nilai salinitas tahunan pada permukaan dalam musim timur di perairan Utara Kabupaten Jayapura berkisar antara 34.1⁰/₀₀ sampai 34.5 ⁰/₀₀. Sebaran salinitas permukaan di perairan Indonesia meningkat dari barat ke timur dan berkisar antara 30⁰/₀₀ sampai 35 ⁰/₀₀. Hal ini karena masuknya massa air bersalinitas tinggi dari Samudera Pasifik.

Tabel 2.9
Rata-Rata Suhu Udara Minimum Mutlak Pada Stasiun
Sentani dan Genyem (Dalam °C) Tahun 2016

No.	Bulan	Rata-rata Udara Minimum	
		Sentani	Genyem
1.	Januari	24.3	22.7
2.	Februari	24.2	22.4
3.	Maret	24.3	23.3
4.	April	24.3	23.9
5.	Mei	24.2	23.7
6.	Juni	24.1	23.5
7.	Juli	23.7	23.2
8.	Agustus	23.7	22.8
9.	September	23.9	23.3
10.	Oktober	24.3	23.4
11.	November	24.4	23.4
12.	Desember	24.4	23.7

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura 2017.

4) Kelembaban

Kelembaban udara Kabupaten Jayapura yang diperoleh dari stasiun meteorologi dan geofisika (stasiun Sentani dan Stasiun Genyem), menunjukkan kelembaban udara di Kabupaten Jayapura dari tahun 2012 – 2016 merupakan wilayah yang rata-rata tingkat kelembaban tinggi yang berkisar 79.5 – 85.5. Kelembaban udara Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.10
Kelembapan Udara Rata-rata di Kabupaten Jayapura 2012-2016

Stasiun	2012	2013	2014	2015	2016
Meteorologi Klas III Sentani	84	82	81	75	77
Klimatologi Klas III Genyem	87	87	88	84	84
Rata-rata	85.5	84.5	84.5	79.5	80.5

Sumber data: DDA BPS Kabupaten Jayapura 2016.

5) Penggunaan Lahan

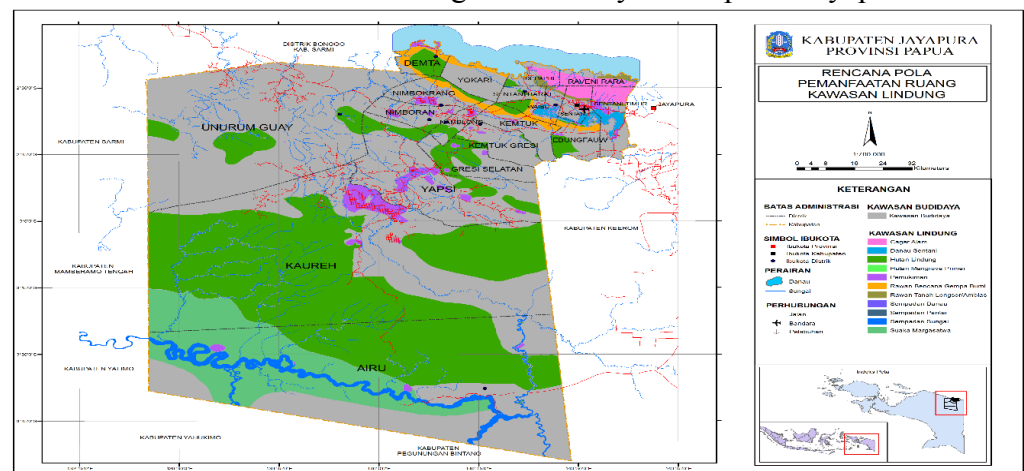
Penggunaan lahan di Kabupaten Jayapura dapat diketahui berdasarkan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

a) Kawasan Lindung

1) Kawasan Hutan Lindung

Luas hutan lindung di Kabupaten Jayapura adalah 544.771,1 Ha. Hutan ini berpotensi sebagai paru-paru dunia, kawasan perlindungan bagi spesies satwa dan tanaman, serta fungsi tata air. Luas kawasan Hutan Lindung dan budidaya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.5
Peta Hutan Lindung dan budidaya Kabupaten Jayapura



Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura

2) Kawasan Cagar Alam/Pelestarian Alam

Luas Cagar Alam Cycloop (CAC) yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura adalah 15.066 Ha. Cagar Alam Cycloop sebagai kawasan lindung bagi spesies, satwa dan tanaman yang ada di kawasan ini, dimana kawasan ini juga berfungsi sebagai paru-paru dunia. Kawasan CAC adalah kawasan yang memiliki potensi sebagai sumber daya air yang digunakan oleh penduduk Kabupaten Jayapura dan juga Kotamadya Jayapura.

b) Kawasan Budidaya

1) Kawasan Hutan Produksi

Kabupaten Jayapura memiliki luas hutan untuk fungsi produksi seluas 562.545,58 Ha, yang terdiri dari tiga (3) jenis hutan, yaitu hutan mangrove, hutan rawa dan hutan lahan kering. Dari ketiga jenis hutan tersebut, luas hutan yang paling dominan adalah hutan lahan kering primer. Selain fungsi ekologisnya sebagai produsen oksigen dan air baku, sumber daya kehutanan juga sebagai kontribusi untuk peningkatan ekonomi masyarakat/daerah, dengan mengoptimalkan hasil hutan, seperti kayu dan hasil hutan lainnya. Jenis-jenis hutan kayu yang dapat dimanfaatkan, antara lain; kayu besi, matoa, dan kayu jati yang saat ini dimanfaatkan seperti; kayu besi, kayu matoa, dan kayu jati. Selain kayu, terdapat juga hasil hutan lainnya, seperti; sagu, rotan, dan kayu gaharu yang umumnya terdapat di daerah Distrik Yapsi dan Ebungfauw. Namun, untuk hutan sagu, dalam skala kecil, merupakan salah satu hasil dari kegiatan penduduk lokal yang tersebar di berbagai distrik. Sedangkan untuk potensi hasil hutan nono kayu, terdapat beberapa komoditi potensial, yaitu: (1) rotan di kawasan Distrik Unurum Guay dan Kaureh, (2) Sagu di Distrik Sentani dan bagian utara Kabupaten Jayapura, dan (3) Kayu Gaharu di Distrik Unurum Guay.

2) Kawasan Pertanian

Luas areal pertanian tanaman pangan (padi) berupa sawah seluas 3,01 Km² atau sekitar 30,1 Ha. Terdapat di Distrik Nimboran, Namblong

dan Nimbokrang yang berasal dari para petani transmigran. Komoditas yang sesuai untuk dikembangkan di kawasan tersebut adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, durian, jambu mete, pala dan kelapa.

3) Kawasan Perikanan

Kabupaten Jayapura memiliki potensi kawasan perikanan, terdapat wilayah pantai, danau dan sungai. Luas potensial kawasan perikanan adalah 69.994 Ha. Tersebar di Distrik Sentani Timur, Sentani, Ebungfauw, Waibu, Sentani Barat, Depapre, Ravenirara, Demta, Yokari, Kemtuk, Namblong, Nimbora, Nimbokrang, Unurum Guay, dan Yapsi.

4) Kawasan Perkebunan

Luas Kawasan perkebunan di Kabupaten Jayapura adalah 421.714,20 Ha, daerah potensial perkebunan berada di Distrik Sentani Timur, Sentani, Ebungfauw, Waibu, Sentani Barat, Depapre, Ravenirara, Demta, Yokari, Kemtuk, Namblong, Nimbora, Nimbokrang, Unurum Guay dan Yapsi

5) Kawasan Peternakan

Daerah berpotensi bagi peternakan di Kabupaten Jayapura adalah Distrik Sentani, Sentani, Ebungfauw, Sentani Barat, Depapre, Demta, Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Namblong, Nimbora, Nimbokrang, Unurum Guay, Yapsi, Kaureh dan Airu.

6) Kawasan Pertambangan

Potensi pertambangan di Kabupaten Jayapura meliputi jenis bahan galian mineral dan logam mulia, potensi tersebut seperti kuarsa, nikel, emas, zeng, alumunium dan jenis tambang lainnya. Jenis galian yang paling besar berpotensi di Kabupaten Jayapura adalah batu bara seluas 76.653 terdapat di Distrik Nimbokrang dan batu gamping seluas 43.521 Ha terdapat di Distrik Unurum Guay.

7) Kawasan Industri

Kayu produksi kehutanan berupa hasil kayu (seperti; kayu besi, kayu matoa, dan kayu jati) dan produksi non kayu (seperti; sagu, rotan dan

kayu gaharu) yang hanya di manfaatkan sampai pada produksi setengah jadi memiliki potensi untuk diolah menjadi barang jadi yang dapat meningkatkan nilai kegunaannya. Wilayah transmigrasi di Distrik Namblong dan Distrik Nimbokrang menjadi Kawasan peruntukan industri dengan lingkup skala industri rumah tangga.

8) Kawasan Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Jayapura meliputi keindahan alam dan peninggalan sejarah budaya yang spesifik. Banyaknya Kawasan yang berpotensi sebagai obyek wisata yang tersebar diseluruh wilayah pembangunan, yang di dukung oleh Bandara Udara yang berada di Kabupaten Jayapura.

9) Kawasan Pemukiman

Eksisting penggunaan lahan pemukiman seluas 32,65 Km² (0,18%) dan di rencanakan eksisting lahan pemukiman sebesar 11.560,56 Km² (0,66%). Kawasan pemukiman terdiri dari perkotaan dan pedesaan. Pemukiman perkotaan terkonsentrasi di Distrik Sentani, Sentani Timur, Waibu, dan sedikit di Sentani Barat. Permukiman transmigran seluas 58,22 Km² yang tersebar lebih luas di Distrik Nimbokrang, Namblong dan Yapsi. Sedangkan pemukiman pedesaan/ perkampungan tersebar di setiap Distrik. Keberadaan dan kecenderungan perkembangan Kawasan pemukiman sangat dipengaruhi aksesibilitas Kawasan dan sumberdaya alam yang tersedia. Kawasan permukiman perkotaan sentani berkembang di tepi ruas jalan utama perkotaan yang terhubung dengan Kotamadya Jayapura sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi tersebar di Papua. Kawasan pemukiman transmigrasi berkembang disepanjang ruas utama Sentani-Namblong-Nimbokrang-Nimbotong-Kabupaten Sarmi.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten Jayapura, ditetapkan sistem perwilayahan pembangunan di Kabupaten Jayapura seperti disajikan pada tabel 2.11 dan dilengkapi dengan identitas dan sektor prioritas pembangunan.

Tabel 2.11
Pembagian Wilayah Pembangunan Kabupaten Jayapura

Wilayah Pembangunan (WP)	Kawasan	Distrik	Prioritas
I	Cagar Alam Cycoop dan Danau Sentani	<ul style="list-style-type: none"> - Sentani Timur - Sentani - Ebungfau - Waibu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pemerintahan 2. Perdagangan dan jasa 3. Bandar Udara 4. Pariwisata 5. Industri Kecil dan Rumah Tangga 6. Kehutanan 7. Perikanan darat/danau
II	Cagar Alam Cycloop dan Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Raveni Rara - Depapre - Sentani Barat - Yokari - Demta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pelabuhan Peti Kemas 2. Perikanan laut 3. Pariwisata 4. Industri 5. Pertambangan 6. Kehutanan
III	Grime	<ul style="list-style-type: none"> - Kemtuk - Kemtuk Gresi - Gresi Selatan - Nimboran - Nimbokrang - Namblong 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian skala rakyat 2. Peternakan skala rakyat 3. Perkebunan (Program Agropolitan) skala rakyat 4. Pertambangan 5. Industri
IV	Nawa	<ul style="list-style-type: none"> - Unurum Guay - Yapsi - Kaureh - Airu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehutanan 2. Perkebunan skala besar 3. PLTA 4. Pertanian skala besar 5. Peternakan skala besar 6. Prasarana Transportasi 7. Industri

Berdasarkan Karakteristik wilayah di Kabupaten Jayapura terdapat wilayah yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Potensi lahan pertambangan rakyat mencapai 255.000 ha yang tersebar di Kampung Oyengsi, Kemtuk Gresi, Nimbokrang, Sentani, Unurum Guay, Kaureh; lahan perumahan seluas 1.589,63 ha; lahan pertanian mencapai 14.796 ha; lahan sagu seluas 6.132 ha (Perda Nomor 3 Tahun 2000); lahan Perkebunan yang telah dikelola saat ini mencapai 18.470,5 ha dengan potensi sebesar 421.714,20 ha; areal kolam dan tambak seluas 45,2 ha dengan potensi luas areal mencapai 69.994 ha; dan Areal Penggunaan Lain seluas 31.499,04 ha. Selain itu, di daerah ini terdapat pula Danau Sentani dengan luas mencapai 9.630 Ha sebagai potensi yang sangat besar dimiliki daerah untuk pengembangan usaha budidaya perikanan darat guna memproduksi berbagai macam

ikan air tawar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat lokal dan berpeluang untuk diekspor, utamanya ke kabupaten-kabupaten yang berada di daerah pegunungan yang mengelilingi Kabupaten Jayapura.

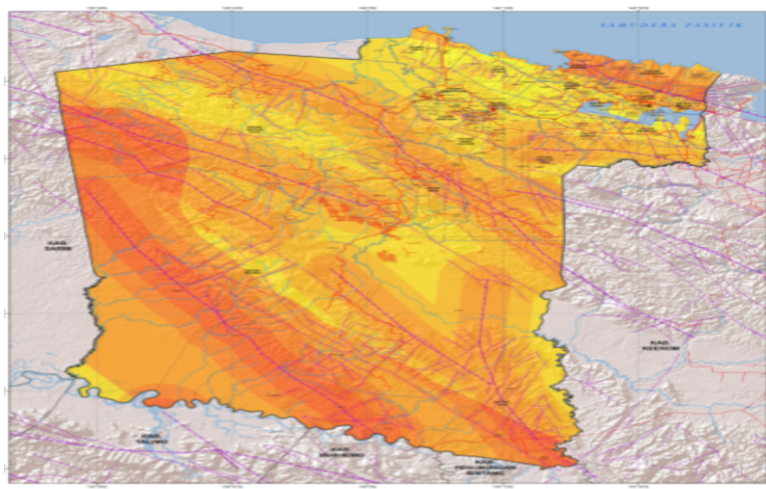
Panjang garis pantai yang dimiliki Kabupaten Jayapura saat ini mencapai 243 mil laut yang terbentang di sepanjang Teluk Tanah Merah, yakni di kawasan Distrik Demta, Distrik Ravenirara dan Distrik Depapre. Oleh karena itu, daerah ini memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan pelabuhan laut dan peti kemas di Depapre, serta pengembangan usaha perikanan laut di Distrik Depapre, Demta, Ravenirara dan Yokari, untuk perikanan tangkap maupun budidaya di Danau Sentani Distrik Ebungfau dan Sentani Timur. Potensi Wisata di Kabupaten Jayapura meliputi pantai di Distrik Depapre, Demta, Ravenirara dan Yokari, Potensi wisata alam terdiri dari Gunung Cycloop, Air terjun dan sungai sedangkan wisata alam lainnya adalah Danau Sentani.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan gempa bumi adalah areal yang diidentifikasi rawan terhadap gempa karena wilayah ini di lewati oleh sesar/patahan, sehingga berdasarkan siklus gejala alam dapat diprediksi pada wilayah ini suatu saat akan terjadi gempa bumi. Untuk itu pada wilayah ini diarahkan untuk tidak membangun atau mengembangkan kegiatan budidaya melainkan tetap sebagai kawasan hutan dengan tanaman keras yang dapat diambil manfaatnya oleh penduduk. Wilayah rawan gempa ini meliputi Distrik Sentani, Demta, Yokari, Sentani Barat, Waibu dan Ebungfauw.

Gambar 2.6

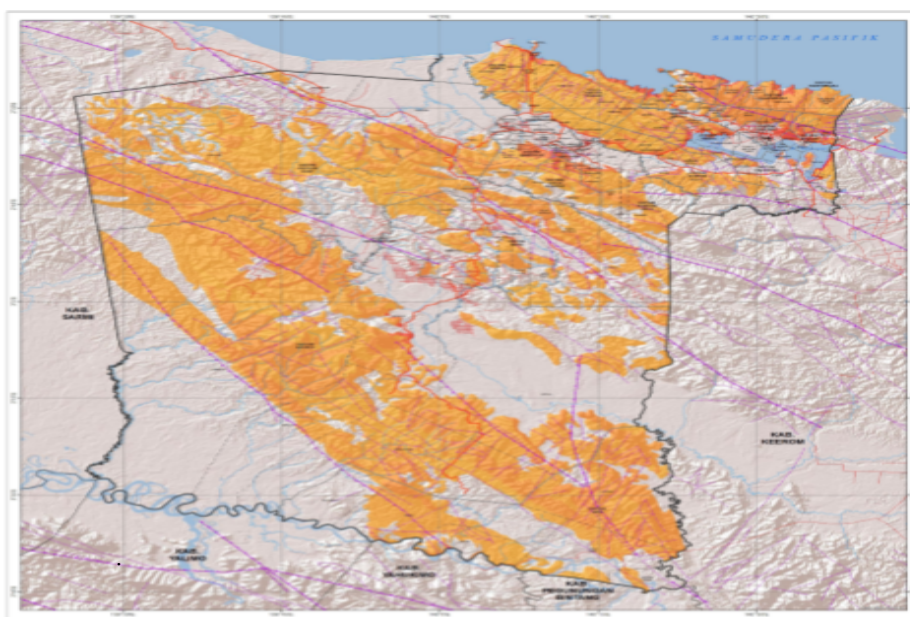
Peta Bahaya Gempa Bumi di Kabupaten Jayapura



Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura.

Wilayah rawan tanah longsor adalah areal yang diidentifikasi rawan gerakan tanah karena kondisi geologi yang labil. Wilayah ini diarahkan untuk mendapatkan perlakuan khusus sehingga potensi longsor dapat diminimalisasi, sementara itu pada beberapa wilayah yang secara alami telah memiliki potensi gerakan yang tinggi diarahkan untuk tidak dikembangkan bagi kegiatan budidaya. Pada kawasan rawan longsor ini juga ditanami tanaman keras yang dapat diambil manfaatnya oleh penduduk. Wilayah rawan longsor ini meliputi; Distrik Yapsi, Demta, Depapre, Unurum Guay, Sentani, Sentani Timur, Ravenirara dan Airu.

Gambar 2.7
Peta Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Jayapura



Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura

Kawasan rawan banjir adalah areal yang diidentifikasi rawan terhadap genangan air secara permanen dan musim hujan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Wilayah ini terutama di wilayah permukiman di daerah Distrik Sentani karena kurang bekerjanya system hidrologi alamiah dan buatan yang ada serta naiknya permukaan air Danau Sentani. Selain itu, akibat terjadinya perubahan fungsi lahan di daerah Cycloop yang merupakan daerah cagar alam oleh masyarakat, yang semula merupakan daerah konservasi menjadi daerah permukiman, serta semakin banyaknya penambangan batu dan pasir yang dilakukan oleh masyarakat disekitar kawasan cagar alam Cycloop tersebut.

Gambar 2.9

**KABUPATEN JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

PETA RAWAN BENCANA

SKALA: 1 : 700 000

KETERANGAN:

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 - Batas Kabupaten
 - Batas Distrik

Simbol IBUKOTA
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Distrik
 - Ibukota desa
 - Kantor Bupati Jayapura

PELAIRAN
 - Garis pantai / Danau
 - Sungai / Anak sungai

PERHUBUNGAN
 - Bandar Udara
 - Jaringan Jalan

RAWAN BENCANA
 - Rawan bencana gempa bumi
 - Rawan bencana tanah longsor/ambles

Indeks Peta

The map shows the city of Jayapura and its surrounding districts, including Sentani, Waris, and Waris. It also shows the city of Jayapura and its surrounding districts, including Sentani, Waris, and Waris. The map includes a coordinate grid and a scale of 1:700,000.

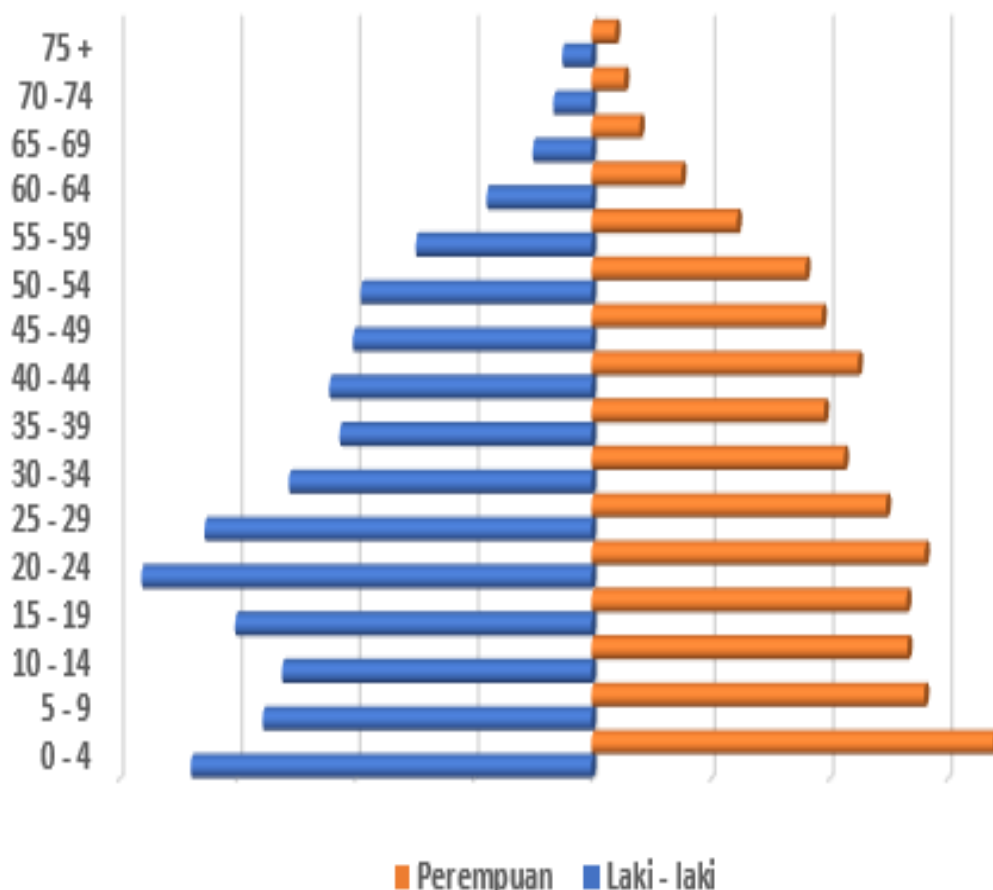
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH RPJMD 2017-2022

2.1.4. Aspek Demografi

a) Jumlah dan struktur umur penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Aspek kependudukan merupakan aspek utama dalam perencanaan dan penyusunan program pembangunan. Penduduk merupakan subjek yang harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan dan sebagai objek dimana hasil pemabangunan harus dinikmati oleh penduduk. Berdasarkan data Kabupaten Jayapura Dalam Angka Tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 sebesar 123.780 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 65.185 jiwa atau 52,66 % dan penduduk perempuan berjumlah 58.595 jiwa atau 47,34% dan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 125.975 jiwa. Penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di Kabupaten Jayapura tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1
Penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin
di Kabupaten Jayapura tahun 2017



Pembagian kelompok umur terdiri dari enam belas (16) kelompok . dengan proporsi penduduk usia muda (dibawah 15 tahun) di tahun 2016 berkisar 28.58 % atau 35.378 jiwa dan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 84.677 jiwa (68,41%) sedangkan proporsi penduduk usia lanjut tercatat 3.707 jiwa (2,99%). Dapat dilihat juga sebaran penduduk di distrik dalam tabel berikut. Dari data tersebut menunjukkan bahwa proporsi umur penduduk didominasi oleh usia produksi yang relatif besar dan menjadi potensi sumberdaya manusia untuk pembangunan. Sebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.12
Sebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2017

Kelompok Umur	Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (BPS)					
	Tahun 2016			Tahun 2017**		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	6.764	6.807	13.571	6.770	6.801	13.571
5 - 9	5.575	5.627	11.202	5.556	5.624	11.180
10 - 14	5.282	5.323	10.605	5.227	5.340	10.567
15 - 19	6.014	5.330	11.344	6.021	5.324	11.345
20 - 24	7.534	5.669	13.203	7.605	5.633	13.238
25 - 29	6.431	4.940	11.371	6.536	4.979	11.515
30 - 34	5.067	4.249	9.316	5.114	4.267	9.381
35 - 39	4.247	3.933	8.180	4.254	3.932	8.186
40 - 44	4.366	4.379	8.763	4.430	4.505	8.935
45 - 49	3.890	3.675	7.565	4.030	3.894	7.924
50 - 54	3.672	3.356	7.028	3.899	3.618	7.517
55 - 59	2.717	2.233	4.950	2.968	2.457	5.425
60 - 64	1.609	1.366	2.975	1.772	1.520	3.292
65 - 69	910	750	1.660	991	816	1.807
70 -74	625	542	1.167	641	555	1.196
75 +	482	398	880	493	403	896
	65.185	58.595	123.780	66.307	59.668	125.975

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura 2013-2016

Tabel 2.13
Perkembangan Jumlah Penduduk Periode Tahun 2013-2017

Tahun	Penduduk (Jiwa)			Perkembangan (%)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	
2013	62.787	56.002	118.789	-
2014	62.891	56.387	119.383	0.5
2015	63.891	57.591	121.410	1.7
2016	63.891	57.519	123.780	1.9
2017**	66.307	59.668	125.975	1.7
Rata-rata				1.16

Sumber data: DDA BPS Kabupaten Jayapura 2017.

Tabel 2.13 menunjukkan tingkat perkembangan penduduk cukup tinggi. dimana perkembangan tertinggi pada tahun 2016 dengan rata-rata perkembangan pertahun 1.16%. perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2015-2016 dan 1,9% jumlah penduduk dan proyeksi pada tahun 2017 perkembangannya hanya mencapai 1,7% jumlah penduduk.

b) Tingkat Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk yang tidak merata, menimbulkan tingkat kepadatan penduduk yang berbeda antara wilayah distrik. Kepadatan jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 sebesar 7.07 Km². Tingkat penduduk terpadat berada di Distrik Sentani yaitu jumlah penduduk 49.321 jiwa dengan luas wilayah sebesar 225,90 Km² maka terdapat 218,33 jiwa/km², tingkat kepadatan penduduk terendah di Distrik Airu dengan luas wilayah sebesar 3,099 Km² dan jumlah penduduk 1108 jiwa dengan kepadatan 0.33 jiwa/Km². Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut. Data Sebaran penduduk di Distrik Kabupaten Jayapura pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.14
Data Sebaran penduduk di Distrik Kabupaten Jayapura pada Tahun 2016

NO	DISTRIK	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	
			2016	% Kepadatan Penduduk
1	Kaureh	4.358	6.806	1,56
2	Airu	3.099	1.018	0,33
3	Yapsi	1.291	6.261	4,85
4	Kemtuk	258	3.941	15,26
5	Kemtuk Gresi	182	4.522	24,79
6	Gresi Selatan	144	994	6,91
7	Nimboran	710	4.429	6,24
8	Namblong	194	3.270	16,88
9	Nimbokrang	775	6.935	8,95
10	Unurum Guay	3.131	2.141	0,68
11	Demta	497,50	3.481	7,00
12	Yokari	519,50	2.099	4,04
13	Depapre	404,30	4.214	10,42
14	Raveni Rara	467,40	1.243	2,66
15	Sentani Barat	129,20	4.563	35,32
16	Waibu	258,30	7.795	30,18
17	Sentani	225,90	49.321	218,33
18	Ebungfau	387,40	2.741	7,08
19	Sentani Timur	484,30	8.006	16,53
	Jumlah	17.516,60	123.780	7,07

Sumber Data : DDA Kabupaten Jayapura.

c) Komposisi dan Populasi penduduk.

1) Pendidikan

Jumlah penduduk Kabupaten Jayapura sesuai tingkat pendidikan/lulusan pada tahun 2016 jenjang pendidikan SD sebanyak 30.180 orang (24.38 persen). jenjang pendidikan SMP sebanyak 32.590 orang (26.33 persen) dan SMA/SMK sebanyak 86.227 orang (69.66 persen). Jumlah jenjang pendidikan D1-D3 Sebanyak 5.722 orang (4.62 persen). Jumlah jenjang pendidikan S1 sebanyak 10.495 orang (8.48 persen) . jenjang pendidikan S2 sebanyak 752 orang (0.61 persen) dan jenjang pendidikan S3 sebanyak 91 orang (0.07 persen). Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Jayapura Pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Jayapura Pada Tahun 2016

NO	Jumlah Penduduk	2013	2014	2015	2016
1	SD	21.513	25.430	26.845	30.180
2	SMP	21.581	27.016	28.972	32.590
3	SMA	51.084	66.934	73.395	86.227
4	D1-DIII	3.974	4.667	5.256	5.722
5	S1	6.355	7.975	9.025	10.495
6	S2	455	589	661	752
7	S3	55	67	71	91
Jumlah		105.017	132.678	144.225	166.057

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura.

2) Dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk;

Kartu keluarga adalah bukti dari identitas warga/penduduk Kabupaten Jayapura. Apabila masyarakat yang tinggal di Kabupaten Jayapura belum terdaftar/mendaftarkan dirinya melalui Formulir pendaftaran (F-1.01), belum dapat dikategorikan sebagai penduduk Kabupaten Jayapura.

Jumlah penduduk berdasarkan pada jumlah seluruh anggota keluarga yang tercatat pada kartu keluarga. Jika ada anggota keluarga yang tidak tinggal bersama karena alasan studi atau pekerjaan, maka selama tidak mengajukan permohonan pindah yang bersangkutan masih tergolong penduduk Kabupaten Jayapura.

Hal ini disebabkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tidak mempunyai kewenangan memindahkan penduduk tanpa adanya permohonan dari yang bersangkutan.. Begitupula penduduk yang

pindah datang ke Kabupaten Jayapura, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWN) dari Kabupaten/Kota asal.

Di Kabupaten Jayapura (bahkan di Indonesia) terdapat penduduk yang selama ≥ 5 tahun tidak pernah melakukan *update* data, dikategorikan sebagai penduduk anomali sehingga berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Penduduk anomaly ini, apabila sudah diperbaharui datanya dan melakukan perekaman dengan sendirinya akan menambahkan jumlah penduduk.

3) Kewarganegaraan/Suku

Penduduk Kabupaten Jayapura sampai dengan tahun 2017 berjumlah 267.658 orang. Berdasarkan asal suku Bangsa penduduk Kabupaten Jayapura dapat diklasifikasi atas penduduk Papua asli Jayapura. Papua luar Jayapura dan Penduduk luar/Non Papua. Penduduk Papua asli Kabupaten Jayapura berjumlah 125.502 orang (46,89 persen). Penduduk Papua Luar Kabupaten Jayapura berjumlah 50.174 orang (18,75 persen) dan Penduduk Luar Papua berjumlah 91.982 orang (34,37 persen). Penduduk Menurut Suku Bangsa Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Penduduk Menurut Suku Bangsa Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017

No.	Suku bangsa	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Papua Jayapura	91.518	99.209	106.508	118.629	125.502
2.	Papua Luar Jayapura	35.189	40.453	43.555	47.484	50.174
3.	Non Papua	70.081	75.743	78.495	86.981	91.982
Jumlah		196.788	215.405	228.558	253.094	267.658

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura.

Pertumbuhan jumlah penduduk Papua Asli Kabupaten Jayapura tahun 2013 sebanyak 91.518 orang menjadi 125.502 orang tahun 2017 bertambah sebanyak 33.984 orang (37,13 persen). Penduduk Papua yang berasal dari luar Jayapura Tahun 2013 berjumlah 35.189 orang menjadi 50.174 orang tahun 2017 bertambah sebanyak 14.985 orang (42,58 persen). Penduduk Non Papua tahun 2013 sebanyak 70.081 orang menjadi 91.982 orang tahun 2017 bertambah sebanyak 21.901 orang (31,25 persen). Meningkatnya jumlah penduduk non-papua yang berdomisili di Kabupaten Jayapura diakibatkan oleh

adanya migrasi penduduk dari luar Papua. Dan pada tahun 2017 penduduk asli Papua sebesar 65,63% atau 175.676 jiwa dan Non Papua sebesar 34,37% atau sebanyak 91.982 jiwa tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Jayapura dengan tingkat penyebaran penduduk Non Papua bila di rata-ratakan sebanyak 5,25 jiwa/Km². Data sebaran Penduduk disajikan pada table berikut.

Tabel 2.17
Sebaran Penduduk Asli Papua dan Non Asli Papua Tahun 2017

No	Distrik	Hasil sementara POAP 2017 (jiwa)					Persentase	
		Laki-laki	Perempuan	Total	Papua	Non Papua	Papua	Non Papua
1	Sentani	73.251	58.816	132.067	81.858	50.482	61,78	38,22
2	Sentani Timur	7.274	6.804	14.078	10.492	3.586	74,53	25,47
3	Depapre	3.234	3.039	6.273	5.771	502	91,99	8,01
4	Sentani Barat	3.801	3.470	7.271	4.927	2.344	67,76	32,24
5	Kemtuk	2.759	2.685	5.444	4.572	872	83,98	16,02
6	Kemtuk Gresi	3.227	3.236	6.463	6.204	259	95,99	4,01
7	Nimboran	3.428	3.366	6.794	5.514	1.280	81,16	18,84
8	Nimbokrang	5.178	4.840	10.018	3.640	6.378	36,33	63,67
9	Unurum Guay	2.274	2.063	4.337	3.327	1.010	76,71	23,29
10	Demta	2.315	2.041	4.356	3.764	592	86,41	13,59
11	Kaureh	10.140	7.625	17.765	10.579	7.186	59,55	40,45
12	Ebungfauw	2.011	1.974	3.985	3.963	22	99,45	0,55
13	Waibu	13.487	11.559	25.046	16.073	8.973	64,17	35,83
14	Namblong	2.510	2.376	4.886	2.686	2.200	54,97	45,03
15	Yapsi	5.247	4.449	9.696	3.755	5.941	38,73	61,27
16	Airu	1.341	1.077	2.418	2.390	28	98,84	1,16
17	Ravenirara	1.006	927	1.933	1.850	83	95,71	4,29
18	Gresi Selatan	844	812	1.656	1.526	130	92,15	7,85
19	Yokari	1.703	1.469	3.172	3.110	62	98,05	1,95
	JAYAPURA	145.030	122.628	267.658	175.728	91.930	65,65	34,35

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura

4) Agama

Agama yang ada di Kabupaten Jayapura terdiri atas 6 (Enam) aliran yang di tahun 2017 penganut agama Kristen Protestan 175.951 orang, Kristen Katolik 15.558 orang, Islam 75.420 orang, Budha 376 orang, Hindu 349 orang, Konghucu 4 orang, dan Penduduk aliran lainnya tidak ada. Data selengkapnya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.18
Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017

No	AGAMA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Protestan	123.577	139.237	148.834	165.540	175.951
2	Katolik	12.821	12.694	12.977	15.219	15.558
3	Islam	58.721	62.853	66.082	71.635	75.420
4	Budha	965	299	326	353	376
5	Hindu	691	277	308	343	349
6	Kong Hu Cu	13	4	4	4	4
7	Aliran Kepercayaan	0	41	27	0	0
Jumlah		196.788	215.405	228.558	253.094	267.658

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura

5) Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif

Penduduk usia produktif adalah penduduk dengan usia 15 sampai dengan 64 tahun. penduduk ini termasuk dalam kategori penduduk yang berpenghasilan dan dapat mencukupi kebutuhan hidup. Perkembangan penduduk usia produktif di Kabupaten Jayapura pada Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Penduduk Usia Produktif di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017

Tahun	Laki-laki 15-64 tahun	Perempuan 15-64 tahun	Jumlah
2013	77.681	63.323	141.044
2014	85.948	72.323	158.271
2015	90.739	74.365	165.104
2016	100.026	81.935	181.961
2017	108.393	88.953	197.346

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura 2017.

Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Jayapura di tahun 2017 adalah 84.677 jiwa atau sebesar 70.09 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Jayapura.

Terlihat pada table 2.20 penduduk usia produktif dilihat dari status di tahun 2012 - 2015 dimana penduduk usia produktif dengan status bekerja sebesar 51.90 persen sedangkan yang mencari kerja 8.5 persen. sekolah 14.6 persen. mengurus rumah tangga 20.4 persen dan lainnya 4.6 persen.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Usia Produktif Sesuai Status Bekerja di Kabupaten
Jayapura Tahun 2012-2015.

Tahun	Bekerja	Mencari Kerja	Sekolah	Mengurus Rmt	Lainnya
2012	59.47	5.36	14.21	19.06	1.90
2013	57.56	3.96	16.33	19.39	2.76
2014	52.13	8.36	17.25	19.7	2.54
2015	51.90	8.5	14.6	20.4	4.6

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura. Sakernas 2016.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

a. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian wilayah dinyatakan dalam struktur ekonomi secara presentase yang menunjukkan besarnya peranan nilai tambah masing-masing sector ekonomi dalam menciptakan PDRB. Dengan kata lain bahwa struktur ekonomi menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonomi. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). Secara umum pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura dihitung berdasarkan dua perhitungan yang dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun, yaitu perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
 Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.514.992.57	24.97	1.686.196.90	23.95	2.026.528.5	23.99	2.391.188.70	23.99	2.558.322.40	22.23
2	Pertambangan & penggalian	175.393.61	2.89	169.303.00	2.40	162.525.30	1.92	167.889.70	1.68	177.168.00	1.54
3	Industri pengolahan	363.765.47	6.00	375.995.11	5.34	440.194.43	5.21	471.530.23	4.73	525.985.96	4.57
4	Pengadaan Listrik & gas	1.849.50	0.04	1.849.50	0.03	2.198.90	0.03	2.909.20	0.04	4.366.10	0.04
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.662.72	0.19	13.200.90	0.19	14.771.40	0.17	16.209.50	0.15	17.834.60	10.03
6	Konstruksi	624.464.18	10.29	746.410.00	10.60	1.023.158.70	12.11	1.347.165.40	14.28	1.644.056.20	12.16
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	682.912.91	12.40	902.593.30	12.82	905.293.26	12.32	1.207.435.30	12.11	1.377.399.30	11.97
8	Transportasi dan Pergudangan	744.641.57	15.26	1.212.368.60	17.22	1.211.868.63	17.36	1.739.100.00	17.45	2.186.995.40	19.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	64.085.88	1.26	94.122.90	1.34	93.122.94	1.37	140.984.90	1.41	162.663.00	1.41
10	Informasi dan Komunikasi	267.826.86	5.21	341.669.90	4.85	341.669.87	4.80	479.505.80	4.81	552.519.40	4.80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	71.800.06	1.39	101.971.70	1.45	101.171.69	1.46	139.204.60	1.40	157.290.90	1.37
12	Real Estate	226.773.89	4.78	338.216.10	4.80	338.216.11	4.48	436.103.40	4.37	509.295.30	4.42
13	Jasa Perusahaan	81.797.98	1.69	120.313.40	1.71	120.313.44	1.75	175.337.00	1.76	211.901.50	1.84
14	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	435.039.26	8.47	576.995.40	8.19	576.995.40	8.27	803.064.20	8.06	911.063.70	7.92
15	Jasa Pendidikan	106.802.71	1.97	140.016.80	1.99	140.016.84	1.84	168.670.20	1.69	190.981.20	1.66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	83.614.58	1.55	106.414.40	1.51	106.414.44	1.44	140.992.90	1.41	163.036.50	1.42
17	Jasa Lainnya	89.463.87	1.63	113.374.80	1.61	113.374.78	1.48	141.378.7	1.42	158.276.80	1.38
	PDRB	6.067.671.70	100.00	7.041.107.00	100.00	8.449.029.40	100.00	9.968.926.70	100.00	11.509.539.70	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Jayapura 2017

Sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan menjadi kekuatan atau basis perekonomian Kabupaten Jayapura dan berkontribusi besar bagi PDRB Kabupaten Jayapura selama tahun 2012-2016. Hal ini dikarenakan potensi lahan di darat maupun di laut dan perairan darat yang memungkinkan dikembangkannya usaha pertanian, perikanan dan kehutanan. Berdasarkan potensi pengembangan wilayah kabupaten Jayapura, dengan adanya ketersediaan lahan maka memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu wilayah kabupaten Jayapura sejak tahun 1970-1990 menjadi sasaran program transmigrasi seperti di Besum, Nimbokrang dan Yapsi sehingga pertanian dan peternakan menjadi sektor lapangan kerja penting yang berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian rakyat dan wilayah kabupaten Jayapura sehingga menjadi sektor yang memberikan sumbangan penting bagi PDRB kabupaten Jayapura. Wilayah perairan Jayapura yang luas dengan potensi sumber daya perairan yang kaya menjadikan sebagian besar masyarakat di pesisir pantai utara Jayapura hidup dari usaha perikanan laut, sementara di sekitar danau sentani sebagian besar masyarakat mengembangkan perikanan darat/budidaya yang keduanya baik perikanan laut maupun perikanan darat memberikan kontribusi penting bagi ekonomi rakyat dan PDRB kabupaten Jayapura. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan lapangan usaha ini terhadap seluruh kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Jayapura berdasarkan data PDRB tahun 2016 mencapai hampir separuh dari lapangan perekonomian lainnya. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat Kabupaten Jayapura berkecimpung di lapangan usaha pertanian. baik pertanian tanaman pangan. hortikultura. perkebunan. peternakan. kehutanan maupun kelautan dan perikanan. Nilai dan Kontribusi Lapangan usaha dalam PDRB adhk di Kabupaten Jayapura Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
 Nilai dan Kontribusi Lapangan usaha dalam PDRB adhk di Kabupaten Jayapura Tahun 2012 - 2016

No	Lapangan usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.374.127.60	24.85	1.374.127.59	24.88	1.501.834.43	24.61	1.807.385.50	24.27	1.840.348.20	22.77
2	Pertambangan & penggalian	173.452.50	3.49	173.452.50	3.14	173.843.03	2.85	176.958.10	2.38	177.353.20	2.19
3	Industri pengolahan	325.451.60	6.55	328.914.56	5.96	334.952.20	5.49	380.114.20	5.11	402.224.90	4.96
4	Pengadaan Listrik & gas	2.245.50	0.04	2.245.53	0.04	2.411.47	0.04	2.692.10	0.04	3.188.20	0.04
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.200.00	0.21	11.200.01	0.20	12.011.74	0.20	14.158.10	0.19	15.019.50	0.19
6	Konstruksi	546.945.40	9.35	546.945.43	9.90	650.016.02	10.65	944.444.40	12.68	1.089.335.50	13.48
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	760.065.90	13.83	828.654.40	13.76	889.702.30	13.62	950.923.50	12.77	1.017.172.80	12.59
8	Transportasi dan Pergudangan	778.412.50	13.86	875.256.80	14.09	963.987.20	14.34	1.066.634.30	14.33	1.234.778.50	15.28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	67.785.70	1.18	77.799.40	1.23	88.613.70	1.28	100.666.80	1.35	110.248.30	1.36
10	Informasi dan Komunikasi	297.499.40	5.26	334.579.20	5.39	371.256.60	5.48	405.212.30	5.44	441.901.20	5.47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	72.142.50	1.35	83.403.40	1.31	95.944.00	1.35	103.418.80	1.39	112.805.20	1.40
12	Real Estate	252.023.00	4.35	289.956.20	4.56	314.084.70	4.75	340.405.00	4.57	374.224.80	4.63
13	Jasa Perusahaan	93.469.70	1.58	109.062.50	1.69	130.309.40	1.79	150.272.80	2.02	172.907.30	2.14
14	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan social	465.710.20	8.62	488.339.10	8.43	563.052.80	8.00	604.030.40	8.11	658.133.00	8.14
15	Jasa Pendidikan	115.911.00	2.12	135.625.10	2.10	148.529.60	2.22	159.269.50	2.14	173.184.60	2.14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	87.862.80	1.62	96.011.20	1.59	104.768.30	1.57	113.820.30	1.53	123.941.80	1.53
17	Jasa Lainnya	94.933.10	1.74	106.268.80	1.72	116.313.00	1.74	125.176.00	1.68	134.579.40	1.67
	PDRB	5.522.701.20	100.00	6.086.192.70	100.00	6.771.410.30	100.00	7.445.582.10	100.00	8.081.347.70	100.00

Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura 2017

Perkembangan Nilai dan Kontribusi lapangan usaha PDRB atas Dasar Harga Konstan (HK) di Kabupaten Jayapura sampai dengan tahun 2016 didukung oleh 17 lapangan usaha dimana masing-masing telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB di kabupaten sebagaimana terlihat pada tabel Perkembangan Kontribusi Lapangan usaha dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jayapura tahun 2012-2016. Perkembangan Nilai dan Kontribusi lapangan usaha PDRB atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 didukung oleh lapangan usaha pertanian sebesar 22.23 persen. pertambangan dan penggalian sebesar 1.54 persen. industri pengolahan sebesar 4.57 persen. Pengadaan listrik dan gas sebesar 1.92 persen. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 10.19 persen. konstruksi sebesar 12.16 persen. perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 11.97. transportasi dan pergudangan sebesar 19.00 persen. penyediaan akomodasi dan makan minum 1.41 persen. informasi dan komunikasi sebesar 4.80 persen. jasa keuangan dan asuransi sebesar 1.37. Real estate sebesar 4.42 persen. jasa perusahaan. 1.84 persen. administrasi pemerintahan. pertahanan dan jaminan sosial 8.12 persen. jasa pendidikan 1.66 persen. jasa kesehatan dan kegiatan 1.42 persen dan jasa lainnya 1.38 persen. Kontribusi tertinggi dari lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 40.05 persen dan terendah lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi 1.38 persen. Perkembangan kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Nilai dan Kontribusi lapangan usaha PDRB atas Dasar Harga Konstan (HK) di Kabupaten Jayapura dapat dilihat dalam tabel berikut.

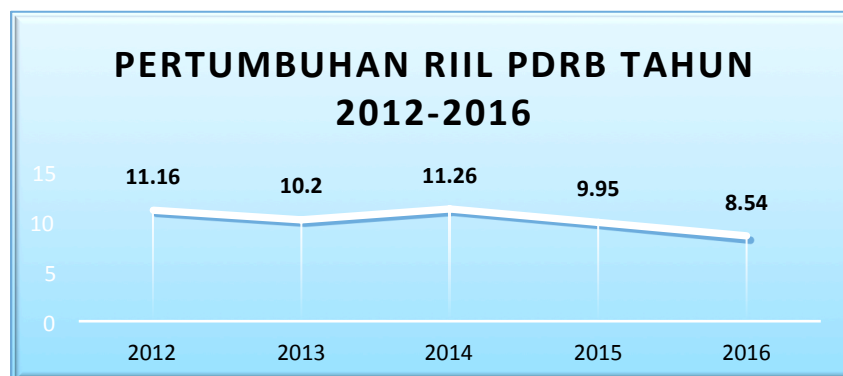
Tabel 2.23
Perkembangan kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Nilai dan Kontribusi lapangan usaha PDRB atas Dasar Harga Konstan (HK) di Kabupaten Jayapura

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
		HB%	HK%	HB%	HK%	HB%	HK%	HB%	HK%	HB%	HK%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.97	24.85	23.95	24.88	23.99	24.61	23.99	24.27	22.23	22.77
2	Pertambangan & penggalian	2.89	3.49	2.40	3.14	1.92	2.85	1.68	2.38	1.54	2.19
3	Industri pengolahan	6.00	6.55	5.34	5.96	5.21	5.49	4.73	5.11	4.57	4.96
4	Pengadaan Listrik & gas	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.19	0.21	0.19	0.20	0.17	0.20	0.15	0.19	10.03	0.19
6	Konstruksi	10.29	9.35	10.60	9.90	12.11	10.65	14.28	12.68	12.16	13.48
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.40	13.83	12.82	13.76	12.32	13.62	12.11	12.77	11.97	12.59
8	Transportasi dan Pergudangan	15.26	13.86	17.22	14.09	17.36	14.34	17.45	14.33	19.00	15.28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.26	1.18	1.34	1.23	1.37	1.28	1.41	1.35	1.41	1.36
10	Informasi dan Komunikasi	5.21	5.26	4.85	5.39	4.80	5.48	4.81	5.44	4.80	5.47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.39	1.35	1.45	1.31	1.46	1.35	1.40	1.39	1.37	1.40
12	Real Estate	4.78	4.35	4.80	4.56	4.48	4.75	4.37	4.57	4.42	4.63
13	Jasa Perusahaan	1.69	1.58	1.71	1.69	1.75	1.79	1.76	2.02	1.84	2.14
14	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	8.47	8.62	8.19	8.43	8.27	8.00	8.06	8.11	7.92	8.14
15	Jasa Pendidikan	1.97	2.12	1.99	2.10	1.84	2.22	1.69	2.14	1.66	2.14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1.55	1.62	1.51	1.59	1.44	1.57	1.41	1.53	1.42	1.53
17	Jasa Lainnya	1.63	1.74	1.61	1.72	1.48	1.74	1.42	1.68	1.38	1.67
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jayapura menurut pendekatan produksi dengan menjumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang di kelompokkan dalam 17 kategori lapangan usaha. Berdasarkan data pada tabel 2.16 terlihat Perbandingan Pertumbuhan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Jayapura. Terlihat laju pertumbuhan PDRB atas Harga Berlaku (Hb) maupun Harga Konstan (Hk) tertinggi pada tahun 2014 dengan angka 11.26 persen. Pertumbuhan PDRB kabupaten Jayapura dari tahun 2012 – 2016 berlangsung secara fluktuatif, dimana pada tahun 2012 berada pada

angka 11.16 persen. pada tahun 2013 mengalami pelambatan sebesar 10.2 persen sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 11.26 persen. sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 mengalami pelambatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya serangan hama yang mengakibatkan gagal panen di seluruh kabupaten Jayapura dan dipengaruhi oleh ekonomi global dan nasional. Pertumbuhan Riil PDRB tahun 2012 – 2016 sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini.

Grafik 2.2
Pertumbuhan Riil PDRB Tahun 2012-2016



Sumber data: PDRB Kabupaten Jayapura tahun 2017

Pertumbuhan Nilai dan Kontribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku (PDRB *adhb*) di Kabupaten Jayapura masih di dominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar Rp.2.558.322.40 atau 22.23 persen. kemudian diikuti oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan. yaitu sebesar Rp.2.186.995.40 atau 19.00 persen, serta lapangan usaha sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebagai sektor yang kontribusi PDRB terendah. yaitu Rp. 4.366.10 atau 0.04 persen. Selama tahun 2012 - 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif dimana tahun 2012 sebesar 11.16 persen, di tahun 2013 menurun sebesar 10.2 persen, meningkat di tahun 2014 sebesar 11.26 persen dan cenderung menurun hingga tahun 2016 sebesar 8.54 persen, adapun beberapa faktor penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi yaitu melemahnya tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, melemahnya nilai kurs rupiah, perlambatan ekonomi global, menurunnya ekspor daerah, kurangnya investor asing, adanya perubahan pengalihan lahan.

Nilai dan Kontribusi lapangan usaha PDRB *adhk* di Kabupaten Jayapura sampai dengan tahun 2016 didukung oleh 17 lapangan usaha dimana masing-

masing telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB di kabupaten sebagaimana terlihat pada tabel Perkembangan Kontribusi Lapangan usaha dalam PDRB *adhk* Kabupaten Jayapura tahun 2012-2016.

b. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum cenderung meningkat. Adapun yang dimaksudkan laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan harga dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun.

Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi *stimulator* bagi pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi yang terkendali akan menambah keuntungan pengusaha. pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi dimasa datang dan pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak negatif pada perekonomian yang selanjutnya dapat mengganggu kestabilan sosial dan politik, dampak negatif pada perekonomian diantaranya daya tarik penanaman modal. Tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi memperburuk distribusi pendapatan dan mengurangi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi Kabupaten Jayapura tahun 2014-2016 mengikuti tren inflasi Kota Jayapura fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7.98 persen dan terendah terjadi di tahun 2015 sebesar 2.79 persen. Secara umum inflasi Kabupaten Jayapura yang mengikuti inflasi kota Jayapura berada di bawah inflasi nasional. Perkembangan Inflasi Kabupaten Jayapura Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Perkembangan Inflasi Kabupaten Jayapura Tahun 2014-2016

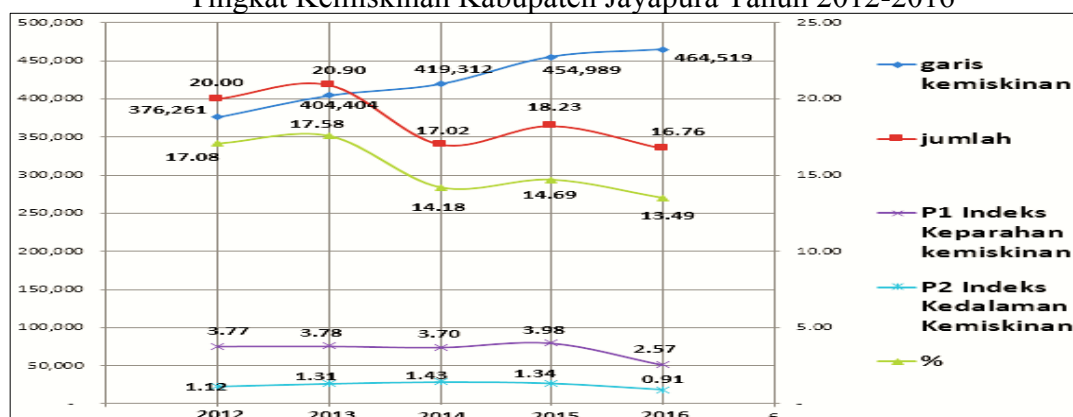
Uraian/Kab/Kota	2014	2015	2016	Rata-rata pertumbuhan
Kota Jayapura	7.98	2.79	3.03	4.6
Merauke	12.3	5.76	3.03	7.03
Nasional	8.36	3.35	4.13	5.28

Sumberdata: BPS Kabupaten Jayapura tahun 2017.

c. Tingkat Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kemiskinan pada daerah tersebut. Tingkat kemiskinan pada Kabupaten Jayapura pada Tahun 2016 adalah 13.49 persen dengan tingkat pendapatan perkapita yakni Rp 464.519.- dan tingkat keparahan kemiskinan sebesar 2.57 persen. selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.3
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016



Sumber data: DDA BPS Kabupaten Jayapura 2017

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pencapaian angka IPM pada tahun 2016 sebesar 70.50 persen bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 69.21 persen mengalami pertumbuhan sebesar 1.29 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Jayapura dalam perencanaan pembangunan manusia. Pertumbuhan IPM Kabupaten Jayapura pada tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.25
Perkembangan IPM Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016

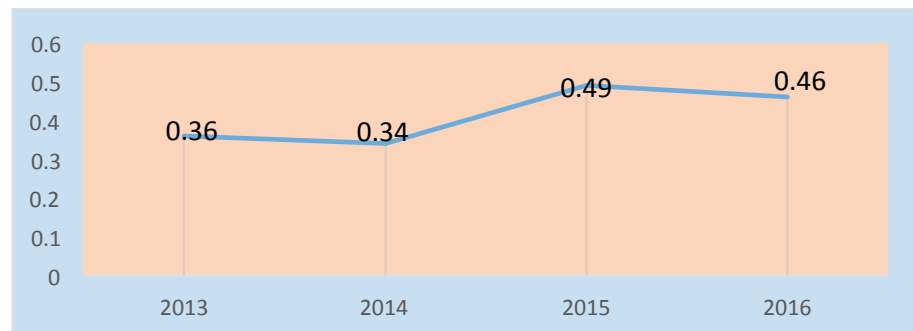
Komponen IPM	2012	2013	2014	2015	2016
1. Angka Harapan Hidup (Tahun)	65.98	66.01	66.02	66.32	66.40
2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.28	13.28	13.54	13.79	14.15
3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9.05	9.33	9.41	9.48	9.53
4. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.575	9.586	9.597	9.622	9.653
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	68.85	69.21	69.55	70.04	70.50

Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura IPM. 2015-2017

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 berada pada angka 70.50. maka menurut Tabel Klasifikasi Pencapaian IPM dikategorikan dalam wilayah dengan kinerja pembangunan manusia Tinggi yaitu capaian IPM 70 sampai dengan 80.

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayapura pada tahun 2013 sebesar 0.36 dan tahun 2015 sebesar 0.49 dan tahun 2016 mengalami pelambatan sebesar 0.46. Pertumbuhan IPM Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.4
Pertumbuhan IPM Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016

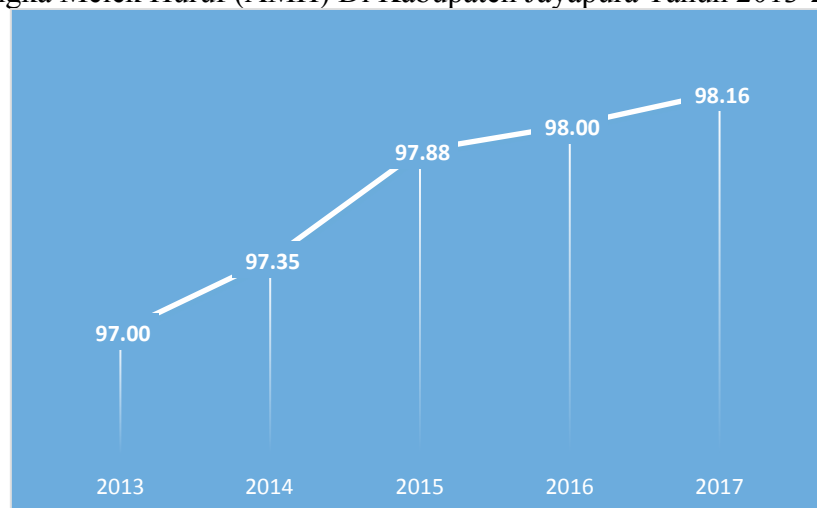


Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura 2017

a. Angka Melek Huruf.

Kondisi eksisting pendidikan Kabupaten Jayapura dapat dilihat dari beberapa indikator. antara lain Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas. Capaian kinerja angka melek huruf Kabupaten Jayapura dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2.5
Angka Melek Huruf (AMH) Di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017



Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura

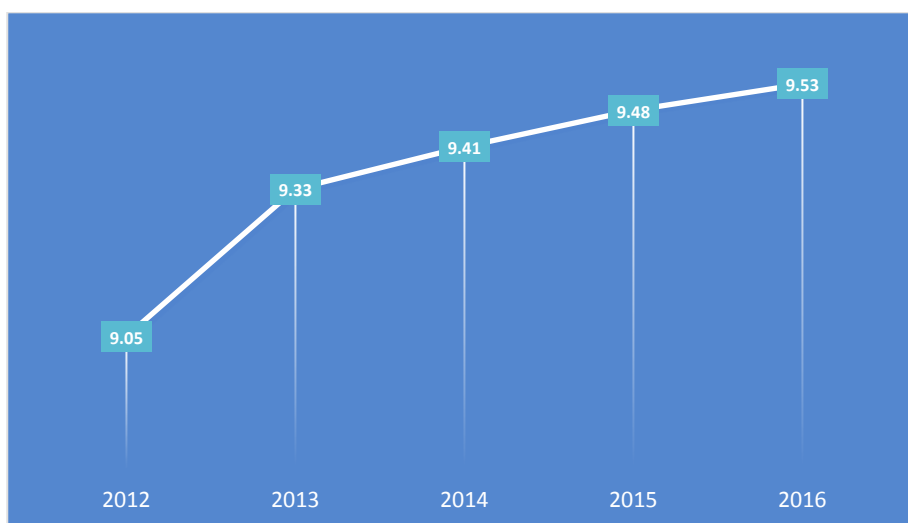
Angka melek huruf Kabupaten Jayapura dari tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 1.16 persen. dimana pada tahun 2013 AMH Kabupaten Jayapura sebesar 97.00 persen dan tahun 2017 sebesar 98.16 persen.

Dengan demikian pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder terkait dituntut untuk dapat bekerja keras meningkatkan pembangunan bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Jayapura.

b. Angka Rata-rata lama sekolah (RLS).

Unsur kedua indikator pendidikan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Jika HLS (Harapan Lama Sekolah) merupakan lamanya (dalam tahun) pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh penduduk usia 7 tahun ke atas, maka RLS (Rata-rata Lama Sekolah) mendeskripsikan lamanya sekolah yang telah dijalani penduduk usia 25 tahun ke atas. RLS digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik berikut.

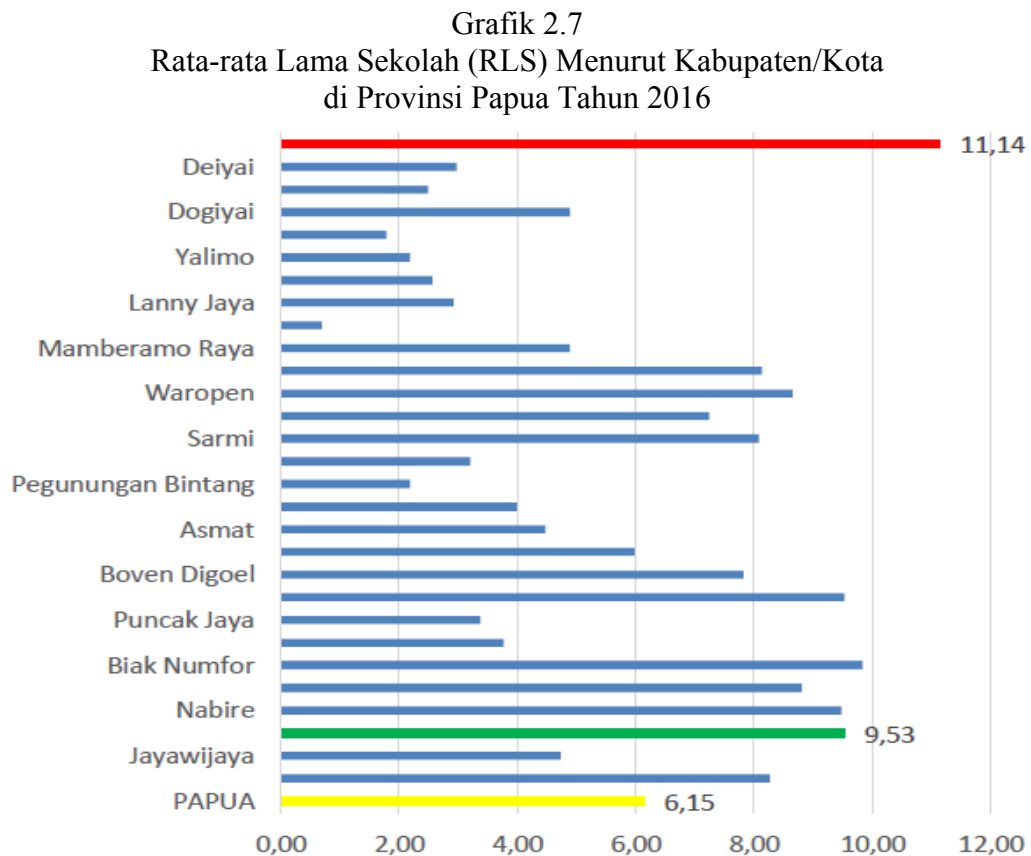
Grafik 2.6
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016.



Sumber Data : BPS Kabupaten Jayapura 2017

Pada tahun 2016 angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jayapura sebesar 9.53 tahun. Angka rata-rata lama sekolah sebesar 9.53 diartikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Jayapura telah mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMA/Sederajat. Hal ini membuktikan kinerja pemerintah yang baik, yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 rata-rata penduduk dapat bersekolah

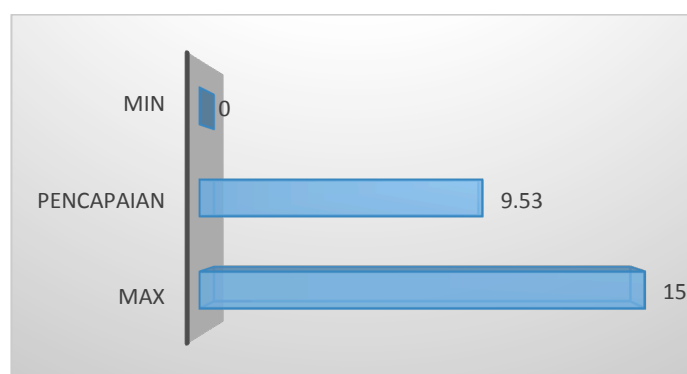
hingga kelas 3 SMP/ sederajat. sedangkan tahun 2016 meningkat ke tingkat SMA kelas 1. Angka ini juga mengindikasikan bahwa secara rata-rata pemerintah Kabupaten Jayapura telah berhasil menuntaskan program wajib belajar 9 Tahun. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber Data : BPS Kabupaten Jayapura 2017

Angka RLS Kabupaten Jayapura menduduki peringkat ke-3 dibawah Kota Jayapura. Kabupaten Biak Numfor dan diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Papua. Berdasarkan informasi pada grafik 2.8 dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya terdapat 5 Kabupaten/Kota yang telah berhasil dalam program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Kabupaten/Kota yang dimaksud antara lain Kota Jayapura. Kabupaten Biak Numfor. Jayapura. Nabire dan Mimika. Selain itu Propinsi Papua sendiri memiliki rata-rata lama sekolah yang masih jauh rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jayapura. yakni dengan RLS 6.15 tahun. atau setara dengan tingkat SD kelas 6.

Grafik 2.8
Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Jayapura Tahun 2016



Sumber Data: BPS Kabupaten Jayapura 2017.

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) terbesar terjadi pada SD tahun 2016 sebesar 96.21 persen. Jika dilihat dari tingkat Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD di tahun 2016 jika di bandingkan tahun 2015 sebesar 97.71 persen terjadi penurunan APS pada SD yaitu 0.50 persen. APS SLTP tahun 2016 sebesar 94.74 persen jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 94.38 persen terjadi peningkatan APS SLTP sebesar 0.36 persen. APS SMA/SMK tahun 2016 sebesar 90.60 persen jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 78.18 persen terjadi peningkatan sebesar 11.88 persen. Angka Partisipasi Sekolah tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016.

NO	JENJANG PENDIDIKAN	APS				
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	SDM/Paket A	94.97	96.67	97.9	97.71	96.21
2	SMP/Ms/Paket B	85.97	93.63	99.24	94.38	94.74
3	SMA/SMK/Paket C	83.81	78.36	87.57	78.18	90.6

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

d. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) terbesar terjadi pada SD tahun 2016 sebesar 120.35 persen. Jika dilihat dari tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SD di tahun 2016 jika di bandingkan tahun 2015 sebesar 111.31 persen terjadi peningkatan APK pada SD yaitu 9.04 persen. APK SLTP tahun 2016 sebesar 91.30 persen jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 98.88 persen terjadi penurunan APK SLTP sebesar 7.58 persen. APK SMA/SMK tahun 2016 sebesar 109.28 persen jika dibandingkan

tahun 2015 sebesar 121.18 persen terjadi penurunan sebesar 11.90 persen. Angka Partisipasi Kasar tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016.

NO	JENJANG PENDIDIKAN	APK				
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	SDM/Paket A	101.07	101.52	105.86	111.31	120.35
2	SMP/Ms/Paket B	97.84	105.21	101.33	98.88	91.3
3	SMA/SMK/Paket C	82.36	89.16	98.18	121.18	109.28

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura 2016.

e. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) terbesar terjadi pada SD tahun 2016 sebesar 94.30 persen. Jika dilihat dari tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) SD di tahun 2016 jika di bandingkan tahun 2015 sebesar 94.24 persen terjadi peningkatan APM pada SD yaitu 0.06 persen. APM SLTP tahun 2016 sebesar 86.65 persen jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 81.55 persen terjadi peningkatan APM SLTP sebesar 5.10 persen. APM SMA/SMK tahun 2016 sebesar 73.22 persen jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 73.80 persen terjadi peningkatan sebesar 5.10 persen. Angka Partisipasi Murni tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016.

NO	JENJANG PENDIDIKAN	APM				
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	SDM/Paket A	90.76	89.98	92.72	94.24	94.3
2	SMP/Ms/Paket B	67.38	67.47	74.61	81.55	86.65
3	SMA/SMK/Paket C	56.36	51.1	63.31	73.8	73.22

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tahun 2017.

2.2.3. Seni budaya dan Olahraga

a. Seni Budaya

Jumlah sanggar seni budaya yang tersebar pada tingkat distrik di Kabupaten Jayapura berjumlah 119. terdiri dari 50 sanggar tari. 28 sanggar seni suara. dan 41 sanggar budaya. Pagelaran seni budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Jayapura setiap tahun adalah Festival Danau Sentani pada bulan Juni. Festival Grime bulan Agustus. Festival Bahari Tanah Merah bulan November. Jumlah Sanggar Seni Tari. Sanggar Seni Suara dan Sanggar Budaya Menurut Distrik di Kabupaten Jayapura Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Jumlah Sanggar Seni Tari, Sanggar Seni Suara dan Sanggar Budaya
Menurut Distrik di Kabupaten Jayapura Tahun 2015.

No.	Distrik	Sanggar Seni Tari	Sanggar Seni Suara	Sanggar Budaya
1	Sentani Timur	8	-	5
2.	Sentani	5	2	7
3.	Waibu	3	1	3
4.	Ebungfau	14	9	12
5.	Sentani Barat	3	3	4
6.	Depapre	2	3	2
7.	Kemtuk	1	-	3
8.	Nimbokrang	11	6	4
9.	Nimboran	2	2	-
10.	Namblong	1	-	1
	Jumlah	50	28	41

Sumber Data : Profile Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Jayapura, 2016.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Jayapura telah tersedia dalam berbagai bentuk, yakni: (1) sanggar seni tari sebanyak 50 buah yang telah tersebar pada 10 distrik; (2) sanggar seni suara sebanyak 28 buah yang tersebar pada 7 distrik; dan (3) sanggar budaya sebanyak 41 buah yang tersebar pada 9 distrik. Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Kesenian Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Kesenian Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah grup kesenian	28	28	28	28	28
2	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-
3	Jumlah Grup Tari	50	50	50	50	50

Sumber data: Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Jayapura (Data diolah)

b. Olah raga

Jumlah klub Sarana Prasarana di Kabupaten Jayapura sebanyak 337 sarana yang tersebar di 19 Distrik. jumlah Sarana Prasarana terbanyak pada lapangan Bola volley dan yan paling sedikit Lapangan Badminton. Data sarana dan Prasarana Kabupaten Jayapura tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Kabupaten Jayapura Tahun 2016

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	78
2	Lapangan Volley	191
3	Lapangan Basket	39
4	Lapangan Futsal	24
5	Badminton	5
5	Kolam Renang	Rencana Pembangunan
6	Ski Air	Rencana Pembangunan
Jumlah		337

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura tahun 2017.

Jumlah klub olah raga di Kabupaten Jayapura sebanyak 133 klub yang tersebar di 19 Distrik. jumlah klub olahraga terbanyak terdapat di Distrik Sentani sebanyak 80 klub sedangkan yang paling sedikit di distrik Airu 2 Klub 1 klub sepak bola dan 1 klub bola volley. Data Klub Olahraga Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Klub Olahraga	133	133	133	133	133
2	Jumlah Atlet Olahraga Yang Berprestasi	2	2	2	2	2
3	Jumlah Organisasi Pemuda	19	19	19	19	19
4	Jumlah Organisasi Olahraga	15	15	15	15	15
5	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	-	-	-	-	-
6	Jumlah Kegiatan Olahraga	-	-	-	-	-
7	Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	-	-	-	-	-

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura (Data diolah).

Tabel 2.33
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Jayapura per Distrik Tahun 2016

No	Distrik	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kaureh	0/6.806	0/6.806	2/6.806	0/6.806
2	Airu	0/1.018	0/1.018	0/1.018	0/1.018
3	Yapsi	0/6.261	0/6.261	3/6.261	0/6.261
4	Kemtuk	4/3.941	0/3.942	2/3.942	0/3.942
5	Kemtuk Gresi	0/4.552	0/4.553	2/4.553	0/4.553
6	Gresi Selatan	0/994	0/995	1/995	0/995
7	Nimboran	4/4.429	0/4.430	4/4.430	0/4.430
8	Namblong	2/3.270	0/3.271	5/3.271	0/3.271
9	Nimbokrang	21/6.935	0/6.936	3/6.936	0/6.936
10	Unurum Guay	0/2.141	0/2.142	2/2.142	0/2.142
11	Demta	0/3481	0/3481	2/3481	0/3481
12	Yokari	0/2099	0/2099	2/2099	0/2099
13	Depapre	7/4.214	0/4.215	4/4.215	0/4.215
14	Raveni Rara	0/1243	0/1244	2/1244	0/1244
15	Sentani Barat	10/4.563	0/4.564	5/4.564	0/4.564
16	Waibu	7/7.795	0/7.795	4/7.795	1/7.795
17	Sentani	14/49.321	0/49.322	80/49321	9/49321
18	Ebungfau	35/2.741	0/2.742	4/2.742	0/2.742
19	Sentani Timur	13/8006	0/8006	6/8006	0/8006
	Jumlah	117/123.780	0/123.780	133/123.780	10/123.780

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura
(Data diolah).

Jumlah grup kesenian di Kabupaten Jayapura tahun 2016 adalah 117 group dari jumlah penduduk sebanyak 123.780 jiwa. sedangkan jumlah gedung olahraga adalah 133 gedung dari jumlah penduduk sebanyak 123.780 jiwa. Jika dilihat jumlah dengan perbandingan penduduknya dapat si asumsikan bahwa jumlah sarana olahraga maupun kesenian dan budaya masih perlu menjadi perhatian pemerintah terutama terkait kuantitas sarana prasarana terkait.

2.3. Aspek Pelayanan Umum.

2.3.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

1. Pendidikan.

Jumlah sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Jayapura terdiri dari Jumlah gedung sekolah PAUD sebanyak 302 gedung. SD/MI sebanyak 135 gedung.

SMP/MTs sebanyak 46 gedung. SM/MA Sebanyak 19 gedung. SMK/SMTK 13 gedung dan perguruan tinggi 4 gedung. Jumlah Gedung Sekolah Dan Perguruan Tinggi Di Kabupaten Jayapura Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Jumlah Gedung Sekolah Dan Perguruan Tinggi Di Kabupaten Jayapura
Tahun 2014-2016

NO	Jumlah Gedung	2014	2015	2016
1	Sekolah PAUD	186	186	302
2	SD/MI	131	133	135
3	SMP/MTs	41	42	46
4	SMA/MA	18	19	19
5	SMK/SMTK	6	14	13
6	Perguruan Tinggi	5	6	6

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tahun 2017.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Berdasarkan tabel 2.35 pada tahun 2016 Angka Partisipasi Sekolah (APS) terbesar terjadi pada SD yakni 96.21. Jika dilihat dari tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) di tahun 2016 terjadi peningkatan APK terbesar pada SD yaitu 147.26 persen atau meningkat sebesar 56.60 persen dari APK SLTP yakni 90.66 persen. Perkembangan APM, APS, dan APK SMU terlihat masih sangat rendah jika dibandingkan capaian SD dan SLTP. hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan dunia pendidikan. khususnya SMU. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017*
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Murid Usia 7-12 Thn	19.908	19.817	20.562	22.902	20.221
1.2.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	15.814	16.177	16.550	16.930	17.320
1.3.	APS SD/MI	96.67	97.90	97.71	96.21	
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Murid Usia 13-15 Thn	5.898	7.286	8.387	9.461	8.224
2.2.	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	7.871	8.052	8.237	8.427	8620
2.3.	APS SMP/MTs	93.63	99.24	94.83	94.74	

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tahun 2017.

Tabel 2.36
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Jayapura Tahun 2016

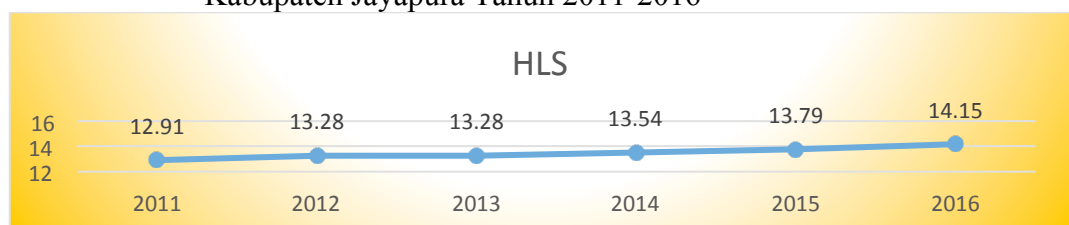
No	Distrik	SD/MI			SMP/MTs		APS
		Jumlah murid usia 7-12 thn	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	Jumlah murid usia 13-15 thn	Jumlah penduduk usia 13-15 th	
1	Kaureh	1.508	870	1.733	338	433	780.6
2	Airu	398	129	3.085	-	64	0
3	Yapsi	924	803	1.151	352	399	882.206
4	Kemtuk	668	501	1.333	273	250	1092
5	Kemtuk Gresi	887	575	1.543	415	286	1451.05
6	Gresi Selatan	163	126	1.294	-	63	0
7	Nimboran	538	566	951	410	282	1453.9
8	Namblong	594	418	1.421	204	208	980.769
9	Nimbokrang	988	889	1.111	583	443	1316.03
10	Unurum Guay	447	273	1.637	104	136	764.706
11	Demta	593	443	1.339	287	221	1298.64
12	Yokari	402	267	1.506	72	133	541.353
13	Depapre	1.025	537	1.909	451	267	1689.14
14	Raveni Rara	285	158	1.804	-	78	0
15	Sentani Barat	925	584	1.584	332	291	1140.89
16	Waibu	1.785	991	1.801	364	493	738.337
17	Sentani	8.556	6311	1.356	4.572	3.141	1455.59
18	Ebungfau	374	348	1.075	-	173	0
19	Sentani Timur	1.842	1025	1.797	704	510	1380.39
	Jumlah	22.902	15.814	1.548.87	4.572	7871	892.926

Sumber data: Dinas pendidikan Kabupaten Jayapura Tahun 2017

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Unsur utama IPM lainnya adalah indikator pendidikan yang terdiri dari HLS (Harapan Lama Sekolah) dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah). HLS menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dikaji untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Jayapura Tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

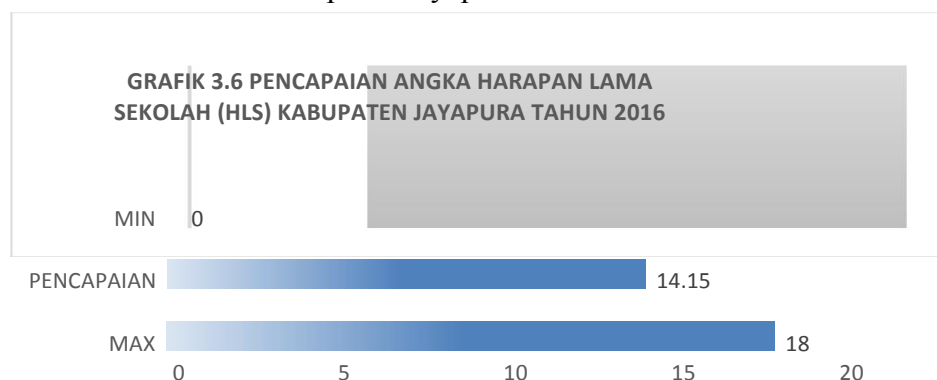
Grafik 2.9
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Jayapura Tahun 2011-2016



Sumber data: IPM Kabupaten Jayapura 2017.

Capaian HLS di Kabupaten Jayapura cukup tinggi. pada tahun 2016. HLS Kabupaten Jayapura adalah sebesar 14 tahun. Dari Grafik 2.9 terlihat adanya peningkatan HLS dari tahun ke tahun. Terjadi peningkatan sebanyak 1.24 tahun atau 14 bulan (1 tahun 2 bulan) dari tahun 2011 hingga tahun 2016. HLS di Kabupaten Jayapura menduduki posisi kedua setelah Kota Jayapura dan diantara Kabupaten lainnya di Provinsi Papua. Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai HLS Propinsi Papua sendiri HLS Kabupaten Jayapura masih lebih unggul. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jayapura sudah baik. namun harus memiliki strategi untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi HLS agar kualitas penduduk Kabupaten Jayapura dalam hal pendidikan bisa lebih baik. Untuk melihat capaian HLS Kabupaten Jayapura terhadap standar yang ditetapkan UNDP dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.10
Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Jayapura Tahun 2016



Sumber data: BPS Provinsi Papua Tahun 2017 (diolah).

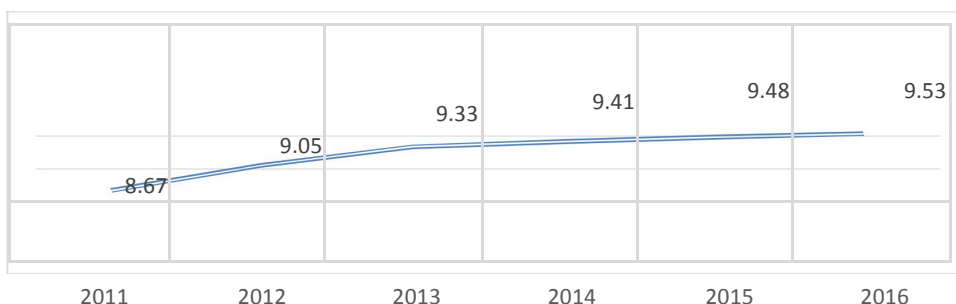
Pencapaian HLS Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 sebesar 14.15 persen. Artinya. tingkat pencapaian HLS Kabupaten Jayapura sudah 77 persen dari target UNDP yaitu sebesar 18 tahun.

c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tahun 2016 angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jayapura sebesar 9.53 tahun. Angka rata-rata lama sekolah sebesar 9.53 diartikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Jayapura telah mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMA/Sederajat. Hal ini membuktikan kinerja pemerintah yang baik. yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 rata-rata penduduk

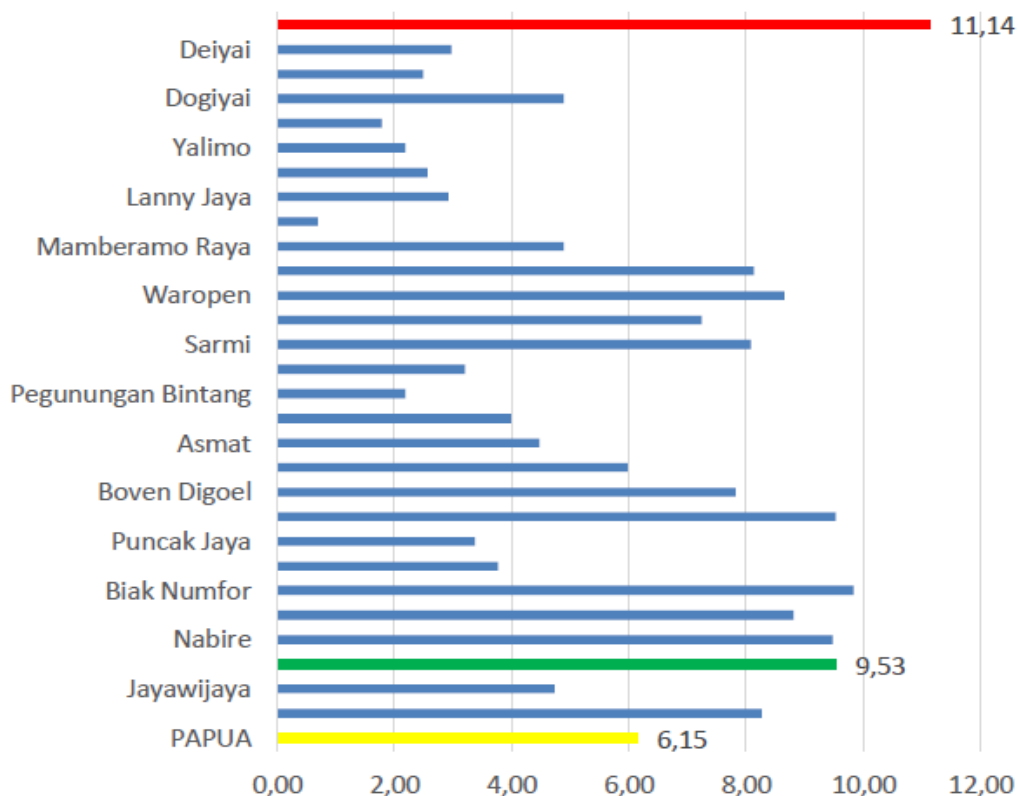
dapat bersekolah hingga kelas 3 SMP/ sederajat. sedangkan tahun 2016 meningkat ke tingkat SMA kelas 1. Angka ini juga mengindikasikan bahwa secara rata-rata pemerintah Kabupaten Jayapura telah berhasil menuntaskan program wajib belajar 9 Tahun.

Grafik 2.11
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Jayapura tahun 2011-2016



Sumber data: BPS Provinsi Papua. diolah.

Grafik 2.12
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2016

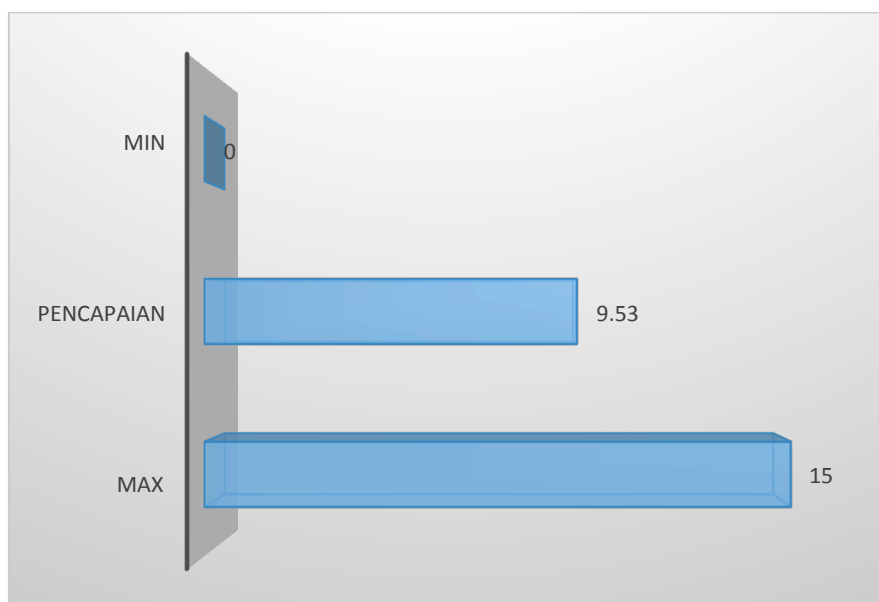


Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura tahun 2017

Angka RLS Kabupaten Jayapura menduduki peringkat ke-3 dibawah Kota Jayapura. Kabupaten Biak Numfor dan diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Papua. Berdasarkan informasi pada Grafik 2.11 dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya terdapat 5 Kabupaten/Kota yang telah berhasil dalam program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Kabupaten/Kota yang dimaksud antara lain Kota Jayapura. Kabupaten Biak Numfor. Jayapura. Nabire dan Mimika. Selain itu Propinsi Papua sendiri memiliki rata-rata lama sekolah yang masih jauh rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jayapura. yakni dengan RLS 6.15 tahun. atau setara dengan tingkat SD kelas 6.

Untuk dapat melihat sejauh mana capaian angka RLS terhadap standar global yang telah ditetapkan oleh UNDP dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.13
Pencapaian Angka Rata-rata Sekolah (RLS)
Kabupaten Jayapura Tahun 2016



Sumber data: BPS Provinsi Papua tahun 2017 (dikelolah)

Standar global yang ditetapkan oleh UNDP untuk RLS adalah 15 tahun atau setara dengan tingkat diploma 3 pada jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2016. pencapaian angka RLS Kabupaten Jayapura terhadap standar global UNDP adalah sebesar 64 persen. Selama 5 tahun terakhir. rata-rata peningkatan indeks pencapaian RLS sebesar 0.24 persen per tahun. Indikator pendidikan di Kabupaten Jayapura harus terus ditingkatkan dengan cara pemerintah lebih serius

dalam menangani program pembangunan di lapangan usaha pendidikan. dan pembangunan di lapangan usaha penunjangnya yaitu lapangan usaha kesehatan dan ekonomi.

d. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah.

Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah mengindikasikan ketersediaan sekolah. yang dimana Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 rasio gedung sekolah terhadap penduduk kelompok usia sekolah 1-6 tahun (PAUD) sebesar 136.55 persen. terhadap penduduk kelompok usia sekolah 7-12 tahun (SD) sebesar 76.42 persen. terhadap penduduk kelompok usia sekolah 13-15 tahun (SMP) sebesar 43.05 persen dan Terhadap penduduk kelompok usia sekolah 16-18 tahun (SMA/SMK) sebesar 22.14 persen. Secara rinci dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Rasio Ketersediaan Sekolah menurut tingkat pendidikan dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Jayapura Tahun 2014 - 2016

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
1	PAUD			
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah	186	186	302
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 1-6 tahun	16.188	16.188	16.188
1.3.	Rasio	99.06	99.68	136.55
1	SD/MI			
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah	131	133	135
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	15.814	15.814	15.814
1.3.	Rasio	72.62	73.89	76.42
2	SMP/MTs			
2.1.	Jumlah Gedung Sekolah	41	42	46
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	7.871	7.871	7.871
2.3.	Rasio	39.08	40.40	43.05
3	SMA/MA			
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah	18	19	19
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	7.227	7.227	7.227
1.3.	Rasio	16.60	22.83	22.14
4	SMK/SMTK			
2.1.	Jumlah Gedung Sekolah	6	14	13
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	7.227	7.227	7.227
2.3.	Rasio	16.60	22.83	22.14

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

Tabel 2.38
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah
Menurut Distrik di Kabupaten Jayapura Tahun 2016

No	Distrik	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
-1	-2	-3	-4	(5=3/4)	-6	-7	(8=6/7)
1	Kaureh	7	870	80.46	2	433	46.19
2	Airu	3	129	232.56	-	64	
3	Yapsi	8	803	99.63	3	399	75.19
4	Kemtuk	5	501	99.80	2	250	80.00
5	Kemtuk Gresi	6	575	104.35	2	286	69.93
6	Gresi Selatan	2	126	158.73	-	63	
7	Nimboran	5	566	88.34	1	282	35.46
8	Namblong	4	418	95.69	1	208	48.08
9	Nimbokrang	10	889	112.49	3	443	67.72
10	Unurum Guay	5	273	183.15	2	136	147.06
11	Demta	5	443	112.87	3	221	135.75
12	Yokari	4	267	149.81	1	133	75.19
13	Depapre	8	537	148.98	2	267	74.91
14	Raveni Rara	4	158	253.16	-	78	
15	Sentani Barat	6	584	102.74	2	291	68.73
16	Waibu	7	991	70.64	2	493	40.57
17	Sentani	27	6311	42.78	14	3.141	44.57
18	Ebungfau	4	348	114.94	-	173	
19	Sentani Timur	8	1025	78.05	3	510	58.82
Total		128	15814	80.94	43	7871	54.63

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tahun 2017 (Data diolah)

e. Rasio Guru terhadap Gedung Sekolah.

Rasio Guru terhadap gedung sekolah di Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 tingkat pendidikan PAUD sebesar 1.34. tingkat SD sebesar 8.40. tingkat SMP sebesar 14.89 dantingkat sekolah SMA/SMK sebesar 19.22. Secara rinci dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Rasio Guru terhadap gedung sekolah tahun 2013 s.d 2016 di Kabupaten Jayapura

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
1	PAUD			
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah	186	186	202
1.2.	Jumlah Guru	267	267	271
1.3.	Rasio	1.44	1.44	1.34
1	SD/MI			
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah	131	133	135
1.2.	Jumlah Guru	1.306	1.120	1.134
1.3.	Rasio	9.97	8.42	8.40
2	SMP/MTs			
2.1.	Jumlah Gedung Sekolah	41	42	46
2.2.	Jumlah Guru	591	670	685
2.3.	Rasio	14.41	15.95	14.89
3	SMA/MA/SMK			
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah	18	33	32
1.2.	Jumlah Guru	550	253	615
1.3.	Rasio	30.56	7.67	19.22

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

f. Rasio Guru/murid

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Rasio Guru Terhadap Murid adalah jumlah siswa di bagi jumlah guru idealnya 1 guru mengajar 32 peserta didik. Rasio guru per murid di Kabupaten Jayapura dapat di lihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.40
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Jayapura Tahun 2014 - 2016

NO	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016
1	PAUD			
1.1.	Jumlah Guru	286	298	319
1.2.	jumlah Murid	6.457	6.900	7.053
1.3.	Rasio	22.58	23.15	22.11
1	SD/MI			
1.1.	Jumlah Guru	1.604	1.432	1.477
1.2.	jumlah Murid	19.907	20.562	22.902
1.3.	Rasio	12.41	14.36	15.51
2	SMP/MTs			
2.1.	Jumlah Guru	840	914	935
2.2.	jumlah Murid	7.972	8.387	9.461
2.3.	Rasio	9.49	9.18	10.12
3	SMA/MA			
1.1.	Jumlah Guru	842	810	823
1.2.	jumlah Murid	4.535	4.620	5.151
1.3.	Rasio	5.39	5.70	6.26
4	SMK/SMK			
2.1.	Jumlah Guru	842	810	823
2.2.	jumlah Murid	2.223	2.498	3.577
2.3.	Rasio	2.64	3.08	4.35

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura

Rasio Guru Terhadap Murid di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Jayapura sudah memenuhi standart kecuali PAUD. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jayapura kurangnya pemerataan guru disetiap sekolah. Rasio Murid terhadap guru pada jenjang pendidikan tingkat PAUD tahun 2014 sebesar 22.58. tahun 2015 sebesar 23.15. tahun 2016 sebesar 22.11 belum memenuhi rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru untuk PAUD rasio 15 berbanding 1. SD di tahun 2014 sebesar 12.41. tahun 2015 sebesar 14.36. tahun 2016 sebesar 15.51 diatas rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru untuk SD atau sederajat 20 berbanding 1. Rasio Guru Terhadap Murid Tingkat SMP di tahun 2014 sebesar 9.49. di tahun 2015 sebesar 9.18. di tahun 2016 sebesar 10.12 diatas rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru untuk SMP atau sederajat 20

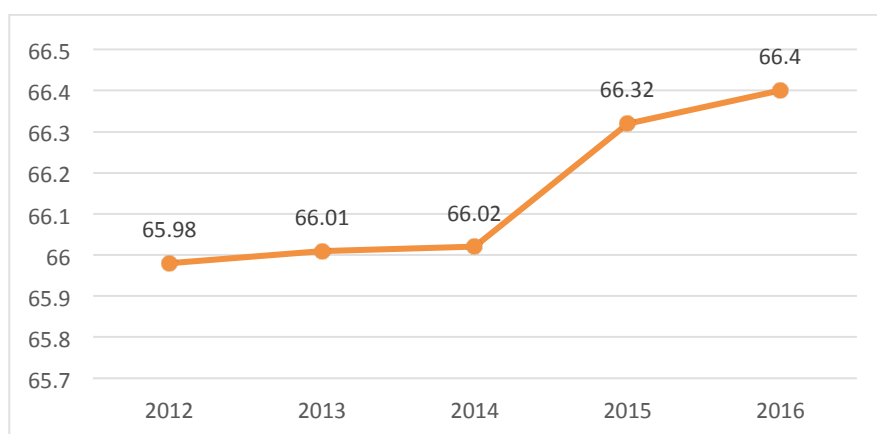
berbanding 1. Rasio Guru Terhadap Murid Tingkat SMA di tahun 2014 sebesar 5.39. di tahun 2015 sebesar 5.70. di tahun 2016 sebesar 6.26. Rasio Guru Terhadap Murid Tingkat SMK di tahun 2014 sebesar 2.64. di tahun 2015 sebesar 3.08. di tahun 2016 sebesar 4.35 diatas rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru untuk SMA/SMK atau sederajat 20 berbanding 1.

2. Kesehatan.

a. Angka Harapan Hidup (AHH).

Salah satu komponen dalam penyusunan angka IPM adalah AHH (Angka Harapan Hidup). Semakin tinggi AHH. memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut

Grafik 2.14
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016



Sumber data: IPM BPS Kabupaten Jayapura 2017.

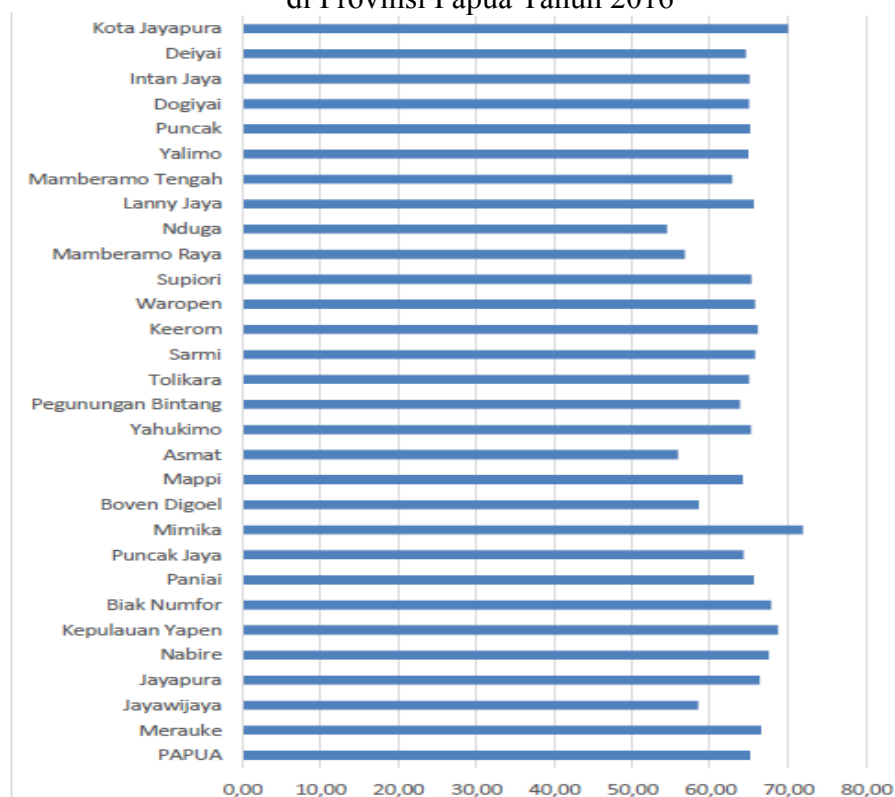
AHH penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 adalah sebesar 66.40 tahun. Artinya. secara rata-rata penduduk Kabupaten Jayapura diharapkan dapat hidup hingga usia 66 tahun. Diagram garis pada grafik 2.14 menunjukkan adanya peningkatan AHH penduduk Kabupaten Jayapura dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2016. AHH Kabupaten Jayapura hanya mengalami sedikit perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. yaitu hanya sebesar 0.08. Angka harapan hidup erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan sehingga peningkatan angka harapan hidup merupakan indikasi yang positif bahwa pembangunan di lapangan usaha

kesehatan di Kabupaten Jayapura dari tahun ke tahun memberikan dampak yang positif bagi penduduk Kabupaten Jayapura.

Untuk lebih memacu upaya pemerintah Kabupaten Jayapura dalam meningkatkan AHH penduduknya, perlu diamati kedudukan Kabupaten Jayapura dibanding dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Papua dalam hal pencapaian AHH. Pada grafik 2.15 terlihat bahwa AHH penduduk tertinggi berada di Kota Jayapura. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di lapangan usaha kesehatan di Kabupaten Jayapura tidak lebih baik daripada Kabupaten Mimika.

Berdasarkan hal tersebut, terindikasi bahwa pemerintah Kabupaten Jayapura perlu mengadakan kajian bersama atau studi banding ke Kabupaten/Kabupaten lainnya yang telah berhasil mencapai angka harapan hidup yang lebih tinggi di banding Kabupaten Jayapura. Upaya tersebut bertujuan agar penduduk Kabupaten Jayapura dapat lebih mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2016 pada tabel berikut.

Grafik 2.15
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Papua Tahun 2016

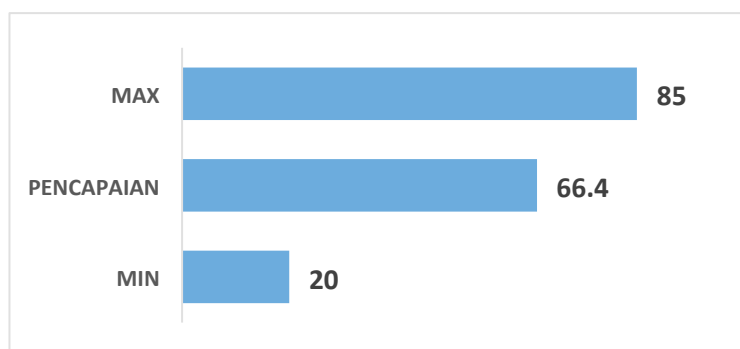


Sumber data: IPM BPS Kabupaten Jayapura 2017.

Untuk dapat melihat sejauh mana capaian AHH penduduk Kabupaten Jayapura terhadap standar global menurut UNDP, dapat dilihat pada grafik 2.15. UNDP mematok Standar global untuk angka harapan hidup penduduk adalah 85 tahun. Artinya, UNDP memasang target kualitas fisik penduduk sehingga rata-rata dapat bertahan hidup sampai usia 85 tahun. Dengan AHH penduduk Kabupaten Jayapura tahun 2016 sebesar 66.40 berarti nilai indeks pencapaian terhadap standar global adalah sebesar 78.11 persen.

Jika dilihat perkembangan indeks pencapaian AHH terhadap standar global dari tahun 2011 hingga tahun 2016, rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0.14 persen per tahun. Hal ini berarti terjadi peningkatan kinerja yang positif bagi pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan. Sehingga, untuk dapat lebih cepat mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dari segi kesehatan dirasa perlu adanya pemerataan pembangunan manusia di bidang kesehatan. Misalnya, dengan meningkatkan kualitas/kuantitas fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang fasilitas kesehatannya masih kurang memadai seperti di Distrik Airu dan distrik lainnya serta kampung-kampung yang jarak jangkauan terhadap fasilitas kesehatannya masih terbilang jauh.

Grafik 2.16
Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Jayapura Tahun 2016



Sumber data: IPM BPS Kabupaten Jayapura 2017.

b. Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka kematian ibu (AKI) merupakan pula salah satu indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan yang digunakan di suatu negara atau daerah, termasuk Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, keadaan perkembangan angka

kematian ibu (AKI) di Kabupaten Jayapura perlu pula diuraikan pada bagian ini. Berdasarkan data profil kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, maka dapat diketahui bahwa capaian AKI di daerah ini selama periode 2012-2016 adalah berfluktuasi, yakni sebanyak 133/100.000 KLH pada Tahun 2012 meningkat menjadi 155/100.000 KLH di Tahun 2013 dan sebanyak 71/100.000 KLH pada Tahun 2014. Kemudian meningkat kembali menjadi 73/100.000 KLH di Tahun 2015 dan sebanyak 144/100.000 KLH pada Tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) melahirkan selama periode 2012-2016 belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah karena adanya kendala kondisi geografis daerah ini yang sangat luas dan lokasi pemukiman penduduk yang sangat tersebar sampai ke wilayah-wilayah pelosok dan terpencil yang masih sangat sulit dijangkau, sehingga kemampuan untuk memberikan layanan dalam bentuk bantuan persalinan ibu-ibu melahirkan pada wilayah-wilayah yang sulit tersebut menjadi sangat sulit dilaksanakan selama ini. Demikian pula kemampuan Puskesmas untuk melakukan pendataan kasus kematian ibu melahirkan di wilayah kerjanya masih sangat terbatas karena adanya berbagai kendala yang dihadapi, utamanya kendala kekurangan tenaga medis yang tersedia, sehingga sangat besar kemungkinan adanya kasus kematian ibu melahirkan yang tidak dilaporkan selama ini. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Jayapura senantiasa berupaya pula secara optimal untuk melakukan perbaikan, sehingga dapat diperoleh data yang lebih akurat dan valid berkaitan dengan angka kematian ibu melahirkan di daerah ini dari tahun ke tahun.

c. Angka Kematian Bayi (AKB)

Indikator lainnya yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja pembangunan bidang kesehatan yang mampu dicapai oleh pemerintah Kabupaten Jayapura selama ini adalah angka kasus kematian bayi (AKB). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, maka dapat diketahui bahwa jumlah AKB di daerah ini pada Tahun 2016 mencapai 52 kasus. Angka Kematian Bayi Kabupaten Jayapura tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Angka Kematian Bayi Kabupaten Jayapura tahun 2013-2016

No	Distrik	2013			2014			2015			2016		
		Bayi Lahir	Bayi Lahir Hidup	Bayi Lahir Mati	Bayi Lahir	Bayi Lahir Hidup	Bayi Lahir Mati	Bayi Lahir	Bayi Lahir Hidup	Bayi Lahir Mati	Bayi Lahir	Bayi Lahir Hidup	Bayi Lahir Mati
1	2	6	7	8									
1	Kaureh	64	63	1	61	61	-	45	45	-	33	33	-
2	Airu	6	6	-	7	7	-	2	2	-	19	19	-
3	Yapsi	105	104	1	120	117	3	150	148	2	114	113	1
4	Kemtuk	126	125	1	109	108	1	117	117	-	112	111	1
5	Kemtuk Gresi	114	112	2	101	100	1	89	87	2	178	176	2
6	Gresi Selatan	3	3	-	15	15	-	13	12	1	5	4	1
7	Nimboran	120	120	-	130	130	-	125	125	-	95	95	-
8	Namblong	77	76	1	86	84	2	51	51	-	80	80	-
9	Nimbokrang	205	205	-	198	198	-	159	156	3	228	225	3
10	Unurum Guay	44	44	-	51	51	-	50	50	-	64	63	1
11	Demta	54	50	4	67	66	1	65	63	2	56	52	4
12	Yokari	48	48	-	51	51	-	40	39	1	47	47	-
13	Depapre	91	89	2	93	93	-	108	104	4	120	113	7
14	Raveni Rara	9	8	1	8	8	-	2	2	-	15	12	3
15	Sentani Barat	102	101	1	123	123	1	125	125	-	98	97	1
16	Waibu	91	90	1	226	225	1	201	201	-	196	191	5
17	Sentani	1099	1086	13	1178	1174	4	1210	1204	3	1218	1195	23
18	Ebungfau	53	53	-	42	42	-	52	52	-	37	37	-
19	Sentani Timur	191	190	1	171	171	-	170	167	6	119	119	-
	Jumlah/Total	2602	2573	29	2838	2824	14	2774	2750	24	2838	2782	52

d. Kondisi Gizi Kurang dan Gizi Buruk.

Kondisi gizi masyarakat merupakan pula salah satu variabel yang senantiasa diupayakan peningkatannya dari tahun ke tahun di Kabupaten Jayapura selama ini. Hal ini disebabkan karena kondisi gizi masyarakat merupakan pula salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura selama periode waktu tertentu.

Oleh sebab itu, perkembangan keadaan gizi masyarakat, terutama pada kelompok balita, perlu pula diuraikan pada bagian ini, sebagaimana yang nampak pada tabel 2.42.

Balita gizi buruk di Kabupaten Jayapura Tahun 2015 tidak ada namun masih banyak balita yang berstatus Gizi Kurang berjumlah 166 balita. Jumlah Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk di Kabupaten Jayapura Periode 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Jumlah Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk di Kabupaten Jayapura Periode 2015

No	Nama Distrik	Gizi Baik	Gizi Kurang	Gizi Buruk	Jumlah
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Kaureh	568	3	-	571
2	Airu	85	-	-	85
3	Yapsi	541	19	-	560
4	Kemtuk	342	4	-	346
5	KemtukGresi	389	7	-	396
6	Gresi Selatan	82	4	-	86
7	Nimboran	385	8	-	393
8	Namblong	287	3	-	290
9	Nimbokrang	583	3	-	586
10	UnurumGuay	186	3	-	189
11	Demta	297	14	-	311
12	Yokari	177	7	-	184
13	Depapre	367	4	-	371
14	RaveniRara	100	8	-	108
15	Sentani Barat	988	2	-	990
16	Waibu	623	18	-	641
17	Sentani	4.036	41	-	45.036
18	Ebungfau	233	7	-	240
19	SentaniTimur	685	11	-	696
	Jumlah/Total	6.922	166	-	7.088

Sumber data: Profil Kesehatan Kabupaten Jayapura. 2015

e. Status Penyakit.

Penyakit menular yang cukup besar kasusnya ditemukan di Kabupaten Jayapura adalah ISPA dan Malaria . Oleh sebab itu, jenis penyakit ini telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah Kabupaten Jayapura untuk senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. 10 Besar Jenis penyakit di Kabupaten Jayapura pada periode 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Besar Penyakit Semua Golongan Umur di Kabupaten Jayapura tahun 2016

NO	PENYAKIT	JUMLAH	%
1	ISPA	37.214	29.03
2	MALARIA	25.072	19.56
3	PENY. LAIN SPBA	11.752	9.16
4	PENY. PD SIS OTOT DAN JARINGAN	10.721	8.36
5	KECELAKAAN/ RUDA PAKSA	9.74	7.59
6	INFEKSI PENYAKIT USUS	9.351	7.38
7	INFEKSI MASTOIDS	8.617	6.72
8	PENYAKIT KULIT INFEKSI	6.791	5.29
9	TUKAK LAMBUNG	3.258	2.54
10	PENYAKIT LAINNYA	5.547	4.32
	Jumlah	128.174	100.00

Sumber data: Profile Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2016

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Jenis Penyakit yang dominan dialami pada tahun 2016 adalah ISPA 29.03 persen dan jumlah kasus malaria di Kabupaten Jayapura pada Tahun 2016 mencapai 19.56 persen.

Keadaan ini merupakan indikator bahwa angka kasus ISPA dan malaria di daerah ini masih cukup mengkhawatirkan. sehingga dibutuhkan upaya serius dari pemerintah Kabupaten Jayapura bersama seluruh komponen masyarakat dan Stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan penyakit ISPA dan malaria di tengah masyarakat dengan senantiasa memperhatikan kebersihan lingkungan. utamanya tempat-tempat genangan air yang dapat menjadi sarang bibit nyamuk malaria.

f. Kondisi HIV/AIDS.

Penemuan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura selama ini senantiasa meningkat periode 2012-2016. yaitu sebanyak 197 kasus pada Tahun 2012 yang terdiri dari 136 HIV dan 61 AIDS dan meningkat menjadi 256 kasus di Tahun 2013 yang terdiri dari 60 HIV dan 196 AIDS. kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 228 Kasus pada Tahun 2014 yang terdiri dari HIV 139 kasus dan AIDS 89 kasus. dan meningkat pada Tahun 2015 menjadi 235

Kasus terdiri dari HIV 95 kasus dan AIDS 140 kasus. kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 442 kasus terdiri dari 332 HIV dan 110 AIDS.

Kasus meninggal karena penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura terus mengalami fluktuatif selama periode 2012 -2016 . yaitu sebanyak 11 kasus pada Tahun 2012. meningkat menjadi 24 kasus di Tahun 2013. dan sebanyak 21 kasus pada Tahun 2014. Kemudian menurun di tahun 2015 sebanyak 12 Kasus dan tahun 2016 5 kasus

Faktor risiko penularan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura pada umumnya terjadi melalui hubungan seks/heteroseks. Adanya kecenderungan peningkatan kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Kabupaten Jayapura setiap tahun selama ini. maka pemerintah telah melaksanakan program kegiatan pencegahan penularan penyakit ini dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat serta mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan Stakeholder lainnya. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura selama ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan. VCT atau test sukarela. PMTCT atau pencegahan penularan dari ibu kepada bayinya dan PITC atau inisiatif petugas kesehatan untuk menawarkan test kepada masyarakat.

Selain itu juga dilakukan upaya pemberantasan Infeksi Menular Seksual (IMS) yang merupakan pintu masuk HIV/AIDS. Kasus HIV/AIDS Kabupaten Jayapura tahun 2012 -2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Kasus HIV/AIDS Kabupaten Jayapura tahun 2012 -2016

No.	Kegiatan/	2012	2013	2014	2015	2016
-1	-2	-5				
1	Kasus HIV/	136	60	139	95	332
2	Kasus AIDS/	61	196	89	140	110
3	Kasus HIV Meninggal/	11	24	21	12	5

Sumber data: Profile Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2017.

g. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Kondisi pelayanan rumah sakit Kabupaten Jayapura berdasarkan indikator *Bed Occupancy Rate* (BOR). *Bed Turn Over* (BTO). *Length of Stay* (LOS). *Turn Over Interval* (TOI). *Gross Death Rate* (GDR). dan *Net Death Rate* (NDR) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.45
Kondisi Layanan Kesehatan berdasarkan Indikator Pelayanan Rumah Sakit
di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2016.

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	BOR	71.5	-	65.3	58.0
2	BTO	63.2	53.04	61.08	54
3	LOS	4.1	-	-	20
4	TOI	1.64	6.9	2.1	3
5	GDR	3.0	2.8	3.3	3.3
6	NDR	2.8	0.5	2.4	1.9

Sumber data: Dinas Kesehatan (Profile 2013-2016 menurut perhitungan).

Berdasarkan tabel 2.45 terlihat bahwa BOR (*Bed Occupancy Rate*) atau pemanfaatan tempat tidur oleh pasien di rumah sakit terlihat trendnya meningkat dari sebanyak 71.5 persen pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 58.0 persen di tahun 2016. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena akses pelayanan bagi masyarakat tidak mampu telah dibuka bagi seluruh pasien kelas tiga untuk dirawat di rumah sakit di Papua dan Papua Barat secara gratis (Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2012). Kemudian pada tabel tersebut terlihat pula bahwa frekuensi pemakaian tempat tidur (*Bed Turn Over=BTO*) juga mengalami penurunan di tahun 2016 54 persen. Hal ini memberi gambaran bahwa tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur di rumah sakit yang ada di daerah ini telah melebihi tingkat idealnya, yakni sekitar 40-50 kali. Disebabkan karena rata-rata lama perawatan pasien empat hari, dimana sebagian besar menderita penyakit malaria. Rata-rata lama perawatan pasien (*Length of Stay=LOS*) memberi gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan dengan tingkat ideal selama 6-9 hari. Oleh sebab itu, rata-rata LOS di RSUD Yowari sebesar 4 hari menunjukkan bahwa mutu layanan pada rumah sakit ini belum optimal karena perawatan harus dilakukan di bawah tingkat ideal sebagai akibat banyak pasien penderita penyakit malaria yang membutuhkan fasilitas rawat inap. Rata-rata hari tempat tidur yang tidak terisi (*Turn Over Interval=TOI*) di RSUD Yowari adalah 2 hari, sehingga telah memenuhi syarat idealnya, yakni selama 1-3 hari. Indikator ini memberi gambaran bahwa tingkat efisiensi dalam penggunaan tempat tidur pada RSUD Yowari cukup baik selama ini.

Selanjutnya, dapat dilihat bahwa angka kematian umum untuk setiap seribu penderita keluar (*GDR=Gross Death Rate*) adalah rata-rata 30 perseribu

(Ideal GDR \leq 45perseribu). sedangkan angka kematian pasien \geq 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap seribu penderita (*Net Death Rate*=NDR) terlihat menurun dari tahun ke tahun selama periode 2013-2016. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa mutu layanan kesehatan di RSUD Yowari adalah cukup baik selama ini. Indikator pelayanan rumah sakit yang telah diuraikan di atas cukup baik bila dibandingkan dengan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. namun proses pelayanan belum sesuai dengan harapan indikator pelayanan RSUD Yowari cukup baik karena tidak ada pesaing di Kabupaten Jayapura.

Untuk menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura. maka ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar di daerah ini sangat dibutuhkan. Di tahun 2016. telah tersedia 19 Puskesmas dan 1 rumah Sakit Umum Daerah. yakni RSUD Yowari. yang telah dilengkapi dengan fasilitas pelayanan VCT. PMTCT dan PITC. Di antara 19 Puskesmas yang sudah ada di daerah ini. sebanyak 15 Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit rujukan ARV (*Anti Retro Viral*) bersama RSUD Yowari. Sarana pelayanan kesehatan masyarakat lainnya yang tersedia di daerah ini adalah 58 Puskesmas Pembantu (Pustu) di tahun 2016. 21 Polindes. 4 Pusling Air dan 20 Pusling Darat. Untuk lebih jelasnya. dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Perkembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016.

No.	Jenis Sarana dan Prasarana/Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2	Puskesmas	19	19	19	19	19
3	Pustu	52	52	53	58	58
4	Polindes	14	14	14	21	21
5	Balai Pengobatan	4	4	2	7	5
6	Praktek dokter	10	10	10	51	51
7	Praktek Bidan	4	4	4	-	2
8	Pusling Air	3	3	3	4	4
9	Pusling Darat	17	17	17	19	20
10	Posyandu	200	200	199	203	209
11	Pengobatan Tradisional	7	7	7	4	4
12	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1
13	Toko Obat	7	7	7	7	7
14	Apotek	12	12	6	22	22
15	Industri Obat Tradisional	1	1	1	1	1

16	Industri Kecil Obat Tradisional	2	2	3	3	3
	<i>Jumlah</i>	354	354	347	417	402

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura. 2017.

Untuk menunjang layanan kesehatan prima di Kabupaten Jayapura. maka sangat dibutuhkan pula kehadiran tenaga kesehatan. Adapun tenaga kesehatan yang telah ada di Kabupaten Jayapura tahun 2016 sebanyak 391 orang yang terdiri dari tenaga medis (dokter/dokter Gigi) 24 orang. perawat. termasuk perawat Gigi sebanyak 174. bidan 74 orang. Farmasi 18 orang. Gizi 27 orang. Teknis medis/analisis 28 orang. Sanitasi 28 orang. Kesehatan Masyarakat 18 orang.

Adapun rasio tenaga medis terhadap penduduk dari masing-masing tenaga per seratus ribu penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Rasio Tenaga Medis Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016.

No.	Tenaga Medis/	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dokter Umum/ <i>Doctor</i>	23	20	11	51	20
2	Dokter Gigi/ <i>Dentist</i>	4	4	3	-	4
	Jumlah	27	24	14	51	24
NO	<i>Paramedical Personal</i>					
1	Perawat/ <i>Nurse</i>	174	160	111	307	174
2	Bidan/ <i>Midwife</i>	93	96	79	95	74
	Jumlah	267	256	190	402	248
No	Tenaga Medis/					
1	Gizi/ <i>Nutrient</i>	41	29	26	35	27
2	Kesehatan Lingkungan/	31	27	16	27	28
3	Analisis/ <i>Analyst</i>	21	24	22	41	28
4	Farmasi/ <i>iPharmacy</i>	16	18	8	19	18
5	Kesehatan Masyarakat/	23	28	12	29	18
	Jumlah	132	126	84	151	119
	Total	426	406	288	604	391

Sumber data: DDA IPM Kabupaten Jayapura 2017.

Selanjutnya. dapat diuraikan mengenai keadaan angka kesakitan yang terjadi di Kabupaten Jayapura sebagai salah satu indikator layanan kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura selama ini. Angka kesakitan merupakan rasio antara jumlah orang yang mengalami keluhan kesehatan terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Kesakitan yang dimaksud disini bukan jenis penyakit tertentu. tapi satu/beberapa jenis keluhan

kesehatan karena satu jenis penyakit. Jenis keluhan ada yang dipengaruhi musim. ada juga yang sifatnya menahun. Pada tahun 2016, 15.84 persen penduduk Kabupaten Jayapura mempunyai keluhan kesehatan (dari 100 penduduk, 16 diantaranya mengalami keluhan kesehatan). Jika dilihat dari rata-rata lama sakitnya, rata-rata lama sakit penduduk Kabupaten Jayapura adalah sekitar 6 hari. Hal ini menunjukkan penduduk tersebut mengalami kerugian materil (ekonomi) rata-rata selama 6 hari. Adapun persentase penduduk Kabupaten Jayapura dengan keluhan kesehatan dan rata-rata lama sakit dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Persentase Penduduk Kabupaten Jayapura
Dengan Keluhan Kesehatan dan Rata-Rata Lama Sakit Tahun 2016.

<i>Indikator</i>	<i>Lk</i>	<i>Pr</i>	<i>Total</i>
<i>Angka kesakitan per 100 penduduk</i>	<i>15.44</i>	<i>16.29</i>	<i>15.84</i>
<i>Rata-rata lama sakit</i>	<i>6.84</i>	<i>5.56</i>	<i>6.20</i>

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Masalah kesehatan adalah gangguan kesehatan yang dinyatakan dalam ukuran kesakitan (Mordibitas) dan kematian (Mortalitas). Kesehatan merupakan unsur penting dalam kesejahteraan hidup, baik perorangan, kelompok dan masyarakat. Perubahan masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat pada umumnya digambarkan dengan perubahan “Pola Penyakit dan Jumlah Kasus Penyakit” yang dicatat dan diamati di fasilitas-fasilitas kesehatan dalam bentuk angka dan data, sehingga cukup baik untuk dijadikan bahan analisis tolak ukur derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Pola sepuluh besar penyakit bagi semua golongan umur bila dibanding tahun lalu mengalami perubahan baik dari urutan sepuluh besar maupun jumlah kasus secara keseluruhan dimana terjadi penurunan dari 127.057 kasus penyakit tahun 2015 menjadi 128.174 kasus di tahun 2016. Dari 10 besar penyakit di tahun 2016 dibawah dapat kita lihat bahwa penyakit terbanyak masih ISPA dengan 37.214 kasus atau 29.03 persen dan presentase kasus malaria berkurang yaitu dari 22.911 kasus pada tahun 2015, di tahun 2016 menjadi 25.072 kasus. Adapun urutan dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Jumlah Kasus Kesakitan atau penyakit di Kabupaten Jayapura

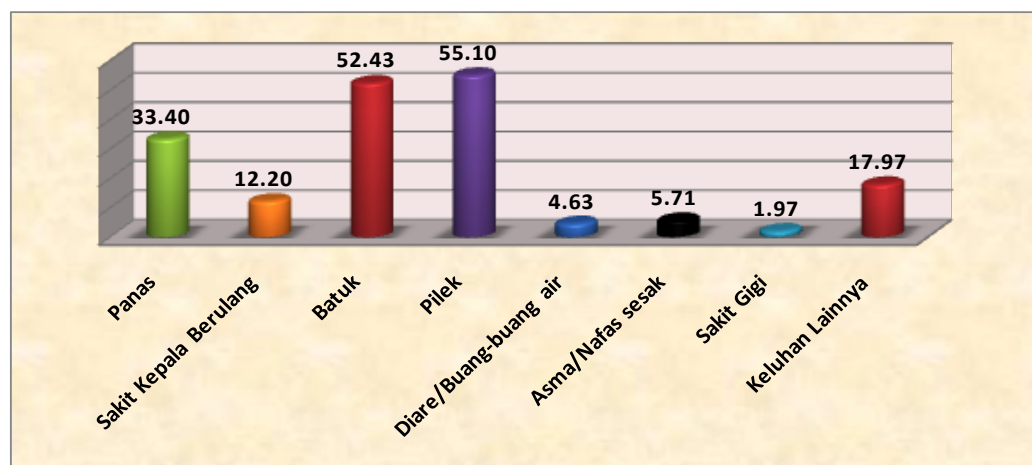
Tahun 2012-2016.

No	Penyakit	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jumlah	Per sen	Jumlah	Per sen	Jumlah	Per sen	Jumlah	Per sen	Jumlah	Per sen
1	SPBA	41.541	37.49	43.471	33.64	43.542	34.7	10.260	8.08	11.752	9.16
2	ISPA	-	-	-	-	-	-	37.571	29.57	37.214	29.03
3	Malaria	23.195	20.93	28.119	21.76	22.558	18	25.911	20.39	25.072	19.56
4	Penyakit pada sistem otot dan jaringan	11.309	10.21	14.143	10.94	14.147	11.3	10.305	8.11	10.721	8.36
5	penyakit kulit	10.029	9.05	10.881	8.42	-	-	9.351	7.36	6.791	5.29
6	Gastritis	5.543	5	5.929	4.58	-	-	-	-	-	-
7	Diare	4.974	4.49	3.932	3.04	3.892	3.1	-	-	-	-
8	Kecelakaan	3.187	2.88	2.958	2.28	3.026	2.4	8.202	6.46	9.740	7.59
9	Hipertensi	1.504	1.36	1.853	1.43	1.861	1.5				
10	Konyungtitifitis	1.056	0.95	-	-	4.321	3.4	-	-	-	-
11	Scabies	1.038	0.94	-	-	10.891	8.7	-	-	-	-
12	Infeksi Usus	-	-	1.111	0.83	1.048	1.8	6.577	5.18	9.351	7.38
13	Penyakit gigi dan rongga mulut	-	-	943	0.72	982	0.8	-	-	-	-
14	Mastoid	-	-	-	-	-	-	9.645	7.59	8.617	6.72
15	Tukak Lambung	-	-	-	-	-	-	3.758	2.96	3.258	2.54
16	Penyakit lainnya	7.421	6.7	18.989	14.68	19.040	15.2	5.477	4.31	5.547	4.32
	total	110.797	100	132329	100	127.674	100	127.057	100	128.174	100

Sumber data: *Profile Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2017*

Grafik 2.17

Persentase Penduduk Kabupaten Jayapura yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Bulan Referensi. Dirinci Menurut Jenis Keluhan Kesehatan Yang Dialami Tahun 2013.



Sumber data : *Profil Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2014.*

Beberapa upaya yang telah dilakukan selama ini untuk mengurangi keluhan kesehatan. antara lain dengan berobat jalan dan berobat sendiri. Berobat jalan dilakukan penduduk dengan mendatangi tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan. seperti Puskesmas. Pustu. dan sebagainya.

h. Rasio Posyandu/Satuan Balita.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 mencapai 209 unit dan jumlah balita sebanyak 10.522 balita. sehingga rasio Posyandu terhadap balita mencapai 19.86 persen. Dilihat dari rasio ini. maka keberadaan Posyandu sudah cukup baik. namun masih ada disparitas yang cukup jauh antara daerah yang padat dan jarang penduduknya. Perkembangan Posyandu/satuan balita di Kabupaten Jayapura selama periode 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah posyandu	200	200	199	203	209
2.	Jumlah balita	13.306	11.805	11.805	10.521	10.522
3.	Rasio	15.03	16.94	16.86	19.29	19.86

Sumber data: DDA BPS Kabupaten Jayapura 2017 (data diolah).

Kasus kematian ibu hamil/bayi pada saat melahirkan/persalinan di Kabupaten Jayapura selama ini pada umumnya (lebih dari 80 persen) disebabkan karena tiga masalah pokok. yaitu: pendarahan (40-60 persen). infeksi jalan lahir (20-30 persen). dan keracunan kehamilan (20-30 persen). Ketiga faktor penyebab tersebut berkaitan erat dengan status gizi. higienis-sanitasi. kesadaran hidup sehat. dan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran penolong kelahiran sangat penting bagi keselamatan bayi dan ibu yang melahirkan. Namun demikian. kendala masih senantiasa dihadapi di lapangan. yakni bahwa tidak semua masyarakat mampu membiayai persalinan dengan dibantu oleh dokter/bidan karena keterbatasan pendapatan mereka. meskipun telah ada kesepahaman bahwa keberhasilan persalinan akan menunjang angka harapan hidup.

Selanjutnya. dapat dilihat Rasio Puskesmas. Poliklinik dan Pustu dengan jumlah Penduduk di Kabupaten Jayapura. Rasio ini sangat penting diuraikan untuk memperlihatkan ketersediaan sarana kesehatan di daerah ini dan kemampuan layanan yang dapat diberikan kepada seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Jayapura.

Perkembangan keadaan rasio Puskesmas. Polindes dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura selama periode 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 2.51. Dilihat bahwa rasio puskesmas per satuan penduduk pada tahun

2012 mencapai 0.163 persen dan pada tahun 2016 sebesar 0.153 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mampu dilayani setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Jayapura meningkat selama periode 2012-2016. sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat keterjangkauan layanan kesehatan masyarakat di daerah ini melalui sarana Puskesmas telah mengalami peningkatan secara signifikan selama periode 2012-2016. Salah satu faktor pendukungnya tentu tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran masyarakat di daerah ini untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatannya bersama keluarga pada Puskesmas yang telah tersedia tenaga medis dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit yang dikeluhkan. Kondisi ini seiring dengan hadirnya sarana Puskesmas di setiap distrik yang ada di daerah ini sebagai wujud pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat di bidang kesehatan.

Tabel 2.51
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Di Kabupaten Jayapura Periode 2012-2016.

No.	Jenis Sarana dan Prasarana/Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Puskesmas	19	19	19	19	19
2	Polindes	14	14	14	21	21
3	Pustu	52	52	53	58	58
Jumlah 1 s/d 3		85	85	86	98	98
4	Jumlah Penduduk	116.491	118.789	119.830	121.410	123.780
5	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0.163	0.160	0.159	0.156	0.153
6	Rasio Polindes per satuan penduduk	0.120	0.118	0.117	0.173	0.170
7	Rasio Pustu per satuan penduduk	0.446	0.438	0.442	0.478	0.469
8	Rasio Puskesmas, Polindes dan Pustu per satuan penduduk	0.730	0.716	0.718	0.807	0.792
9	Jumlah Distrik	19	19	19	19	19
10	Jumlah Kampung/Kelurahan	144	144	144	144	144
11	Rasio Puskesmas Per distrik	1	1	1	1	1

Sumber data: DDA Kabuapten Jayapura 2017

i. Rasio dokter per satuan penduduk.

Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu yang telah ditetapkan dalam SPM kesehatan, maka idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Untuk mengetahui rasio dokter dengan jumlah penduduk Kabupaten Jayapura, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.52.

Sesuai tabel 2.52 dapat dilihat bahwa rasio jumlah dokter di Kabupaten

Jayapura pada Tahun 2012 mencapai 1 : 8.432 kemudian meningkat menjadi 1:2.878 pada Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa beban dokter dalam penanganan kebutuhan layanan kesehatan di Kabupaten Jayapura masih kurang walaupun terjadi peningkatan. namun harus mencapai beban ideal yakni setiap dokter harus melayani jumlah penduduk yang lebih dari 2.500 orang. sebagaimana kondisi ideal yang telah ditentukan dalam SPM pendidikan. Jumlah Dokter di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Jumlah Dokter di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016.

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Dokter	14	10	22	72	43
2.	Jumlah Penduduk	118.046	121.222	119.383	121.410	123.780
3.	Persentase dokter per penduduk	0.118	0.082	0.184	0.593	0.347
4.	Rasio dokter per penduduk	1:8.432	1:12.122	1:5.426	1:1.686	1:2.878

Sumber data: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2017.

j. Rasio Bidan Per Satuan Penduduk

Jumlah bidan yang ada di Kabupaten Jayapura pada Tahun 2016 adalah 87 orang dengan jumlah penduduk 123.780 jiwa (meurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura). Berarti rasio bidan per satuan penduduk di daerah ini mencapai 1 : 1.422 yang berarti bahwa setiap bidan melayani sebanyak 1.422 penduduk. Berdasarkan data ini. maka dapat dikatakan bahwa beban setiap bidan yang ada di daerah ini masih sangat berat. sehingga belum mampu melayani secara keseluruhan kebutuhan layanan kesehatan. khususnya bagi ibu hamil dan yang akan melahirkan. Akibatnya. tentu masih cukup banyak jumlah ibu-ibu di daerah ini yang terpaksa memenuhi kebutuhan layanan kesehatannya pada saat hamil dan persalinan melalui tenaga dukun. Jumlah Bidan di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Jumlah Bidan di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016.

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Bidan	21	94	66	95	87
2.	Jumlah Penduduk	118.046	121.222	119.383	121.410	123.780
3.	Persentase bidan per penduduk	0.178	0.775	0.552	0.782	0.702
4.	Rasio bidan per penduduk	1:5.621	1:1.290	1:809	1:1.278	1:1.422

Sumber data: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2017.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

a. Jalan dan Jembatan.

Panjang ruas jalan di Kabupaten Jayapura Tahun 2017 mencapai 1132,14 Km yang terdiri dari panjang ruas jalan nasional 156,72 Km. panjang ruas jalan Provinsi 356,74 Km dan panjang ruas jalan kabupaten 618.68 Km, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Panjang Ruas Jalan Menurut Kewenangan Pengelolaan
di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016 (Km)

TAHUN	KEWENANGAN			TOTAL
	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN	
2013	156,72	356,74	618,68	1132,14
2014	156,72	356,74	618,68	1132,14
2015	156,72	356,74	618,68	1132,14
2016	156,72	356,74	618,68	1132,14
2017	156,72	356,74	618,68	1132,14

Sumber data: Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Jayapura Tahun 2017

Kinerja layanan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada beberapa indikator yang antara lain penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan. Panjang jalan yang telah dibangun di Kabupaten Jayapura sampai pada Tahun 2016 mencapai 618.68 Km. yang terdiri dari jalan aspal dengan panjang mencapai 283.37 Km atau 45.80 % dari total panjang jalan. jalan kerikil sepanjang 283.23 Km atau 45.78%. dan jalan tanah sepanjang 197.20 Km atau 31.87 % dari total panjang jalan yang telah dibangun. Untuk lebih jelasnya panjang dan kondisi jalan di Kabupaten Jayapura tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Panjang dan Kondisi Jalan di Kabupaten Jayapura Tahun 2012 – 2016

No.	Tahun	Pajang Jalan	Permukaan Jalan					
			Aspal/Beton		Kerikil		Tanah	
			KM	%	KM	%	KM	%
1	2013	618,68	138,11	23,77	284,37	48,95	196,2	27,28
2	2014	618,68	138,11	23,77	284,37	48,95	196,2	27,28
3	2015	618,68	238,25	45,8	183,23	45,78	197,2	31,87
4	2016	618,68	238,25	45,8	183,23	45,78	197,2	31,87
5	2017	618,69	238,25	45,81	183,23	45,79	197,21	31,88

Sumber data: Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Jayapura. 2017.

Dari panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jayapura sampai dengan tahun 2016 yaitu 618.68 km. dimana 378.07 km dalam kondisi baik. 271.92 km dalam kondisi rusak ringan dan 48.17 km dalam kondisi rusak

berat. Panjang Ruas Jalan dan Kondisi Jalan Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.56

Panjang Ruas Jalan dan Kondisi Jalan Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016

TAHUN	PANJANG JALAN	KONDISI JALAN		
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
2013	618,68	154,42	260,03	204,23
2014	618,68	175,35	247,8	195,53
2015	618,68	220,53	214,05	184,1
2016	618,68	266,75	281,08	70,85
2017	618,68	378,07	192,44	48,17

Sumber dana: Dinas PU dan Perumahan Tahun 2017

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

a. Perumahan

Salah satu bentuk layanan umum yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura kepada masyarakat adalah perbaikan pemukiman dan pembangunan perumahan guna membantu penduduk yang tidak atau kurang mampu membangun rumah yang layak huni.

Untuk itu, pada bagian ini penting diuraikan mengenai kondisi permukiman dan perumahan di Kabupaten Jayapura saat ini. Total rumah yang ada di Kabupaten Jayapura pada Tahun 2014 mencapai 29.528 unit, dimana 15.033 buah atau 50.91 persen di antaranya merupakan rumah layak huni dan sisanya sebanyak 14.495 buah atau 49.09 persen dari total merupakan rumah yang tidak layak huni. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi rumah yang ada di Kabupaten Jayapura pada Tahun 2014 seperti yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57

Kondisi Rumah di Kabupaten Jayapura Tahun 2014.

No	Distrik	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Jumlah
1	Kaureh	760	3075	3835
2	Airu	196	243	439
3	Yapsi	631	818	1449
4	Kemtuk	107	704	811
5	KemtukGresi	386	591	977
6	Gresi Selatan	22	283	305
7	Nimboran	410	560	970
8	Namblong	240	488	728
9	Nimbokrang	609	1080	1689
10	UnurumGuay	58	452	510
11	Demta	159	579	738
12	Yokari	101	497	598
13	Depapre	155	518	673

14	Ravenirara	18	315	333
15	Sentani Barat	533	465	998
16	Waibu	230	1055	1285
17	Sentani Barat	8871	1368	10239
18	Ebungfauw	115	622	737
19	Sentani Timur	1432	782	2214
Jumlah		15033	14495	29528

Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura 2016.

b. Kondisi Air Bersih.

Penggunaan air bersih sebagai sumber air minum dipengaruhi oleh beberapa faktor. antara lain tersedianya fasilitas air bersih seperti air leding. tingkat pengetahuan penduduk tentang kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan juga dengan tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi penduduk. Oleh karena itu. persentase rumah tangga yang sudah menggunakan sumber air minum higienis di suatu daerah dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan penduduk.

Pada tahun 2016 rumah tangga di Kabupaten Jayapura yang telah menggunakan fasilitas air bersih untuk minum sebanyak 77.90 %. yaitu 30.39 % dari mata air terlindung. 26.07 % dari air isi ulang . dan 14.19 % dari sumur bor/pompa.

Sanitasi rumah sangat bergantung pada sistem pembuangan air besar. ini juga berkaitan erat dengan resiko kesehatan. Tempat/cara pembuangan yang kurang baik akan menyebabkan lingkungan tempat tinggal tercemar. baik pencemaran udara maupun pencemaran sistem sanitasi rumah. Sarana pembuangan air besar yang baik seharusnya memiliki penampungan akhir yang terlindung. yaitu tersedianya tangki-tangki penampungan kotoran.

Sekitar 73.39% rumah tangga di Kabupaten Jayapura memiliki tempat buang air besar sendiri. Persentase rumah tangga yang menggunakan tempat buang air besar dengan penampungan akhir tangki septik adalah 36.82 %. Sedangkan sisanya menggunakan kolam/sawah. sungai. lubang tanah. dan lainnya sebagai tempat buang air besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk tentang kesehatan dan kebersihan tempat pembuangan akhir masih rendah.

Jarak ideal antara sumber air minum dengan tempat pembuangan akhir tinja seharusnya minimal 10 meter. batasan tersebut untuk menghindari

terkontaminasinya sumber air minum dari limbah rumah tangga. Berdasarkan data Susenas 2010-2016. 65.70 persen rumah tangga memiliki tempat pembuangan akhir tinja yang berjarak aman dengan sumber air minum.

5. Ketentraman. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tindak kriminal tertangani pada tahun 2012-2015 sebanyak 2.457 kasus. dengan jumlah tindak kriminal tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2014. yakni 728 kasus dengan angka kriminalitas yang tertangani yaitu 61 kasus tiap tahunnya. Pada tahun 2015 tindakan kriminal mengalami penurunan dari 728 kasus di tahun 2014 menjadi 428 kasus. dengan angka kriminalitas tertangani 35 kasus. Angka kriminalitas tertangani yang masih rendah mengharuskan pemerintah untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mengurangi tingkat potensi kejahatan/kriminal yang terjadi melalui penguatan jalinan kerjasama dengan institusi terkait keamanan seperti pihak TNI POLRI. dan Kelembagaan masyarakat seperti Kelembagaan desa. Kelembagaan pemuda. Kelembagaan keagamaan dan Kelembagaan sosial guna meningkatkan kewaspadaan publik terhadap peluang terjadinya kejahatan di kalangan masyarakat. Angka Kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Jayapura dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.58
Angka Kriminalitas Tertangani Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2015

No	Jenis Kejahatan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Dalam 1 Tahun	573	728	728	428
2	Jumlah Penduduk	119.117	118.789	119.838	121.410
	Angka Kriminalitas Tertangani	48	61	61	35

Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura. 2016

Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi ketika kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum berkurang adalah meningkatnya tingkat kecelakaan lalulintas. Tingkat kecelakaan lalulintas di Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 adalah 69 kasus. dengan tingkat kerugian mencapai Rp 500.650.000.-. dan korban meninggal dunia 35 orang. luka berat 25 orang dan luka ringan 10 orang. jika dibandingkan dengan jumlah kasus kecelakaan di tahun 2015. maka telah terjadi tingkat kecelakaan sebesar 13 kasus yakni dari 56 kasus menjadi 69 kasus dengan

kerugian materiil Rp. 500.650.000.-. Jumlah Kecelakaan Lalulintas Di Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Jumlah Kecelakaan Lalulintas Di Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Kerugian Jiwa			Nilai Kerugian Materiil (Rp)
		MD	LB	LR	
2012	66	48	48	17	685.000.000
2013	42	21	41	10	723.500.000
2014	42	21	41	10	723.500.000
2015	56	15	36	34	899.600.000
2016	69	35	25	10	500.650.000

Sumber: DDA BPS Kabupaten Jayapura. 2017

Selain itu, terdapat pula kasus lain yang sangat berpengaruh terhadap kredibilitas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yaitu temuan dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah. Hingga tahun 2017 terdapat Persentase tindak lanjut temuan yang ditangani oleh inspektorat sebesar 61 persen, pelanggaran pegawai yang di tangani Inspektorat di tahun 2017 sebesar 0.08 persen dan Jumlah temuan BPK sebanyak 70 temuan. Selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Jumlah Kegiatan Pengawasan Inspektorat di Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Pengawasan					
1	Persentase tindak lanjut temuan	10,00	15,00	11,00	12,00	61,00
2	Persentase pelanggaran pegawai	0	0	0	0	0,08
3	Jumlah temuan BPK	60	65	66	67	70

Sumber data: Inspektorat Kabupaten Jayapura. 2017.

6. Sosial.

Penanganan dan perlindungan sosial di Kabupaten Jayapura dalam rangka pemberdayaan sosial telah dilaksanakan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Keadaan PMKS di daerah ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Keadaan PMKS di Kabupaten Jayapura Tahun 2015-2016

NO	JENIS PMKS	JUMLAH	
		2015	2016
1	Anak Balita Terlantar	557	594
2	Anak Terlantar	1.027	336
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	278	278
4	Anak Jalanan	-	-
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	12	12
6	Anak Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	-	-
7	Anak yang memerlukan perlindunagn khusus	379	379
8	Lanjut Usia Terlantar	937	937
9	Penyandang Disabilitas	878	878

10	Tuna Susila	189	189
11	Geladangan	-	-
12	Pengemis	-	-
13	Pemulung	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-
15	Bekas Warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLP)	389	389
16	Penyandang HIV/AIDS	1266	1266
17	Program Penyalahgunaan NAPZA	196	196
18	Korban Trafficking	-	-
19	Korban Tindak kekerasan	34	34
20	Pekerjaan Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	44	44
21	Korban Bencana Alam	16036	16036
22	Korban Bencana Sosial/pengungsi	8652	8652
23	Perempuan rawan social ekonomi	379	379
24	Keluarga Fakir Miskin	38286	38286
25	Keluarga bermasalah Sosial Komunitas	27	27
26	Adat terepencil (KAT)	18825	18825

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura 2017

Pada tabel diatas dapat dilihat keadaan penanganan dan perlindungan sosial dengan melibatkan berbagai jenis pekerja sosial. telah dilakukan pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain itu. diberikan pula bantuan bagi korban bencana dan rawan bencana. bantuan bagi fakir miskin dan bantuan pembinaan bagi yayasan sosial.

Secara khusus. dilaksanakan juga pembinaan dan pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada sepuluh distrik di Kabupaten Jayapura. KAT merupakan kelompok masyarakat berbagai etnis yang bertempat tinggal di daerah pedalaman/lembah/pesisir yang lokasinya terisolir dan dalam kelompok-kelompok kecil dengan kondisi kehidupan yang masih sangat sederhana sehingga mereka mengalami ketertinggalan dan keterbelakangan.

Tabel 2.62
Data capaian bidang sosial di Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,46	4,37	4,86	6,51	6,23
	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	3.560	3.489	3.883	5.201	4.975
	Jumlah PMKS seharusnya menerima bantuan	79.888	79.888	79.888	79.888	79.888
2	Persentase PMKS yang tertangani	6,74	6,61	7,35	9,85	9,42
	Jumlah PMKS yang tertangani	5.385	5.278	5.874	7.866	7.526
	Jumlah PMKS yang ada	79.888	79.888	79.888	79.888	79.888
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	3,81	3,73	4,16	5,56	5,32
	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	609	596	664	889	850
	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya dapat bantuan	15.978	15.978	15.978	15.978	15.978
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha	54,55	54,55	63,64	86,36	95,45

	bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya					
	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis x 100 %	12	12	14	19	21
	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	22	22	22	22	22
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	0	0	0	0	0
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	12,08	8,73	18,13	28,73	32,33
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap			100		100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	9,17	9,42	10,71	11,69	11,69

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, 2017

2.3.2. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.

1. Tenaga Kerja

Data ketenagakerjaan merupakan salah satu informasi penting yang diperlukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia dapat menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran dan pada akhirnya akan dapat pula menimbulkan peningkatan angka kemiskinan dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.63
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Jayapura tahun 2014-2016

Jenis Kelamin	Tahun/Persen					
	2014	%	2015	%	2016	%
Laki-laki	904	40.65	638	62.30	525	57.25
Perempuan	1.320	59.35	386	37.70	392	42.75
Jumlah	2.224	100.00	1.024	100.00	917	100.00

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura tahun 2017 (Data diolah).

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah pencari di Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 sebanyak 917 orang terdiri dari pencari kerja laki-laki sebanyak 525

orang (57.25 persen) dan perempuan sebanyak 392 orang (42.75 persen) dari total jumlah pencari kerja terdaftar.

Tabel 2.64
Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Jayapura Tahun 2016

Uraian	Jenis Pendidikan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	D.I.II.III	S1	S2	
Jumlah pencari kerja	4	13	465	184	247	4	917

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura tahun 2017 (Data diolah).

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah pencari di Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 sebanyak 917 orang. pencari kerja terbanyak di dominasi tamatan SLTA sebanyak 465 orang dan sedikit dari tamatan SD sebesar 4 orang.

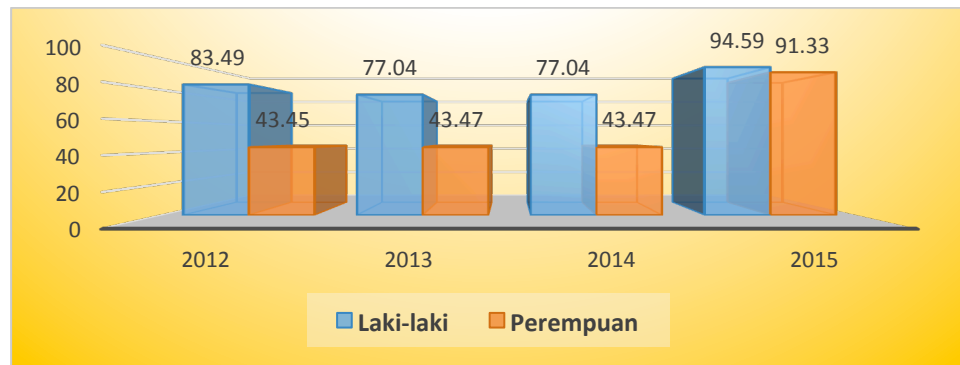
Dilihat dari sisi gender. TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibanding dengan TPAK perempuan. yaitu masing-masing sebesar 94.59 persen dan 91.33 persen pada tahun 2015. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi masih lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini terkait dengan budaya/tradisi masyarakat Kabupaten Jayapura yang pada umumnya menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dalam kapasitas mereka sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga. Perkembangan keadaan TPAK di Kabupaten Jayapura selama periode 2012-2015 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2.65
Perkembangan keadaan TPAK di Kabupaten Jayapura selama periode 2012-2015

Penduduk / Population	TPAK				TKK			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
Laki-laki	83.49	77.04	77.04	94.59	91.79	94.42	94.42	85.15
Perempuan	43.45	43.47	43.47	91.33	91.59	91.80	91.80	87.66
Jumlah / Total	64.84	61.52	61.52	93.30	91.73	93.57	93.57	85.97

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura. 2017

Grafik 2.18
TPAK Dirinci Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Jayapura
Tahun 2012-2015



Sumber data: Sakernas. 2016

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa TPAK penduduk laki-laki di Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan dalam periode 2012-2015, yakni sebesar 11.10 persen, pada Tahun 2012 sebesar 83.49, tahun 2015 sebesar 94.59. TPAK perempuan dari 43.45 persen di Tahun 2012 menjadi 91.33 persen di tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 47.88 persen. Apabila dilihat secara keseluruhan, maka TPAK di Kabupaten Jayapura pada Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 53.43 persen.

Pada tabel 2.63 dapat dilihat tenaga kerja yang terserap di masing-masing kelompok lapangan usaha ekonomi di Kabupaten Jayapura pada Tahun 2015. Pada tabel ini terlihat bahwa lapangan usaha primer merupakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja paling banyak, dimana tenaga kerja yang terserap pada lapangan usaha ini mencapai 22.634 orang. Tenaga kerja di kelompok lapangan usaha sekunder 4.794 orang dan tersier 17.358 orang.

Hal ini tidak terlepas dari keadaan tingkat pendidikan yang dimiliki para tenaga kerja yang bekerja di daerah ini yang masih didominasi dengan tingkat pendidikan sampai ke tingkat pendidikan dasar, yakni SLTP ke bawah, sehingga cukup sulit untuk terserap pada lapangan usaha formal yang disediakan pada lapangan usaha sekunder dan tersier.

Tabel 2.66
Persentase Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Jayapura
Dirinci Menurut Kelompok Lapangan usaha Ekonomi Tahun 2015

No.	Kelompok Lapangan usaha	Lk	Pr	Lk+Pr
1	2	-3	-4	-5
1	Primer			
	Pertanian			
	Pertambangan & penggalian	14.820	7.814	22.634
2	Sekunder			

<i>S</i>	Industri			
	Listrik & air bersih	4.395	399	4.794
	Konstruksi			
3	Tersier			
	Perdagangan. hotel & restoran			
	Transportasi & telekomunikasi	10.741	6.617	17.358
	Keuangan. persewaan & jasa perusahaan			
	Jasa-jasa			
	Jumlah	29.956	14.830	44.786

SSumber data :Kabupaten Jayapura. Sakernas 2016

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Pemberdayaan perempuan.

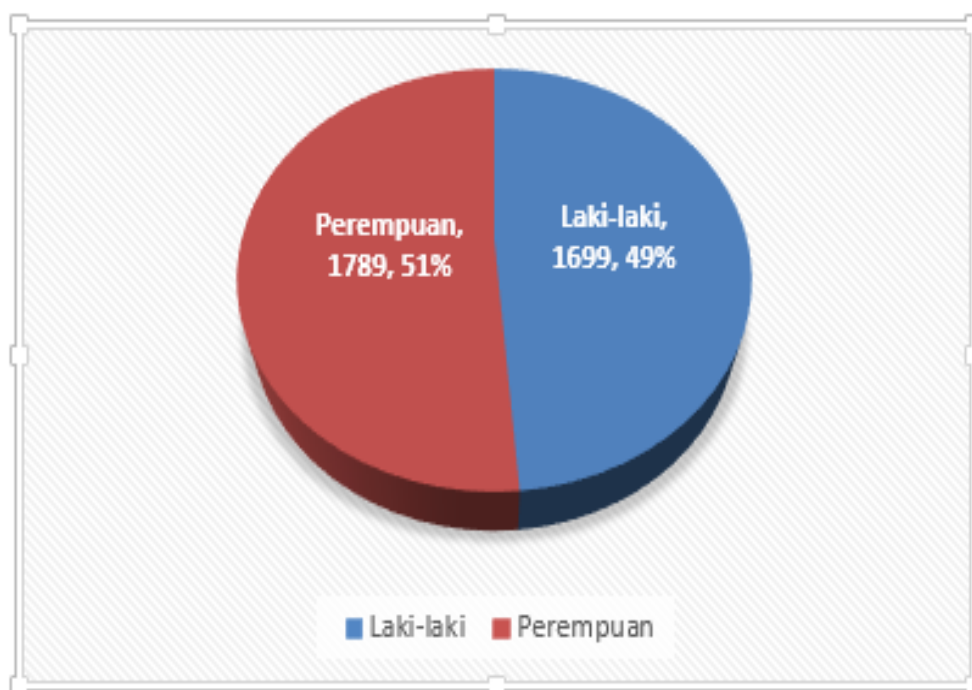
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura sepatutnya berdampak secara menyeluruh pada segala bidang hingga dapat tercipta kesejahteraan pembangunan yang integral. termasuk didalamnya adalah pembangunan daerah tanpa mengesampingkan peran perempuan. Pentingnya keterlibatan dan partisipasi perempuan tercantum perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan Indonesia di atur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

Wanita semestinya diberdayakan sebaik mungkin dalam mendukung aktifitas pembangunan baik yang bersifat nasional maupun daerah. dengan demikian pemerintah harus meningkatkan Kapasitas dan kualitas perempuan dalam melaksanakan perannya sebagai pelaku pembangunan yang dapat memberikan sumbangsih baik pada bidang ekonomi. sosial. dan politik serta budaya.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Jayapura terkait pemberdayaan perempuan tidaklah terlepas dari apa yang telah dilakukan pemerintah hingga

tahun 2015. sehingga penentuan kebijakan pembangunan tanpa mengesampingkan hak-hak perempuan dapat diberlakukan secara tepat guna.

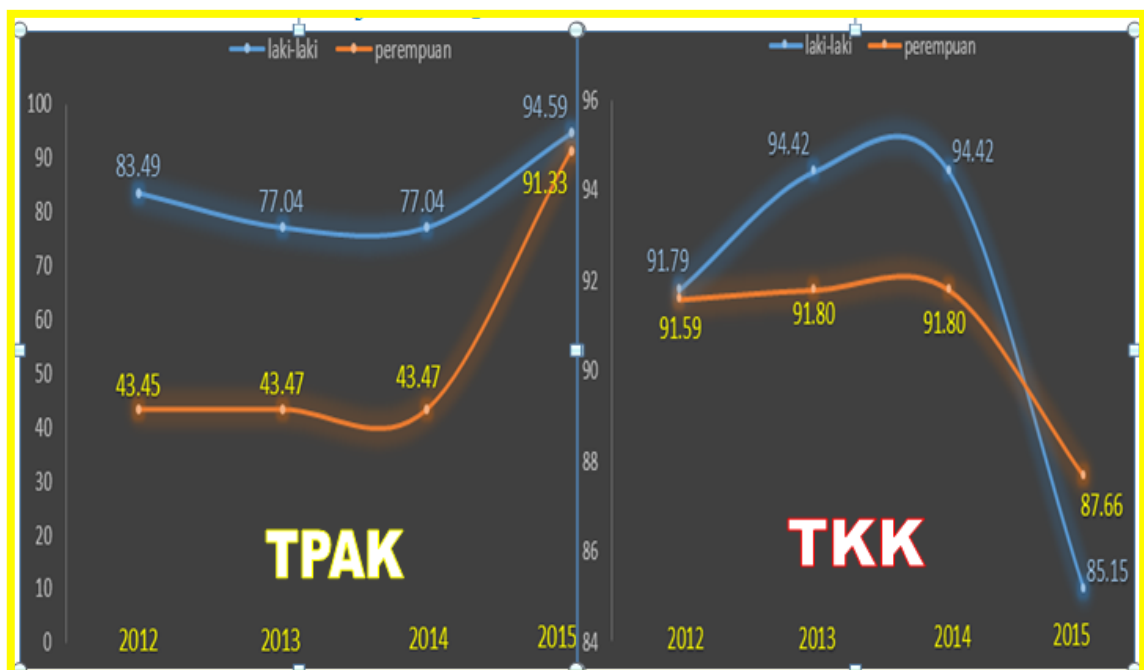
Grafik 2.19
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Jayapura Tahun 2017



Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura. 2016

Hingga tahun 2015. terdapat 1.789 pegawai atau 51 persen pegawai perempuan yang aktif memberikan sumbangsih pada bidang pemerintahan. kuantitas ini telah melewati jumlah laki-laki yang berperan pada bidang yang sama. yakni 1.699 pegawai atau 49 persen.

Grafik 2.20
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Tingkat Kesempatan
Kerja Perempuan Dan Laki-laki Tahun 2012-2015



Sumber Data: BPS Kabupaten Jayapura tahun 2016

Jika dilihat berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja, pada tahun 2015, TPAK perempuan pada Kabupaten Jayapura masih rendah dibandingkan TPAK pria, yakni 91.33 persen dibanding 94.59 persen. Sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang dimiliki oleh perempuan adalah 91.80 persen. tingkatan ini masih lebih rendah dibandingkan TKK laki-laki yakni 94.42 persen. Namun, TKK perempuan dapat dikatakan cukup tinggi di tahun 2015 sebesar 87.66 persen walaupun menurun dari tahun 2014.

Dengan demikian pemerintah perlu menentukan kebijakan-kebijakan, sasaran, tujuan dan strategi guna meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan daerah. Selain upaya memberdayakan perempuan pemerintah pun perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan terhadap wanita. hal ini penting diberlakukan sebagai akibat adanya **'keterpurukan'** moral bangsa yang sedang marak terjadi di setiap daerah terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, yang berdampak negatif terhadap upaya peningkatan kualitas perempuan.

Tabel 2.67
Data Capaian bidang Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017

1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,76	5,00	4,69	7,32	5,47
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	25,77	25,77	33,26	49,37	49,37
4	Rasio KDRT	0,056	0,072	0,052	0,023	0,023
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	43	43	39	15	20
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	0,65	0,70	0,51	0,24	0,32
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	64,28	45,00	56,25	120,00	54,55
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	53,6	62,5	18,8	53,3	25,0
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	53,57	62,50	18,75	53,33	25,00
10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	64,29	32,50	43,75	33,33	50,00
11	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	64,29	32,50	43,75	33,33	50,00
12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	88,79	88,72	88,80	90,18	90,20
13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	91,18	87,80	86,14	97,04	91,09
14	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun				18,314	
15	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian	38,78	26,04	26,75	26,78	18,92

b. Perlindungan Anak.

Isu mengenai perlindungan anak telah menjadi perhatian pemerintah sejak kepala daerah memproklamkan bahwa Kabupaten Jayapura akan menjadi Kabupaten layak anak. sehingga di tahun 2017 pemerintah Kabupaten Jayapura akan secara berkesinambungan melaksanakan pembangunan tanpa mengesampingkan perlindungan dan hak-hak terhadap anak. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas anak melalui sasaran perwujudan penghidupan yang layak. anak yang cerdas dan berahklak mulia serta perlindungan terhadap segala bentuk tindak kekerasan. Selain itu pemerintah juga berupaya untuk menciptakan perwujudan keserasian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat tercipta harmonisasi pemberlakuan kebijakan yang akurat.

Terdapat beberapa upaya pemerintah dalam melindungi serta meningkatkan kesejahteraan anak yang kiranya dapat menjadi bahan

pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan secara berkesinambungan terkait perlindungan anak di masa yang akan datang.

Tabel 2.68
Jumlah Anak Asuh Organisasi Sosial Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Jayapura Tahun 2014

No	Organisasi Sosial	Jumlah Anak Asuh	
		Laki-laki	Perempuan
1	- Panti Sosial Asuhan Anak	403	711
2	- Panti Sosial Patiran Anak	-	-
3	- Panti Sosial Bina Remaja	-	-
4	- Panti Sosial Tresda Werda	9	43
5	- Panti Sosial Binanetra	-	-
6	- Panti Sosial Bina Karya	-	-
7	- Panti Sosial Karya Wanita	-	-
8	- Yayasan	906	714
TOTAL		1.318	1.468

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura. 2016

Salah satu wujud upaya pemerintah dalam melindungi kesejahteraan anak terlihat pada peran pemerintah menyediakan saran sosial yang dapat menopang keberlangsungan hidup anak-anak khususnya pada anak-anak dengan kebutuhan khusus. seperti halnya pada pemerintah kabupaten jayapura yang menyediakan fasilitas panti asuhan guna menampung kebutuhan anak-anak yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada tabel 2.68 Diatas terlihat terdapat 2.786 anak. yang terdiri dari 1.318 anak laki-laki dan 1.468 anak perempuan yang menjadi perhatian pemerintah yang ditampung pada panti sosial asuhan anak. dengan adanya penampungan tersebut dapat dikatakan sebagian besar hak-hak anak telah menjadi perhatian pemerintah. Diharapkan dalam mendukung upaya pemerintah guna mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan kabupaten layak anak. yang telah menjadi target pemerintah untuk tahun 2017.

3. Ketahanan Pangan.

Kondisi Pangan di Kabupaten Jayapura masih cukup baik hal ini bisa dilihat di Kabupaten Jayapura tidak pernah mengalami bahaya kelaparan atau kekurangan kebutuhan pangan. Untuk meningkatkan ketahanan pangan pemerintah telah membangun lumbung pangan di beberapa distrik. untuk memenuhi persediaan cadangan pangan daerah.

Adapun jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Jayapura dari Tahun 2014 hingga Tahun 2016 tidak semua Distrik terdapat Lumbung Pangan. namun terjadi

peningkatan dimana di tahun 2014 hanya terdapat 3 Lumbung Pangan yaitu di Distrik Kemtuk 1 Lumbung. Yapsi 2 Lumbung. sedangkan di tahun 2016 11 Lumbung Pangan yaitu di Distrik Yapsi 2 Lumbung. Kemtuk 1 Lumbung. Namblong 3 Lumbung. Nibokrang 2 Lumbung. Sentani 1 Lumbung dan entani Timur 1 Lumbung. Selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Jumlah Bangunan Lumbung Pangan Menurut Distrik
Di Kabupaten Jayapura Tahun 2014-2016

No	Distrik	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Kaureh	0	0	0
2	Airu	0	0	0
3	Yapsi	2	2	2
4	Kemtuk	1	1	1
5	KemtukGresi	0	1	1
6	Gresi Selatan	0	0	0
7	Nimboran	0	0	0
8	Namblong	0	3	3
9	Nimbokrang	0	2	2
10	UnurumGuay	0	0	0
11	Demta	0	0	0
12	Yokari	0	0	0
13	Depapre	0	0	0
14	RaveniRara	0	0	0
15	Sentani Barat	0	0	0
16	Waibu	0	0	0
17	Sentani	0	1	1
18	Ebungfau	0	0	0
19	SentaniTimur	0	1	1
	Jumlah	3	11	11

Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura 2017.

Adapun ketersediaan Energi dan Protein di Kabupaten Jayapura dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.70
Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator	Capaian Kinerja
-----	-------------------------	-----------------

	Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan pangan utama	34,91	25,97	30,97	35,68	33,23
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita					
	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari):					
	Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD 100	2350 Kg kal/kap/hari	2412 Kg kal/kap/hari	2460 kg Kal/kap/hari	2340 kg kal/kap/hari	2324 kg kal/kap/hari
	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):					
	Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD 100	76.24 gram/kap/hari	77 gram/kap/hari	84 gram/kap/hari	83.89 gram/kap/hari	77.05 gram/kap/hari
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100	100	100
4	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,9	72,84	76,21	89,56	82,46
5	Penguatan cadangan pangan		2 Ton	13 Ton	10 Ton	8 Ton
6	Penanganan daerah rawan pangan	3 kelompok	6 kelompok	9 kelompok	10 kelompok	9 kelompok

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura 2017.

4. Lingkungan Hidup

Pengelolaan sampah dan Pengembangan drainase dan irigasi merupakan tanggungjawab semua pihak lingkup pemerintah Kabupaten Jayapura. sehingga dapat tercipta sinkonisasi penentuan kebijakan yang akurat karena didukung oleh masyarakat yang lebih partisipatif dan paham akan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup. Data capaian bidang lingkungan hidup Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71

Data capaian bidang lingkungan hidup Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
-----	---------------------------------	-----------------

		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	ada	ada	ada	ada	ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	1.313.591	1.313.591	1.313.591	1.313.591	1.313.591
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
12	Penetapan hak MHA	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	tidak ada	tidak ada	Hiroshi, repangmuaif	tidak ada	repangmuaif
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	-	-	-	-	-
18	Timbulan sampah yang ditangani	8444 M ³	8444 M ³	8444 M ³	8444 M ³	8444 M ³
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	42 ton
20	Persentase cakupan area pelayanan	603 Ha	604 Ha	605 Ha	606 Ha	607 Ha
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	19	19	19	19	19
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
25	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1	1	2	2	1
26	Kerusakan Kawasan Hutan	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
27	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	45	45	45	45	45

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura, 2017.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura belum dapat menjangkau seluruh ibukota distrik hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana

persampahan. Sampai pada tahun 2017 penanggulangan sampah hanya melayani distrik yang ada di kota Kabupaten Jayapura.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penduduk di Kabupaten Jayapura masih banyak yang belum memiliki dokumen kependudukan sebagai syarat warga Negara. Selain itu, pada umumnya masyarakat mengurus dokumen kependudukan apabila ada keperluan yang berhubungan dengan kepentingan pengurusan yang lain. Keadaan ini merupakan salah satu indikator masih rendahnya kesadaran penduduk daerah akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Jayapura yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.72
Penduduk Kabupaten Jayapura Dirinci Menurut Kepemilikan
Dokumen Kependudukan Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Akte Lahir	65.510	81.666	85.562	92.310
2	Akte Nikah	20.799	23.728	24.219	22.653
3	KTP	119.167	124.245	129.592	85.873
4	KK	48.620	55.625	61.198	66.190
5	Akta Cerai	539	17	18	20

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016

Tabel 2.73
Penduduk Kabupaten Jayapura Dirinci Menurut Kepemilikan
Dokumen Kependudukan sesuai Distrik Tahun 2015

No	Distrik	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Dokumen					
		KTP		KK		Akte Lahir	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	Kaureh	9.654	2.033	4.343	111	7.860	8.246
2	Airu	516	571	291	40	620	1.005
3	Yapsi	4.666	1.562	2.432	42	3.201	5.597
4	Kemtuk	2.245	553	946	37	1.908	2.340
5	Kemtuk Gresi	3.005	420	1.277	21	1.804	3.566
6	Gresi Selatan	860	32	325	6	840	559
7	Nimboran	3.794	356	1.476	31	3.874	2.100
8	Namblong	2.762	322	1.203	21	2.087	2.318
9	Nimbokrang	4.835	1.949	2.732	23	5.916	3.554
10	Unurum Guay	2.254	357	935	31	1.766	2.259
11	Demta	1.727	637	874	30	892	2.648
12	Yokari	1.325	1.325	553	32	840	559
13	Depapre	3.669	550	1.334	26	1.782	4.467
14	Ravenirara	971	111	402	19	1.013	714
15	Sentani Barat	3.364	488	1.566	38	3.753	2.281
16	Waibu	2.274	361	5.119	75	1.602	1.946
17	Sentani	65.716	16.210	31.567	392	28.172	83.976
18	Ebungfauw	9.346	3.594	812	35	9.850	9.065
19	Sentani Timur	6.609	1.950	2.970	31	7.841	4.401
	TOTAL	129.592	33.381	61.169	1.041	85.562	142.996

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016

Pada tabel di atas nampak bahwa jumlah penduduk yang telah dilayani oleh pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memiliki KTP sebagai dokumen resmi kependudukan di Indonesia pada tahun 2015 telah mencapai 129.592 orang dan yang belum sebanyak 33.381 orang. Kemudian jumlah penduduk yang terlayani untuk memperoleh Kartu Keluarga (KK) sebanyak 61.169 dan yang belum sebanyak 1.041 orang. Selanjutnya, jumlah penduduk yang telah dilayani dalam pemilikan akta kelahiran sebanyak 85.562 orang dan yang belum mencapai 142.996 orang.

Berdasarkan data diatas, maka dilihat bahwa masih ada sekitar 20.48 persen penduduk yang belum terlayani kepemilikan KTP, dan sebanyak 1.67 persen yang belum terlayani dokumen KK serta sebanyak 62.56 persen yang belum terlayani dokumen Akta Kelahiran. Keadaan ini menunjukkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk memiliki dokumen kependudukan berupa KTP dan KK serta kemampuan pemerintah daerah ini untuk memberikan pelayanan dalam pengadaan dokumen kependudukan tersebut sudah cukup memadai, sehingga persentase penduduk yang telah memiliki kedua macam dokumen tersebut sudah cukup tinggi pada tahun 2015. Namun demikian, masih terlihat keadaan yang cukup memprihatinkan dengan masih sangat rendahnya jumlah penduduk daerah ini yang belum memiliki dokumen akta lahir, yakni mencapai 52.56 persen, padahal dokumen ini sangat penting dan sangat dibutuhkan pada saat yang bersangkutan ingin bersekolah atau bekerja. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi layanan kepada masyarakat dalam bentuk akta kelahiran, sehingga seluruh anggota masyarakat dapat memperoleh akta kelahiran. Salah satu bentuk upaya yang perlu segera dilaksanakan adalah mengintensifkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk di gereja-gereja, masjid dan tempat ibadah lainnya, kepada masyarakat untuk segera menguruskan akta kelahiran bagi anggota keluarganya masing-masing.

Tabel 2.74

Data capaian bidang kependudukan dan pencatatan sipil
Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	0,84	0,86	0,80	0,47	0,51
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,40	0,45	0,51	0,57	0,61
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,42	0,42	0,42	0,65	0,65
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		ada	ada	ada	ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	83	86	59	46	50
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	40	45	60	57	61

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jayapura, 2017.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kebijakan pemerintah Pusat. Provinsi. Kabupaten dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat kampung telah dilaksanakan pelimpahan kewenangan dalam mengelola dana yaitu Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pemerintah pusat, dana Program Strategi Pembangunan Kampung (PROSPEK) dari pemerintah Provinsi dan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari dana Kabupaten. Dalam rangka peningkatan kapasitas aparat kampung untuk mengelola dana kampung pemerintah Kabupaten Jayapura telah melakukan pelatihan manajemen pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan kampung melalui penyusunan RPJMK.

Peran pemerintah daerah dalam memajukan masyarakat kampung melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung di tahun 2015 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Pemberdayaan Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun 2014-2016

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura.	9 DAS (Dewan Adat Suku)	19 distrik
2	RT/RW	80 RT/RW	4 distrik
3	a. bantuan pembinaan Kelompok masyarakat pembangunan Kampung	Masyarakat kampung	19 distrik
	b. data profil kampung		19 distrik
	c. Kader Taman Posyandu		1166 kader
	d. pelayanan Kesehatan pada balita di posyandu		71 Taman Posyandu, 191 Pos Yandu, 144 PK
	e. pemberdayaan di kampung		19 Distrik
	f. Masyarakat adat		
4	a. Aparatur pemerintah kampung	185 aparatur pemerintah kampung	31 kampung
5	a. pembinaan PKK Distrik dan Kampung	PKK distrik dan kampung	19 distrik

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat. 2016

Tabel 2.76
Data capaian pelayanan Pemberdayaan Kampung
Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100	100	100
	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	144	144	144	144	144
	Jumlah seluruh pemerintahan desa	144	144	144	144	144
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,44	0,46	0,49	0,49	0,49
	Jumlah kelompok binaan LPM	188	197	210	210	210
	Jumlah LPM	432	432	432	432	432
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2,00	1	1	1	1
	Jumlah kelompok binaan PKK	288				
	Jumlah PKK	144	144	144	144	144
4	Persentase LSM aktif					1,39
	Jumlah LSM aktif					6
	Jumlah LPM	432	432	432	432	432
5	Persentase LPM Berprestasi					17,36
	Jumlah LPM berprestasi					75
	Jumlah LPM	432	432	432	432	432
6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
	Jumlah PKK aktif	144	144	144	144	144
	Jumlah PKK	144	144	144	144	144
7	Persentase Posyandu aktif	65,16	65,16	65,16	65,16	65,16
	Jumlah Posyandu aktif	144	144	144	144	144
	Total Posyandu	221	221	221	221	221
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat					
	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat					-
	Total Program Pemberdayaan Masyarakat	4	4	4	4	4
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100
	program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	3	3	3	3	3
	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	3	3	3	3	3

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Kampung Kabupaten Jayapura, 2017.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mengontrol perkembangan penduduk Kabupaten Jayapura. menggunakan beberapa indikator seperti. banyaknya penduduk usia subur. Kapasitas penggunaan alat kontrasepsi dan jumlah peserta KB. Jumlah Penduduk Usia Subur Tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Jumlah Penduduk Usia Subur Tahun 2013-2015

No	Distrik	Jumlah Penduduk Usia Subur					
		WUS			PUS		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Kaureh	2.979	2999	3100	2.900	2062	2100
2	Airu	172	201	230	230	160	180
3	Yapsi	1.998	14950	15500	1.900	13425	13500
4	Kemtuk	919	919	980	815	815	850
5	Kemtuk Gresi	1.012	1042	1070	721	808	900
6	Gresi Selatan	311	501	550	311	302	330
7	Nimboran	1.125	1225	1400	962	1025	1121
8	Namblong	817	867	989	645	625	665
9	Nimbokrang	1.571	1885	1980	1.321	1718	1750
10	Unurum Guay	427	477	601	410	410	450
11	Demta	792	852	880	740	749	760
12	Yokari	625	572	580	510	402	421
13	Depapre	942	962	999	775	789	805
14	Ravenirara	279	299	310	210	260	270
15	Sentani Barat	1.020	1050	1251	900	920	950
16	Waibu	1.212	1252	1292	1.212	1200	1221
17	Sentani	12.270	15270	15570	9.500	11617	11876
18	Ebungfau	692	702	850	690	688	750
19	Sentani Timur	1.801	1591	1601	1.400	1281	1315
Jumlah		30.339	47666	49733	26.152	39256	40214

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura. 2017.

Banyaknya jumlah penduduk usia subur di Kabupaten Jayapura tahun 2015 adalah 89.947 jiwa yang terdiri dari wanita usia subur yakni 49.733 orang dan pria usia subur sebanyak 40.214 orang. Banyaknya jumlah penduduk usia subur dimaksud dapat menjadi Evaluasi pemerintah guna mengontrol tingkat pertumbuhan penduduk dan informasi bagi pemerintah guna memperkuat kualitas Kesehatan guna mengurangi tingkat kematian ibu dan anak pada masa kehamilan maupun proses kelahiran. Indikator lainnya yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat ukur perkembangan penduduk adalah banyaknya penduduk yang menggunakan alat akseptor KB. Penduduk Kabupaten Jayapura yang menggunakan alat akseptor KB di tahun 2014 adalah sebanyak 28.195 orang. dimana penggunaan akseptor ini terdiri dari 7 metode kontrasepsi yang terdiri dari IUD. MOP. MOW. Implan. suntik. PIL. dan Kondom. Penggunaan metode kontrasepsi terbanyak adalah metode suntik yakni 14.225 orang. sebagaimana data pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Jumlah Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Yang Digunakan
Di Kabupaten Jayapura Pada Tahun 2013-2015

No	Tahun	IUD	MOP	MOW	Implan	Suntik	Pil	Kondom
1	2013	176	40	258	1.456	6.246	1.963	834
2	2014	1.688	43	1711	2.966	14.225	5.841	1.721
3	2015	1772	45	1797	3114	14936	6133	1807

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura. 2017.

Tabel 2.79
Data capaian pelayanan Pengendalian Penduduk
Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)					
2	Total Fertility Rate (TFR)					
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	39	39	39	39	39
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	43	43	43	43	
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	-	-	-	1
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program					4
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	3	3	3	3
8	Ratio Akseptor KB	42	66	70	70	0,5
	Jumlah Akseptor KB					19.944
	Jumlah pasangan usia subur					40.214
9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	42	66	70	70	49,59
	Jumlah peserta KB aktif					19.944
	Jumlah pasangan usia subur					40.214
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	5.471	5.618	5.346	5.330	5.324
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	26.152	39.256	40.214	41.018	35,7
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	26.152	39.256	40.214	41.018	50,41
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani					20.270
	Jumlah pasangan usia subur					40.214
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10.973	25.997	28.195	28.759	2,59
	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	12.508	347	351	467	516
	Jumlah akseptor KB					19.944
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	138	51	43	43	-
	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi					
	Jumlah akseptor KB					19.944
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	61,11	61,11	75	55	61,11
	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	11.000	11.000	15.000	11.000	11.000
	Jumlah anggota kelompok BKB	18.000	18.000	20.000	20.000	18.000
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	77	76	77	77	88
	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	11.500	11.500	12.000	12.000	14.000
23	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	80	80	80	80	62,5
	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	20	20	20	20	20
24	Jumlah Faskes dan jejaring	25	25	25	25	32
26	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	12.354	12.367	12.518	10.901	10.878
27	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100
28	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	48.260	55.625	61.198	66.190	72.986
29	Rata-rata usia kawin pertama wanita	17	18	21	21	21

Sumber data: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , 2017.

8. Perhubungan.

a. Transportasi Darat.

Jumlah kendaraan bermotor aktif milik pemerintah pada tahun 2016 berjumlah 4.475 unit yang terdiri atas 793 (17.72 persen) unit kendaraan berplat merah. 909 (20.31persen) kendaraan berplat kuning. dan 2.773 (61.97persen) kendaraan berplat hitam. Kendaraan Bermotor Aktif Milik Pemerintah Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Kendaraan Bermotor Aktif Milik Pemerintah Tahun 2014-2016

No	Jenis Kendaraan	Jenis Plat Nomor Polisi											
		2014				2015				2016			
		Plat Merah	Plat Hitam	Plat Kuning	Jumlah	Plat Merah	Plat Hitam	Plat Kuning	Jumlah	Plat Merah	Plat Hitam	Plat Kuning	Jumlah
1	Sedan	2	59	18	79	2	27	4	33	2	27	4	33
2	Jeep	10	87	1	98	9	58	0	67	9	58	0	67
3	Minibus	119	1.324	630	2.073	99	976	632	1.507	119	1076	662	1.857
4	Mikrobus	6	6	12	24	8	6	7	21	8	6	7	21
5	Bus	2	2	0	4	1	2	0	3	1	2	0	3
6	Pick Up	46	401	28	475	42	361	14	417	42	366	14	422
7	Light Truck	7	132	250	389	17	110	151	278	17	110	171	298
8	Dump Truck	3	72	48	123	1	0	0	1	1	0	0	1
9	Truck	0	17	38	55	0	13	26	39	0	13	51	64
10	Dump Truck	0	4	12	16	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ambulance	7	1	0	8	12	4	0	16	12	4	0	16
12	Ransus	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sepeda Motor	486	13.651	0	14.137	541	1.000	0	1.541	571	1.100	0	1.671
14	Sepeda Motor R-3	0	4	0	4	11	9	0	20	11	11	0	22
15	Scooter	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		689	15.761	1.037	17.487	743	2.566	634	3.943	793	2773	909	4.475

Sumber data : DDA Kabupaten Jayapura. 2017

b. Transportasi Udara.

Hingga tahun 2014 terdapat 8 lapangan udara dalam status aktif hingga tahun 2014. Lapangan terbang tersebut adalah Bandara sentani. Lapangan terbang hulu atas. lapangan terbang aurina. lapangan terbang pagai. lapangan terbang lereh. lapangan terbang sinar mas. dan lapangan terbang Adventist. Terdapat satu lapangan terbang yang masih dalam proses perencanaan guna pelaksanaan pembangunan. yakni lapangan terbang Melindra yang terdapat pada distrik Airu. Terkait upaya peningkatan pelayanan transportasi udara. bandara sentani Kabupaten Jayapura digunakan sebagai barometer pelaksanaan Evaluasi serta pengambilan kebijakan. Bandar Udara Aktif Di Kabupaten Jayapura Hingga Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Bandar Udara Aktif Di Kabupaten Jayapura Hingga Tahun 2014-2016

No	Bandara	Distrik	Landasan	Ukuran (m ²)	Kondisi			Pengelola
					2014	2015	2016	
1	Bandara Sentani	Sentani	Aspal Beton	98.000	Baik	Baik	Baik	Dirjen Dephun Jakarta
2	Lapter Hulu Atas	Airu	Tasirtu	8.500	Baik	Baik	Baik	Misi
3	Pagai	Airu	Rumput	1.500	Baik	Baik	Baik	Misi
4	Lapter Melindra	Airu	Tahap pekerjaan (pematangan tanah)					Pemda Kab Jayapura
5	Lapter Sinar Mas	Kaureh	Tasirtu	16.000	Baik	Baik	Baik	Swasta
6	Lapter Adventist	Waibu	Tasirtu	10.200	Baik	Baik	Baik	Swasta

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura 2016

c. Transportasi Laut Dan Sungai.

Berbagai aktifitas di lapangan usaha perhubungan telah dilaksanakan. baik di sub-lapangan usaha Perhubungan Darat. Perhubungan Udara. Perhubungan Laut dan di sub lapangan usaha Angkutan Sungai. Danau dan Pantai (ASDP). Data di bawah menunjukkan bahwa pada Tahun 2013 perahu motor di danau sentani sebanyak 60 buah dan sungai mamberamo 15 buah dengan frekuensi pelayanan sebanyak 67 dimana frekuensi pelayanan di danau Sentani sangat tinggi bila dibandingkan dengan penyeberangan di sungai Mamberamo. Jumlah Armada ASDP Di Kabupaten Jayapura Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82
Jumlah Armada ASDP Di Kabupaten Jayapura Tahun 2016

No	A r m a d a	Tahun perolehan	Jumlah	Frekuensi
1	Perahu Motor di Danau Sentani		80	2
2	Perahu Motor di Sungai Mamberamo (AIRU)		15	2
3	Perahu Motor di laut		40	2
4	Kapal Penyeberangan		-	-

Sumber data: Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jayapura. 2016.

Terdapat beberapa jumlah armada yang belum tersedia. seperti kapal motor dan kapal penyeberangan. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Jayapura mampu memajukan kualitas pelayanan transportasi laut dan sungai melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi secara akurat. efektif. dan efisien dalam menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.

Tabel 2.83

Data capaian Pelayanan Perhubungan Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.969.680	2.175.794	3.402.757	2.245.492	2.483.686
2	Rasio ijin trayek	0,005	0,008	0,008	0,008	0,008
3	Jumlah uji kir angkutan umum	386	823	1.025	1.106	660
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	7	7	7	10	11
5	Persentase layanan angkutan darat	0,54	0,66	0,69	0,69	0,69
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	21	27	9	9	5
7	Pemasangan Rambu- rambu	-	0,00	0,00	1,10	47,33
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,187	0,127	0,034	0,033	0,032
	Panjang Jalan	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00
	Jumlah Kendaraan	3.303,00	4.859,00	18.060,00	18.960,00	19.529,00
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	1.974.425	2.051.929	1.981.265	613.543	732.816
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	93.222.679	94.940.588	163.604.417	6.667.659	6.490.802

9. Komunikasi dan Informatika.

a. Komunikasi.

Jumlah saluran telepon terpasang terdapat pada 9 distrik. yakni distrik sentani. sentani timur. unurumguay. demta. nimboran. nimbokrang. kemptuk. depapre dan kaureh. dengan jumlah pelanggan 3.600 orang. Terkait dengan pelayanan telepon seluler. hingga tahun 2013 telah menjangkau hampir di semua wilayah Kabupaten Jayapura. Selain itu. sarana telekomunikasi yang disediakan pemerintah telah menjangkau 13 distrik dengan bentuk fasilitas seperti sarana warnet/warsel (44 buah) . kios phone (56 buah). orari (79 buah). rapi (8 buah) dan televisi kabel (18 unit).

Tabel 2.84
Jumlah Sarana Telekomunikasi Di Kabupaten Jayapura Tahun 2017

NO	DISTRIK	JENIS SARANA TELEKOMUNIKASI					
		WARTEL	WARNET/ WARSEL	KIOS PHONE	ORARI	RAPI	TV KABEL
1	SENTANI		15	30	29	4	10
2	EBUNGFUW						
3	WAIBU			4			5
4	SENTANI TIMUR	-	1	3	4	1	1
5	SENTANI BARAT	-	-	2	2	-	-
6	UNURUM GUAY	-	1	1	-	-	-
7	YOKARI						
8	DEMTA	-	2	2	1	-	-
9	NAMBLONG			2			
10	NIMBORAN	-	4	-	7	3	-
11	NIMBOKRANG	-	12	5	33	-	-
12	KEMTUK	-	1	-	3	-	-
13	GRESI SELATAN						
14	KEMTUK GRESI	-	-	-	-	-	-
15	RAVENIRARA						
16	DEPAPRE	-	4	2	-	-	1
17	KAUREH	-	3	-	-	-	1
18	YAPSI		1	5			
19	AIRU						
	JUMLAH	0	44	56	79	8	18

Sumber data: Dinas Infokom Kab. Jayapura. 2017

b. Informatika.

Bentuk pelayanan komunikasi terkait informatika dilakukan pemerintah melalui penyediaan sarana informatika di kalangan masyarakat secara luas di Kabupaten Jayapura.

Tabel 2.85
Jumlah Penjangkauan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)
di Kabupaten Jayapura 2012-2016

No	Jenis Kegiatan	Jumlah				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kegiatan Penjangkauan	82	75	51	20	20
2	Jumlah Orang yang dijangkau	-	-	-	-	-
3	Jumlah kampung yang dijangkau	54	52	48	32	40
4	Jumlah Distrik yang dijangkau	18	18	18	16	12

Sumber data: DDA BPS Kabupaten Jayapura. 2017.

Di tahun 2014, upaya pemerintah dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat terlihat pada kegiatan yang dilaksanakan oleh badan komunikasi informasi dan arsip daerah kabupaten jayapura. dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi yang memiliki sasaran yakni masyarakat di wilayah pedesaan. Di tahun 2014 terdapat 20

kegiatan penjangkauan KIE yang dilaksanakan dengan jumlah orang sebanyak 1.500 orang yang terdapat pada 40 kampung di 15 distrik. Diharapkan dengan adanya proses penyebaran informasi yang positif masyarakat di kabupaten jayapura dapat semakin maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak baik pada kemajuan pola pikir dan sikap.

Tabel 2.86
Data capaian layanan Komunikasi Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017

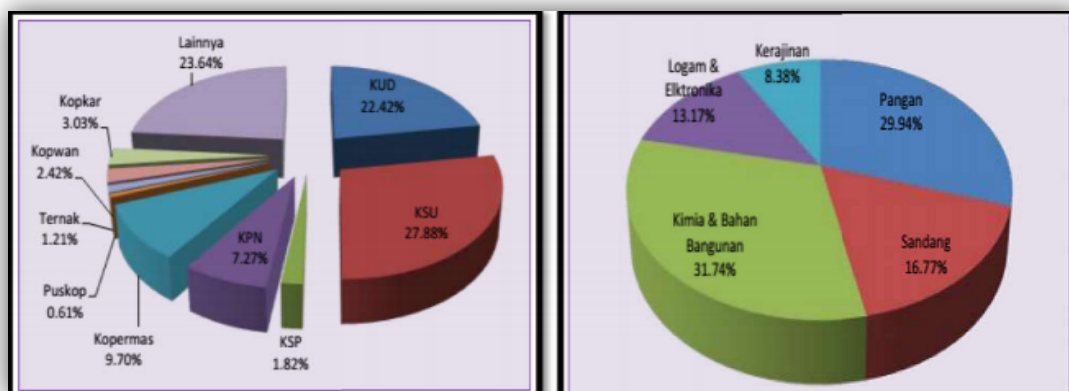
No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-
2	Cakupan Layanan Komunikasi	0,12	0,13	0,14	0,20	0,32
	Luas Wilayah yang tercoverage	2.019	2.194	2.469	3.527	5630
	Luas Wilaya Keseluruhan	17.514,6	17.514,6	17.514,6	17.514,6	17.514,6
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	45,00	48,00	57,00	65,00	77,95
	Jumlah penduduk yang menggunakan HP/telpon	69838	94458	122780	148562	197280
	Jumlah Penduduk	155197	196788	215405	228558	253094
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	10,00	21,00	27,00	30,00	34,61
	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	3791	10525	15401	18659	24751
	jumlah rumah tangga	37919	50121	57041	62198	71517
5	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	12,00	17,00	25,00	37,00	69,22
	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	4550	8520	14260	23013	49503
	jumlah rumah tangga	37919	50121	57041	62198	71517

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura, 2017.

10. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam memajukan pembangunan ekonomi di Kabupaten Jayapura peranan lapangan usaha industri perlu menjadi fokus perhatian pemerintah. karena lapangan usaha industri memegang peran penting dalam proses akselerasi pembangunan melalui identifikasi. intensifikasi. dan ekstensifikasi keunggulan-keunggulan pada lapangan usaha industri yang dapat memberikan dampak yang besar dalam menciptakan peningkatan penyerapan tenaga kerja. mengurangi tingkat kemiskinan. meningkatkan pendapatan masyarakat. dan mampu mengembangkan nilai tambah (*nilai tambah*) pada berbagai jenis komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Jayapura. Terdapat beberapa elemen penting yang menjadi indikator pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mengembangkan lapangan usaha industri. seperti koperasi masyarakat. industri kecil dan menengah. dan pasar.

Grafik 2.21
Proporsi Koperasi dan Industri Kecil Menengah Menurut Jenis
di Kabupaten Jayapura Tahun 2014



Sumber data: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 2015

Banyaknya pertumbuhan koperasi di kalangan masyarakat dapat menjadi wahana bagi pemerintah dalam meningkatkan akselerasi ekonomi masyarakat. khususnya masyarakat desa. dimana hal ini dapat memandirikan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada secara leluasa berdasarkan prinsip kekeluargaan demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Tabel 2.87
Jumlah Koperasi Menurut Jenis di Kabupaten Jayapura Tahun 2014

No	Distrik	Jumlah Koperasi										
		KUD	KSU	KSP	KPN	Koperm	Puskop	Ternak	Kopwan	Kopkar	Lainnya	Total
1	Kaureh	3	2	-	-	-	-	-	-	1	3	9
2	Airu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
3	Yapsi	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
4	Kemtuk	2	1	-	1	-	-	1	-	-	3	8
5	Kemtuk	4	1	-	-	2	-	-	-	-	1	8
6	Gresi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Nimboran	-	1	-	1	1	-	-	-	-	4	7
8	Namblong	3	4	-	-	1	-	1	-	-	-	9
9	Nimbokran	1	6	-	-	-	-	-	-	-	5	12
10	Unurum	1	3	-	-	2	-	-	-	-	-	6
11	Demta	1	-	-	-	6	-	-	-	1	-	8
12	Yokari	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
13	Depapre	4	2	-	1	1	-	-	2	-	2	12
14	RaveniRara	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
15	Sentani	1	2	-	1	1	-	-	-	-	1	6
16	Waibu	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3
17	Sentani	3	20	2	7	-	1	-	1	3	12	48
18	Ebungfau	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	4
19	Sentani	4	2	1	1	-	-	-	-	-	4	12
Jumlah		37	46	3	12	16	1	2	4	5	39	165

Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura. 2017

Terdapat 165 koperasi di Kabupaten Jayapura. dimana tiap koperasi tersebut tersebar di 19 distrik. Koperasi yang ada terdiri atas 9 jenis koperasi dengan jumlah

koperasi terbanyak adalah koperasi serba usaha (KSU) yaitu sebanyak 46 unit koperasi dan koperasi dengan jumlah terendah adalah puskop (pusat koperasi) yakni 1 unit koperasi.

Keberadaan koperasi sebagai bagian dalam proses mensejahterakan masyarakat dapat memberikan sumbangsih yang sangat signifikan terhadap tumbuh kembang. kualitas. dan kuantitas lapangan usaha industri. khususnya industri kecil dan menengah. hal ini dapat terjadi karena mobilisasi Sumberdaya baik manusia maupun Sumberdaya alam secara efektif. efisien dan akurat dapat terjadi melalui koperasi. sedangkan industri kecil menengah berfungsi sebagai wahana penyaluran kreatifitas yang bersifat mensejahterakan masyarakat.

11. Penanaman Modal.

Aktiva rupiah aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. yang dimaksud dengan kekayaan ini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh oleh perusahaan/pemerintah melalui transaksi atau kejadian/kegiatan masa lalu. Sedangkan valuta asing merupakan besarnya nilai transaksi internasional yang menggambarkan perkembangan investasi pada Kabupaten Jayapura. hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Jumlah Aktiva Rupiah Dan Valuta Asing Bank Umum Dan BPR Menurut Kelompok Bank Di Propinsi Papua. Kota Dan Kabupaten Jayapura 2010-2014 (dalam juta)

Akhirperiode	2010	2011	2012	2013	2014	2014			
						Jul	Aug	Sep	Oct
Rupiah	27.724.895	32.362.717	33.285.559	36.689.902	41.816.091	38.529.320	42.091.950	47.719.838	47.379.676
Bank Pemerintah I)	23.843.558	27.698.659	27.372.043	28.875.406	33.816.240	31.105.241	33.518.519	41.906.525	39.973.840
Bank Swasta Nasional	3.621.744	4.263.680	5.366.206	7.205.415	7.245.521	6.780.875	7.910.458	5.120.054	6.693.354
Bank Asing dan Bank Campuran									
Bank Perkreditan Rakyat	259.593	400.378	547.31	609.081	754.33	643.204	662.973	693.259	712.482
Valas	1.398.179	2.053.863	1.505.914	738.679	867.185	738.949	674.914	2.451.978	1.052.112
Bank Pemerintah I)	151.665	210.447	171.88	287.126	289.681	250.339	236.507	240.009	301.292
Bank Swasta Nasional	1.246.514	1.843.416	1.334.034	451.553	577.504	488.61	438.407	2.211.969	750.82
Bank Asing dan Bank Campuran									
Bank Perkreditan Rakyat									
Jumlah	29.123.074	34.016.202	34.791.473	37.428.581	42.683.275	39.268.269	42.766.864	50.171.816	48.431.788
Bank Pemerintah I)	23.995.223	27.909.106	27.543.923	29.162.532	34.105.921	31.355.580	33.755.026	42.146.534	40.275.132
Bank Swasta Nasional	4.868.258	6.107.096	6.700.240	7.656.968	7.823.025	7.269.485	8.348.865	7.332.023	7.444.174
Bank Asing dan Bank Campuran									
Bank Perkreditan Rakyat	259.593	400.378	547.31	609.081	754.33	643.204	662.973	693.259	712.482
Menurut Dati II (Rp dan Valas)	29.123.074	34.016.202	34.791.473	37.428.581	42.683.275	39.268.269	42.766.864	50.171.816	48.431.788
Kab. Jayapura	424.937	655.592	2.041.108	2.290.057	2.415.411	2.394.912	2.660.024	2.421.668	2.541.262
Kota Jayapura	15.729.746	17.382.462	16.843.062	19.446.364	22.304.495	20.653.649	22.258.890	29.011.765	27.342.986

Sumber: Bank Indonesia Papua. 2015

Tingkat valuta asing Kabupaten Jayapura mengalami perubahan secara fluktuatif sejak tahun 2010 hingga tahun 2014. tercatat hingga bulan oktober 2014 nilai valuta asing Kabupaten Jayapura adalah Rp 2.541.262.000.000.-. besar nilai valas ini melampaui nilai valas pada tahun 2013 yaitu Rp 2.290.057.000.000.- atau terjadi peningkatan sebesar Rp 251.205.000.000.- Peningkatan valas ini menggambarkan masih terjadi sentimen positif oleh pelaku-pelaku investasi yang berdampak pada perkembangan kuantitas investasi di Kabupaten Jayapura.

Tabel 2.89

Data capaian pelayanan Penanaman Modal Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		17	13	15	25
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		469.063.361.000	1.043.590.386.000	1.280.173.127.000	1.433.011.871
3	Rasio daya serap tenaga kerja		469,76	401,15	359,20	251,52
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)			122,5	22,7	12,0

Sumber data: Dinas Penanamana modal Kabupaten Jayapura, 2017.

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.90

Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Jayapura

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
-1	-2	-3	-4	(5=3+4)
2012	Jumlah Investor			
2013	Jumlah Investor	11	6	17
2014	Jumlah Investor	10	7	17
2015	Jumlah Investor	10	8	18
2016	Jumlah Investor	13	8	21

Sumber Data: BPS Kabupaten Jayapura (Data diolah)

b. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Jayapura. dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.91
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Jayapura Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	33.887	11.113	34.281	40.992	36.405	42.091	39.886	14.640	61.194	16.170
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	45.000		75.273		78.496		54.526		77.364	
3	Rasio daya serap tenaga kerja	75.30	24.70	45.54	54.46	46.38	53.62	73.15	26.85	79.10	20.90 119

Sumber data: BPS Provinsi Papua 2017

12. Kepemudaan dan Olahraga.

Untuk mengembangkan potensi kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Jayapura. maka pemerintah bersama masyarakat telah membangun sarana olahraga untuk beberapa cabang olahraga. seperti sepak bola. futsal. bola volley. dan sebagainya. Saat ini telah tersedia di Kabupaten Jayapura sebanyak 81 sarana olahraga sepak bola. 155 sarana olahraga volley. 36 sarana olahraga basket. 25 sarana olahraga futsal. 54 sarana olahraga bulutangkis. 3 sarana olahraga karate. 11 sarana olahraga silat. dan 3 sarana olahraga tinju yang dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat.

Namun demikian. sebagian dari sarana dan prasarana olahraga yang telah tersedia tersebut belum memenuhi syarat standar. antara lain 32 sarana sepakbola. 28 sarana volley. 8 sarana basket. 8 sarana futsal dan 18 sarana bulutangkis. sehingga perlu dikembangkan di masa datang agar dapat memenuhi standar sebagai sarana olahraga yang nyaman dan aman digunakan oleh masyarakat. terutama para pemuda dalam menyalurkan bakat dan minatnya di bidang olah raga.

Hal ini disebabkan karena pemuda di daerah ini memiliki potensi yang besar berupa bakat alami di bidang olah raga dalam berbagai cabang olah raga. sehingga

tentu harus diimbangi dengan pembinaan dan fasilitas olahraga yang memadai. Untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan olah raga ke masa datang. maka pemerintah Kabupaten Jayapura telah membangun beberapa sarana olahraga. seperti stadion Sepak Bola (Stadion “Barnabas Youwe”) dan sedang membangun Gedung Olahraga (GOR) yang layak digunakan untuk pesta olah raga tingkat provinsi dan regional. gedung fitness dan bulutangkis. serta sarana sirkuit.

Atas berbagai bentuk upaya yang telah dilakukan selama ini. maka dapat pula diraih beberapa bentuk prestasi olah raga. antara lain juara III Gubernur Cup Sepakbola Wanita (Galanita). Juara I Presiden Cup (Danon). Juara III Suratin Cup (usia 18 tahun). juara I Sepakbola usia 21 Tahun Kapolda Cup. Juara I Balap sepeda Gubernur Cup. Juara I Kejurda Basket dan Juara 1 Kejurda Softball. Data capaian layanan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabell berikut.

Tabel 2.92
Data capaian layanan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	20	20	22	22	23
	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	34	37	37	38	41
	Jumlah seluruh organisasi pemuda	59,00	54,00	59,00	58,00	56,00
2	Persentase wirausaha muda	14	20	24	50	51
	Jumlah wirausaha muda	196	196	214	276	300
	Jumlah seluruh wirausaha	7,00	10,00	11,00	18,00	17,00
3	Cakupan pembinaan olahraga	1	1	2	3	3
	Jumlah cabang olahraga yang dibina	20	20	25	28	36
	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	5,00	5,00	8,00	11,00	8,00
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	40	68	95	146	203
	Jumlah pelatih bersertifikat	82	166	217	317	390
	Jumlah seluruh pelatih	49,00	41,00	44,00	46,00	52,00
5	Cakupan pembinaan atlet muda			3,42	3,33	5,26
	Jumlah atlit pelajar yang dibina	-	-	8	9	18
	Jumlah seluruh atlit pelajar	-	-	234	270	342
6	Jumlah atlet berprestasi	-	-	22	28	32
7	Jumlah prestasi olahraga	-	-	1	-	1
8	Jumlah sarana dan Prasarana	280	297	332	336	341

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura, 2017.

13. Statistik.

Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mengelola statistik setiap tahun menerbitkan buku antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Daerah Dalam Angka (DDA).

Tabel 2.93
Statistik Kabupaten Jayapura

No.	Statistik	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	Buku "PDRB"	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura 2017

14. Persandian

Persandian Kabupaten Jayapura telah diterapkan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura dengan cara menggunakan sandi dalam komunikasi. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Data persandian Kabupaten Jayapuran tahun 2013-2017

No.	Persandian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	55	51	51	54	54

Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura 2017 (diolah)

15. Kebudayaan.

Potensi pariwisata menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi. dimana sebagian objek wisata masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat tetapi juga dibeberapa tempat telah dimodifikasi dan ditata oleh Pemerintah daerah dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang secara langsung berdomisili dan memiliki hak ulayat pada lokasi tersebut. Dalam rangka pelestarian budaya setiap tahun dilaksanakan pagelaran seni budaya melalui Festival Danau Sentani (FDS). Festival Lembah Grime dan Festival Bahari Tanah Merah. Beberapa objek pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.95
Objek Budaya di Kabupaten Jayapura Tahun 2016

No	Nama Tempat	Lokasi
1	Lukisan Tradisional di atas kulit kayu	Sentani Timur (Asei Besar)
2	Tugu Mac Arturt	Sentani (Sentani Kota)
3	Situs Megalitik Tutari	Waibu (Doyo Lama)
4	Rumah Adat Suku Kaway	Waibu (Doyo Baru)
5	Peti Batu	Waibu (Kwadeware)
6	Landasan Meriam Tentara Sekutu	Sentani Barat (Dosay)
7	Dmo Sre (Batu Berjalan). Dmo Gantung (Batu Gantung). Dmo Kiray (Batu Kiray). Dmo Dzert (Batu tempat penyimpanan harta budaya)	Sentani Barat (Maribu)
8	Batu Sukun	Depapre (Yepase)
9	Tembikar dan Tanah liat bahan kapak batu	RaveniRara (Ormu Wari)
10	Pusat Penyebaran Harta Budaya	Kemtuk Gresi (Pupehabu)
11	Tapak Kaki Wairam	Kemtuk Gresi (Pupehabu)
12	Fosil Sagu	Kemtuk Gresi (Bring)
13	Tugu Peringatan Masuknya Injil	Nimboran (Tabri)
14	Tugu Monumen Jepang	Nimboran (Sarmai Krang)
15	Museum perubahan peradaban pertanian	Nimboran (Sarmai Krang)
16	Fosil Manusia Raksasa	Demta (Ambora)

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura 2017.

Tabel 2.96
Nama tarian dan benda budaya di Kabupaten Jayapura

No	Nama jenis tari	Lokasi
1	Tari Awaijale Rilejale	Danau Sentani
2	Tari perang (Falabea)	Kalangan suku Sentani
3	Tari Pangkur sagu	Sentani
4	Tari Kikaro	Doyo Lama
5	Tari Ahokoy	Yoka
	Nama benda budaya	Lokasi
1	Lukisan Kulit Kayu (Khombow)	Kampung Asei
2	Kapak Batu	Sentani
3	Kole-kole (perahu tradisional)	Danau Sentani
4	Sempe (Tempat sagu)	Abar
5	Batik papua	Sentani
6	Noken	Sentani
7	Tifa	Sentani
8	Tas kulit kayu	Sentani
9	Ukiran Kayu	Sentani
10	Bukere/sero-sero (Alat tradisional tangkap ikan)	Kampung Ayapo

Sumber data: DDA Kabupaten Jayapura 2017 (Data diolah).

16. Perpustakaan.

Dalam rangka meningkatkan budaya membaca di kalangan masyarakat pemerintah Kabupaten Jayapura telah menyediakan fasilitas perpustakaan yang terdapat pada badan komunikasi informasi dan arsip daerah kabupaten jayapura. Diharapkan dengan semakin menguatnya budaya baca masyarakat kabupaten dapat semakin maju dalam berpola pikir dan berkreatifitas. Hingga tahun 2015. terdapat 1.560 orang pengunjung yang menggunakan fasilitas perpustakaan yang berasal dari 20.159 populasi pengunjung yang semestinya dilayani. Guna mengimbangi kapasitas pengujung pada perpustakaan. pemerintah kabupaten jayapura berupaya meningkatkan jumlah koleksi judul buku dan buku yang tersedia perpustakaan kabupaten jayapura. yakni 6.477 koleksi judul buku dan 7.870 koleksi buku.

Terkait dengan kearsipan. pemerintah Kabupaten Jayapura telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait pembinaan petugas pengelolaan kearsipan hingga akurasi dan tingkat keamanan kearsipan dapat terwujud. Di tahun 2015. terdapat 182 kegiatan pembinaan petugas pengelolaan kearsipan. dimana kegiatan ini diharapkan dapat berdampak pada tingkat distrik terkait dengan penerapan pengelolaan arsip secara baku. Terdapat 51 kampung yang diharapkan dapat mengelolah kearsipan diwilayahnya dengan baik.

Tabel 2.97
Kegiatan Bidang Perpustakaan
Di Kabupaten Jayapura Tahun 2015

No	Bidang	Uraian	Jumlah/Satuan
1	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan kampung.	-
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.560 Orang
		Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	20.159 Orang
		Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	6.477 Buku
		Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah.	7.870 Buku

Sumber Data : Badan Komunikasi. Informasi. Dan Arsip Daerah. 2015

Tabel 2.98
Data capaian pelayanan perpustakaan Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	202	330	435	405	321
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,50	0,72	0,85	0,93	0,73
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	1.934	3.376	5.232	7.354	9.236
	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	3.868	4.712	6.184	7.938	12.661
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,008	0,025	0,049	0,073	0,087
	Jumlah perpustakaan	1	3	6	9	11
	Jumlah penduduk	118.789	119.383	121.410	123.780	125.975
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	202	330	435	405	321
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1.934	3.376	5.232	7.354	9.236
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	-	-	-	-	-

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura, 2017.

17. Kearsipan.

Terkait dengan kearsipan. pemerintah Kabupaten Jayapura telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait pembinaan petugas pengelolaan kearsipan hingga akurasi dan tingkat keamanan kearsipan dapat terwujud. Di tahun 2015. terdapat 182 kegiatan pembinaan petugas pengelolaan kearsipan. dimana kegiatan ini diharapkan dapat berdampak pada tingkat distrik terkait dengan penerapan pengelolaan arsip secara baku. Terdapat 51 kampung yang diharapkan dapat mengelolah kearsipan di wilayahnya dengan baik.

Tabel 2.99
Informasi Kegiatan Bidang Kearsipan
di Kabupaten Jayapura Tahun 2015

No	Bidang	Uraian	Jumlah/Satuan
1	Kearsipan	Jumlah SKPD. Distrik dan Kampung/Kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku.	51 Kampung
		Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelolaan kearsipan.	182 Kegiatan

Sumber Data : Badan Komunikasi. Informasi. Dan Arsip Daerah. 2015

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Lapangan usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan yang cukup baik. sejak tahun 2012 hingga 2015 telah terjadi tren yang perlahan meningkat. diawali dengan 12.223.57 kg menjadi 15.896.05 kg namun pada tahun 2016 menurun 12.115.00 kg. Terdapat dua jenis perikanan. yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada Tahun 2014 produksi perikanan tangkap adalah 254.116 kg dan perikanan budidaya yaitu 576.02 kg. Produksi Perikanan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2012 s/d 2016 (000 kg) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Produksi Perikanan Di Kabupaten Jayapura Tahun
2012 s/d 2016 (000 kg)

Jenis Perikanan	2012	2013	2014	2015	2016
Perikanan Tangkap					
Laut	12.223.57	12.250.50	12.896.05	15.896.05	12.115
Perairan Umum	1.249.64	1.260.66	1.389.87	1.530	242.001
Perikanan Budidaya					
Kolam	274.22	314.22	362.92	362.92	158.01
Keramba	402.14	442.14	557.10	725.13	418.01

Sumber Data : DDA BPS Kabupaten Jayapura 2017

Luas areal perikanan yang dimanfaatkan dalam meningkatkan produktifitas perikanan pada tahun 2016 adalah 77.08 ha dengan luas perikanan air tawar pada kolam sebesar 60.02 ha dan keramba yaitu 17.06 ha. Namun dalam meningkatkan kualitas dan Kapasitas perikanan dan kelautan maka pemerintah perlu menciptakan ekspansi wilayah perikanan atau pembangunan kampung sebagai sentra perikanan. Luas Areal Budidaya Produksi Perikanan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016 (ha) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101
Luas Areal Budidaya Produksi Perikanan
Di Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016 (ha)

Tahun	Luas Areal (Ha)					Jumlah
	Air Tawar			Air Laut	Air Payau	
	Kolam	Karamba	Total			
2012	46.50	14.70	61.20	-	1.7	62.9
2013	48.13	15.44	63.57	-	1.7	65.27
2014	55.30	16.20	71.50	-	1.7	73.20
2015	59.00	16.45	75.45	-	1.5	76.95
2016	60.02	17.06	77.08	-	-	77.08

Sumber Data : DDA BPS Kabupaten Jayapura 2017

Jumlah Rumah Tangga Perikanan di kabupaten jayapura pada tahun 2014 adalah sebanyak 12.429 RT. dengan jenis profesi terbesar adalah nelayan yakni 6.035 orang. jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah sebelumnya berjumlah 5.982 orang di tahun 2013. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

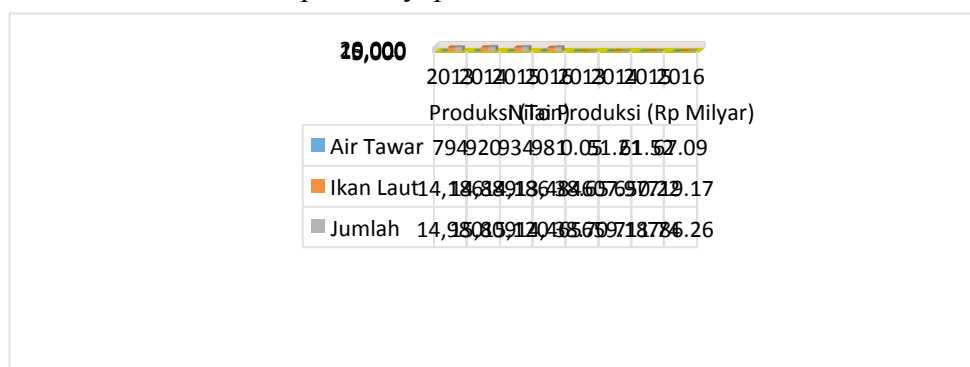
Tabel 2.102
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Di Kabupaten Jayapura
Tahun 2011-2015

No	Jenis Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Budidaya Ikan	2.168	2.169	2.846	305	6914
	Kolam	1084	1084	1423	110	2501
	Keramba	1084	1084	1423	195	4413
2	Nelayan	5.970	6.035	6.048	6.191	6169
Total		8.138	8.204	8.894	6.496	13.083

Sumber Data : BPS Kabupaten Jayapura. 2017

Potensi perikanan laut di Kabupaten Jayapura memiliki peluang yang sangat besar untuk dioptimalkan. Peluang ini terlihat dari peningkatan produksi dari beberapa tahun terakhir. Selain perikanan air laut. potensi perikanan air tawar di Kabupaten Jayapura juga memiliki peluang besar untuk dioptimalkan. Hal ini terlihat dari peningkatan hasil produksi beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2013 sebesar 14.980 ton atau setara Rp 38.70 milyar; tahun 2014 sebesar 15.809 ton atau setara dengan 659.18 milyar; tahun 2015 sebesar 15.120 ton atau setara dengan Rp 711.74 milyar; dan tahun 2016 sebesar 786.28 ton atau setara dengan Rp 786.26 milyar. Gambaran rinci produksi perikanan air tawar tahun 2013 s.d. tahun 2016 dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.22
Produksi (ton) dan Nilai Produksi Ikan Air Tawar dan Ikan Laut
di Kabupaten Jayapura Tahun 2013 s.d Tahun 2016



Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura Tahun 2017

Tabel 2.103
Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Produksi Perikanan Budidaya	100.5 %	102.2 %	104.7 %	100.00 %	103.3 %
2	Konsumsi Ikan	102.0 %	100.7 %	108.5 %	108.5 %	94.4 %
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	31.3 %	30.6 %	37.4 %	35.2 %	52.4 %
4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	100.8 %	100.3 %	102.4 %	100.1 %	96.6 %
5	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	-	-	0.08	0.08	0.08
6	Nilai Tukar Nelayan	1.009	1.012	1.013	1.014	1.015

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura tahun 2016

2. Pariwisata.

Berdasarkan hasil pendataan yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka jumlah data tentang budaya dan pariwisata di Kabupaten Jayapura dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.104
Potensi Pariwisata di Kabupaten Jayapura

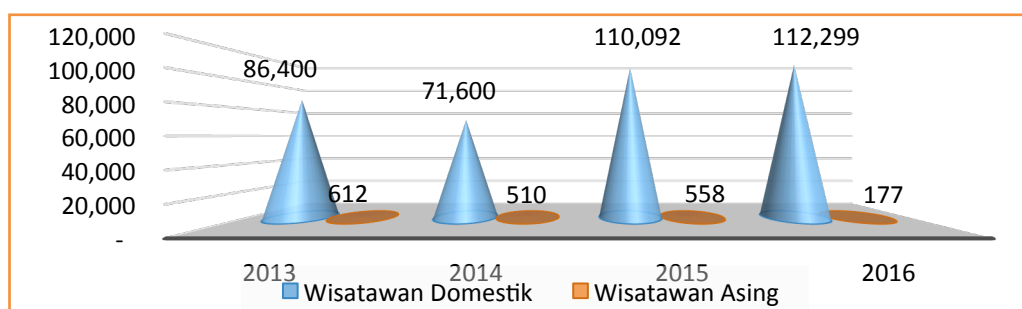
NO	JENIS	SATUAN	JUMLAH
1.	Sanggar Seni	Group	65
2.	Situs	Lokasi	3
3.	Danau	Lokasi	1
4.	Telaga	Lokasi	8
5.	Pantai	Lokasi	22
6.	Sungai	Buah	10
7.	Rumah Bilyard	Buah	3
8.	Rumah Makan / restourant	Buah	129
9.	Travel/Agen Perjalanan	Buah	16
10.	Pemandu Wisata	Orang	140
11.	Hotel/Penginapan	Unit	19
12.	Panti Pijat	Buah	4
13.	Sejarah	Buah	37
14.	Bahasa Daerah	Jenis	18
15.	Sub Suku Bangsa	Jenis	10
16.	Pondok penginapan/home stay	unit	12
17.	Pondok Wisata/Gasebho	Unit	103

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura Tahun 2017

Jumlah kunjungan wisata nasional tahun 2013 Sebanyak 86.400 orang. tahun 2014 sebanyak 71.600 orang. Tahun 2015 sebanyak 110.092 orang. tahun 2016 sebanyak 112.299 orang. Kunjungan wisata Nasional dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan sebesar 76.74 persen atau rata-rata kunjungan per tahun 95.098 orang. Kunjungan Mancanegara tahun 2013 sebanyak 612 orang. tahun 2014

sebanyak 510 orang. tahun 2015 sebanyak 558 orang. tahun 2016 sebanyak 177 orang. Kunjungan wisata mancanegara dari tahun 2013-2016 mengalami penurunan sebesar 37.14 atau rata-rata kunjungan per tahun 464.25 orang. Data Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Jayapura Tahun 2013 s.d Tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.23
Data Pengunjung Obyek Wisata
di Kabupaten Jayapura Tahun 2013 s.d Tahun 2016



Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura. Tahun 2017

3. Kehutanan.

Terdapat tiga komoditi utama yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Jayapura dalam meningkatkan produktifitas hasil hutan. ketiga komoditi tersebut adalah kayu bulat. kayu gergajian. dan kayu masohi. Produksi bagi hasil hutan adalah kayu gergajian. yakni 20.037.42 m³ permintaan terhadap jenis kayu ini meningkat disebabkan oleh peningkatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan property/perumahan masyarakat dan sarana publik maupun pemerintah. Pemanfaatan komoditi hutan lainnya adalah kayu masohi yaitu 70.020 ton jumlah ini meningkat drastis dari tahun 2012 yakni 102.84 ton. Produksi Kehutanan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.105
Produksi Kehutanan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2015

Tahun	Jenis Hasil Hutan		
	Kayu Bulat /Log (m ³)	Kayu Gergajian (m ³)	Masohi (Ton)
2011	10.883.34	11.440.49	40
2012	22.164.01	11.082.01	179.12
2013	2.392.22	25.799.84	102.84
2014	5.479.91	20.037.42	70.020
2015	5.479.91	20.037.42	70.020

Sumber Data : BPS Kabupaten Jayapura. 2016

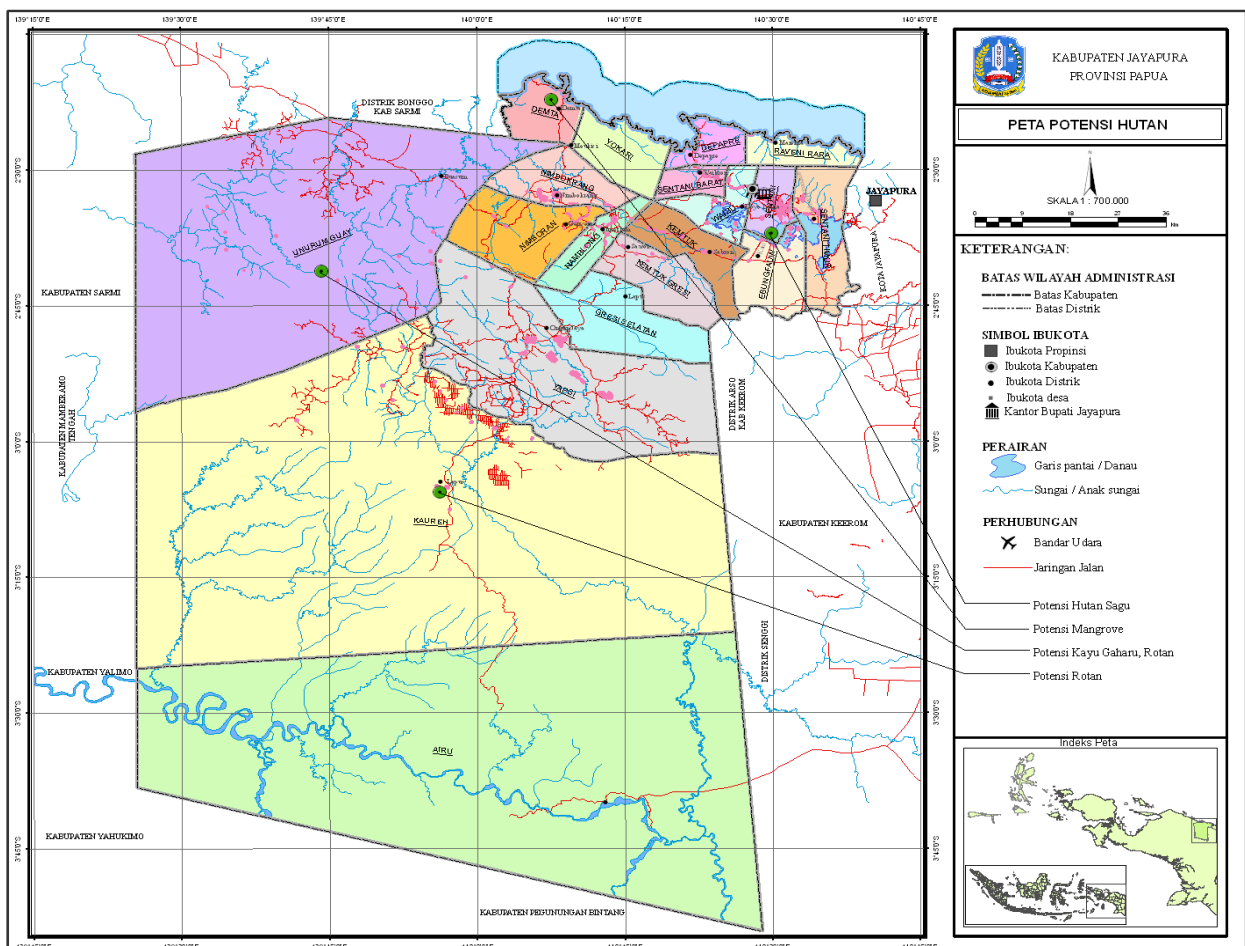
Dalam meningkatkan produktifitas hasil hutan pemerintah Kabupaten Jayapura telah menentukan luas wilayah hutan yang dijadikan sebagai lahan hutan produksi yaitu 729.949 Ha sebagaimana uraian pada tabel berikut.

Tabel 2.106
Luas Lahan Kehutanan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2015

Jenis Hutan	Luas Lahan (Ha)
Hutan Lindung PPA	498.469.20
Hutan Produksi:	729.949.00
a. Hutan Produksi (HP)	145.917.70
b. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	304.553.40
c. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	279.477.90
Hutan Konversi (KSA/KPA)	84.840.15
Areal Penggunaan Lain (APL)	31.209.95
Perairan/Danau	8.938.62

Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura. 2017

Gambar 2.10
Potensi Hutan Kabupaten Jayapura



Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura

4. Pertanian.

a. Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Secara umum struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Jayapura didominasi lapangan usaha pertanian. Peranan lapangan usaha ini terhadap seluruh kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Jayapura berdasarkan data PDRB tahun 2017 mencapai hampir separuh dari lapangan perekonomian lainnya. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat Kabupaten Jayapura berkecimpung di lapangan usaha pertanian. baik pertanian tanaman pangan. hortikultura. perkebunan. peternakan. kehutanan maupun kelautan dan perikanan.

Lapangan usaha pertanian di Kabupaten Jayapura mempunyai dua peranan sekaligus yaitu mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan memberikan lapangan kerja bagi warga masyarakat Kabupaten Jayapura. Sebagai lapangan usaha yang menjadi tumpuan ketahanan pangan dan mata pencaharian sebagian besar rakyat. pembangunan pertanian merupakan generator bagi pembangunan di Kabupaten Jayapura.

Potensi produksi pangan dapat dilihat dari cukup besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur. Produksi pertanian sub lapangan usaha tanaman pangan di Kabupaten Jayapura Tahun 2013 s.d Tahun 2016 dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.24
Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan
Di Kabupaten Jayapura Tahun 2013 - 2016

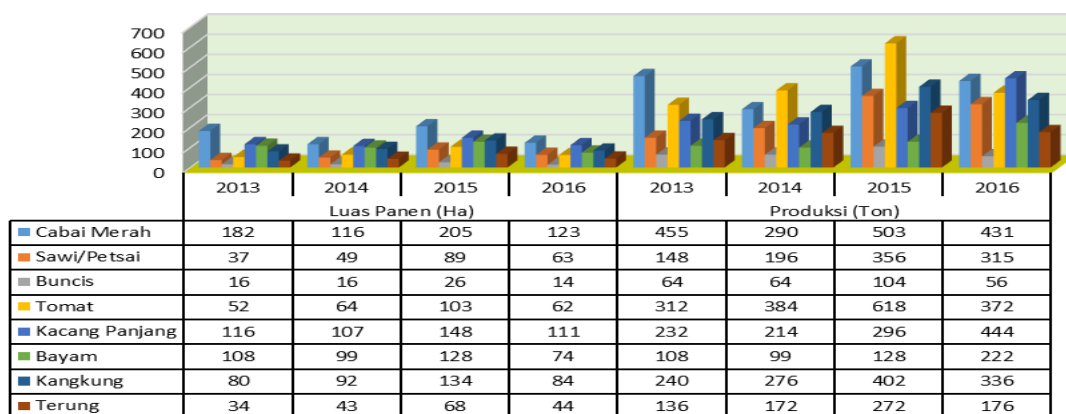


Sumber data: Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura Tahun 2017

Berdasarkan pemanfaatan lahan, kawasan selatan ke arah utara dan sebagian wilayah di bagian barat Kabupaten Jayapura merupakan lahan potensial tanaman bahan makanan utamanya tanaman padi. Pada kawasan tersebut, budidaya padi dapat dilakukan 3 kali panen setiap tahunnya.

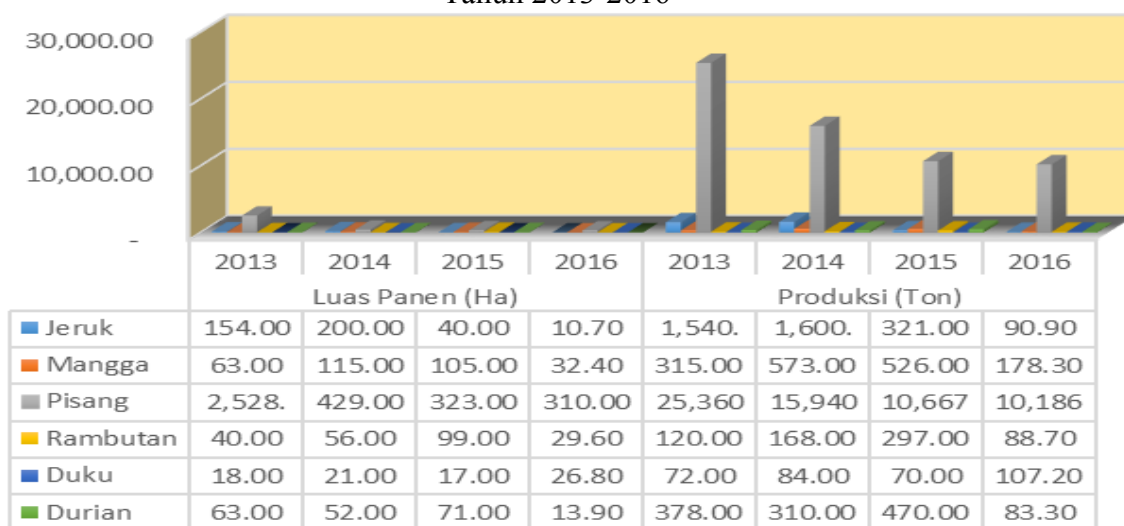
Selain sebagai penghasil pangan, Kabupaten Jayapura menjadi juga penghasil berbagai buah-buahan dan sayuran. Adapun luasan panen dan total produksi sayuran dan buah-buahan dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.25
Luas Panen dan Total Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Jayapura
Tahun 2013-2016



Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura tahun 2017 (Data dikelolah)

Grafik 2.26
Luas Panen dan Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Jayapura
Tahun 2013-2016

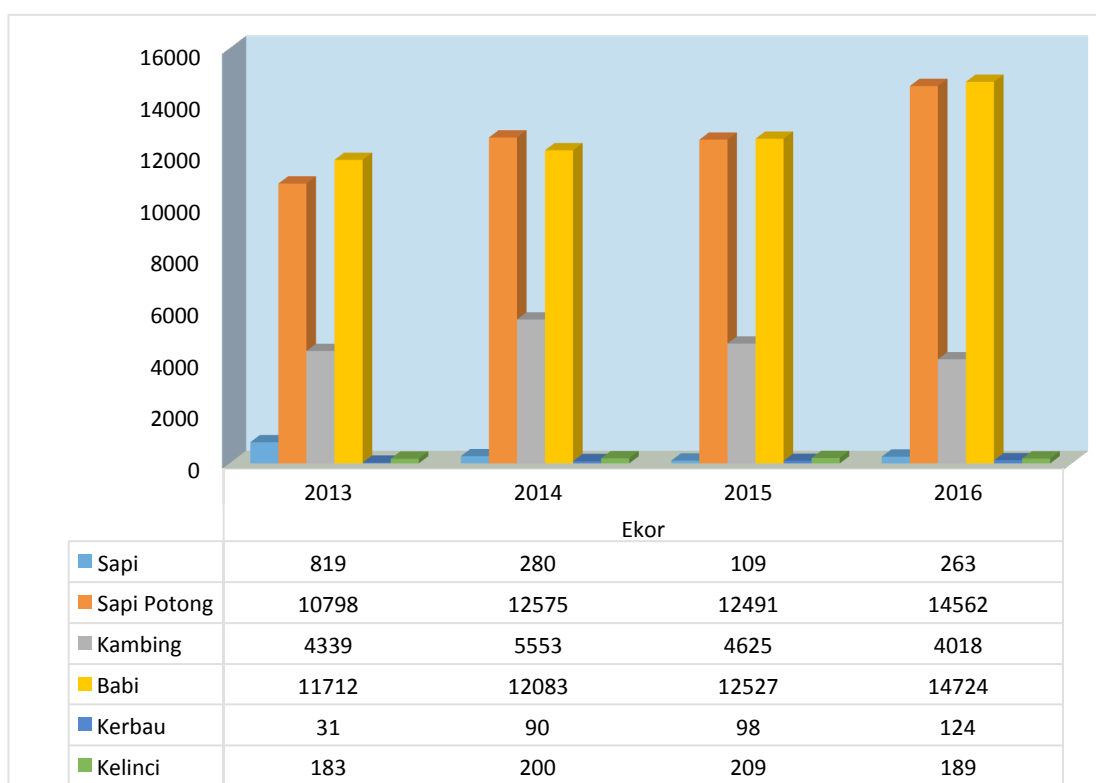


Sumber data: Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura tahun 2017 (Data dikelolah)

b. Peternakan.

Peternakan merupakan salah satu lapangan usaha pembangunan yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Jayapura. Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jayapura populasi Peternakan di Kabupaten Jayapura tahun 2016 yang paling banyak ternak Babi sebesar 14.724 ekor dan sapi potong sebesar 14.562 ekor. populasi ternak yang paling sedikit ternak kerbau 124 ekor. Populasi ternak Kabupaten Jayapura Tahun 2013 s.d Tahun 2016 dapat dilihat pada Grafik berikut.

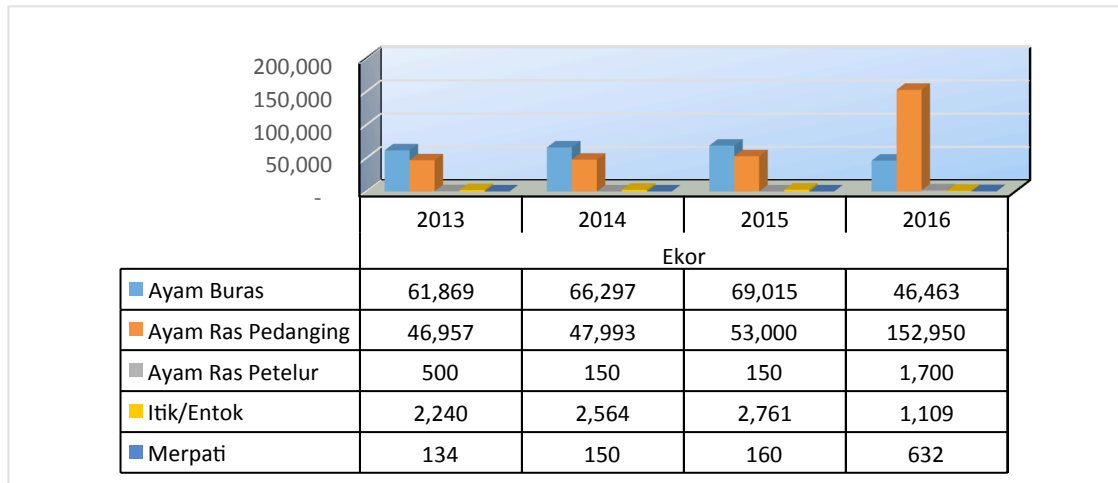
Grafik 2.27
Populasi Ternak (ekor) Kabupaten Jayapura Tahun 2013 - 2016



Sumber data: Dinas Peternakan Kabupaten Jayapura tahun 2017 (Data dikelolah)

Populasi unggas di Kabupaten Jayapura tahun 2016 yang paling banyak Ayam Ras Pedanging 152.950 ekor dan ayam buras sebesar 46.463 ekor. Ayam ras petelur. itik/entok sebesar 1.109 ekor dan merpati 632 ekor. Populasi unggas Kabupaten Jayapura Tahun 2013 s.d Tahun 2016 dapat dilihat pada Grafik berikut.

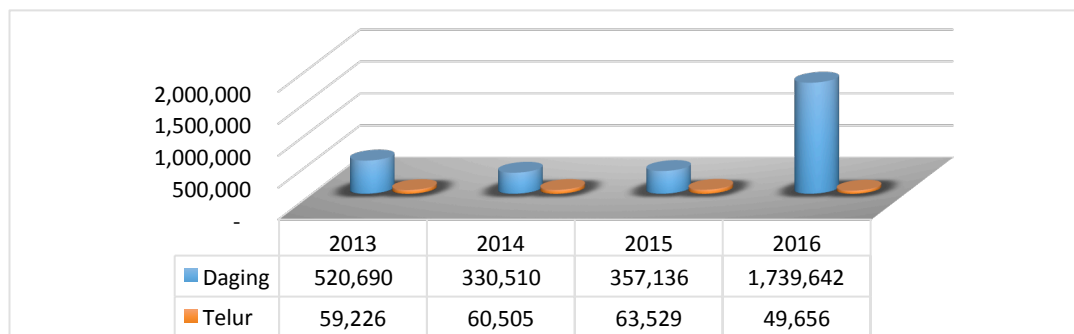
Grafik 2.28
Populasi Unggas di Kabupaten Jayapura Tahun 2013 s.d Tahun 2016



Sumber data: Dinas Peternakan Kabupaten Jayapura tahun 2017 (Data dikelolah)

Produksi daging di Kabupaten Jayapura tahun 2016 sebanyak 1.739.642 Kg dan telur sebanyak 49.656 Kg. Produksi Daging dan telur Kabupaten Jayapura Tahun 2013 s.d Tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.29
Produksi Daging dan Telur Di Kabupaten Jayapura Tahun 2013 - 2016



Sumber data: Dinas Peternakan Kabupaten Jayapura tahun 2017 (Data dikelolah)

5. Energi dan sumber daya mineral.

a. Energi

Potensi Energi di Kabupaten Jayapura yang sudah dimanfaatkan untuk tenaga pembangkit listrik. Jumlah tenaga pembangkit listrik di Kabupaten Jayapura ada 5 jenis yaitu PLTMH. PLTD. PLTA. PLTS Terpusat dan PLTS (Solar Home System). Jumlah pembangkit listrik di Kabupaten Jayapura sebanyak 270 unit. pembangkit listrik terbanyak adalah PLTS sebanyak 250 unit yang tersebar di 14 Kampung. Jumlah dan jenis pembangkit listrik dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.107
Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Jayapura Tahun 2015

No	Jenis Pembangkit Listrik	Distrik	Jumlah (Unit)
1	PLTMH	Raveni Rara	2
		Yokari	1
		Yakore	1
		Jumlah	4
		Sentani	1
		Genyem	1
		unurum guay	1
		Kamdera	1
		Demta	1
		Sentani timur (Ayapo)	1
		Kaureh (Lapua)	1
		Unurum guay (Nimboton)	1
		Yapsi (Bumi sahaja)	1
		Yokari (Bukisi. endokisi dan Meukisi)	3
		Jumlah	12
3	PLTA	Aorya/Genyem	1
4	PLTS Terpusat	Kampung Muaif	1
		Bangai	1
		Benguin Progo	1
		Jumlah	3
	PLTS (Solar Home system)	Asei	1
		Aurina	25
		Yadau	15
		Nendalsi	17
		Muara nawa	17
		Meukisi	25
		Pagai	30
		Naira	15
		Kamikaro	24
		Guryad	10
		Bangai	17
		Hulu atas	30
		Umrn	12
		Omon	12
		Jumlah	250
		Total Jumlah	270

b. Sumber daya mineral

Potensi Sumber daya mineral di Kabupaten Jayapura terdiri dari bahan tambang. mineral. logam serta galian industri yang tersebar di 19 Distrik. jenis sumber daya mineral dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.108
Penyebaran Bahan Tambang, Mineral Dan Logam Serta Bahan Galian Industri
di Kabupaten Jayapura

NO.	JENIS SUMBER DAYA MINERAL	LOKASI
1	Alluminium	Pegunungan Cycloop. Pantai Sarera
2	Krom	Ifar gunung
3	Tembaga	Pegunungan Cycloop
4	Emas	Pegunungan Cycloop. S. Kemiri. S. Deyau. S. Sawe. S. Ayapo
5	Kobal	Sentani
6	Tungsten	Sentani
7	Nikel	Sentani. Tanjung Tanah Merah. Ormu
8	Platina	Pegunungan Cycloop.
9	Perak	Pegunungan Cycloop.
10	Gamping	Kemtuk. Nimbokrang. Lereh. Nimboran. Sentani Barat. Depapre
11	Pasir	Distrik Sentani. Sentani Barat. Waibu dan Sentani Timur.
12	Trash	Doyo Lama. Doyo Baru
13	Andesit	Pegunungan Cycloop.
14	Granodiorit	Pegunungan Cycloop.
15	Lempung (kaolin)	Genyem. Lereh
16	Asbes	Danau Sentani dan sekitarnya
17	Talk	Danau Sentani dan sekitarnya
18	Gypsum	Genyem
19	Dolomit	Sentani dan sekitarnya. Demta
20	Kalsit	Demta. Ormu
21	Basalt	Pegunungan Cycloop.
22	Tarkhit	Pegunungan Cycloop.
23	Marmer	Ormu. Depapre
24	Batubara	Genyem Kecil. Umbrop dan Benyom

Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura

Kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian Kabupaten Jayapura terhadap PDRB ADHK pada tahun 2015 adalah Rp 176.958.100.000.- meningkat sebesar Rp 1.922.920.000.- dari kontribusi tahun 2014 yakni Rp 175.035.180.000.- dengan indeks dan laju implisit pada tahun 2015 masing-masing 95.12 persen dan 2.44 persen. Lapangan usaha energi Kabupaten Jayapura terhadap PDRB ADHK pada tahun 2015 adalah Rp 2.450.800.000.- menurun Rp 98.540.000.- dari kontribusi tahun 2014 yakni Rp 2.450.800.000.- dengan indeks dan laju implisit pada tahun 2015 masing-masing 131.26 persen dan 40.70 persen.

Tabel 2.109
Kontribusi Pertambangan Dan Energi Terhadap PDRB Tahun 2010-2015 Kabupaten
Jayapura (dalam juta dan %)

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2000 PERTAMBANGAN DAN ENERGI						
Lapangan usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pertambangan dan Penggalan	174.482.10	182.267.20	175.393.60	169.303.00	162.525.30	168.315.70
Pengadaan Listrik dan Gas	1.913.50	1.820.20	2.201.10	2.013.00	2.378.40	3.217.0
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 PERTAMBANGAN DAN ENERGI						
Pertambangan dan Penggalan	174.482.10	173.487.08	173.452.50	173.843.03	175.035.18	176.958.10
Pengadaan Listrik dan Gas	1.913.54	2.027.57	2.245.53	2.411.47	2.549.34	2.450.80
INDEKS IMPLISIT PDRB ADHB 2000 PERTAMBANGAN DAN ENERGI						
Pertambangan dan Penggalan	-	105.06	101.12	97.39	92.85	95.12
Pengadaan Listrik dan Gas	-	89.77	98.02	83.48	93.29	131.26
LAJU IMPLISIT PDRB ADHB 2000 PERTAMBANGAN DAN ENERGI						
Pertambangan dan Penggalan	-	5.06	-3.75	-3.69	-4.66	2.44
Pengadaan Listrik dan Gas	-	-10.23	9.19	-14.84	11.76	40.70

Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura. 2015

6. Perdagangan.

Pada tahun 2014 terdapat 979 sarana perdagangan. dengan jumlah usaha terbanyak adalah CV yakni 421 unit usaha dan kios yang berjumlah 155 unit usaha serta PT dengan jumlah 126 unit usaha. Rendahnya kepemilikan sarana perdagangan oleh putra daerah perlu menjadi perhatian bagi pemerintah guna meningkatkan dunia kewirausahaan daerah melalui peningkatan kreatifitas dan pemahaman mengenai dunia usaha bagi putra daerah sehingga dapat menambah jumlah putra daerah yang berkecimpung dalam dunia perdagangan.

Tabel 2.110
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kepemilikannya Di Kabupaten
Jayapura Tahun 2014

No	Jenis Usaha	Pemilik		
		Putra Daerah	Non Putra Daerah	Jumlah
1	Perseroan Terbatas (PT)	21	105	126
2	Koperasi	5	3	8
3	Persekutuan Komanditer (CV)	140	281	421
4	Firma	-	-	-
5	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	-	-	-
6	Agen Premiun. Minyak dan Solar (APMS)	2	-	2
7	Agen Minyak Tanah/Bersubsidi (AMT)	-	-	-
8	Hypermarket	-	-	-
9	Supermarket	-	-	-
10	Minimarket	1	1	2
11	Gudang	-	1	1
12	Hotel	1	5	6
13	Penginapan/Resort	-	3	3
14	Karaoke	-	11	11
15	Panti Pijat Tradisional	1	1	2
16	Klinik Pengobatan Tradisional	-	-	-
17	Restoran	-	3	3
18	Rumah Makan	2	15	17
19	Warung Makan	-	11	11
20	Kafe	-	5	5
21	Air Isi Ulang	-	2	2
22	Bengkel	-	21	21
23	Industri Meubel	-	20	20
24	Industri Alumunium	-	-	-
25	Industri Kerajinan Kulit	-	-	-
26	Penjahit/ Konveksi	-	1	1
27	Foto Studio	-	6	6
28	Rental Komputer dan Warnet	-	4	4
29	Kounter	-	5	5
30	Klinik Kecantikan dan Salon	-	5	5
31	Pangkas Rambut	-	1	1
32	Optikal	-	-	-
33	Apotik	1	6	7
34	Toko Obat Berizin	-	-	-
35	Industri Pande Besi	-	-	-
36	Industri Batu Tela	--	--	--
37	Industri Tahu dan Tempe	-	1	1
38	Industri Pembuatan Roti	-	-	-
39	Industri Batik Papua	-	1	1
40	Budidaya Ternak Sapi	-	-	-
41	Budidaya Ternak Babi	-	-	-
42	Budidaya Ternak Ayam	1	-	1
43	Budidaya Ikan Air Tawar	-	1	1
44	Usaha Dagang (UD)	3	39	42
45	Toko	1	82	83
46	Kios	47	108	155
47	Yayasan/Lembaga	4	1	5
Jumlah		230	749	979

Sumber data: DDA BPS Kabupaten Jayapura. 2017

Tabel 2.111
Jumlah Pasar Menurut Jenis di Kabupaten Jayapura Tahun 2017

No	Distrik	Jumlah Pasar					
		Sentral	Modern	Swadaya	Desa	Daerah Terpencil	Total
1	Kaureh	-	-	-	1	1	2
2	Airu	-	-	-	-	-	-
3	Yapsi	-	-	-	1	1	2
4	Kemtuk	-	-	1	1	-	2
5	Kemtuk Gresi	-	-	-	2	-	2
6	Gresi Selatan	-	-	-	-	-	-
7	Nimboran	-	-	-	2	-	2
8	Namblong	-	-	-	1	-	1
9	Nimbokrang	-	-	2	1	-	3
10	Unurum Guay	-	-	-	1	-	1
11	Demta	-	-	-	1	2	3
12	Yokari	-	-	-	-	-	-
13	Depapre	-	-	-	1	-	1
14	RaveniRara	-	-	-	-	-	-
15	Sentani Barat	-	-	1	1	-	2
16	Waibu	-	-	1	-	-	1
17	Sentani	1	1	-	-	-	2
18	Ebungfau	-	-	-	-	-	-
19	Sentani Timur	-	-	1	-	-	1
Jumlah		1	1	6	13	4	25

Sumber data: DDA BPS Kabupaten Jayapura, 2017

Di Tahun 2017 terdapat 25 pasar yang telah disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. pasar terbanyak berlokasi di pedesaan dengan jumlah pasar sebanyak 13 unit. Namun masih terdapat beberapa distrik yang masih belum memiliki pasar atau masih terdapat beberapa daerah yang sudah memiliki pasar tetapi belum secara maksimal dimanfaatkan oleh warga. dengan demikian sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut dan memberikan solusi yang bersifat perwujudan kesejahteraan.

7. Perindustrian.

Terdapat 167 industri kecil dan menengah yang dimiliki oleh Kabupaten Jayapura yang secara terintegrasi terdapat pada 11 distrik. jumlah IKM terbanyak adalah IKM yang bergerak pada bidang bahan kimia dan bahan bangunan. yaitu 53 unit IKM. lalu ada juga IKM yang bergerak dalam bidang pangan dengan jumlah 50 unit IKM. Namun, masih terdapat beberapa distrik yang belum merasakan manfaat dari keberadaan IKM. hal inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam memajukan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.112
Jumlah Industri Kecil dan Menengah Menurut Jenis di Kabupaten
Jayapura Tahun 2015

No	Distrik	Jumlah Industri Kecil Dan Menengah					
		Pangan	Sandang	Kimia & Bahan Bangunan	Logam & Elektronika	Kerajinan	Total
1	Kaureh	-	-	-	-	-	-
2	Airu	-	-	-	-	-	-
3	Yapsi	4	-	3	6	-	13
4	Kemtuk	1	-	1	-	1	3
5	Kemtuk Gresi	-	-	-	-	-	-
6	Gresi Selatan	-	-	-	-	-	-
7	Nimboran	-	-	2	-	1	3
8	Namblong	2	-	-	-	-	2
9	Nimbokrang	1	1	10	-	-	12
10	Unurum Guay	-	-	-	-	-	-
11	Demta	1	-	2	1	-	4
12	Yokari	-	-	-	-	-	-
13	Depapre	3	-	-	1	-	4
14	RaveniRara	-	-	-	-	-	-
15	Sentani Barat	-	-	2	-	1	3
16	Waibu	-	1	-	-	-	1
17	Sentani	34	25	30	14	7	110
18	Ebungfau	-	1	-	-	1	2
19	Sentani Timur	4	-	3	-	3	10
Jumlah		50	28	53	22	14	167

Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura. 2015

Tanggung jawab pemerintah yang tak kalah penting terkait industri kecil menengah adalah pemerintah perlu memfasilitasi IKM dengan ketersediaan pasar yang memadai sehingga dapat tercipta proses jual beli dan penampungan terhadap hasil industri yang telah diproduksi. hal ini sangat penting dilakukan mengingat pemerintah adalah pelaku utama dalam menciptakan konektifitas antara IKM, hasil industri dan pembeli/konsumen.

2.3.4. Penunjang Urusan

1. Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari tahun 2013 – 2017 mengerjakan dokumen perencanaan pembangunan daerah diantaranya RPJMD, RKPD dan RTRW dan mengevaluasi konsistensi dokumen perencanaan. Dokumen yang dikerjakan Bappeda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113
Data kinerja perencanaan tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	95	95	95	95	95
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	98	98.5	99	99.08	99.08
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100

2. Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2013 – 2017 mengerjakan dokumen laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jayapura diantaranya penjabaran APBD, penetapan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2013 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014 sampai tahun 2016 meningkat dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dokumen yang dikerjakan BPKAD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114
Data capaian kinerja keuangan tahun 2013-2017

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	13,67%	13,71%	14,52%	12,65%	
3	Persentase program yang tidak terlaksana	2,38%	3,23%	2,84%	0,54%	
4	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	3,36%	2,56%	3,47%	2,90%	
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20,65	20,81	17,51	14,80	
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	8,38	10,12	10,39	8,97	
7	Perbandingan antara belanja langsung terhadap APBD	45,52	49,53	62,73	53,08	45,00%
8	Perbandingan antara belanja tidak langsung Terhadap APBD	54,48	50,47	47,52	46,92	55,00%
9	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	10,06	8,33	7,89	11,15	
10	Penetapan APBD	Tidak Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

3. Kepegawaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura dari tahun 2013 – 2017 melaksanakan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan analisa jabatan serta penempatan ASN sesuai kebutuhan perangkat daerah. pembinaan, pendidikan, pelatihan dan analisa jabatan serta penempatan ASN sesuai kebutuhan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115

Pembinaan, pendidikan, pelatihan dan analisa jabatan serta penempatan ASN

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	428 JP	255 JP	321 JP	397,5 JP	321 JP
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,23	3,80	7,51	0,00	1,83
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	7,01	0,98	5,56	7,41	11,05
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	34	36	36	37	32
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	800	737	759	771	610
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	101	95	89	82	76

4. Penelitian dan pengembangan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura dari tahun 2013 – 2017 melaksanakan penelitian terhadap kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116

Hasil penelitian

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	90	100	90	90	80
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	29,41	20,59	38,24	29,41	20,59
	Penerapan SIDA:					
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	-	-	3	2	31
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0	0	0	0	0

Sumber : Balitbangda Kabupaten Jayapura, 2017

5. Pengawasan

Inspektorat Kabupaten Jayapura dari tahun 2013 – 2017 melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117
Hasil Pengawasan

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Pengawasan					
1	Persentase tindak lanjut temuan	10,00	15,00	11,00	12,00	61,00
2	Persentase pelanggaran pegawai	0	0	0	0	0,08
3	Jumlah temuan BPK	60	65	66	67	70

Sumber :Inspektorat Kabupaten Jayapura, 2017

6. Setwan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dari tahun 2013 – 2017 melaksanakan pengintegrasian Program-Program Kerja DPRD dan melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD). Hasil Kerja Sekretariat Dewan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Kinerja Sekretariat Dewan

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD			ada	ada	ada

Sumber :Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura, 2017

7. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2013 – 2017 menyelenggarakan proses penyelenggaraan pemerintah daerah diantaranya menyusun dan menerbitkan rancangan-rancangan peraturan daerah. Hasil Kerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119
Kinerja Sekretariat Daerah

No.	Bidang urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Penegakan PERDA					
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
6	Jumlah Perda Kabupaten Jayapura	0	12	14	13	8

Sumber : Bappeda Kabupaten Jayapura, 2017

7.1. Aspek Daya Saing Daerah.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita.

Pengeluaran konsumsi per kapita di Kabupaten Jayapura tahun 2016 sebesar Rp. 9.653.000 jika dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp. 9.586.000 mengalami peningkatan sebesar Rp. 67.000 (0.69 persen). Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120

Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Jayapura

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Total Pengeluaran RT	9.586.000	9.597.000	9.622.000	9.653.000
2	Jumlah RT	48.620	55.625	61.198	71.517
3	Rasio (1./2.)	197.16	172.53	157.23	134.97

Angka Perkembangan konsumsi RT per kapita di Kabupaten Jayapura tahun 2012 - 2016 rata-rata sebesar sebesar Rp. 9.606.000 dengan perkembangan sebesar 0.99 persen, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121

Angka Perkembangan Konsumsi RT per Kapita
Menurut Kabupaten Jayapura Tahun 2012 s.d 2016.

No	Uraian	Tahun					Rata-rata	Perkem- bangan
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total pengeluaran RT	9.575.000	9.586.000	9.597.000	9.622.000	9.653.000	9.606.600	0.99

b. Nilai Tukar Petani

Rasio Nilai tukar petani di Kabupaten Jayapura pada tahun 2013-2016 mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 100.84 persen mengalami penurunan sebesar 4.82 persen menjadi 96.02 persen pada tahun 2016. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.122
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Jayapura

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)	152.775	127.171	134.522	139.341
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	151.503	130.665	138.899	145.116
3	Rasio	100.84	97.33	96.85	96.02

Sumber Data: DDA Kabupaten Jayapura, 2016.

2.4.2. Fasilitas Wilayah/infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan

Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Jayapura tahun 2016 sebesar 280.61. jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 22.47 mengalami peningkatan sebesar 258.14. rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123
Panjang jalan dan jumlah jenis kendaraan
di Kabupaten Jayapura tahun 2012-2016

Jenis Kendaraan/Panjang jalan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Jenis Kendaraan	17.487	17.487	141.060	3.943	107.811
Panjang Jalan	77.830	52.020	49.633	38.420	38.420
Rasio	22.47	33.62	284.21	10.26	280.61

Sumber Data: Kabupaten Jayapura Dalam Angka 2014 dan 2016.

2. Jumlah orang/yang terangkut angkutan umum

Jumlah penumpang yang terangkut melalui terminal penumpang di Kabupaten Jayapura melalui Angkutan Darat. Udara dan ASDP sebanyak 8.660.605 orang. Penumpang Angkutan darat sebanyak 6.998.400 orang. Angkutan udara sebanyak 1.656.838 orang dan ASDP sebanyak 5.367 orang. Jika di proyeksikan maka rata penumpang yang terangkut per bulan sebanyak 721.717 orang dan per hari sebanyak 1.977 orang. Jumlah penumpang yang terangkut angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.124

Jumlah orang/yang terangkut angkutan umum tahun 2017

No	Uraian	Jumlah orang yang terangkut
1	Angkutan Darat	6.998.400
2	Angkutan Laut	
3	Angkutan Udara	1.656.838
4	Angkutan ASDP	5.367
Total		8.660.605

Sumber data: Dinas Perhubungan

3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara terminal per tahun

Jumlah penumpang yang terangkut melalui terminal bandara di Kabupaten Jayapura sebanyak 1.656.838 orang. Jika di proyeksikan maka rata-rata penumpang yang terangkut per bulan sebanyak 138.069 orang dan per hari sebanyak 4.539 orang. Jumlah penumpang yang terangkut di terminal udara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125

Arus lalu Lintas Penumpang Pesawat Udara melalui Pelabuhan udara Tahun 2016

No	Bulan	Banyaknya Penumpang		
		Datang	Berangkat	Transit
1	2	3	4	5
1	Januari	79.159	75.400	17.638
2	Februari	68.110	64.899	14.318
3	Maret	73.346	70.804	14.916
4	April	71.407	66.552	14.854
5	Mei	80.213	75.904	15.931
6	Juni	79.039	73.300	15.880
7	Juli	81.933	54.000	-
8	Agustus	77.671	75.842	16.134
9	September	73.022	68.406	14.058
10	Oktober	64.257	64.257	13.856
11	November	75.921	74.723	11.893
12	Desember	10.228	58.445	10.165
Total		834.306	822.532	159.643

Sumber Data: DDA BPS Kabupaten Jayapura 2017

Jumlah barang yang terangkut (bongkat muat) melalui cargo terminal bandara di Kabupaten Jayapura sebanyak 69.088.591 Kg. Jika di proyeksikan maka rata-rata barang yang terangkut per bulan sebanyak 5.757.383 Kg dan per hari sebanyak 189.284 Kg. Jumlah barang yang terangkut di terminal udara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126
Arus lalu Lintas Barang / Cargo Melalui Pelabuhan udara
Sentani per-bulan tahun 2016

No	Bulan	Banyaknya Barang	
		Bongkar	Muat
1	2	3	4
1	Januari	551.599	7.860.801
2	Februari	531.701	8.780.017
3	Maret	621.561	6.223.036
4	April	612.995	7.701.823
5	Mei	663.991	6.595.863
6	Juni	797.902	7.918.468
7	Juli	719.909	7.305.204
8	Agustus	1.022.957	6.827.635
9	September	401.639	775.448
10	Oktober	715.455	391.914
11	November	410.056	708.106
12	Desember	327.543	622.968
Total		7.377.308	61.711.283

Sumber: DDA BPS Kabupaten Jayapura 2017

4. Ketaatan terhadap RTRW

a. Ketaatan terhadap rencana tata ruang

Ketaatan terhadap rencana tata ruang dan wilayah di Kabupaten Jayapura harus menjadi fokus pemerintah guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemanfaatan lahan sesuai perencanaan tata ruang yang telah menjadi bagian dalam fungsi pengawasan dan kontrol serta kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 2.127
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW di Kabupaten Jayapura
Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016**
1	Realisasi RTRW	50	53	57	61	64
2	Rencana Peruntukkan RTRW	50	55	60	70	75
3	Rasio (1/2)	100.00	96.36	95.00	87.14	85.33

Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura. 2015

Sesuai uraian pada tabel diatas. tingkat rasio capaian ketaatan terhadap RTRW telah menunjukkan pencapaian sesuai dengan tingkat realisasinya pada kisaran 85 persen hingga 100 persen. Terkait realisasi RTRW. terjadi pula peningkatan ketaatan tiap tahunnya yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan capaian realisasi dari 50 persen di tahun 2012 menjadi 64 persen di tahun 2016 (masih merupakan data proyeksi). Begitupula dengan rencana peruntukkan RTRW yang meningkat dari 50 persen pada tahun 2012 menjadi 75 persen di

tahun 2016. Dengan meningkatnya tingkat ketaatan secara bertahap membuktikan bahwa tanggapan masyarakat terhadap upaya pemerintah mengawasi Pemanfaatan ruang masih cukup baik.

5. Luas produktif

Tabel 2.128
Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2013 s.d 2016
Kabupaten Jayapura

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Luas wilayah produktif	763.898.19	763.898.19	763.898.19	763.898.19
2	Luas Seluruh wilayah budidaya	14.500	14.900	15.050	15.160
3	Rasio (1/2.)	52.68	51.27	50.76	50.39

Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura

6. Luas wilayah Produktif

Luas wilayah produktif pada tahun 2016 diperkirakan akan meningkat menjadi 5.660 ha. bertambah sekitar 181 ha dari luas wilayah produktif pada tahun 2015 yakni 5.479 ha. Peningkatan luas wilayah produktif ini merupakan gambaran pertumbuhan positif terhadap dunia pertanian serta perkebunan sebagai akibat adanya implementasi kebijakan pembangunan daerah yang baik. Luas Lahan Produktif Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.129
Luas Lahan Produktif Kabupaten Jayapura Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016**
1	Luas Wilayah Kabupaten	17.514.00	17.514.00	17.514.00	17.514.00	17.514.00
2	Luas Wilayah Lindung	498.469.20	498.469.20	498.469.20	498.469.20	498.469.20
3	Luas Wilayah Budidaya	10.346.00	10.346.00	10.346.00	10.346.00	10.346.00
4	Luas Wilayah Produktif	5.042.00	5.167.00	5.303.00	5.479.00	5.660.00
A	Rasio Wilayah Produktif	1:2.052	1:2.002	1:1.952	1:1.888	1:1.828
5	Jumlah Luas Produktif Yang Dikembangkan	125.00	136.00	176.00	181.00	146.00

Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura. 2015

7. Luas Wilayah industry

Tabel 2.130
Luas wilayah industri

NO	URIAN	2013	2014	2015	2016
1	Luash wilaya Industry				
2	Luas seluruh wilayah budidaya	14.500 Ha	14.900 Ha	15.050 Ha	15.160 Ha
3	Rasio (1/2)	0.0105 Ha	0.0007 Ha	0.0151 Ha	0.0180 Ha

Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura

8. Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah banjir di Kabupaten Jayapura di tahun 2013 dari 152.60 Ha mengalami peningkatan dengan semakin sedikitnya luas wilayah banjir di Tahun 2017 menjadi 40.05 Ha. Rasio Luas wilayah banjir tahun 2013-2017 Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131
Rasio Luas wilayah banjir tahun 2013-2017 Kabupaten Jayapura

NO	URIAN	2013	2014	2015	2016	2017**
1	Luas wilayah banjir	152.60 Ha	11 Ha	228 Ha	273.05 Ha	40.05 Ha
2	Luas seluruh wilayah budidaya	14.500 Ha	14.900 Ha	15.050 Ha	15.160 Ha	15.500 Ha
3	Rasio (1/2)	0.0105 Ha	0.0007 Ha	0.0151 Ha	0.0180 Ha	0.0025 Ha

Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura

9. Luas Wilayah Kekeringan

Tabel 2.132
Rasio Luas wilayah kekeringan tahun 2013-2016 Kabupaten Jayapura

NO	URIAN	2013	2014	2015	2016
1	Luas wilayah Kekeringan				
2	Luas seluruh wilayah budidaya	14.500 Ha	14.900 Ha	15.050 Ha	15.160 Ha
3	Rasio (1/2)	0.0105 Ha	0.0007 Ha	0.0151 Ha	0.0180 Ha

Sumber data: RTRW Kabupaten Jayapura

10. Luas Wilayah Perkotaan

Wilayah perencanaan RDRT Kawasan Perkotaan Sentani disebut sebagai Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Kota Sentani. Lingkup Ruang BWP Kota Sentani berdasarkan aspek administrative dan fungsional dengan luas kurang lebih 4.447.376 hektar. beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bum. Batas-batas BWP Kota sentani meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan kampung sereh dan hinekombe Distrik Sentani Kota;

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kampung nendali distrik sentani timur;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan sebagian Kampung ifar besar. sebagian yobeh. sebagian dobonsolo. ifale (Distrik Sentani). dan kampung doyo lama pada distrik waibu; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan sebagian kampung ifar besar. sebagian yobeh. sebagian dobonsolo. ifale (Distrik Sentani). dan kampung doyo lama pada distrik waibu.

BWP Kota Sentani. terdiri atas:

- a. Kelurahan sentani kota dengan luas kurang lebih 1.274.015 hektar.
- b. Kampung ifar besar dengan luas kurang lebih 148.067 hektar;
- c. Kampung yobeh dengan luas kurang lebih 297.136 hektar
- d. Kampung yahim dengan luas kurang lebih 263.553 hektar.
- e. Kelurahan dobonsolo dengan luas kurang lebih 301.032 hektar
- f. Kampung sereh dengan luas kurang lebih 337.626 hektar.
- g. Kelurahan hinekombe dengan luas kurang lebih 1.007.714 hektar
- h. Kampung doyo baru dengan luas kurang lebih 708.056 hektar

BWP Kota Sentani dibagi menjadi tiga sub BWP yang terdiri atas;

- a. Sub BWP 1. Terdiri atas sebagian kelurahan sentani kota. dobonsolo. sebagian kampung yahim. yobeh. dan ifar besar dengan luas kurang lebih 1.401.027 hektar.
- b. Sub BWP II. terdiri dari sebagian kelurahan dobonsolo. Hinekombe dan sebagian doyo baru dengan luas kurang lebih 1.410.352 hektar.
- c. Sub BWP III. terdiri atas sebagian kelurahan Hinekombe. sentani kota dan sebagian kampung sereh dengan luas kurang lebih 1.420.177 hektar.

11. Jenis dan Jumlah bank dan cabang.

Jenis dan Jumlah Bank terdapat 4 jenis namun di Kabupaten Jayapura hanya dari tahun 2013-2016 terdapat 3 jenis Bank yaitu Bank Pemerintahan. Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah sedangkan untuk Bank asing tidak ada. Jumlah Bank Kabupaten Jayapura dari tahun 2013-2016 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.133
Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Jayapura tahun 2013-2016

Tahun	Jenis				
	Bank Pemerintahan	Bank swasta	Bank pembangunan daerah	Bank Asing	jumlah
2013	14	3	4	-	21
2014	8	9	4	-	21
2015	11	9	7	-	27
2016	4	6	1	-	11

Sumber data: Papua dalam angka 2014-2017.

12. Jenis dan jumlah perusahaan dan cabang.

Jumlah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan di tahun 2016 berjumlah 21 Perusahaan PMDN dan PMA di bandingkan tahun 2013 hanya 17 Perusahaan PMDN dan PMA.

Tabel 2.134
Jenis dan Jumlah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2016.

Tahun	Jenis		
	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah
2013	11	6	17
2014	10	7	17
2015	10	8	18
2016	13	8	21

Sumber data: Papua Dalam Angka 2014-2017

13. Jenis Kelas dan Jumlah restoran.

Jenis Kelas dan Jumlah Restoran di Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 terabagi atas 4 kelas yaitu Restoran. Rumah makan. Warung makan dan Kantin data selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.135
Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Warung Makan Yang
Terdaftar di Kabupaten Jayapura Tahun 2016

No	Distrik	Jumlah			
		Restoran	Rumah Makan	Warung Makan	Kantin
1	Kaureh	-		5	-
2	Airu		-	1	-
3	Yapsi	-	-	15	-
4	Kemtuk	-	-	-	-
5	KemtukGresi	-	-	2	-
6	Gresi Selatan	-	-	-	-
7	Nimboran	-	1	5	-
8	Namblong	-	-	5	-
9	Nimbokrang	-	-	12	-
10	UnurumGuay	-	-	5	-
11	Demta	-	-	2	-
12	Yokari	-	-	-	-
13	Depapre	-	-	4	-
14	RaveniRara	-	-	-	-
15	Sentani Barat	-	-	-	-
16	Waibu	-	5	1	2
17	Sentani	1	51	32	7
18	Ebungfau	-	-	-	-
19	SentaniTimur	3	-	3	1
	Jumlah/Total	4	57	92	10

Sumber data: DDA BPS Kabupaten Jayapura 2017.

14. Jenis kelas dan Penginapan hotel.

Kabupaten Jayapura memiliki hotel menurut klasifikasi pada tahun 2014 tercatat berjumlah 24 hotel baik yang berbintang maupun non bintang. dimana hotel berbintang di tahun 2014 yaitu Hotel Sentani Indah dengan jumlah kamar 100 Kamar dan Hotel Endit dengan jumlah kamar sedikit yaitu 4 kamar tergolong hotel Non Bintang. klasifikasi dan jumlah kamar untuk hotel-hotel yang lain di tahun 2014 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.136
Hotel di Kabupaten Jayapura Beserta Klasifikasi dan Jumlah kamar

No	Hotel	Klasifikasi	Room
1	Sentani Garden (Sentani Indah Hotel)	Bintang	100
2	Hotel surya	Non Bintang	9
3	Hotel Flamboyan	Non Bintang	23
4	Hotel Pelangi	Non Bintang	17
5	Hotel Semeru Amaron	Non Bintang	20
6	Hotel Mansapurani	Non Bintang	22
7	Hotel Ratna Manunggal	Non Bintang	33
8	Hotel Minang Jaya	Non Bintang	18
9	Hotel Jaguar	Non Bintang	7
10	Hotel Rasen	Non Bintang	58
11	Hotel Ratna Indah	Non Bintang	33
12	Hotel Tahara	Non Bintang	25
13	Hotel Sentani Raya	Non Bintang	40
14	Hotel Surya Jaya	Non Bintang	15
15	Hotel Metta Star	Non Bintang	21
16	Hotel Renggali	Non Bintang	25
17	Hotel Sinar	Non Bintang	18
18	Hotel Citra Buana	Non Bintang	24
19	Hotel Traveler	Non Bintang	120
20	Hotel Kemiri Raya	Non Bintang	10
21	Hotel J" FIVE "	Non Bintang	9
22	Hotel Berkat	Non Bintang	41
23	Hotel Endit	Non Bintang	4
24	Hotel Merbau	Non Bintang	20

Sumber data DDA BPS Kabupaten Jayapura 2017

15. Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih.

Penggunaan air bersih sebagai sumber air minum dipengaruhi oleh beberapa faktor. antara lain tersedianya fasilitas air bersih seperti air leding. tingkat pengetahuan penduduk tentang kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan juga dengan tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi penduduk. Oleh karena itu. persentase rumah tangga yang sudah menggunakan sumber air minum higienis di suatu daerah dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan penduduk.

Pada tahun 2013 rumah tangga di Kabupaten Jayapura yang telah menggunakan fasilitas air bersih untuk minum sebanyak 77.90 %. yaitu 30.39 % dari mata air terlindung. 26.07 % dari air isi ulang . dan 14.19 % dari sumur bor/pompa.

Sanitasi rumah sangat bergantung pada sistem pembuangan air besar. ini juga berkaitan erat dengan resiko kesehatan. Tempat/cara pembuangan yang kurang baik akan menyebabkan lingkungan tempat tinggal tercemar. baik pencemaran udara maupun pencemaran sistem sanitasi rumah. Sarana pembuangan air besar yang baik seharusnya memiliki penampungan akhir yang terlindung. yaitu tersedianya tangki-tangki penampungan kotoran. Sekitar 73.39 % rumah tangga di Kabupaten Jayapura memiliki tempat buang air besar sendiri. Persentase rumah tangga yang menggunakan tempat buang air besar dengan penampungan akhir tangki septik adalah 36.82 %. Sedangkan sisanya menggunakan kolam/sawah. sungai. lubang tanah. dan lainnya sebagai tempat buang air besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk tentang kesehatan dan kebersihan tempat pembuangan akhir masih rendah.

Jarak ideal antara sumber air minum dengan tempat pembuangan akhir tinja seharusnya minimal 10 meter. batasan tersebut untuk menghindari terkontaminasinya sumber air minum dari limbah rumah tangga. Berdasarkan data Susenas 2013. 65.70 persen rumah tangga memiliki tempat pembuangan akhir tinja yang berjarak aman dengan sumber air minum. Jadi dapat dikatakan bahwa pada tahun 2013 sekitar 34.30 persen rumah tangga di Kabupaten Jayapura beresiko terkena pencemaran sumber air minum.

16. Rasio ketersediaan daya listrik.

Pada tahun 2016 ketersediaan daya listrik terpasang di Kabupaten Jayapura sebesar 34.165 KW dengan produksi listrik sebesar 137.348.351 KWh. Jumlah pengguna listrik Kabupaten Jayapura pada tahun 2016 sebanyak 38.093 pelanggan. jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 dengan jumlah pengguna listrik sebanyak 35.884 pelanggan.

Tabel 2.137
Rasio Ketersediaan Listrik tahun 2013-2016

Tahun	Daya terpasang	Produksi Listrik	Jumlah Pelanggan	Rasio
2013	86.363	47.791.397	29.961	0.18
2014	14.779	87.822.200	33.302	0.02
2015	75..90	116.706.411	35.884	0.01
2016	34.165	137.348.351	38.093	0.02

Sumber data: Papua Dalam Angka 2014-2017

17. Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik.

Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Jayapura yang menggunakan listrik di tahun 2015 berjumlah 11.893 KK dimana yang menggunakan Sambunga listrik PLN berjumlah 10.206 KK. Non PLN berjumlah 1.161 KK dan PLTS berjumlah 526 KK.

Tabel 2.138
Data Sambung Listrik Di Kabupaten Jayapura Tahun 2015.

No	Wil/ Distrik	Jum Kamp /Kel	Pendudu k	KK	Sambungan Listrik (KK)			KK Blm Terpasang (5-6-7-8)
					PLN	Non PLN	PLTS	
	Wil Pem I							
1	Sentani	10	60.531	11.201	10.601	-	-	600
2	Sentani Timur	7	7.269	1.812	876	-	-	936
3	Sentani Barat	5	4.173	908	745	-	-	163
4	Waibu	7	9.398	1.585	1.289	-	-	296
5	Ebungfau	5	2.625	662	200	-	78	384
	Wil Pem II							
1	Kemtuk	12	3.577	817	407	-	-	410
2	Kemtuk Gresi	12	4.116	987	278	-	-	709
3	Nimboran	14	5.447	1.065	773	18	-	274
4	Nimbokrang	9	8.105	1.701	1.645	-	-	56
5	Namblong	9	3.857	742	648	-	-	94
6	Gresi Selatan	4	1.375	298	43	-	-	255
	Wil Pem III							
1	Ravenirara	4	1.142	324	81	-	-	243
2	Yokari	5	2.486	398	71	86	150	91
3	Depapre	8	4.385	792	552	46	-	194
4	Demta	7	3.323	711	486	-	-	225
	Wil Pem IV							
1	Airu	6	608	281	-	-	89	192
2	Kaureh	5	13.342	3.794	165	1.011	-	2.618
3	Unurm Guay	6	2.730	508	303	-	156	49
4	Yapsi	9	6.975	1.362	1.043	-	53	266
Jumlah		144	145.464	29.948	10.206	1.161	526	8.055

Sumber data: Pertambangan dan Energi Kabupaten Jayapura. 2014

18. Persentase penduduk yang menggunakan hp/Telepon

Tak hanya jasa pelayanan kantor pos yang disediakan oleh pemerintah. adapula sarana komunikasi lainnya seperti saluran telpon. wartel. warnet. dan sebagainya seperti digambarkan pada tabel. Jumlah saluran telepon terpasang terdapat pada 9 distrik. yakni distrik sentani. sentani timur. unurumguay. demta. nimboran. nimbokrang. kemtuk. depapre dan kaureh. dengan jumlah pelanggan 3.600 orang. Terkait dengan pelayanan telepon seluler. hingga tahun 2013 telah menjangkau hampir di semua wilayah Kabupaten Jayapura. Selain itu. sarana telekomunikasi yang disediakan pemerintah telah menjangkau 13 distrik dengan

bentuk fasilitas seperti sarana warnet/warsel (44 buah) . kios phone (56 buah). orari (79 buah). rapi (8 buah) dan televisi kabel (18 unit).

Tabel 2.139

Jumlah Sarana Telekomunikasi Di Kabupaten Jayapura Tahun 2017

NO	DISTRIK	JENIS SARANA TELEKOMUNIKASI					
		WARTEL	WARNET/ WARSEL	KIOS PHONE	ORARI	RAPI	TV KABEL
1	SENTANI		15	30	29	4	10
2	EBUNGFAUW						
3	WAIBU			4			5
4	SENTANI TIMUR	-	1	3	4	1	1
5	SENTANI BARAT	-	-	2	2	-	-
6	UNURUM GUAY	-	1	1	-	-	-
7	YOKARI						
8	DEMTA	-	2	2	1	-	-
9	NAMBLONG			2			
10	NIMBORAN	-	4	-	7	3	-
11	NIMBOKRANG	-	12	5	33	-	-
12	KEMTUK	-	1	-	3	-	-
13	GRESI SELATAN						
14	KEMTUK GRESI	-	-	-	-	-	-
15	RAVENIRARA						
16	DEPAPRE	-	4	2	-	-	1
17	KAUREH	-	3	-	-	-	1
18	YAPSI		1	5			
19	AIRU						
	JUMLAH	0	44	56	79	8	18

Sumber data: Dinas Infokom Kab. Jayapura. 2017

Masih terdapat 6 Distrik yang belum memiliki sarana prasarana telekomunikasi yang memadai. yakni distrik airu, ravenirara, yokari, ebungfau, Kemtuk gresi dan gresi selatan. Distrik-distrik dimaksud perlu menjadi perhatian pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana telekomunikasi guna menjawab kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi.

2.4.3. Fokus Iklim ber Investasi

1. Angka kriminalitas

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Jayapura tahun 2016 adalah 626 kasus dengan kasus terbanyak adalah Curanmor. jumlah tindakan criminal ini meningkat da tahun 2016 yakni 75 kasus. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah guna meningkatkan kondusifitas daerah bersama pihak-pihak yang terkait. seperti TNI POLRI dan masyarakat.

Tabel 2.140
Jumlah Kejahatan Di Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2016

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus			
		2013	2014	2015	2016
1	Curanmor	45	45	87	75
2	Pencurian Berat (Curat)	28	28	51	21
3	Pencurian Biasa	79	79	-	42
4	Aniaya Berat	14	14	1	2
5	Pembunuhan	-	-	2	3
6	Penipuan	37	37	38	39
7	Perkosaan	22	22	7	5
8	Penggelapan	25	25	13	10
9	Ancam/Peras	37	37	23	31
10	Pengeroyokan	55	55	57	60
11	Perzinahan	21	21	16	13
12	Bawa Lari Anak Perempuan Dibawah Umur	10	10	-	3
13	Pengrusakan	76	76	59	38
14	Penghinaan	58	58	4	9
15	Perjudian	2	2	3	3
16	Percabulan	35	35	8	3
17	Perbuatan Tidak Senang	55	55	-	2
18	Kecelakaan Lalu Lintas	42	42	56	69
19	Penyerobotan	27	27	-	17
20	Kasus Narkoba	10	10	-	27
21	Aniaya Biasa	-	-	-	120
22	Lain-lain	50	50	13	34
TOTAL		728	728	438	626

Sumber data: BPS Kabupaten Jayapura. 2017

2. Jumlah Demonstrasi

Tabel 2.141
Jumlah Demo Kabupaten Jayapura

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bidang politik	5	6	1	13	11
2	Ekonomi	7	8	14	15	14
3	Kasus pemogokan kerja	2		1	2	
4	Jumlah unjuk rasa	14	14	16	20	25

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Lama proses perijinan.

Tabel 2.142
Jenis ijin dan Lama proses perijinan

No	Jenis Izin	Lama Proses Perizinan (Hari Kerja)	
		Target	Realisasi
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	3	3
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3	3
3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3	3
4	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	12	12
5	Izin Prinsip Tata Ruang	14	14
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14	6
7	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	7	3
8	Izin Usaha Penanaman Modal		
	a. Izin Usaha Baru	6	Belum
	b. Izin Usaha Perluasan	6	Belum
	c. Izin Usaha Perubahan	5	Belum
	d. Izin Usaha Penggabungan	6	Belum
9	Izin Prinsip Penanaman Modal		
	a. Izin Usaha Baru	3	Belum
	b. Izin Usaha Perluasan	3	Belum
	c. Izin Usaha Perubahan	5	Belum
	d. Izin Usaha Penggabungan	7	Belum
10	Surat Izin Galian Pertambangan	Kewenangan Provinsi	
11	Surat Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Tidak ada	

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

4. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah.

Pajak di kabupaten jayapura terdiri atas 9 jenis pajak termasuk 1 jenis bea. jumlah jenis pajak sebagaimana dimaksud adalah pajak hotel. pajak restoran. pajak hiburan. pajak reklame. pajak penerangan jalan. pajak parker. pajak air tanah. pajak mineral bukan logam dan batuan. pajak bumi dan bangunan lapangan usaha pedesaan dan perkotaan/PBB-P2. sedangkan jenis bea yang dipungut di Kabupaten Jayapura adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sedangkan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Jayapura bersumber dari 3 jenis retribusi. yaitu retribusi jasa umum. retribusi jasa usaha. dan retribusi perizinan tertentu.

Tabel 2.143

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura

NO	URAIAN
	PAJAK
1	PAJAK HOTEL
2	PAJAK RESTORAN
3	PAJAK HIBURAN
4	PAJAK REKLAME
5	PAJAK PENERANGAN JALAN
6	PAJAK PARKIR
7	PAJAK AIR TANAH
8	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
9	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN LAPANGAN USAHA PERDESAAN DAN PERKOTAAN /PBB-P2
10	BEA PEROLEHANAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
	RETRIBUSI
1	RETRIBUSI JASA UMUM
2	RETRIBUSI JASA USAHA
3	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura 2017

5. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha.

Tabel 2.144

Jumlah perda yang mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Jayapura

No	Perda	Tanggal Penetapan
1	Pengelola Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Maret 2012
2	Pajak Daerah	20 November 2012
3	Retribusi Jasa Umum	20 November 2012
4	Retribusi Perizinan Tertentu	20 November 2012
5	Penyelenggaraan Kepariwisata	16 Mei 2014
6	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	16 Mei 2014
7	Minuman Beralkohol	23 Oktober 2014
8	Penyertaan Modal Daerah Pada PT. BANK Pembangunan Daerah. Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura	31 Desember 2014
9	Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar dan Terminal Pharaa Sentani	31 Desember 2014
10	Penyelenggaraan Reklame	20 April 2015
11	Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Masyarakat Hukum Adat	20 April 2015
12	Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Produk Bersama Jayapura Baru Kampung Membangun Era Masyarakat Mandiri	12 Februari 2014
13	Penetapan Tarif Dasar dan Harga Standar Nilai Jual Per Meter Kubik dan Per Ret Mineral Bukan Logam dan Batuan	7 Juli 2014
14	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Golongan Retribusi Jasa Umum atas Pengendalian Menara Telekomunikasi	15 September 2014

2.4.4. Fokus Sumber daya Manusia.

1. Kualitas tenaga kerja (Rasio kelulusan S1.S2.S3).

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Jayapura bisa dilihat dari jumlah lulusan klasifikasi pendidikan S1/S2/S3. dimana dari tahun 2014 hingga tahun 2016 masih banyak lulusan dari S1. namun rasio kelulusan S1-S3 terhadap jumlah penduduk di tahun 2016 sebesar 9.16 persen dari presentase yang ada maka dapat dikatakan bahawa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Jayapura Tahun 2016 masih rendah karena tidak mencapai 10 persen.

Tabel 2.145

Rasio Lulusan S1/S2/S3 tahun 2013-2016 Kabupaten Jayapura

NO	Uraian	2014	2015	2016
1	Jumlah lulusan S1	7.975	9.647	10.495
2	Jumlah lulusan S2	589	692	752
3	Jumlah lulusan S3	67	78	91
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	8.631	10.417	11.338
5	Jumlah penduduk	119.830	121.410	123.780
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	7.20	8.58	9.16

2. Tingkat ketergantungan.

Tingkat ketergantungan di Kabupaten Jayapura terhadap usia produktif tahun 2013 hingga tahun 2017 masih tergolong tinggi terlihat pada tingkat rasio masih di atas 40 persen. namun Rasio Ketergantungan Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan dimana tahun 2013 tingkat rasio sebesar 52.97 persen mengalami peningkatan tahun 2016 menjadi sebesar 45.20 persen.

Tabel 2.146

Rasio Ketergantungan Kabupaten Jayapura Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	39.031	38.556	38.535	35.378	35.318
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	2.104	2.237	2.408	3.707	3.899
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	41.135	40.793	40.943	39.085	39.217
4	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	77.654	78.590	80.467	84.695	86.758
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	52.97	51.91	50.88	46.15	45.20

Sumber Data: DDA Kabupaten Jayapura 2017.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bahwa pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersediannya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Dalam era otonomi daerah saat ini, sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; (ii) Dana perimbangan, serta (iii) Lain-lain pendapatan yang sah.

Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Landasan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mempertegas bahwa “Keuangan Daerah” merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Dengan mengikuti prinsip “*Money Follow Function*”, maka dapat dikatakan bahwa pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang artinya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pusat didanai oleh APBN dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai oleh APBD. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Jayapura periode tahun RPJMD 2013-2017 dapat dicermati lebih terinci pada perkembangan realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sebagaimana uraian berikut.

a. Pendapatan Daerah

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pembangunan yang didesentralisasikan maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memperoleh

dan mengelola keuangan dalam bentuk pendapatan daerah.

Sumber penerimaan pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :

Pajak Daerah

- Retribusi Daerah
- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Dan lain-lain PAD yang sah

Dana Transfer meliputi :

- Dana Transper Pusat
- Dana Transper Pusat Lainnya
- Dana Transper Pemerintah Lainnya

Lain Lain Pendapatan Yang Sah meliputi :

- Dana Hibah
- Dana Darurat
- Dana Desentralisasi

Target pendapatan daerah Kabupaten Jayapura selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat di tabel 3.1

Tabel 3.1
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2013-2017

NO	URAIAN	PENDAPATAN TAHUN 2013	PENDAPATAN TAHUN 2014	PENDAPATAN TAHUN 2015	PENDAPATAN TAHUN 2016	TARGET PENDAPATAN TAHUN 2017	PERTU MBUHA N
4	PENDAPATAN DAERAH	854.601.422.306	994.174.941.372	1.218.251.513.112	1.497.540.656.362	1.266.434.424.234	9,31
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.516.471.560	69.423.015.948	76.901.687.650	84.316.762.612	101.749.244.700	18,80
4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	8.321.200.000	23.694.153.907	18.326.305.712	26.053.560.000	33.501.383.663	15,08
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	7.050.771.815	18.128.288.591	30.223.240.000	29.082.879.462	29.044.244.700	23,83
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.948.392.777	3.800.000.000	4.300.000.000	6.020.000.000	6.900.000.000	11,38
4.1.4	LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	15.196.106.968	23.800.573.450	24.052.141.938	23.160.323.150	32.303.616.337	12,41
4.2	DANA PERIMBANGAN	633.442.560.976	712.370.241.596	851.224.643.000	1.110.531.942.600	882.575.433.638	6,72
4.2.1	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	47.136.886.976	49.671.549.596	64.472.053.000	50.271.074.000	42.730.899.638	(12,00)
	BAGI HASIL PAJAK	34.504.712.446	20.979.943.066	27.388.714.000	20.518.411.000	22.030.435.242	17,35
	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	12.632.174.530	28.355.780.767	37.083.339.000	29.752.663.000	20.700.464.396	10,92
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	533.111.084.000	597.199.562.000	621.019.550.000	690.129.417.000	684.494.186.000	6,22
4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	53.194.590.000	65.499.130.000	165.733.040.000	370.131.451.600	155.350.348.000	10,25
4.3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.000.000.000	218.314.592.000	274.703.688.000	34.382.815.000	281.459.765.896	12,42
4.3.1	DANA HIBAH	0	0	0	0	0	
4.3.2	DANA DARURAT	2.000.000.000	0	0	0	0	
4.3.3	BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	11.464.479.858	13.794.466.000	18.056.145.462	17.423.415.150	20.500.874.896	(33,15)
	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	11.464.479.858	13.794.466.000	18.056.145.462	17.423.415.150	20.500.874.896	24,50
4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	107.665.579.912	158.173.936.000	86.138.875.000	228.539.531.000	239.910.601.000	11,88
	DANA PENYESUAIAN	31.165.704.912	54.589.963.999	83.563.877.000	124.955.559.000	136.326.629.000	24,88
	DANA OTONOMI KHUSUS	76.499.875.000	103.583.972.001	103.583.972.000	103.583.972.001	103.583.972.000	6,41
4.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	48.666.140.000	46.346.190.000	82.346.190.000	22.346.190.000	21.698.290.000	(30,86)

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (dikelola tahun 2017)

Dari tabel 3.1 menunjukkan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan rata rata 9,31 % tahun, Target pendapatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 535.783.922.306 (62,69%). Dimana pada tahun 2013 target pendapatan daerah sebesar Rp. 854.601.422.306 dan pada tahun 2016 menjadi Rp 1.497.540.656.362. Pada tahun 2017 target sebesar Rp. 1.266.434.424.234 menurun sebesar Rp. 124.600.900.378 (8,96%). Menurunnya target pendapatan tahun 2017 diakibatkan adanya defisit APBN yang mengakibatkan menurunnya dana transfer secara nasional ke daerah.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	Pertumbuhan
4	PENDAPATAN	863.347.739.128	1.003.664.252.764	1.186.438.268.364,92	1.409.107.490.955,46	1.227.749.126.679,63	10,82
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.914.407.615	80.133.491.088	74.130.385.458,92	87.394.171.937,46	96.961.324.536,63	31,11
4.1.1	Pajak Daerah	11.371.630.738	28.247.804.695	20.437.426.648,75	27.171.795.078,13	35.672.561.883	21,57
4.1.2	Retribusi Daerah	8.466.385.867	20.556.692.293	25.184.455.000	25.885.531.550,00	28.865.345.185	7,91
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah	3.648.392.777	4.464.415.345	1.746.004.842	5.719.092.533,00	200.000.000	6,19
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	18.427.998.233	26.864.578.755	26.762.498.968,17	28.617.752.776,33	32.223.417.468,41	15,84
4.2	DANA PERIMBANGAN	636.419.891.977	708.726.243.361	832.967.467.644	1.020.402.973.157,00	854.302.192.529	7,07
4.2.1	Dana Bagi Hasil pajak/hasil bukan pajak	50.114.217.977	46.027.551.361	46.212.447.644	56.369.513.458	26.280.675.292	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	533.111.084.000	597.199.562.000	621.019.550.000	690.129.417.000,00	707.058.948.000	7,78
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	53.194.590.000	65.499.130.000	165.735.470.000	273.904.042.699,00	120.962.569.237	6,79
	Pendapatan Transfer Pusat Lainnya (DAK IPD)	108.077.080.000	151.783.936.000	180.192.350.000	228.539.531.000	240.741.730.437	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	76.936.359.536	63.020.582.315	99.148.065.262	72.770.814.861,00	35.743.879.177	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	34.382.814.103,00	-	
4.3.2	Dana Darurat	2.000.000.000	-	-	-	-	
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah lainnya	9.477.279.536	16.674.392.315	16.801.875.262	16.041.810.758,00	16.567.379.177	9,75
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	108.077.080.000	151.783.936.000	180.192.350.000	228.539.531.000	240.741.730.437	
	Dana Desentralisasi Fiskal dan percepatan pembangunan	48.612.890.000	25.000.000.000	60.000.000.000,00	-	-	
4.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah lainnya	16.846.190.000	21.346.190.000	22.346.190.000,00	22.346.190.000,00	19.176.500.000	

Sumber Data : Badan Pengelola Pendapatan Daerah (dikelola tahun 2017)

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura selama periode tahun 2013-2017 menurut data yang disajikan pada tabel 3.2 menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,82 %. Berdasarkan pertumbuhan pendapatan tahun 2015-2016 memperlihatkan perkembangan realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.186.438.268.365, terjadi penambahan sebesar Rp.222.669.222.591 (18,77%) sehingga pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp.1.409.107.490.955, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar

Rp.181.358.364.277 (12,87%) sehingga realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai Rp.1.227.749.126.679,63, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional sebesar 7 %.

b. Belanja Daerah

Sebagai instrument penting dalam struktur APBD, belanja daerah merupakan penentu untuk mengetahui kecenderungan belanja disuatu daerah selama periode RPJMD. Demikian pula dengan kondisi yang berlangsung di Kabupaten Jayapura tahun 2013-2017 sebagaimana diperlihatkan dalam tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3.
Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017

No.	Uraian Belanja	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertum- buhan
	BELANJA	884.098.061.653	1.034.176.636.721	1.152.059.979.946	1.463.248.465.569	1.230.102.960.917	14,06
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	510.003.798.796	532.370.166.974	512.358.674.741	681.776.525.895	652.176.329.178	11,02
1	Belanja Pegawai	364.176.575.380	391.448.989.736	356.691.710.741	397.658.853.126	394.074.346.119	3,38
2	Belanja Bunga	-	-	-	-		
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-		
4	Belanja Hibah	16.313.980.000	31.405.871.346	33.733.335.000	86.564.606.700	45.457.644.804	17,09
5	Belanja Bantuan Sosial	17.003.157.600	11.874.570.000	6.470.390.000	9.010.900.000	11.105.720.000	-21,49
6	Belanja bagi hasil						
7	Belanja Bantuan Keuangan	97.797.440.000	95.813.702.103	110.879.199.000	185.577.148.000	194.673.316.595	
8	Belanja Tidak Terduga	14.712.645.816	1.827.033.789	4.584.040.000	2.965.018.069	6.865.301.660	-149,93
B	BELANJA LANGSUNG	374.094.262.857	501.806.469.747	639.701.305.205	781.471.939.674	577.926.631.739	
1	Belanja Pegawai	65.240.412.601	61.392.814.454	71.969.161.468	82.451.789.706	95.034.067.987	
2	Belanja Barang dan Jasa	167.970.237.661	224.304.991.411	287.547.634.421	295.000.719.716	311.711.548.990	24,42
3	Belanja Modal	140.883.612.595	216.108.663.882	280.184.509.316	404.019.430.253	171.181.014.762	22,96

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (dikelola tahun 2017)

Pada tabel di atas terlihat bahwa total belanja daerah Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan selama periode 2013-2017. Pada tahun 2013 belanja sebesar Rp 884.098.061.653,- menjadi Rp. 1.009.788.521.604 pada tahun 2017 atau meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 14,06 persen pertahun.. Keadaan ini merupakan indikator bahwa kebutuhan belanja daerah ini sangat besar setiap tahun selama periode tersebut dan belum mampu diimbangi dengan laju pertumbuhan pendapatan daerahnya, sebagai akibat dari masih sangat rendahnya kemampuan daerah ini dalam menciptakan PAD setiap tahun. Oleh karena itu upaya yang efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan terobosan-terobosan kreatif dan inovatif guna meningkatkan PAD dari tahun ke tahun dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah ini yang sangat melimpah. Secara nominal, belanja operasi lebih besar dari pada

belanja modal pada tahun 2013. Rata Rata proporsi Belanja Langsung terhadap total belanja daerah Tahun 2013-2017 sebesar 50,65 persen, kondisi ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Jayapura selama periode ini, lebih banyak diarahkan kepada belanja Tidak Langsung, utamanya pada komponen belanja pegawai, sebagai akibat masih besarnya jumlah pegawai di daerah ini, sehingga dibutuhkan pula belanja pegawai yang lebih besar dan meningkat secara signifikan setiap tahun. Dari delapan komponen belanja Tidak Langsung maka belanja pegawai memperoleh alokasi belanja terbesar Rp. 364.176.575.380 pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 395.111.206.819 pada tahun 2017 atau bertambah sebesar 8.49 persen selama periode tersebut.

3.1.2. Neraca Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan yang berlaku tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Neraca Kabupaten Jayapura pada periode 2012-2016 terlihat posisi keuangan cukup baik, namun tingkat pertumbuhan masing-masing komponen cukup rendah dan berfluktuasi. Untuk aset lancar, pada tahun 2013 sampai tahun 2016 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,34 %/tahun.

Selanjutnya, dapat dilihat nilai investasi jangka panjang yang meningkat dari Rp.57.831.002.808,65 pada Tahun 2013 menjadi Rp. 118.113.475.781,60,- pada Tahun 2016. Selain itu, terlihat pula bahwa nilai aset tetap pemerintah Kabupaten Jayapura pada periode 2012-2016 berfluktuatif sebesar Rp. 1.873.195.246.277,- pada Tahun 2013 menjadi Rp.1.884.540.767.899,77,- pada Tahun 2016. Kondisi ini disebabkan karena adanya penambahan aset tetap, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan bangunan, yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jayapura setiap tahun selama periode tersebut. Dari beberapa komponen aset tetap, terlihat bahwa pembangunan jalan, jembatan dan irigasi serta bangunan gedung merupakan prioritas utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, sehingga nilai komponen ini mengalami pertambahan setiap tahun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Pada tabel 3.3 terlihat pula bahwa secara

keseluruhan, jumlah aktiva dalam neraca keuangan Kabupaten Jayapura telah meningkat pula selama periode 2012-2016, yakni sebesar Rp. 2.164.141.117.962,25 pada Tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 2.190.258.252.436,61,- pada Tahun 2016, namun tahun 2015 menurun sebesar Rp. 1.944.224.412.664 . Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Jayapura mempunyai kemampuan untuk meningkatkan investasi jangka panjang dan aset tetap dalam periode 2012-2016 dan dapat diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut selama periode 2012-2016 sebagai periode RPJMD ini.

Kemudian jika dilihat dari aspek kewajiban daerah, maka pada tabel 3.4 terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki hutang pada Tahun anggaran 2012 - 2016. Tetapi pada Tahun 2013 sebesar Rp. 1.437.781.063 dan pada tahun 2016 Rp. 244.036.989,00 Selanjutnya, pada tabel 3.6 terlihat bahwa equitas dana lancar dalam neraca memperlihatkan posisi SiLPA yang cukup fluktuatif, tetapi kecenderungan meningkat selama periode 2012-2016, yakni sebesar Rp.156.724.517.700 pada Tahun 2013 menurun menjadi Rp.107.417.995.977,94 tahun 2016. SiLPA yang terbentuk selama periode ini didominasi oleh komponen cadangan persediaan yang tumbuh dengan lambat, yakni hanya 2,5 persen per tahun. Selain itu, SiLPA yang terbentuk tersebut digunakan untuk membayar utang, sehingga hutang pada Tahun 2013 berkurang. Pada sisi lain, equitas dana yang diinvestasikan memperlihatkan trend yang meningkat dari Rp.1.989.332.352.684 pada Tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 2.190.258.252.436,61,- pada tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 5 persen per tahun.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya posisi keuangan daerah Kabupaten Jayapura selama periode 2013-2016 adalah cukup baik yang ditunjukkan oleh jumlah aset yang dimiliki dapat menutupi semua kewajiban. Untuk mengetahui gambaran lebih detail mengenai kemampuan pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menyediakan dana untuk pembangunan daerah dan memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, selama periode 2013-2016, dapat dilihat pada tabel 3.4 yang mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

Tabel 3.4
Rata-rata pertumbuhan Neraca Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2013-2016

URAIAN	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Rata-rata Pertum- buhan %
ASET	2.143.600.031.728	2.459.258.046.010	1.944.224.412.664	2.190.258.252.435	
ASET LANCAR	170.978.191.234	231.618.167.908	251.414.685.288	151.073.834.227	
Kas	156.724.517.700	183.273.210.259	209.348.738.264	107.508.282.967	127
Piutang	2.998.125.256	24.133.475.266	21.519.170.425	17.126.325.392	
Persediaan	11.255.548.278	24.211.482.382,60	20.546.776.598,94	26.439.225.868,33	22,83
ASET TETAP	1.873.195.246.277	2.103.493.144.102	1.551.620.407.992	1.884.540.767.899	
Tanah	92.252.996.163	102.626.894.302	205.440.618.691	221.868.048.691,00	39,66
Peralatan dan Mesin	268.454.063.709	297.694.958.871	289.061.039.523,70	323.569.047.677,00	5,98
Gedung dan Bangunan	531.364.762.983	587.524.268.332,63	644.469.554.847,05	704.145.231.299,38	6,64
Jalan, Irigasi dan Jaringan	834.351.813.523	946.503.225.635	1.033.091.887.234	1.242.047.141.780,67	9,05
Aset Tetap Lainnya	15.752.388.453	16.098.894.853	16.181.936.353	17.149.059.670,00	12,45
Konstruksi Dalam	131.019.221.446	153.044.902.108	157.267.776.527	273.773.401.810,00	0,73

Pengerjaan					
Akumulasi Penyusutan			-793.892.405.184,15	-898.011.163.029,18	
ASET LAINNYA	99.426.594.217	124.146.734.000	141.189.319.385	154.643.650.309	
Kemitraan dengan pihak Ketiga	18.793.300.000	18.793.300.000	18.793.300.000	18.793.300.000,00	1,19
TPTGR	11.182.451.736		-	Belum ada Data	-7
Tagihan Penjualan Angsuran	1.120.293.250		-		12,44
Aset Lain-Lain	27.210.058.613	30.685.345.938	60.367.421.829,80	26.062.323.784,00	-6,74
Tagihan Jangka Panjang		12.367.243.867	12.113.542.986	12.082.446.986,00	-0,52
Aset tidak berwujud			10.598.649.550	10.892.649.550,00	
Akumulasi Amortisasi			-33.569.545.952	-31.300.545.792,17	
Investasi Dana Bergulir	5.715.284.765,65	2.627.126.700,05	70.074.876,05	83.136.734,76	-67,07
Dana bergulir diragukan tertagih	(2.028.787.809,00)	-39.788.357,00	-39.788.357,00	-39.788.357,00	-66,52
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	54.198.505.852	59.713.505.852	72.855.664.452,15	118.070.127.403,84	9,22
JUMLAH ASET DAERAH	2.143.600.031.727,65	2.459.258.046.009,60	1.944.224.412.664,38	2.190.258.252.435,21	-0,98
KEWAJIBAN	2.164.141.117.961,60	1.832.265.217.193,00	213.546.112.205,10	2.146.803.102.798,88	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.437.781.063	1.223.882.005	4.360.467.339	244.036.989	0
Hutang PFK	0	66.010.565	163.093.397	90.286.989,00	20,86
Hutang Pajak	1.079.237.703	0	0		
Hutang Langganan	0	0	0		
Hutang Lain-lain	358.543.360	578.935.720	-		12,73
Pendapatan diterima dimuka			2.232.122.375,10	0	0
Hutang jangka pendek lainnya		578.935.720	1.965.251.567	153.750.000,00	35,74
EKUITAS DANA	2.162.703.336.899	1.831.041.335.188	209.185.644.866	2.146.559.065.810	5,01
EKUITAS DANA LANCAR	173.370.984.215	1.831.041.335.188	209.185.644.866	107.417.995.978	
S T L P A	156.724.517.700	1.831.041.335.188	209.185.644.866	107.417.995.977,94	4,35
Cadangan Deposito			0	0	0
Cadangan Piutang	6.828.699.299	-	-	0	3,68
Cadangan Persediaan	11.255.548.278,60	-	-	0	5,67
Pendapatan yang ditangguhkan				0	
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-1.437.781.063	-	-		108,26
EKUITAS DANA INVESTASI	1.989.332.352.684	0	0	2.039.141.069.832	
Diinvestasikan dalam Investasi Permanen	57.831.002.808	-	-	118.070.127.403,84	1,73
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.873.195.246.277	-	-	1.884.540.767.899,77	2,33
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	58.306.103.599	-	-	36.530.174.528,33	-15,31
Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	0	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.326.844.454.860,20	3.663.306.552.381,00	422.731.757.071,10	4.293.362.168.608,76	

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (dikelola tahun 2017)

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan keuangan masa lalu memberikan informasi tentang peningkatan pendapatan daerah, alokasi belanja, dan kebijakan pembiayaan defisit atau surplus. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jayapura selama periode 2013-2017 tetap mengacu kepada upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, sehingga senantiasa diarahkan pada kebijakan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang berbasis kinerja dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, adil dan akuntabilitas. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah ini harus pula mempertimbangkan perubahan yang dapat terjadi selama periode 2013-2017,

dimana pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jayapura selama periode ini senantiasa fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan pendanaan, baik untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Analisis keuangan daerah pada masa lalu dapat dicermati dari tiga aspek, yaitu (i) analisis kebijakan pendapatan, (ii) analisis kebijakan belanja, (iii) analisis kebijakan pembiayaan. Khusus untuk analisis kebijakan pembiayaan lebih detail dijelaskan pada subbab kerangka pendanaan. Untuk itu, analisis kebijakan pendapatan daerah dan analisis kebijakan belanja daerah di Kabupaten Jayapura akan diuraikan pada bagian ini. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran belanja untuk kebutuhan aparatur pemerintah cenderung menurun secara fluktuatif dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Pada tahun 2013 sebesar 54,81% menurun menjadi sebesar 40,53% pada Tahun 2016 . dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 13,17% menjadi 53,70. Jika dibandingkan antara total belanja kebutuhan aparatur dengan total belanja daerah, maka nampak bahwa belanja kebutuhan aparatur pemerintah rata rata 51,41% setiap tahun selama periode 2013-2017. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 48,51% pendapatan daerah Kabupaten Jayapura yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian visi, misi kepala daerah dan Ururan Pemerintahan. Kecenderungan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura dalam postur APBD selama tahun 2013-2017 secara proposional dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut

Tabel 3.5
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2017

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran Pembiayaan	Prosentase
		(Rp)	(Rp)	
		(a)	(b)	
1	Tahun anggaran 2013	459.668.175.394	838.723.269.052	54,81
2	Tahun anggaran 2014	536.948.844.935	978.885.432.999	54,85
3	Tahun anggaran 2015	618.205.098.883	1.162.975.091.946	53,16
4	Tahun anggaran 2016	614.166.632.700	1.515.300.469.239	40,53
5	Tahun anggaran 2017	664.514.789.275	1.237.514.387.233	53,70

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (dikelola tahun 2017)

Tabel 3.6
Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama

No	Uraian	2014	2015	2016	2017 (unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung	470.515.447.520,00	512.273.786.741,00	681.776.525.895,00	651.336.006.152,00	9,45
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	260.757.158.564,00	262.345.310.833,00	278.420.464.699,00	277.411.743.683,00	2,01
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	66.404.476.412,00	90.936.250.943,00	115.745.959.781,00	110.256.530.749,00	14,48
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.109.139.987,00	668.120.164,00	695.848.222,00	986.850.409,00	- 10,85
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	329.500.319,00	323.390.801,00	631.580.424,00	369.221.278,00	- 8,05
5	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.509.600.000,00	2.333.750.000,00	2.165.000.000,00	5.050.000.000,00	28,22
6	Belanja Bunga					
7	Belanja bagi hasil					
8	Belanja Hibah	31.405.871.346,00	33.733.335.000,00	86.564.606.700,00	44.617.321.778,00	- 8,70
9	Bantuan Sosial	11.358.965.000,00	6.470.390.000,00	9.010.900.000,00	11.105.720.000,00	- 9,50
10	Belanja Bantuan Keuangan (Prospek, ADD, ADK)	95.813.702.103,00	110.879.199.000,00	185.577.148.000,00	194.673.316.595,00	19,50
11	Belanja tak terduga	1.827.033.789,00	4.584.040.000,00	2.965.018.069,00	6.865.301.660,00	20,78
B	Pembiayaan Pengeluaran	5.870.072.727,00	11.000.000.000,00	52.052.003.670,00	8.519.162.000,00	- 128,50
1	Pembentukan Dana Cadangan					
2	Pembayaran pokok utang					
3	Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah	5.515.279.367,00	11.000.000.000,00	50.413.652.103,00	8.519.162.000,00	- 121,24
4	Kewajiban kepada pihak ketiga	354.793.360,00	-	1.638.351.567,00	-	33,33
	TOTAL (A+B)	476.385.520.247,00	523.273.786.741,00	733.828.529.565,00	659.855.168.152,00	8,81

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk memberi gambaran atau informasi pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Gambaran ini menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pemerintahan daerah pada periode 2013-2017 terutama terkait dengan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui besaran dari pendanaan pembangunan, maka kondisi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dijelaskan apakah terjadi surplus atau defisit selama pemerintahan yang lalu.

a. Surplus/Defisit

Dengan memperhatikan pendapatan dan belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir, maka gambaran surplus/defisit dalam anggaran daerah dapat diketahui. Penetapan kebijakan anggaran yang defisit atau surplus seringkali tidak sama dengan realisasi. Pada masa pemerintahan sebelumnya, penetapan APBD di Kabupaten Jayapura selalu dalam posisi defisit. Artinya rencana alokasi belanja lebih besar daripada rencana penerimaan pendapatan daerah. Akan tetapi dalam realisasinya, APBD justru mengalami surplus anggaran. Selama periode 2013-2017, posisi defisit. Riil Anggaran 2013 Rp 24.624.470.076 pada tahun 2014 turun menjadi Rp. 23.919.876.686, dan tahun 2015 pada Tahun 2016 terjadi

minus defisit riil sebesar Rp. -106.192.978.283 dan pada Tahun 2017 menjadi Surplus Rp. 14.768.126.481. Surplus anggaran Kabupaten Jayapura ditetapkan sebagai sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran berikutnya. Dengan merasiokan antara defisit dengan nilai PDRB tahun berlaku, transaksi keuangan Kabupaten Jayapura pada masa pemerintahan sebelumnya masih terhitung cukup baik. Defisit Riil Anggaran Tahun 2013-2017 pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Defisit Riil Anggaran 2013-2017

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	863.347.739.128	1.003.664.252.764	1.186.438.268.365	1.409.107.490.955	1.227.749.126.680
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	818.857.649.052	972.268.217.267	1.151.975.091.946	1.463.248.465.570	1.204.461.838.199
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	19.865.620.000	7.476.158.811	11.000.000.000	52.052.003.670	8.519.162.000
	Defisit riil	24.624.470.076	23.919.876.686	23.463.176.419	-106.192.978.285	14.768.126.481

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (dikelola tahun 2017)

Komposisi penutup defisit riil yaitu SiLPA, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Piutang Daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Dari enam komposit tersebut, SiLPA merupakan sumber utama pembiayaan defisit. Porsi SiLPA yang digunakan untuk menutup defisit. Perkembangan komposisi penutup defesit riil berfluktuatif, pada tahun 2013 sebesar Rp. 156.724.517.700 dan menurun sangat tajam menjadi Rp. 107.417.995.977,94 pada tahun 2016. Perkembangan komposisi penutup defesit riil dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jayapura 2013-2016

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil							
		TAHUN 2013	(%)	TAHUN 2014	(%)	TAHUN 2015	(%)	TAHUN 2016	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	156.724.517.700	18,15	183.104.335.188	18,16	209.185.644.866,92	17,93	107.417.995.977,94	7,62
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (dikelola tahun 2017)

Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2016

No.	Uraian	2013	%	2014	%	2015	%	2016	
		Rp	dari SiLPA	Rp	dari SiLPA	Rp	dari SiLPA	RP	dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	156.714.517.700		183.104.335.188		209.185.644.866,92		107.417.995.977,94	
2.	Pelampauan penerimaan PAD	10.746.316.822	6,86	19.927.082.531	10,94	14.941.197.809	7,23	6.577.409.325	6,12
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	2.977.331.001	1,90	-3.643.998.235	2,00	81.920.340.644	39,66	26.914.577.157	25,06
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (dikelola tahun 2017)

b. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan dalam penganggaran daerah adalah penerimaan ataupun pengeluaran yang dialokasikan untuk mewujudkan keseimbangan neraca daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jayapura sepanjang tahun 2013-2016 diperoleh gambaran bahwa tingkat realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah berkisar antara Rp 132.100.047.624 tahun 2013 hingga Rp. 213.610.974.261,92 tahun 2016 dengan rata-rata Rp. 172.252.965.688. Hal ini memperlihatkan Kabupaten Jayapura telah berhasil memperoleh penerimaan pembiayaan pembangunan yang sebagian besar bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Dengan demikian, komponen sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) merupakan pembentuk terbesar dari nominal realisasi penerimaan pembiayaan. Selanjutnya tingkat realisasi pengeluaran pembiayaan berkisar antara Rp. 19.865.620.000 pada tahun 2013 hingga Rp 52.052.003.670 pada tahun 2016.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Pembiayaan 2013-2016

No	Uraian	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	132.100.047.624	157.578.372.418	185.722.468.448	213.610.974.261,92
3.2	PENGELUARAN DAERAH	19.865.620.000	5.870.072.727	11.000.000.000	52.052.003.670
	Pembiaayaan Netto	112.234.427.624	151.708.299.691	174.722.468.448	161.558.970.591,92
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	156.724.517.700,00	183.104.335.188,00	209.185.644.866,92	100.374.533.322,38

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (dikelola tahun 2017)

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Bagian ini menganalisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Jayapura selama 5 (lima) tahun ke depan yakni 2017-2022. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Untuk mengetahui kapasitas fiskal riil keuangan daerah, maka yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan prioritas utama Kabupaten Jayapura pada masa sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisis proyeksi pendapatan

daerah dan belanja daerah dengan terlebih dahulu melakukan proyeksi asumsi makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran. Tujuan dari perhitungan asumsi makro adalah untuk mengetahui besaran pendapatan dan belanja yang diperlukan dalam lima tahun ke depan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jayapura merupakan sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam periode 2013-2017. Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud, meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan penerimaan.

Untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif di masa datang, terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah, dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, maka penetapan asumsi-asumsi yang mendasari rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jayapura selama periode 2013-2017, yaitu: (1) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi; dan (2) pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti perkiraan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Asumsi dimaksud sekaligus juga menjadi angka proyeksi berbagai indikator ekonomi makro daerah dan pokok-pokok kebijakan fiskal Kabupaten Jayapura.

Tabel 3.11
Proyeksi Perkembangan Asumsi Makro Ekonomi
Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan ekonomi	8,54	8,60	8,66	8,72	8,78	8,84
Inflasi	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Tingkat Pengangguran	14,63	14,63	14,5	14,03	13,5	10,99

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2017-2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura relative tinggi dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 0.06 % per tahun. Untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Jayapura diprediksikan bertumbuh lebih cepat dengan kisaran antara 0.06 - 0.1% selama periode 2013-2017 melalui implementasi penjabaran visi dan misi kepala daerah dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 8.4%

per tahun dengan prediksi tingkat inflasi sekitar 5 - 5.3 % pertahun. Melalui prediksi laju pertumbuhan ekonomi tersebut, maka angka pengangguran dan jumlah serta persentase penduduk miskin dapat diprediksikan mengalami penurunan lebih cepat.

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp.1.275.158.512.896 meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp. 1.669.198.127.414 diproyeksi dengan laju pertumbuhan rata rata 6,80%/tahun.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan berbagai kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi diproyeksi tumbuh dengan laju rata-rata mencapai 13,94% per tahun pada tahun 2018 sebesar Rp.103.000.000.000, menjadi 189.000.000.000 pada tahun 2022 dengan asumsi bahwa pergerakan perekonomian di Kabupaten Jayapura lebih cepat dan stabilitas harga dapat terjaga tidak lebih dari 5% setiap tahun. Sumber-sumber PAD diproyeksikan meningkat adalah retribusi daerah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 12,97 % per tahun, pajak daerah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 12,05, Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,97% dan Lain-lain PAD yang sah pertumbuhan rata-rata sebesar 11,21%.

Pendapatan Dana Transfer (Perimbangan) diproyeksikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 5,68%/tahun pada tahun 2018 Rp. 890.761.520.000 dan pada Tahun 2022 mencapai Rp. 1.133.735.569.737 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,89%/tahun pada tahun 2018 Rp. 281.396.992.896 dan pada Tahun 2022 mencapai Rp.360.906.619.735.

Tabel 3.12
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2018 s/d Tahun 2022

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2018	2019	2020	2021	2022
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	9,22	1.275.158.512.896	1.409.374.364.186	1.558.311.800.604	1.723.142.980.665	1.905.157.278.731
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	14,36	103.000.000.000	120.000.000.000	140.000.000.000	163.000.000.000	189.000.000.000
1.1.1.	Pajak daerah	14,76	38.620.811.850	44.993.245.805	52.489.120.556	61.107.834.151	70.854.533.698
1.1.2.	Retribusi daerah	12,17	27.512.604.803	32.052.184.595	37.392.078.549	43.531.857.847	50.475.189.176
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	683,01	6.900.000.000	8.004.000.000	9.337.466.400	10.870.678.383	12.604.551.585
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	11,74	29.966.583.347	34.950.569.600	40.781.334.495	47.489.629.619	55.065.725.541
1.2.	Dana Perimbangan	8,85	890.761.520.000	979.837.672.000	1.077.821.439.200	1.185.603.583.120	1.304.163.941.432
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak	9,30	16.939.548.000	18.633.502.800	20.496.853.080	22.546.538.388	24.801.192.227
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	44,20	29.156.789.000	32.072.467.900	35.279.714.690	38.807.686.159	42.688.454.775
1.2.2.	Dana alokasi umum	7,39	685.569.817.000	754.126.798.700	829.539.478.570	912.493.426.427	1.003.742.769.070
1.2.3.	Dana alokasi khusus	14,30	159.095.366.000	175.004.902.600	192.505.392.860	211.755.932.146	232.931.525.360
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8,36	281.396.992.896	309.536.692.186	340.490.361.404	374.539.397.545	411.993.337.299
1.3.1	Hibah		-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat		-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	11,96	19.850.874.896	21.835.962.386	24.019.558.624	26.421.514.487	29.063.665.936
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	8,00	240.699.928.000	264.769.920.800	291.246.912.880	320.371.604.168	352.408.764.585
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	9,74	20.846.190.000	22.930.809.000	25.223.889.900	27.746.278.890	30.520.906.778

3.3.1.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah diproyeksikan dengan pertumbuhan rata-rata 7,9%/tahun pada tahun 2018 Rp. 1.275.158.512.186 meningkat sebesar 514.578.355.567 (40,35%) pada Tahun 2022 menjadi Rp. 1.789.736.867.653.

Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung (BTL) diproyeksikan sebesar 8,83%/tahun pada tahun 2018 sebesar Rp. 723.283.756.203 meningkat sebesar Rp.333.335.491.254 (46,09%) pada tahun 2022 menjadi Rp.1.056.639.247.457. Pertumbuhan Belanja Langsung diproyeksikan sebesar 7,06,%/tahun pada tahun 2018 sebesar Rp. 570.257.493.429 meningkat sebesar Rp. 204.059.345.648 (35,78%) pada tahun 2022 menjadi Rp. 774.316.839.077.

Tabel 3.13
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2018 s/d Tahun 2022

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022
2	BELANJA	6,69	1.293.541.450.432	1.367.033.266.322	1.473.460.797.018	1.571.609.308.978	1.678.053.533.831
2.1	Belanja Tidak Langsung	5,65	723.283.957.003	754.621.303.935	787.854.666.727	845.355.212.487	882.844.427.566
2.1.1	Belanja Pegawai	6,64	457.685.091.803	475.992.495.475	495.032.195.294	514.833.483.106	535.426.822.430
2.1.2	Belanja Bunga						
2.1.3	Belanja Subsidi	23,90	5.951.880.000	6.249.474.000	6.561.947.700	6.890.045.085	7.234.547.339
2.1.4	Belanja Hibah	1,45	33.285.175.000	34.949.433.750	36.696.905.438	38.531.750.709	40.458.338.245
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4,34	9.756.620.000	10.244.451.000	11.268.896.100	12.395.785.710	13.635.364.281
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	3,90	5.304.151.000	5.569.358.550	5.847.826.478	6.140.217.801	6.447.228.691
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	7,10	206.301.039.200	216.616.091.160	227.446.895.718	261.563.930.076	274.642.126.579
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,49	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	6,76	570.257.493.429	612.411.962.387	676.040.511.872	711.259.875.198	774.316.839.077
2.2.1	Belanja Pegawai	3,99	71.942.151.587	75.539.259.166	79.316.222.125	82.488.871.010	86.613.314.560
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,45	325.146.524.474	344.655.315.942	375.674.294.377	394.458.009.096	429.959.229.915
2.2.3	Belanja Modal	8,34	173.168.817.368	192.217.387.278	221.049.995.370	234.312.995.092	257.744.294.602
	Surplus/ Devesit	86,07	18.382.937.536	14.819.332.898	12.470.249.776	10.768.208.677	8.855.406.417

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (dikelola tahun 2017)

3.3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pertumbuhan Pembiayaan diproyeksikan sebesar -50,33%/tahun pada tahun 2018 sebesar Rp. 18.382.937.536 mengalami penurunan sebesar Rp. -9.251.920.219 (50,53%) pada tahun 2022 menjadi Rp. 9.131.017.317,37. Proyeksi Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2018 s/d Tahun 2022

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022
3	PEMBIAYAAN	- 78,94	35.422.937.536	8.520.000.000	8.520.000.000	8.520.000.000	8.520.000.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	26.902.937.536	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	8.520.000.000	8.520.000.000	8.520.000.000	8.520.000.000	8.520.000.000

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (dikelola tahun 2017)

3.3.2. Perhitungan kerangka pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tiap tahunnya. Besarnya pendapatan daerah hasil prediksi yang dilakukan pada bab sebelumnya, adalah besaran keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, namun sebelumnya harus dikurangi pengeluaran besaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

Perkembangan Kerangka pendanaan dan Kapasitas Riil di Kabupaten Jayapura selama periode 2018-2022 untuk mendanai kegiatan Pembangunan dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022
1.	Pendapatan	1.328.964.387.968,00	1.433.587.007.968	1.580.103.180.008,16	1.742.755.222.128,74	1.922.808.296.048,37
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
	Total penerimaan	1.328.964.387.968,00	1.433.587.007.968,00	1.580.103.180.008,16	1.742.755.222.128,74	1.922.808.296.048,37
	Dikurangi:					
3.	Belanja Tidak Langsung	723.283.957.003,00	754.621.303.935	787.854.666.727,13	845.355.212.487,34	1.014.863.138.555,00
4.	Pengeluaran Pembiayaan	8.520.000.000,00	8.520.000.000	8.520.000.000,00	8.520.000.000,00	8.520.000.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	570.257.493.429,00	670.445.704.033	783.728.513.281,03	888.880.009.641,40	899.425.157.493,37

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (Data diolah), 2017.

Perkembangan Kapasitas Riil diproyeksikan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 570.257.493.429,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 329.167.664.064. (57,72%) Pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 899.425.17.493,37 dengan laju pertumbuhan rata rata 11,54%/tahun.

Pada kerangka pendanaannya dibagi menjadi tiga prioritas, yang kemudian dilakukan penetapan masing-masing persentasenya. Persentase untuk prioritas I adalah sebesar 34,02%, sedangkan untuk prioritas II sebesar 46,13 % dan prioritas III sebesar 19,85%. Anggaran Belanja Daerah Prioritas I sebesar 34,02% yang dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, Presentase Anggaran Belanja Daerah Prioritas II sebesar 46,13 % yang dialokasikan untuk program prioritas Perangkat Daerah terkait langsung dengan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, Anggaran Belanja Daerah Prioritas III sebesar 19,85 % dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Penggunaan kapasitas kemampuan keuangan daerah tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2018-2022

Uraian	Proyeksi per tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kapasitas riil kemampuan keuangan	570.257.493.429	670.445.110.122	783.728.046.272	888.880.009.194	899.425.157.430
Prioritas I	211.767.854.655	235.772.247.388	258.830.598.433	276.225.898.567	302.945.855.569
Prioritas II	250.398.258.353	303.072.344.271	368.936.877.530	425.406.294.314	419.355.539.123
Prioritas III	108.091.380.421	131.600.518.463	155.960.570.309	187.247.816.314	177.123.762.739

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (dikelola tahun 2017)

Tabel 3.17
Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018-2022

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	Tahun 2018			2019			2020			2021			2022		
		PRIORIT AS I	PRIORITA S II	PRIORITA S III	PRIORIT AS I	PRIORIT AS II	PRIORIT AS III	PRIORIT AS I	PRIORI TAS II	PRIORIT AS III	PRIORIT A S I	PRIORIT AS II	PRIORIT AS I II	PRIORIT AS I	PRIORITAS II	PRIORIT AS III
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	94.802.697.602	161.721.280.515	21.087.241.183	112.958.832.482	180.727.668.649	26.595.965.301	122.328.008.511	198.762.243.211	24.855.561.831	132.801.843.788	209.784.168.099	44.539.123.035	145.722.961.769	247.070.902.834	36.541.430.838
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan	13.058.943.400	24.499.747.600	-	15.711.890.570	27.021.853.410	-	17.283.079.627	28.749.776.354	-	18.778.675.683	30.476.456.351	-	20.656.543.252	32.449.977.693	-
1.01 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	6.000.000.000	-	-	6.000.000.000	-	-	6.600.000.000	-	-	6.000.000.000	-	-	6.000.000.000
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	3.382.256.700	59.455.348.300	-	3.551.369.535	61.706.618.180	-	3.906.506.489	66.030.147.523	-	4.101.831.813	65.746.490.719	-	4.512.014.994	69.572.713.784	-
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Yowari	30.202.159.538	24.048.610.462	-	31.712.267.515	25.627.950.146	-	34.883.494.266	27.323.947.729	-	36.627.668.980	28.872.569.150	-	40.290.435.878	30.804.181.897	-
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.120.037.300	31.345.513.000	1.664.170.000	46.742.039.165	34.137.459.645	1.830.587.000	49.489.535.863	39.501.205.610	2.013.645.700	53.483.746.265	42.751.326.170	2.154.600.899	58.832.120.892	66.719.909.655	2.370.060.989
1.04 . 1.04.01	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.876.408.164	19.275.473.653	13.266.821.183	4.070.228.572	29.053.021.018	18.593.503.301	4.477.251.429	33.658.323.120	16.052.853.631	4.701.114.001	38.119.155.432	36.176.553.386	5.171.225.401	43.324.132.500	27.942.604.224
1.04 . 1.06.01	Dinas Sosial	-	2.254.800.000	-	-	2.254.800.000	-	-	2.480.280.000	-	-	2.728.308.000	-	-	3.001.138.800	-
1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	4.727.752.500	841.787.500	-	4.964.140.125	925.966.250	-	5.460.554.138	1.018.562.875	-	5.733.581.844	1.089.862.276	-	6.306.940.029	1.198.848.504	-
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	5.435.140.000	-	-	6.206.897.000	-	-	6.827.586.700	-	-	9.375.225.202	-	-	9.953.681.324	-	-
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	24.436.501.100	49.793.587.300	29.464.272.040	25.658.326.155	73.172.946.030	36.410.699.244	28.224.158.771	72.264.546.633	48.751.769.168	29.635.366.709	85.266.926.837	54.369.875.597	32.598.903.380	93.638.241.123	48.339.964.706
2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.547.115.500	1.450.000.000	2.675.849.500	1.624.471.275	2.095.000.000	2.943.434.450	1.786.918.403	2.304.500.000	3.237.777.895	1.876.264.323	3.534.950.000	3.464.422.348	2.063.890.755	3.888.445.000	3.810.864.582
2.02 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.114.716.000	3.205.000.000	120.000.000	1.170.451.800	3.525.500.000	132.000.000	1.287.496.980	3.878.050.000	145.200.000	1.351.871.829	4.149.513.500	155.364.000	1.487.059.012	4.564.464.850	170.900.400
2.03 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	1.461.983.000	-	2.492.522.000	1.535.082.150	-	4.741.774.200	1.688.590.365	-	3.015.951.620	1.773.019.883	-	4.227.068.233	1.950.321.872	-	4.649.775.057
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	1.182.477.500	10.448.223.500	452.355.000	1.241.601.375	18.493.045.850	1.497.590.500	1.365.761.513	15.024.756.435	12.547.349.550	1.434.049.588	16.158.851.565	14.798.454.505	1.577.454.547	20.038.138.324	4.811.401.505
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.271.928.400	-	2.768.605.840	1.335.524.820	-	3.045.466.424	1.469.077.302	-	3.350.013.066	1.542.531.167	-	3.584.513.981	1.696.784.284	-	3.942.965.379

2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	1.921.377.00 0	4.905.339.000	485.360.000	2.017.445.85 0	7.395.872.90 0	533.896.000	2.219.190.43 5	8.135.460.190	587.285.600	2.330.149.95 7	10.307.949.9 03	638.087.692	2.563.164.95 2	9.640.964.894	701.896.461
2.08 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.169.204.00 0	-	6.285.366.000	1.227.664.20 0	-	6.913.902.6 00	1.350.430.62 0	-	7.605.292.8 60	1.417.952.15 1	-	8.137.663.3 60	1.559.747.36 6	-	8.951.429.69 6
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	4.386.195.00 0	19.411.324.80 0	2.307.900.000	4.605.504.75 0	21.352.457.2 80	2.538.690.0 00	5.066.055.22 5	23.487.70 3.008	2.792.559.0 00	5.319.357.98 6	25.131.842.2 19	2.988.038.1 30	5.851.293.78 5	27.645.026.440	3.286.841.94 3
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.546.730.00 0	-	6.824.650.000	3.724.066.50 0	-	8.507.115.0 00	4.096.473.15 0	-	9.357.826.5 00	4.301.296.80 8	-	8.835.874.3 55	4.731.426.48 8	-	9.719.461.79 1
2.11 . 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.222.705.40 0	3.728.500.000	195.000.000	1.283.840.67 0	12.001.350.0 00	214.500.000	1.412.224.73 7	10.293.38 5.000	235.950.000	1.482.835.97 4	16.119.451.9 50	252.466.500	1.631.119.57 1	17.010.397.145	277.713.150
2.11 . 3.02.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	1.400.200.000	-	-	2.540.220.00 0	-	-	2.794.242.000	-	-	3.073.666.20 0	-	-	3.381.032.820	-
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.142.180.00 0	-	1.699.600.000	2.249.289.00 0	-	1.869.560.0 00	2.474.217.90 0	-	2.056.516.0 00	2.597.928.79 5	-	2.200.472.1 20	2.857.721.67 5	-	2.420.519.33 2
2.13 . 2.13.01	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.266.540.00 0	-	2.475.710.000	2.379.867.00 0	-	2.723.281.0 00	2.617.853.70 0	-	2.995.609.1 00	2.748.746.38 5	-	4.205.301.7 37	3.023.621.02 4	-	4.625.831.91 1
2.16 . 3.02.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	5.245.000.000	-	-	5.769.500.00 0	-	-	5.346.450.000	-	-	6.790.701.50 0	-	-	7.469.771.650	-
2.17 . 2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	344.353.700	-	-	378.789.070	-	-	416.667.977	-	-	445.834.735	-	-	490.418.209
2.18 . 2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.203.349.30 0	-	337.000.000	1.263.516.76 5	-	370.700.000	1.389.868.44 2	-	407.770.000	1.459.361.86 4	-	436.313.900	1.605.298.05 0	-	479.945.290
3	Urusan Pilihan	5.999.382.55 0	24.771.926.25 0	7.445.505.050	6.299.351.67 8	39.749.118.8 75	8.190.055.5 55	6.929.286.84 5	53.288.33 5.457	9.009.061.1 11	7.275.751.18 8	57.421.314.7 00	9.639.695.3 88	8.003.326.30 6	49.980.637.326	10.603.664.9 27
3.01 . 3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.664.680.85 0	5.657.310.250	-	1.747.914.89 3	7.223.041.27 5	-	1.922.706.38 2	7.945.345.403	-	2.018.841.70 1	10.673.779.4 58	-	2.220.725.87 1	11.741.157.404	-
3.02 . 3.02.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.179.530.00 0	3.370.799.000	388.000.000	1.238.506.50 0	5.207.878.90 0	426.800.000	1.362.357.15 0	5.728.666.790	469.480.000	1.430.475.00 8	6.801.533.46 9	502.343.600	1.573.522.50 8	7.481.686.816	552.577.960
3.03 . 3.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	749.400.700	4.962.587.000	3.942.724.050	786.870.735	5.458.845.70 0	4.336.996.4 55	865.557.809	5.004.730.270	4.770.696.1 01	908.835.699	6.465.898.88 9	5.104.644.8 28	999.719.269	7.112.488.778	5.615.109.31 0
3.03 . 3.03.02	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.321.134.00 0	6.961.230.000	1.381.316.000	1.387.190.70 0	7.657.353.00 0	1.519.447.6 00	1.525.909.77 0	8.423.088.300	1.671.392.3 60	1.602.205.25 9	9.026.334.88 5	1.788.389.8 25	1.762.425.78 4	13.204.974.929	1.967.228.80 8
3.06 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	960.000.000	298.465.000	-	11.056.000.0 00	328.311.500	-	21.725.90 4.695	361.142.650	-	20.750.926.0 00	386.422.636	-	6.367.203.200	425.064.899
3.07 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.084.637.00 0	2.860.000.000	1.435.000.000	1.138.868.85 0	3.146.000.00 0	1.578.500.0 00	1.252.755.73 5	5.460.600.000	1.736.350.0 00	1.315.393.52 2	3.702.842.00 0	1.857.894.5 00	1.446.932.87 4	4.073.126.200	2.043.683.95 0
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	86.529.273.4 03	14.111.464.28 8	50.094.362.14 8	90.855.737.0 73	15.322.610.7 17	60.426.798.363	99.422.437.0 87	17.854.87 1.788	66.824.178.199	104.393.558.941	19.032.542.6 59	75.199.122.295	114.289.348.379	21.996.594.340	80.638.702.2 68
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	35.134.001.8 00	-	8.171.074.200	8.890.701.8 90	-	8.988.181.6 20	40.579.772.0 79	-	9.886.999.7 82	42.608.760.6 83	-	10.579.089.767	46.869.636.7 51	-	11.636.998.7 43
4.01 .	Sekretariat Dewan	8.418.090.00 0	-	16.762.710.00 0	8.838.994.50 0	-	18.438.981.000	9.722.893.95 0	-	20.282.879.100	10.209.038.6 48	-	21.702.680.637	11.229.942.5 12	-	23.872.948.7

4.01.04	Perwakilan Rakyat Daerah															01
4.01 . 4.01.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.575.246.40 0	-	2.006.500.000	2.704.008.72 0	-	2.207.150.0 00	2.696.440.90 0	-	2.427.865.0 00	2.831.262.94 5	-	2.597.815.5 50	2.836.420.54 8	-	2.857.597.10 5
4.01 . 4.01.06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.911.792.00 0	-	1.626.848.000	3.057.381.60 0	-	1.789.532.8 00	3.363.119.76 0	-	1.968.486.0 80	3.531.275.74 8	-	2.106.280.1 06	3.884.403.32 3	-	2.316.908.11 6
4.01 . 4.01.10	Distrik Sentani Timur	727.000.000	-	144.000.000	763.350.000	-	458.400.000	839.685.000	-	504.240.000	881.669.250	-	749.436.800	969.836.175	-	824.380.480
4.01 . 4.01.11	Distrik Sentani	1.133.990.10 0	-	328.825.000	1.190.689.60 5	-	661.707.500	1.309.758.56 6	-	727.878.250	1.375.246.49 4	-	992.359.728	1.512.771.14 3	-	1.091.595.70 0
4.01 . 4.01.12	Distrik Sentani Barat	654.995.000	-	114.925.000	687.744.750	-	426.417.500	756.519.225	-	469.059.250	794.345.186	-	712.507.600	873.779.705	-	783.758.360
4.01 . 4.01.13	Distrik Ebungfauw	591.500.000	-	215.500.000	621.075.000	-	537.050.000	683.182.500	-	590.755.000	717.341.625	-	842.534.200	789.075.788	-	926.787.620
4.01 . 4.01.14	Distrik Waibu	784.270.000	-	133.730.000	823.483.500	-	447.103.000	905.831.850	-	491.813.300	951.123.443	-	737.782.080	1.046.235.78 7	-	811.560.288
4.01 . 4.01.15	Distrik Depapre	849.848.000	-	224.830.000	892.340.400	-	547.313.000	981.574.440	-	602.044.300	1.030.653.16 2	-	855.671.170	1.133.718.47 8	-	941.238.287
4.01 . 4.01.16	Distrik Raveni Rara	720.124.200	-	304.275.800	756.130.410	-	634.703.380	831.743.451	-	698.173.718	873.330.624	-	961.810.078	960.663.686	-	1.057.991.08 6
4.01 . 4.01.17	Distrik Kemtuk	722.830.000	-	173.000.000	758.971.500	-	490.300.000	834.868.650	-	539.330.000	876.612.083	-	788.979.600	964.273.291	-	867.877.560
4.01 . 4.01.18	Distrik Kemtuk Gresi	882.590.000	-	170.000.000	926.719.500	-	487.000.000	1.019.391.45 0	-	535.700.000	1.070.361.02 3	-	583.752.400	1.177.397.12 5	-	642.127.640
4.01 . 4.01.19	Distrik Namblong	401.488.200	-	320.811.800	421.562.610	-	352.892.980	463.718.871	-	388.182.278	486.904.815	-	415.355.037	535.595.296	-	456.890.541
4.01 . 4.01.20	Distrik Nimboran	846.040.000	-	133.400.000	888.342.000	-	446.740.000	977.176.200	-	491.414.000	1.026.035.01 0	-	736.457.130	1.128.638.51 1	-	810.102.843
4.01 . 4.01.21	Distrik Nimbokrang	704.188.500	-	134.112.500	739.397.925	-	147.523.750	813.337.718	-	162.276.125	854.004.603	-	173.635.454	939.405.064	-	190.998.999
4.01 . 4.01.22	Distrik Gresi Selatan	726.700.000	-	252.100.000	763.035.000	-	577.310.000	839.338.500	-	635.041.000	881.305.425	-	892.842.370	969.435.968	-	982.126.607
4.01 . 4.01.23	Distrik Demta	834.830.000	-	138.100.000	876.571.500	-	451.910.000	964.228.650	-	497.101.000	1.012.440.08 3	-	742.179.220	1.113.684.09 1	-	196.677.877
4.01 . 4.01.24	Distrik Yokari	731.300.000	-	207.600.000	767.865.000	-	528.360.000	844.651.500	-	581.196.000	886.884.075	-	832.505.720	975.572.483	-	295.657.692
4.01 . 4.01.25	Distrik Unurum Guay	424.900.000	-	535.000.000	446.145.000	-	888.500.000	490.759.500	-	977.350.000	515.297.475	-	1.271.092.0 00	566.827.223	-	1.398.201.20 0
4.01 . 4.01.26	Distrik Yapsi	594.140.000	-	198.400.000	623.847.000	-	518.240.000	686.231.700	-	570.064.000	720.543.285	-	256.868.480	792.597.614	-	282.555.328
4.01 . 4.01.27	Distrik Kaureh	674.970.000	-	392.570.000	708.718.500	-	731.827.000	779.590.350	-	805.009.700	818.569.868	-	1.079.355.2 79	900.426.854	-	1.187.290.80 7
4.01 . 4.01.28	Distrik Airu	1.134.644.00 0	-	225.000.000	1.191.376.20 0	-	247.500.000	1.310.513.82 0	-	272.250.000	1.376.039.51 1	-	291.307.500	1.513.643.46 2	-	320.438.250
4.02 . 4.02.01	Inspektorat	1.472.789.55 2	3.262.215.000	510.601.728	1.546.429.03 0	4.088.436.50 0	561.661.901	1.701.071.93 3	4.497.280. 150	617.828.091	1.786.125.52 9	4.947.008.16 5	661.076.057	1.964.738.08 2	5.441.708.982	727.183.663

4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.889.960.92 0	2.254.882.630	8.052.969.770	3.034.458.96 6	1.780.370.89 3	9.358.266.7 47	3.337.904.86 3	2.958.407. 982	10.674.093. 422	3.504.800.10 6	2.958.407.98 2	11.915.393. 727	3.855.280.11 6	4.315.046.195	12.386.091.0 00
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.845.341.34 2	8.594.366.658	295.866.000	6.137.608.40 9	9.453.803.32 4	325.452.600	6.510.464.24 8	10.399.18 3.656	357.997.860	6.835.987.46 1	11.127.126.5 12	383.057.710	7.253.988.44 3	12.239.839.163	421.363.481
4.04 . 4.04.02	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.548.395.38 9	-	2.695.212.350	4.775.815.15 8	-	2.964.733.5 85	5.253.396.67 4	-	3.261.206.9 44	5.516.066.50 8	-	3.489.491.4 30	6.067.673.15 9	-	3.838.440.57 2
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.953.374.00 0	-	3.698.000.000	7.301.042.70 0	-	4.067.800.0 00	8.031.146.97 0	-	4.474.580.0 00	8.432.704.31 9	-	4.904.568.6 25	9.275.974.75 0	-	5.266.580.66 0
1.03 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	156.250.000	-	-	171.875.000	-	-	189.062.500	-	-	207.968.750	-	-	228.765.625
4.07 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.639.934.00 0	-	1.928.400.000	1.721.930.70 0	-	2.144.240.0 00	1.894.123.77 0	-	2.333.364.0 00	1.988.829.95 9	-	2.943.236.8 40	2.187.712.95 4	-	3.246.333.06 0

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJM atau RPJP). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Selanjutnya berbagai permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang kewenangan di Kabupaten Jayapura dapat diidentifikasi pada sub bagian berikut ini.

4.1.1. Masalah Pokok.

1. Belum optimalnya Kualitas pelayanan Pendidikan.
 - a. Masih terbatasnya tenaga Guru sesuai bidang studi.
 - b. Belum meratanya distribusi Guru setiap sekolah.
 - c. Kurangnya Gedung sekolah untuk menjangkau letak geografis.
 - d. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pendidikan.
 - e. Masih banyak tenaga pendidik yang belum sertifikasi.

- f. Rendahnya kualitas dan derajat pendidikan dan kesehatan SDM di kampung dan di daerah terpencil di Wilayah Pembangunan 3 dan 4.
 - g. Rendahnya kualitas daya saing sebagai sumberdaya manusia lokal/asli untuk terlibat dalam pembangunan, baik sebagai pegawai di birokrasi maupun sebagai pelaku di dunia usaha.
 - h. Rendahnya kualitas pendidikan menjadikan daya saing sebagai sumberdaya manusia juga rendah.
2. Belum optimalnya Kualitas pelayanan Kesehatan.
 - a. Masih terbatasnya tenaga para medis dan tenaga dokter
 - b. Keterbatasan sarana transportasi dalam mendukung pelayanan kesehatan.
 - c. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat.
 - d. Rendahnya kualitas kesehatan menjadikan daya saing sebagai sumberdaya manusia juga rendah.
 3. Kurangnya daya saing tenaga kerja
 - a. Masih rendahnya kapasitas SDM tenaga kerja.
 - b. Belum tersedianya balai latihan kerja.
 - c. Kurangnya pelatihan bagi pencari kerja.
 - d. Rendahnya kualitas daya saing sebagai sumberdaya manusia lokal/asli untuk terlibat dalam pembangunan, baik sebagai pegawai di birokrasi maupun sebagai pelaku di dunia usaha.
 4. Belum optimalnya Peran Masyarakat Adat dan Kampung Adat Dalam Pembangunan.

Konteks sosio-kultural dan sosio-historis masyarakat asli Jayapura dan masyarakat asli Papua non Jayapura yang jumlahnya dominan dalam populasi. Masyarakat ini masih relatif tertinggal dalam aspek ekonomi dan pendidikan sehingga memerlukan ruang sosial untuk akselerasi kehidupan ekonomi dan pendidikan. Isu ini juga menjadi sangat strategis karena dengan berlakunya undang-undang desa, rekognisi terhadap eksistensi adat sangat mendapatkan tempat khususnya peluang bagi pembentukan kampung adat dan Dewan Adat Suku (DAS) di Kabupaten Jayapura.

- a. Belum adanya pengakuan hak komunal masyarakat Hukum adat.
- b. Masih kurangnya sosialisasi tentang kedudukan dan peran adat dalam pembangunan.

- c. Pengakuan eksistensi MHA di kabupaten Jayapura belum didukung kajian Etnografi dan Geografis lengkap masing-masing Wilayah Adat.
 - d. Belum adanya produk hukum daerah perlindungan dan penataan hak-hak MHA.
 - e. Rendahnya kapasitas dan kualitas kehidupan ekonomi MHA.
 - f. Rendahnya kapasitas dan kualitas SDM MHA dalam menata dan mengelola pemerintahan adat, perlindungan adat dan budaya serta pengelolaan wilayah adat dengan pemanfaatan ruang dan potensi SDA yang dimiliki.
5. Belum optimalnya fungsi-fungsi kampung adat dalam penyelenggaraan pembangunan.
- a. Belum adanya kepastian hukum tentang kampung adat.
 - b. Belum adanya struktur kampung adat.
6. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura
- a. Belum optimalnya kontribusi pertanian, perkebunan peternakan, perikanan, industri dan perdagangan mendukung PDRB.
 - b. Belum optimalnya pembinaan berkelanjutan terhadap kelompok industri kecil dan menengah.
 - c. Belum Optimalnya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
 - d. Kesenjangan sosial ekonomi antara warga asli Papua Jayapura dengan warga lainnya.
7. Masih rendahnya peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pariwisata dalam perekonomian rakyat
- a. Belum optimalnya Produktivitas Usaha Ekonomi Rakyat disebabkan belum terbentuknya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di setiap kampung dan Geografi intelektual.
 - b. Kurangnya pembinaan dan pelatihan pengurus koperasi.
 - c. Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan ekonomi kreatif pariwisata.
 - d. Belum maksimalnya upaya dan kegiatan pemanfaatan serta pengelolaan potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan sehingga potensi yang melimpah belum dapat mendorong peningkatan signifikan dari sisi produksi dan produktivitas.

- e. Masih sangat rendah kreativitas dan inovasi-inovasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
 - f. Iklim investasi yang belum terlalu kondusif dalam mendorong tumbuh kembangnya UKM dan investasi skala besar baik untuk industri ekstraktif (industri yang mengolah bahan baku dari alam seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lain-lain) maupun perkebunan swasta.
 - g. Belum adanya regulasi daerah yang menjamin keberlanjutan investasi dan pertumbuhan UKM secara sosial dan ekologis.
 - h. Belum adanya sistem ekonomi kerakyatan yang mendukung petani lokal.
 - i. Belum optimalnya bantuan perbankan kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan.
 - j. Rendahnya akses dan peluang SDM lokal asli untuk terlibat dalam pembangunan, baik sebagai pegawai di birokrasi maupun sebagai pelaku di dunia usaha.
8. Kesejahteraan Sosial
- a. Belum optimalnya pelayanan terhadap kesejahteraan PMKS
 - b. Belum tersedia panti dan perlindungan rehabilitasi sosial
 - c. Masih kurangnya pemberdayaan terhadap keluarga penyandang kesejahteraan sosial
9. Infrastruktur Wilayah dan Interkoneksi Pusat-Pusat Pertumbuhan.
- Keterbatasan sarana dan prasarana dan jangkauan moda transportasi dalam menjangkau dan menghubungkan kawasan strategis serta pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah pembangunan, di sebabkan belum tersedianya jaringan jalan dan jembatan di beberapa kampung sehingga tidak dapat diakses melalui transportasi darat khususnya daerah wilayah IV dan wilayah pesisir.
10. Jangkauan dan kelayakan infrastruktur pemukiman dan perumahan
- a. Belum tersedianya jaringan air bersih di setiap kampung.
 - b. Masih banyak rumah tidak layak huni yang ditinggali masyarakat.
 - c. Belum tersedianya jembatan penyebrangan dan tambatan perahu di daerah pesisir, daerah aliran sungai dan kampung di sekitar Danau Sentani.
11. Jangkauan dan fungsi infrastruktur komunikasi.
- a. Masih ada satu Distrik di Kabupaten Jayapura yang belum ada jaringan komunikasi.

- b. Masih terbatasnya jangkauan jaringan komunikasi di Distrik dan kampung-kampung khususnya Wilayah Pembangunan IV.
12. Efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan:
- a. Belum terjadi peningkatan dan perbaikan Tata kelola pemerintahan kampung dan distrik yang lebih baik sehingga layanan pemerintahan dan layanan publik belum dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
 - b. Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan belum berjalan secara simultan sehingga belum menjawab kompleksitas permasalahan pemerintahan dan pembangunan daerah.
 - c. Kurangnya dukungan dan peningkatan partisipasi dan dukungan Publik dalam pelaksanaan seluruh agenda pemerintahan dan politik daerah.
 - d. Belum maksimalnya penataan sistem pelayanan publik satu pintu berbasis teknologi informasi khususnya layanan perizinan dan non perizinan sehingga menjangkau dan memenuhi harapan kepuasan masyarakat.
13. Belum efektifnya fungsi distrik dalam pelayanan
- a. Belum optimalnya distrik dalam penyediaan Data dan Informasi
 - b. Belum optimalnya distrik dalam fungsi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Belum optimalnya distrik dalam fungsi Pelatihan masyarakat
14. Belum optimalnya kualitas ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat:
- a. Masih perlunya peningkatan harmonisasi hubungan antar masyarakat yang heterogen secara sosial dan budaya di Kabupaten Jayapura
 - b. Belum selesai penataan kelembagaan sosial budaya sebagai agen pemersatu hubungan sosial antara masyarakat asli dan non dalam mewujudkan harmoni sosial di Kabupaten Jayapura.
 - c. Belum optimalnya pelayanan dalam perlindungan masyarakat dari kebencanaan (bencana alam dan kebakaran)
15. Perkembangan sensitivitas gender dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan:
- a. Masih tingginya presentase persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik secara fisik maupun mental dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat luas.

- b. Belum memaksimalkan upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan akses berimbang baik sekolah (pendidikan) maupun hak untuk bermain, belajar dan bersekolah pada level kampung dan distrik.
- c. Masih sangat terbatasnya peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di ranah publik baik itu perempuan di pemerintahan, perempuan di legislatif dan perempuan di dunia swasta dengan mendorong kebijakan yang lebih sensitive dan responsive gender secara nyata.

16. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup

Potensi sumberdaya alam spesifik seperti eksistensi danau Sentani, hutan sagu, pegunungan cyclop, kawasan hutan serta berbagai hewan langka yang perlu dipertahankan daya dukung dan fungsinya. Potensi ini tetap terpelihara dan terlindungi agar tidak mengakibatkan terjadinya kerentanan ekologis dan bencana alam. Masalah pokok yang dihadapi tentang kualitas lingkungan hidup:

- a. Belum adanya pembangunan dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan SDA dengan potensi sumberdaya alam spesifik eksisting yang terintegrasi seperti DAS, danau Sentani, habitat sagu, pegunungan Cyclop dan/kawasan konservasi, kawasan hutan dan laut serta berbagai flora dan fauna langka yang perlu dipertahankan serta ditingkatkan daya dukung dan fungsinya.
- b. Perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah belum atau sering mengabaikan/memperhatikan kerentanan dan daya dukung ekologis dan kearifan lokal sehingga banyak berdampak secara sosial dan lingkungan akibat dari kebijakan pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak terkontrol yang berpotensi secara sengaja mendatangkan bencana alam dari tahun ke tahun secara *masive*.

17. Terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan

- a. Belum terintegrasi sistem perencanaan dan tata kota dengan sistem pengelolaan sampah terpadu dalam mewujudkan eksistensi kota Sentani sebagai ibu kota Kabupaten Jayapura dan pintu gerbang Provinsi Papua.
- b. Belum ada pembaharuan atau revisi atas regulasi Pengelolaan Sampah di kabupaten Jayapura untuk menjawab permasalahan penanganan dan pengelolaan sampah yang volumenya terus meningkat sehingga dapat dilakukan penanganan dan pengelolaan sampah yang modern dan partisipatif.

- c. Belum maksimalnya penataan kota Sentani dari aspek keindahan dan kenyamanan sehingga dapat memberikan citra yang baik tidak hanya kepada Kabupaten Jayapura tetapi terutama sebagai industri pariwisata dan pintu gerbang Provinsi Papua.

4.1.2. Masalah Urusan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Urusan Bidang Pendidikan.

- a. Capaian angka melek huruf sebesar 70.57 % tahun 2016 yang meskipun lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Papua (75,58%), tetapi belum mencapai kondisi ideal yakni 100%.
- b. Capaian angka rata-rata lama sekolah sampai tahun 2016 sebesar 9,94 tahun yang meskipun sudah di atas rata-rata Provinsi Papua (9 tahun) tetapi masih jauh dari capaian ideal yakni 15 tahun (tamat SLTA).
- c. Tingkat pendidikan yang ditamatkan masih terdapat 14,64 % penduduk yang tidak memiliki ijazah, Sekitar 85.36 % penduduk di Kabupaten Jayapura (usia 10 tahun keatas) sudah mempunyai ijazah, yaitu 27.25 % mempunyai ijazah SD/MI, 20.34 % mempunyai ijazah SMP/MTs/SMP Kejuruan.
- d. Pada tahun 2016, APS penduduk 7–12 tahun mencapai 96,21 %, ini berarti masih terdapat 3.79 % penduduk 7-12 tahun yang belum sekolah atau tidak sekolah lagi. Dari 94.97 % penduduk umur 7-12 tahun yang bersekolah ada yang masih sekolah di SD, ada pula yang sudah duduk di bangku SMP. Sedangkan APS penduduk umur 13-15 tahun sebesar 94,74 %, artinya penduduk berumur 13-15 tahun masih aktif bersekolah pada tingkat SD, SLTP atau sudah di bangku SLTA, sedangkan 3,16 % masih belum sekolah atau tidak sekolah lagi. Untuk APS penduduk 16-18 tahun sebesar 90,60 %, artinya penduduk berumur 16-18 tahun masih aktif bersekolah pada tingkat SLTP, SLTA atau bangku kuliah, sedangkan 9,40 % masih belum sekolah atau tidak sekolah lagi.
- e. Jumlah Sekolah dan Rasio Ketersediaan Sekolah belum sepenuhnya menjangkau sebaran penduduk. Sampai akhir tahun 2017 terdapat sarana fisik pendidikan di Kabupaten Jayapura yang terdiri dari 148 PAUD, 53 TK, 135 SD/MI, 43 SLTP/MTs.
- f. Kualitas pendidikan, dilihat dari tingkat kelulusan, meskipun rata-rata capaian nilai kelulusan telah berada diatas standar yang dipersyaratkan (4,51), namun dilihat dari tingkat kelulusan masih cukup rendah, terutama pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Sedangkan dari sisi mutu tenaga kependidikan diindikasikan oleh presentase kelayakan guru mengajar, yakni: guru SD/MI yang layak mengajar 65,18 %, semi layak 33,71 % dan

tidak layak 2,17 %; pada tingkat SMP/MTs yang layak mengajar 80,35%, semi layak 13,78% dan tidak layak 5,87%.

- g. Sebagian besar guru pada semua jenjang pendidikan belum mengikuti uji kompetensi profesi.
- h. Sebagian besar anak yang menjadi siswa baru pada jenjang pendidikan SD/MI tidak memiliki kesempatan menikmati Sekolah Taman Kanak-Kanak (69,12%) karena masih sangat terbatasnya sarana dan pra sarana pendidikan anak usia dini (PAUD) di kampung-kampung.
- i. Belum efektifnya dampak program khusus Penelusuran dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Asli Kabupaten Jayapura (P5) dalam mengakselerasi kemajuan dan kualitas pendidikan daerah.
- j. Masih rendahnya penerapan kurikulum berbasis teknologi disebabkan oleh ketersediaan fasilitas yang minim dan belum merata disetiap jenjang pendidikan.
- k. Belum meratanya kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat pesisir, terisolir dan terpencil.
- l. Belum optimalnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- m. Masih rendahnya angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan. SMP sebesar 68,65 % dan SD sudah mencapai 94,30 %.
- n. Masih lemahnya kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan pendidikan.
- o. Masih rendahnya mutu pendidikan masyarakat.
- p. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pendidikan.
- q. Belum optimalnya dan transparan pengelolaan dana BOS.

4.1.2.2. Urusan bidang Kesehatan.

- a. Angka harapan hidup baru mencapai 66,40 tahun, masih di bawah angka rata-rata Provinsi Papua (69,12 tahun) dan masih jauh dari capaian ideal yakni 85 tahun.
- b. Masalah penyakit infeksi belum dapat diatasi namun masalah baru sudah harus segera mendapat perhatian, yaitu penyakit degeneratif dan penyakit kronis (hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung koroner dan sebagainya) yang frekuensinya semakin bertambah, menimbulkan beban ganda dan berimplikasi pada perencanaan di bidang kesehatan.
- c. Penyakit HIV/AIDS pada tingkat yang mengkhawatirkan yang memberi dampak negatif di bidang kesehatan, ekonomi dan pembangunan serta

kesejahteraan.

- d. Sarana/fasilitas kesehatan yang masih terbatas untuk menjangkau luasnya wilayah serta kesulitan geografis. Sampai akhir tahun 2017 tersedia satu rumah sakit umum, 20 Puskesmas, 58 Puskesmas Pembantu (Pustu), 21 Polindes, 4 Pusling Air dan 20 Pusling Darat. Rasio posyandu/balita 1:30; rasio dokter PNS terhadap penduduk 1:518; rasio puskesmas terhadap wilayah 1:1 distrik.
- e. Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah masih sangat terbatas.
- f. Masih Minimnya Tenaga Dokter Spesialis di RSUD dan Puskesmas plus.
- g. Sebanyak (58.84 %) belum mempunyai tempat pembuangan akhir tinja hanya menggunakan kolam/sawah, sungai, lubang tanah, dan lainnya sebagai tempat buang air besar. Sekitar 45.32 % rumah tangga di Kabupaten Jayapura beresiko terkena pencemaran sumber air minum.
- h. Tenaga kesehatan belum merata terdistribusi sampai ke tingkat kampung.
- i. Masih minimnya fasilitas penunjang pelayanan posyandu di beberapa kampung.
- j. Belum meratanya sarana prasarana kesehatan di setiap kampung.
- k. Kurangnya tenaga dokter umum dan dokter spesialis.
- l. Belum optimalnya pelayanan Puskesmas 24 jam di wilayah-wilayah yang jangkauan terbilang cukup jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- m. Masih adanya kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas.
- n. Masih adanya kasus kematian bayi umur 0 sampai kurang dari 1 tahun.
- o. Masih adanya kasus prevalensi gizi kurang pada balita.
- p. Masih adanya kasus prevalensi penyakit menular malaria, ISPA dan TBC.

4.1.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Kondisi jalan aspal, kerikil dan tanah masih banyak yang rusak, termasuk jalan lingkungan maupun jaringan jalan di beberapa ibukota distrik. Total panjang ruas jalan di Kabupaten Jayapura sampai Tahun 2016 adalah 778,30 Km, dengan rincian jalan aspal 347.73 Km (17.61%), jalan kerikil sepanjang 347.73 Km (44.68) dan jalan tanah sepanjang 293.54 Km (37.72%). Total Jalan yang rusak sepanjang 294.14 Km (37,79 %) dan jembatan yang ada di daerah ini pada Tahun 2016 sebanyak 207 unit dengan total panjang mencapai 1.787.5 meter. Jembatan loging sepanjang 1.068 meter, total jembatan yang mengalami kerusakan sepanjang 1.237,5 meter (69,23%).
- b. Sarana jalan darat belum dapat mengakses seluruh distrik dan kampung terutama yang ada di Distrik Airu, Ebungfau, Ravenirara dan Yokari, karena beberapa ruas jalan dan jembatan masih mengalami kerusakan.
- c. Pembangunan dan pengelolaan drainase di wilayah pemukiman, terlebih yang ada di wilayah perkotaan belum optimal, sehingga sering menimbulkan banjir pada saat musim hujan.
- d. Sebanyak 50 % Sarana Air Bersih Pedesaan dalam kondisi rusak
- e. Masih ada kampung yang belum memiliki Sarana Air Bersih
- f. Masih Minimnya Sanitasi di lingkungan Perumahan

4.1.2.4. Pertanian, Perumahan dan kawasan Pemukiman

- a. Jumlah Rumah di Kabupaten Jayapura sebanyak 29,528 unit, bahwa sebanyak 15.033 unit (49.09 %) rumah penduduk tidak layak huni.
- b. Pemenuhan kebutuhan air minum bagi rumah tangga belum mampu dipenuhi secara maksimal. PDAM hanya mampu melayani sekitar 10,38 % sebagian besar di wilayah perkotaan.
- c. Sebanyak 3.655 KK belum terlayani jaringan listrik dari PLN.
- d. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Kabupaten Jayapura dalam hal pengadaan dan pemasangan PLTS.
- e. Masih tingginya pendirian rumah dan pelaksanaan konstruksi yang tidak didukung oleh regulasi AMDAL dan IMB.
- f. Belum tersedianya Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik pemerintah

daerah.

- g. Tingginya kasus penyerobotan dan pemalangan tanah.
- h. Banyak jalan lingkungan dalam kondisi rusak.
- i. Drainase di lingkungan perumahan belum memadai sehingga terjadi genangan pada musim hujan.
- j. Masih banyak lahan dan tanah yang belum bersertifikat.
- k. Belum optimalnya penanganan pertanian;

4.1.2.5. Sosial.

- a. Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih tersebar di 5 distrik yang membutuhkan program pemberdayaan yang mencakup upaya-upaya integrasi sosial, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
- b. Perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum maksimal.
- c. Belum adanya sistem perlindungan sosial yang terencana dan komprehensif.
- d. Belum optimalnya pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.
- e. Masih rendahnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.

4.1.2.6. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

- a. Masih adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- b. Masih lemahnya penegakan hukum yang ditandai dengan adanya pelanggaran yang terjadi, baik terhadap produk hukum nasional maupun produk hukum daerah dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
- c. Minimnya dorongan dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat;
- d. Masih lemahnya kinerja penegakkan hukum daerah terhadap berbagai pelanggaran;
- e. Semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga dan aparatur hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Masih tingginya tindak kriminal yang disebabkan oleh masih beredarnya minuman keras beralkohol yang akhirnya menimbulkan kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan dan bahkan pembunuhan;

- g. Minimnya pencegahan terhadap kriminalitas yang dapat menimbulkan pencurian, kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan dan bahkan pembunuhan;
- h. Tingginya kasus klaim kepemilikan tanah adat/ulayat yang seharusnya tidak boleh terjadi jika status kepemilikan yang jelas sesuai ketentuan dan kepemilikan adat/ulayat;
- i. Masih rendahnya pengetahuan kebangsaan bagi masyarakat;
- j. Belum optimalnya koordinasi para penegak hukum dalam memberikan rasa aman kepada lingkungan dan masyarakat.

4.1.3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

4.1.3.1. Tenaga kerja

- a. Belum optimalnya penanganan terhadap angka pengangguran.
- b. Masih rendahnya SDM pencari kerja terlebih khusus masyarakat lokal (OAP).
- c. Masih ada kesenjangan antara angkatan kerja dengan lowongan kerja.
- d. Belum optimalnya keselamatan kerja.
- e. Belum tersedianya balai latihan kerja.
- f. Belum optimalnya sistem pendataan ketenagakerjaan dan informasi lapangan kerja;

4.1.3.2. Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- a. Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah tangga (KDRT).
- b. Kualitas hidup perempuan dan anak masih relatif rendah khususnya di kampung asli.
- c. Kurangnya kontribusi dan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pemerintahan.
- d. Kurangnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten dan distrik.
- e. Minimnya partisipasi kaum perempuan di bidang politik;
- f. Minimnya intensitas pembimbingan dan pendampingan bagi kaum perempuan dalam manajemen usaha;
- g. Belum optimalnya sistem pendataan anak jalanan;
- h. Derajat pendidikan dan pendapatan perempuan masih rendah, sehingga wawasan terkait kesetaraan gender, peran perempuan dan perlindungan anak masih terbatas.

4.1.3.3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

- a. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Sembilan Wilayah Adat dan Kampung Adat.
- b. Masih rendahnya SDM Aparat Kampung dalam mengelola Sumber Daya Alam.
- c. Adanya dualisme kepemimpinan antara Kampung adat di Kampung Pemerintah.
- d. Dana kampung belum signifikan mengangkat perekonomian Kampung.
- e. Kurang Optimalnya Aparat kampung dalam mengelola Dana Kampung.
- f. Belum optimalnya monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan kampung.
- g. Kurang maksimalnya pendampingan terhadap pengelolaan dana kampung.
- h. Belum konsisten pelaksanaan program kampung dengan RPJMK.

4.1.3.4. Perhubungan.

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan Dermaga dan Tambatan Perahu untuk Transportasi Air di Kampung.
- b. Sarana angkutan publik masal dan fasilitas pendukungnya, seperti terminal, halte dan lapangan terbang perintis belum tersedia secara memadai.
- c. Belum tersedia regulasi/perda tentang pemanfaatan Bandara Internasional Sentani untuk mendukung PAD Kabupaten Jayapura.
- d. Penataan transportasi Darat, Air, termasuk penyediaan rambu, nama jalan dan marka belum dilaksanakan secara optimal, sehingga senantiasa menciptakan ketidakteraturan arus lalu lintas dan sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

4.1.3.5. Lingkungan Hidup.

- a. Pengelolaan sampah dan limbah belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah.
- b. Perlu adanya regulasi yang mengatur terhadap pembangunan pemukiman dan fasilitas umum lainnya.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan.
- d. Pengelolaan lingkungan hidup belum dapat dilaksanakan secara optimal,

sehingga masih sering terjadi pengrusakan lingkungan, penebangan hutan sagu termasuk perambah hutan lindung.

- e. Sarana dan prasarana lingkungan, seperti laboratorium lingkungan hidup, belum tersedia secara memadai, sehingga belum mampu mendukung kegiatan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup.
- f. SDM pengelola laboratorium lingkungan hidup belum tersedia secara memadai.
- g. Kerjasama pemerintah, dunia usaha, lembaga lain dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan belum terlaksana secara optimal.
- h. Belum optimalnya penataan dan pemeliharaan drainase untuk mencegah banjir.
- i. Minimnya pemanfaatan keanekaragaman hayati terhadap pengembangan nilai tambah.

4.1.3.6. Koperasi dan UKM.

- a. Peranan dan kontribusi lembaga koperasi dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Jayapura yang masih sangat rendah.
- b. Pemetaan lembaga usaha koperasi dan UKM belum tersedia, sehingga belum dapat diketahui potensi sumberdaya yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangannya.
- c. Kualitas dan kapasitas SDM pengelola koperasi dan UKM masih rendah, sehingga kinerja usaha mereka relatif rendah dan belum berkembang dengan baik.
- d. Jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) penduduk masih relatif rendah yang mengakibatkan kurangnya inovasi dalam mendukung kemajuan perekonomian Kabupaten Jayapura.
- e. Kurangnya akses sumber permodalan ke perbankan bagi koperasi dan UKM untuk meningkatkan dan mengelolah usaha.
- f. Kemampuan pengelola koperasi dan UKM dalam membangun jaringan usaha (bisnis) masih relatif rendah.
- g. Tingkat pengetahuan dan keterampilan pengelola usaha koperasi dan UKM dalam menyusun rencana bisnis (*business plan*) belum mampu, sehingga kemampuan mereka dalam mengembangkan usahanya masih perlu di pacu.

4.1.3.7. Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

- a. Kurangnya sarana prasarana pelayanan penanaman modal dan perizinan yang memadai;
- b. Masih Rendanya Penanaman Modal Asing (PMA);
- c. Daya serap investasi yang masih rendah;
- d. Kurangnya promosi untuk potensi-potensi daerah;
- e. Kurangnya koordinasi terhadap pemangku wilayah adat terkait kepemilikan hak ulayat;
- f. Kurangnya kepastian hukum tentang kepemilikan hak ulayat;
- g. Belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif;
- h. Belum adanya data potensi investasi yang mendukung kegiatan penanaman modal;
- i. Belum adanya usaha mempromosikan potensi investasi
- j. Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu antara Provinsi dengan BPPTSP Kabupaten Jayapura;
- k. Belum optimalnya sistem informasi yang menunjang pelayanan umum dan perizinan di bidang penanaman modal;
- l. Masih kurangnya kompetensi SDM ASN yang membidangi promosi dan kerjasama, pelayanan perizinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang penanaman modal;

4.1.3.8. Pemuda dan Olah Raga.

- a. Ketersediaan sarana dan prasaran pendukung olahraga masih kurang.
- b. Pengelolaan Stadion Barnabas Youwe “SBY” dan GOR Toware belum optimal, sehingga belum mampu memacu prestasi olah raga di kalangan pemuda.
- c. Pembinaan olahraga berprestasi masih memerlukan pembinaan secara berkelanjutan.
- d. Belum optimal Peranan dan kontribusi lembaga kepemudaan dalam pembangunan dan pengembangan aktivitas kepemudaan dan olah raga.
- e. Minimnya partisipasi pihak swasta dan lembaga lainnya dalam menunjang pembinaan keolahragaan yang berkelanjutan.
- f. Pemberian penghargaan bagi pemuda dan atlit serta *official* yang berprestasi masih sangat kurang.

4.1.3.9. Informasi dan Komunikasi

- a. Masih ada distrik dan kampung belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
- b. Minimnya penguasaan IPTEK oleh masyarakat untuk memecahkan hambatan dalam kehidupannya.
- c. Kurangnya motivasi masyarakat untuk bekerja keras dan cerdas dengan memanfaatkan IPTEK.
- d. Pengembangan IPTEK belum mampu mendorong masyarakat untuk menggunakan dan menciptakan suatu kreasi dan inovasi untuk berdayasaing tinggi di pasar lokal, impor dan ekspor.

4.1.3.10. Pengendalian Penduduk dan KB

- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penyuluh KB
- b. Kurangnya Tenaga PPLKB.
- c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk ikut program KB
- d. Rendahnya angka akseptor KB;
- e. Belum optimalnya pelayanan KB;
- f. Belum optimalnya sistem informasi program KB kepada masyarakat;

4.1.3.11. Kependudukan dan Capil

- a. Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP.
- b. Minimnya sarana prasarana kependudukan.
- c. Dokumen akte kependudukan belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat khususnya masyarakat OAP yang berada di wilayah IV;
- d. Belum terintegrasinya data kependudukan dan catatan sipil dalam perencanaan Perangkat Daerah;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengurus dokumen-dokumen kependudukan dan catatan sipil;
- f. Sulitnya konektifitas jaringan aplikasi SIAK untuk menunjang pelayanan publik;
- g. Belum optimalnya pelaksanaan operasi yustisi.

4.1.3.12. Bidang Statistik

- a. Belum tersedianya data pembangunan yang *update*;
- b. Belum tersedianya data terpilah penduduk Papua Kabupaten dan Papua Non Kabupaten ;

- c. Kurang terintegrasinya data BPS dengan PD;
- d. Belum optimalnya sistem publikasi dan informasi pembangunan secara *online*;

4.1.3.13. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya promosi dan pengembangan potensi adat dan budaya lokal.
- b. Kurangnya dorongan pada masyarakat lokal untuk menghargai dan melestarikan budayanya.
- c. Perlunya upaya mempromosikan tempat-tempat sejarah sebagai pelestarian budaya;
- d. Belum tersedianya museum dan informasi data tentang nilai-nilai budaya;
- e. Belum optimalnya penulisan dan penerbitan serta publikasi buku-buku sejarah dan cerita rakyat tentang adat dan budaya lokal.

4.1.3.14. Bidang Perpustakaan

- a. Belum tersedianya prasarana perpustakaan yang memadai.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu;
- c. Belum tersedianya tenaga pustakawan;
- d. Informasi dan ketersediaan pustaka yang tidak up to date;
- e. Belum optimalnya layanan perpustakaan keliling;

4.1.3.15. Ketahanan Pangan

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan.
- b. Kurangnya SDM masyarakat memanfaatkan bahan pangan lokal.
- c. Masih terbatasnya keanekaragaman pangan lokal.
- d. Kurang optimalnya peran penyuluh pertanian.

4.1.4. Urusan Pilihan

4.1.4.1. Pertanian

- a. Kesadaran dan kemampuan masyarakat lokal dalam bertani secara modern relatif rendah.
- b. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian.
- c. Kebutuhan konsumsi masyarakat atas beras, kacang-kacangan dan

jagung belum dapat dipenuhi oleh produksi di daerah.

- d. Penggunaan bibit unggul belum ditunjang dengan teknik budidaya yang modern serta keanekaragaman varietas terbatas.
- e. Penggunaan pupuk dan pestisida an-organik serta pestisida hayati belum dapat meningkatkan produksi secara maksimal.
- f. Kemampuan petani dalam pengadaan pupuk dan pestisida organik masih relatif rendah karena harganya cukup tinggi.
- g. Kesadaran petani dalam penggunaan pupuk masih kurang, termasuk komitmen petani untuk mengolah lahan sesuai jadwal dan musim tanam.
- h. Ketersediaan sarana produksi, seperti *hand tractor*, *tractor*, sangat terbatas.
- i. Ketersediaan irigasi di sentra-sentra produksi padi masih kurang.
- j. Perluasan areal belum tercapai karena status tanah (tanah ulayat) tidak jelas.

4.1.4.2. Perkebunan dan Peternakan

- a. Tingkat kerusakan tanaman kakao sangat tinggi akibat serangan hama dan pengendalian hama sangat kurang.
- b. Industri pengolahan kakao belum tersedia.
- c. Ketersediaan tenaga penyuluh perkebunan, pertanian, dan peternakan, perikanan (PPL) masih kurang.
- d. Lokasi pengembangan usaha peternakan terintegrasi belum tersedia.
- e. Pusat pelatihan dan pendidikan peternakan terpadu bagi masyarakat belum tersedia.
- f. Tanggungjawab petani penggadu/pengontrak ternak sapi masih relatif rendah.
- g. Belum tersedianya industri pakan ternak.
- h. Design pengembangan peternakan belum tersedia.
- i. Pemeliharaan ternak oleh masyarakat masih belum bersifat bisnis dan budidaya.
- j. Belum tersedianya Rumah Potong Hewan (RPH) yang memadai.

4.1.4.3. Perikanan.

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan, seperti *cold storage*, pasar ikan hidup Netar dan BBI Sereh belum optimal.

- b. Potensi sumberdaya air, utamanya danau Sentani dan beberapa sumber mata air lainnya yang tersebar di beberapa distrik, belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan usaha budidaya perikanan air tawar
- c. Belum tersedianya industri pakan ikan.
- d. Jumlah penyuluh dan kapasitas masih sangat terbatas.
- e. Belum terlaksana budidaya dan pengembangan spesies ikan asli danau Sentani.
- f. Belum terlaksananya penguatan kapasitas masyarakat lokal untuk pengembangan usaha perikanan.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang masih sangat kurang dalam upaya mendorong pengembangan usaha perikanan.
- h. Masih terbatasnya petani dan nelayan mengakses pasar dan bisnis.
- i. Belum optimalnya fungsi Balai Benih Ikan (BBI) menjadi sumber benih dan pusat pengembangan ikan.

4.1.4.4. Kehutanan.

- a. Belum maksimalnya rehabilitasi lahan kritis.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana hutan masih sangat terbatas.
- c. Pelaksanaan fungsi pengawasan hutan oleh petugas polisi kehutanan masih sangat minim.
- d. Belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan cagar alam.
- e. Pemetaan penggunaan hutan belum dilaksanakan secara optimal.
- f. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan belum terbangun suatu kesadaran bersama.
- g. Kurangnya penegakan hukum terhadap perusakan hutan.
- h. Belum adanya kerjasama terpadu antara pemerintah dan masyarakat adat dalam perlindungan hutan.
- i. Adanya keterbatasan permodalan dan regulasi daerah yang memberikan ruang bagi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan.
- j. Masih adanya kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penjarahan (*illegal logging*).
- k. Terjadinya ketidakseimbangan antara *supply* dan kebutuhan bahan baku industri meubel.
- l. Belum optimalnya antara penebangan kayu dan penanaman kembali (*reboisasi*).

4.1.4.5. Pariwisata.

- a. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia pengelola pariwisata masih relatif minim;
- b. Tingkat partisipasi dan kesadaran komunitas masyarakat adat terhadap pariwisata masih rendah.
- c. Event pariwisata Festival Danau Sentani (FDS), Lembah Grime dan Tanah Merah belum terkelola dengan baik.
- d. Kurangnya minat investor untuk mendukung industri pariwisata.
- e. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan destinasi wisata.
- f. Masih minimnya sarana dan prasarana di destinasi wisata.
- g. Belum tersedianya *grand design* pariwisata sesuai potensi wilayah.
- h. Belum optimalnya promosi dan pemasaran destinasi wisata.
- i. Minimnya kesadaran masyarakat adat untuk mengembangkan destinasi wisata diwilayahnya.

4.1.4.6. Industri dan Perdagangan.

- a. Kurangnya koordinasi pihak-pihak yang menangani perindustrian dan perdagangan.
- b. Kurangnya SDM para pengelola industri dan pedagang kecil.
- c. Masih terbatasnya akses para pedagang dan pengelola industri kecil dan menengah ke lembaga perbankan sebagai sumber permodalan.
- d. Sarana dan prasarana pendukung perindustrian dan perdagangan masih kurang memadai (Pasar, Terminal Peti kemas, lembaga perpajakan, dan lain-lain).
- e. Masih rendahnya kualitas produksi industri kecil/kerajinan sehingga kurang mampu bersaing.
- f. Belum maksimalnya penerapan teknologi industri untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
- g. Kurangnya promosi dan informasi potensi perdagangan.

4.1.5. Penunjang Urusan

4.1.5.1. Perencanaan pembangunan

- a. Belum optimalnya penegakan Perda RTRW,
- b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan-kawasan prioritas belum seluruhnya disusun.

- c. Belum tersedianya *database* di setiap sektor dan urusan.
- d. Dokumen perencanaan pembangunan yang telah dihasilkan, belum tepat waktu dan belum disosialisasikan secara optimal.
- e. Masih rendahnya dukungan data dari PD.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- g. Belum maksimalnya pelaksanaan *e-planning*.
- h. Belum tersedianya desain Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota.
- i. Belum optimalnya penggunaan ilmu pengetahuan berupa hasil-hasil kajian untuk pelaksanaan pembangunan;
- j. Kurangnya pemahaman dari aparat perencana di tingkat PD dalam menyusun indikator dan capaian hasil pembangunan.

4.1.5.2. Kepegawaian dan SDM

- a. Kualitas dan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah pada umumnya belum merata di seluruh PD dan wilayah distrik/kampung/kelurahan.
- b. Kurangnya pembinaan administrasi dan aparatur.
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana bagi aparatur distrik dan kampung masih relatif kurang.
- d. Penempatan Jabatan struktural belum sesuai dengan keahlian dan latar belakang Pendidikan.
- e. Ketersediaan sumberdaya manusia aparatur yang memenuhi syarat untuk diangkat pada jabatan struktural yang belum terisi masih relatif kurang.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Kepegawaian.

4.1.5.3. Inspektorat

- a. Penyelesaian hasil temuan pemeriksaan auditor, baik BPK maupun inspektorat masih rendah.
- b. Masih kurangnya auditor dan tenaga pemeriksa.
- c. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap OPD belum terlaksana.
- d. Penetapan hukum daerah tentang SPM dan SOP yang telah disusun belum ada.
- e. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang memiliki Sertifikasi dan keahlian Pengadaan Barang dan Jasa masih terbatas.

4.1.5.4. Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pelaporan Keuangan dari Perangkat Daerah belum tepat waktu.
- b. Belum maksimal penyusunan dan penetapan APBD.
- c. Kurang optimalnya pelaksanaan *e-budgeting*.
- d. Kurang sinkronnya *e-planning* dengan *e-budgeting*.
- e. Belum optimalnya pendataan dan penataan barang milik daerah/ aset daerah

4.1.5.5. Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Belum optimalnya penggalian sumber sumber PAD.
- b. Belum maksimalnya PAD untuk meningkatkan APBD.
- c. Minimnya regulasi dalam peningkatan PAD.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dan pelaku bisnis dalam membayar pajak dan retribusi.
- e. Mengoptimalkan sistem pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi informasi.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa depan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan, gambaran umum kondisi daerah; isu nasional dan isu regional, dan isu internasional.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan

mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional. Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengajukan 17 tujuan spesifik, 62 sasaran dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara-negara Anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar pemerintah pasca 2015.

1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan
3. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia
4. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua
7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara Negara-negara
11. Membuat Kabupaten dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya

14. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.1.2 ASEAN Economic Community (AEC)

1. Komunitas ekonomi asean (AEC) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada 2015. Adapun berikut karakteristik kunci dari perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015:
2. Pasar tunggal dan produksi dasar,
3. Sebuah ekonomi yang sangat kompetitif
4. Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan, dan
5. Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Bidang kerjasama AEC meliputi pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas; pengakuan kualifikasi profesional; konsultasi mengenai kebijakan makroekonomi dan keuangan; langkah-langkah pembiayaan dalam perdagangan; peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi; perkembangan elektronik transaksi melalui e-ASEAN; mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber di daerah; dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk bangunan AEC. Singkatnya, AEC akan mengubah ASEAN ke wilayah dengan pergerakan bebas dari barang, Jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan lebih bebas aliran modal.

Pemberlakuan AEC akan mengakibatkan Barang, jasa, dan tenaga kerja semakin mudah untuk lalu lalang di negara anggota ASEAN. Bagi Indonesia, kesepakatan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Jika diolah dan dikelola dengan baik, produk dan tenaga kerja Indonesia berpotensi merajai pasar Asia

Tenggara. Sebaliknya, jika tak siap berkompetisi, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara anggota ASEAN lain.

Demikian juga bagi Kabupaten Jayapura, Asean economy community ini menjadi sebuah prospek baru untuk Kabupaten Jayapura membuka arus investasi seiring dengan keterbukaan Kabupaten Jayapura yang ramah terhadap investor. Penguatan pasar lokal dan regional menjadi perhatian utama guna mempersiapkan pasar bebas yang berimplikasi pada eksistensi pengusaha lokal untuk dapat berdaya saing dengan pengusaha asing.

4.2.2 Isu atau Kebijakan Nasional

Selain memerhatikan isu skala internasional dan regional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan adalah isu strategis nasional yang dalam hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa “Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*.

4.2.3 Isu Pembangunan Provinsi Papua

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018, isu strategis pembangunan tingkat regional Provinsi Papua meliputi;

1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua sebagai yang terendah di Indonesia
2. Masih rendahnya akses masyarakat asli Papua pada pendidikan dasar dan menengah termasuk non-formal akibat rendahnya ketersediaan layanan pendidikan untuk masyarakat di daerah terpencil, pendekatan yang tidak sesuai dengan kondisi geografis dan pola permukiman serta budaya masyarakat setempat
3. Belum tersedianya sistem jaminan pemenuhan biaya pendidikan gratis (operasional dan personal) dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah khususnya bagi Orang Papua Asli sesuai mandat UU Otsus, menyebabkan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat.
4. Masih rendahnya akses masyarakat asli Papua pada pemenuhan kesehatan dasar akibat rendahnya ketersediaan sarana kesehatan, rendahnya distribusi tenaga kesehatan dan non kesehatan, ketersediaan obat-obatan secara merata, serta tingginya biaya kesehatan akibat belum meratanya distribusi jaminan kesehatan masyarakat
5. Masih tingginya angka kematian ibu, kematian bayi baru lahir dan balita, angka balita kurang Gizi, serta penyakit endemis malaria dan menular berbahaya
6. Masih rendahnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau dengan sanitasi lingkungan dan air bersih yang bermutu dan ketersediaan listrik yang merata
7. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat perkotaan dan pedesaan karena pemberdayaan ekonomi yang belum sepenuhnya bertumpu pada kekuatan ekonomi kerakyatan dalam memastikan adanya mata pencaharian (*livelihood*) yang menyebabkan rendahnya nilai tambah dan produktivitas di wilayah pedesaan,

8. Masih rendahnya angka kemandirian fiskal akibat belum optimalnya pemanfaatan sumber pendapatan asli daerah dari produk unggulan daerah non migas diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta sumber pendapatan un-conventional lainnya diantaranya skema kompensasi penurunan emisi gas rumah kaca.
9. Belanja pemerintah cenderung tidak efisien sehingga menciptakan kesenjangan sosial dan politik ekonomi yang menempatkan masyarakat pada posisi absolute konsumtif
10. Dis-harmony hubungan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kabupaten akibat miss-management dalam penetapan orientasi dan strategi pembangunan sehingga meninggalkan peran kabupaten/ Kabupaten sebagai jenjang pemerintahan dengan kewenangan tersendiri
11. Terbaikannya peran masyarakat Adat termasuk perempuan Papua yang secara keterwilan oleh MRP (Majelis Rakyat Papua) selaku mitra utama pemerintah sehingga proses pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan banyak yang bertentangan dengan prinsip dasar dan hak dasar masyarakat adat.
12. Tidak Konsistennya penyelenggaraan pembangunan Papua karena belum tersedia masterplan pembangunan (RPJP) sebagai kesepakatan warga menuju peradaban baru yang dicita-citakan bersama
13. Pembangunan infrastruktur strategis yang tidak berkesinambungan sehingga koneksitas antar daerah masih terhambat
14. Masih adanya tuntutan dari kelompok masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI karena tidak terlaksananya rekonsiliasi akibat perbedaan pemahaman sejarah bangsa dan ketidak puasan pada kebijakan publik yang belum menjawab permasalahan mendasar pembangunan
15. Pengendalian dan pengurangan aksi korupsi, kolusi dan nepotisme belum berjalan dengan baik
16. Tidak jelasnya mind set dan culture-set birokrasi pemerintah daerah yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas pelayanan publik dalam pencapaian prioritas pembangunan
17. Penataan dan pemanfaatan ruang bagi pembangunan tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten/ Kabupaten maupun stakeholder lainnya.
18. Distribusi pembiayaan pembangunan era otonomi khusus yang belum proporsional antara provinsi dengan kabupaten/ Kabupaten dalam penyediaan layanan yang lebih kontekstual
19. Belum optimalnya pengembangan potensi olahraga prestasi dan perlindungan nyata atas kekayaan intelektual serta kebudayaan luhur asli Papua termasuk

penilaian atas sumberdaya hayati dan plasma nutfah asli Papua berdasarkan penelitian dan pengembangan secara berkelanjutan dan memastikan penguatan akar budaya Papua dalam menghadapi gempuran modernisasi

20. Rendahnya kepercayaan investor karena belum adanya upaya konstruktif dalam penegakan hukum, pengembangan sistem informasi pembangunan daerah yang mendukung pertumbuhan investasi daerah yang berorientasi pada pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

4.3. Isu Pembangunan Daerah

Isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Jayapura dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Akses dan kualitas pelayanan pendidikan.
2. Akses dan pelayanan kesehatan.
3. Daya saing tenaga kerja.
4. Peran masyarakat adat dalam pembangunan.
5. Peran kampung adat dalam pembangunan.
6. Ekonomi kerakyatan.
7. Infstruktur wilayah dan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan.
8. Layanan komunikasi dan informasi.
9. Kesejahteraan Sosial.
10. Perumahan Layak huni.
11. Air bersih dan sanitasi.
12. Tata kelolala pemerintahan.
13. Penataan pemukiman.
14. Ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
15. Gender dan perlindungan anak.
16. Lingkungan hidup.

BAB V

VISI DAN MISI

5.1. Visi

Visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode RPJMD yakni tahun 2022. Visi ini memberi kejelasan tentang arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Dengan demikian, rumusan visi ini menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun, menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah, menjelaskan/mengakomodasi keunikan yang dimiliki daerah dalam jangka menengah, dan menggambarkan nilai-nilai kunci (*core values*) yang perlu dilaksanakan.

Sebagai acuan nasional, visi RPJMN Indonesia 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai acuan Provinsi, Visi RPJMD Provinsi Papua adalah “Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik”. Sebagai acuan jangka panjang kabupaten, visi RPJPD Kabupaten Jayapura 2005-2025 adalah “Terwujudnya Manusia Jayapura yang Terdepan di Papua”. Rumusan visi ini mengandung empat pokok visi yakni: 1. Terdepan dalam kualitas manusia; 2. Terdepan dalam kualitas masyarakat; 3. Terdepan dalam kualitas pemerintahan; 4. Terdepan dalam kualitas wilayah. Ini berarti bahwa poin penting dibalik visi RPJPD Kabupaten Jayapura adalah kualitas.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah teridentifikasi masalah utama pembangunan Kabupaten Jayapura secara jangka menengah yakni: (1) rendahnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia; (2) kurang berdayanya masyarakat adat; (3) kurang berkembangnya kampung adat; (4) rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan; (5) kurang mantapnya infrastruktur wilayah; (6) belum optimalnya perwujudan pemerintahan yang baik; (7) belum optimalnya kepuasan atas pelayanan publik; (8) rentannya gangguan ketertiban, ketenteraman dan keindahan dalam masyarakat; (9) adanya ancaman terhadap daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam. Dari berbagai masalah pokok tersebut maka dapat

dirumuskan pokok visi dan pernyataan visi untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Jayapura 2017-2022 sebagai berikut.

Tabel 5.1
Perumusan Visi

No	Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Rendahnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Manusia berkualitas	Jayapura Berkualitas
2.	Kurang berdayanya masyarakat adat	Masyarakat adat berkualitas	
3.	Kurang berkembangnya kampung adat	Kampung adat berkualitas	
4.	Rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan	Ekonomi sejahtera	Jayapura Sejahtera
5.	Kurang mantapnya infrastruktur wilayah	Infrastruktur mantap	
6.	Belum optimalnya perwujudan pemerintahan yang baik	Ramah pemerintahan	Jayapura Ramah
7.	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Ramah pelayanan	
8.	Rentannya gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat	Ramah sosial	
9.	Adanya ancaman kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Ramah Lingkungan	

Dari tabel 5.1 pernyataan visi dapat diformulasi rumusan visi RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 yakni:

VISI:

“KABUPATEN JAYAPURA BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN RAMAH”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat pokok visi yakni “Jayapura berkualitas”, “Jayapura sejahtera”, “Jayapura ramah”. Ketiga pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan visi tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan, dimana Jayapura berkualitas, sejahtera dan ramah adalah substansi utama sementara Jayapura berkelanjutan merupakan prakondisi bagi perwujudan substansi utama tersebut.

Jayapura berkualitas adalah kondisi kualitas manusia secara umum yang semakin berkualitas dan berdayasaing, ditandai oleh derajat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, dengan ditopang oleh eksistensi masyarakat adat yang semakin berdaya dan kampung adat yang semakin berkembang, sesuai dengan karakteristik sosial-budaya daerah.

Jayapura sejahtera adalah kondisi kehidupan ekonomi kerakyatan yang semakin tangguh dengan didukung oleh infrastruktur wilayah yang semakin membuka konektivitas

distrik maupun kampung. Ekonomi kerakyatan dimaksud adalah perekonomian yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan perdagangan pada seluruh distrik dan kampung.

Jayapura ramah adalah kondisi tatanan masyarakat Kabupaten Jayapura yang hidup dan berkembang dalam heterogenitas sosial yang tinggi tetapi harmonis dan damai serta sensitif terhadap gender dan perlindungan anak dengan ditopang oleh tatakelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan yang memuaskan. Selain itu, jayapura juga ramah lingkungan, yakni kondisi dimana daya dukung lingkungan dan sumber daya alam tetap terpelihara dan seluruh upaya pembangunan selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*).

Prinsip dasar dari rangkaian pokok visi tersebut adalah “adat yang kuat”, “perekonomian rakyat yang meningkat” dan “daerah yang berkualitas”, yang pada gilirannya menopang tujuan pembangunan berkelanjutan. Keseluruhan rangkaian pilar perubahan itulah yang akan didorong pencapaiannya. Semboyan di balik rumusan visi ini adalah:

SEMBOYAN

“ADAT KUAT, EKONOMI RAKYAT MENINGKAT, JAYAPURA BERKUALITAS”

Rangkuman penjelasan visi ini dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Penjelasan Visi

Visi	Pernyataan Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Jayapura Berkualitas	Kondisi dimana kualitas manusia meningkat melalui kemajuan pendidikan dan kesehatan dengan masyarakat adat yang berdaya dan kampung adat yang berkembang.
Kabupaten Jayapura Berkualitas, Sejahtera dan Ramah	Jayapura Sejahtera	Kondisi dimana produksi, pro-duktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan perdagangan meningkat secara berbasis ekonomi kerakyatan dengan dukungan infra-struktur wilayah yang mantap.
	Jayapura Ramah secara sosial dan Lingkungan	Kondisi dimana tatanan daerah berkembang dalam heterogenitas sosial yang harmonis serta sensitif terhadap gender dan perlindungan anak dengan ditopang oleh tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang memuaskan
		Kondisi dimana daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam terpelihara dan seluruh upaya pembangunan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

5.2. Misi

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Kriteria rumusan misi adalah: 1) Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi; 2) Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; 3) Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Berdasarkan pemahaman itu maka perumusan misi RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3
Perumusan Misi

No.	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi
1.	Ketertinggalan kualitas manusia	Jayapura Berkualitas	Rendahnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Meningkatkan kualitas manusia
			Kurang berdayanya masyarakat adat	Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat
			Kurang berkembangnya kampung adat	
2.	Kekurangsejahteraan masyarakat	Jayapura Sejahtera	Rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan	Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan
			Kurang mantapnya infrastruktur wilayah	Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur
3.	Kerentanan sosial	Jayapura Ramah secara sosial	Belum optimalnya perwujudan pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
			Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	
			Rentannya gangguan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	
4.	Kerentanan ekologis	Jayapura Ramah Secara lingkungan	Adanya ancaman kelestarian lingkungan hidup	Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam

Berdasarkan tabel 5.3 maka rumusan Misi serta penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut.

MISI KABUPATEN JAYAPURA

- (1) Meningkatkan kualitas manusia**
- (2) Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat**
- (3) Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan**
- (4) Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur**
- (5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**
- (6) Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam**

Adapun penjelasan masing-masing misi dapat dilihat pada tabel 5.4.

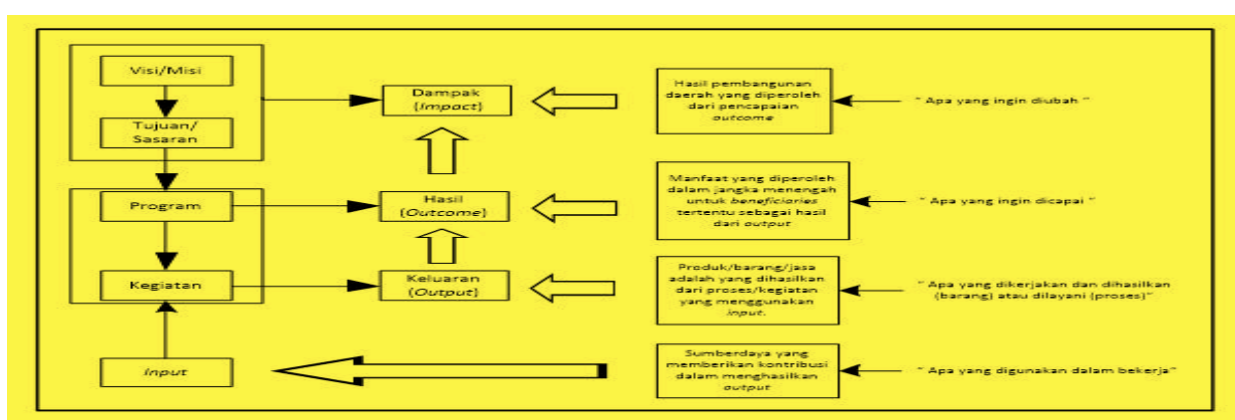
Tabel 5.4.
Penjelasan Misi

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	Jayapura Berkualitas	Meningkatkan kualitas manusia	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan, dan daya saing tenaga kerja
		Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan masyarakat hukum adat dan pengembangan kampung adat
	Jayapura Sejahtera	Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan	Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata.
		Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan permukiman.
	Jayapura Ramah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Misi ini mencakup upaya umum dalam reformasi birokrasi, pelayanan publik, penguatan distrik, responsivitas gender dan perlindungan anak, serta pemeliharaan ketertiban, ketenteraman dan keindahan dalam masyarakat.
		Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Misi ini mencakup upaya umum pemeliharaan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Tujuan dan Sasaran

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5.1.
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, reasonable, time-bond* (SMART-C).

Tabel 5.5
Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jayapura

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	T1. Meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	S1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan
		S2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
		S3. Meningkatnya daya saing Sumber Daya/tenaga kerja manusia
Misi 2. Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat	T2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat hukum adat dan perkembangan kampung adat	S4. Meningkatnya partisipasi masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pembangunan
		S5. Berkembangnya fungsi-fungsi kampung adat dalam penyelenggaraan pembangunan
Misi 3. Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan	T3. Meningkatkan produksi dan produktivitas perekonomian rakyat	S6. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, industri dan perdagangan
		S7. Meningkatnya peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pariwisata dalam perekonomian rakyat
		S8. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial
Misi 4. Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah	T4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah	S9. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur transportasi dan perhubungan
		S10. Meningkatnya kapasitas pelayanan air minum dan penanganan limbah
		S11. Meningkatnya jangkauan dan kelayakan infrastruktur pemukiman dan perumahan
		S12. Meningkatnya jangkauan dan fungsi infrastruktur komunikasi
Misi 5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	T5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	S13. Meningkatnya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan
		S14. Meningkatnya kualitas ketertiban, ketenteraman dan keindahan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan
		S15. Berkembangnya sensitivitas gender dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan
		S16. Meningkatnya peran distrik dalam pelayanan kepada masyarakat
Misi 6. Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	T6. Memelihara daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam	S17. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup
		S18. Terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan

Tabel 5.6
Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Terkait
					2017	2018	2019	2020	2021	2022		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	M1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	T1: Meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,5	70,9	71,3	71,7	72,1	72,5	72,5	Perangkat Daerah Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
			S1: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (thn)	9,53	9,7	9,9	10,25	10,55	11	11	Perangkat Daerah Pendidikan
				Angka harapan lama sekolah (thn)	13,79	14,4	14,65	14,75	14,9	15	15	Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
				Angka melek huruf (%)	98,16	98,55	98,6	98,65	98,7	98,8	98,8	Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
			S2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	66,4	66,9	67,3	67,7	67,9	68	68	Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
			S3. Meningkatnya daya saing Sumber Daya/Tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	14,63	14,63	14,5	14,03	13,5	10,99	10,99	Perangkat Daerah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sosial, Pendidikan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Lingkup Ekonomi
2	M2: Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat	T2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat hukum adat dan perkembangan kampung adat		% masyarakat hukum adat (MHA) / Dewan Adat Suku (DAS) yang terpelihara dalam pengakuan wilayah adat suku (%)	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretariat Daerah, Lingkungan Hidup, Sekretariat Dewan.
				Jumlah kampung adat yang telah ditetapkan perbub dan perda	4	4	5	5	6	8	8	Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretariat Daerah,, Lingkungan Hidup, Sekretariat Dewan
			S4. Meningkatnya partisipasi masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pembangunan	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sumber daya komunalnya mendapatkan sertifikasi.	9	9	9	9	9	9	9	Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretariat Daerah, Lingkungan Hidup, Sekretariat Dewan
				Jumlah masyarakat hukum adat yang efektif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kampung/ kampung adat dan daerah	9	9	9	9	9	9	9	Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lingkungan Hidup, Sekretariat Dewan
				% karya seni dan	5	5	5	5	5	5	5	Perangkat Daerah Kebudayaan dan

				kearifan lokal masyarakat adat yang dikembangkan.								Pariwisata, DPMK, Litbang, Kominfo, Pendidikan
			S.5 Berkembangnya fungsi-fungsi kampung adat dalam penyelenggaraan pembangunan	Jumlah kampung adat yang menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	4	4	8	8	8	6	32	Perangkat Daerah Pemberdayaan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat Daerah, 19 Distrik
3	Misi-3: Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan	T3. Meningkatkan produksi dan produktivitas perekonomian rakyat		Pertumbuhan ekonomi	8,54	8,60	8,66	8,72	8,78	8,84	8,84	Lingkup Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah, BP2TSP.
				Pengeluaran PDRB/kapita	9,65	10,14	10,64	11,17	11,73	12,32	12,32	Lingkup Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah, BP2TSP.
				% penduduk di atas garis kemiskinan	65,29	65,31	65,33	65,35	65,37	65,39	65,39	Perangkat Daerah Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Lingkup Ekonomi
			S6.Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, industri dan perdagangan	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	16,31	16,21	16,11	16,01	15,91	15,81	15,71	Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	22,23	22,68	23,13	23,58	24,03	24,48	24,93	Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	12,22	12,67	13,12	13,57	14,02	14,47	14,92	Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi,
				Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	12,22	12,67	13,12	13,57	14,02	14,47	14,92	Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi, Bappeda
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	4,57	5,02	5,47	5,92	6,37	6,82	7,27	Perangkat Daerah Dinas perdagangan, Koperasi UKM, BPKAD, Bappeda
				% koperasi aktif	64,35	66,52	68,7	70,87	73,04	75,22	75	Dinas Koperasi dan UMKM
			S7. Meningkatnya peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pariwisata dalam perekonomian rakyat	% usaha mikro dan kecil	0,57	0,6	65	70	75	80	80	Dinas Koperasi dan UMKM
				% kontribusi pariwisata dalam PAD	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	80	Dinas Pariwisata, Bappenda, DPMK.
				Jumlah wisatawan mancanegara dan domestik	121.000	121.000	122.000	122.000	152.000	123.000	123.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			S8. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial	% PMKS yang terlayani	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Sosial
				% korban bencana yang mendapatkan jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
4	Misi-4: Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur	T4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan pertanahan, pehubungan.

	wilayah											
			S9. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur transportasi dan perhubungan	% jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	0,52	0,54	0,55	0,56	0,06	0,58	0,6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan pertanahan, pehubungan.
				Jumlah arus penumpang angkutan umum (pengguna terminal, pelabuhan dan bandara)	210,17 KM	1,2 KM	1,5 KM	1,5 KM	1,5 KM	1,5 KM	217,37	Dinas Perhubungan , Pariwisata, Disperindag, BP2TSP.
				Jumlah terminal, pelabuhan dan bandara terpelihara	26	27	29	31	31	33	33	Dinas Perhubunagn, Bappeda
			S10. Meningkatkan kapasitas pelayanan air minum dan penanganan limbah	% Rumah berakses air bersih	50	55	60	65	70	75	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				% Rumah yang bersanitasi	50	55	60	65	70	75	75	Dinas Pertanahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			S11, Meningkatnya jangkauan dan kelayakan infrastruktur pemukiman dan perumahan	Rasio rumah layak huni	26	1	2	2	2	2	2	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial
				Rasio pemukiman layak huni	49,09%	50	52	54	56,00	60	60	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial
			S12. meningkatnya jangkauan dan fungsi infrastruktur komunikasi	% distrik yang berfungsi sebagai basis data elektronik (smart district)	50	50	100	100	100	100	100	Kominfo, setda, BKPSDM, Dispora, Perpustakaan, BPBD, Kesbangpol, 19 Distrik
5	M.5 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	T5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Perangkat Daerah Inspektorat dan semua PD
			S13. Meningkatnya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Nilai LAKIP/SAKIP	CC	B	B	B	A	A	A	Perangkat Daerah Setda, Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Semua PD
				Indeks kepuasan masyarakat	68	68	75	75	80	85	85,00	Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, P3KA, Capil, BPPTSP, Wajib Dasar, Satpol PP, PMK, BPKAD, Bapenda, Bappeda
			S14. Meningkatnya kualitas ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	% Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)	80	80	80	80	80	80	80	Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan politik, Satpol PP, BP2STP, Capil, BPBD, Pengendalian Penduduk dan KB
			S15. Berkembangnya sensitivitas gender dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan	Rasio KDRT	0,06	0,06	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Satuan Polisi dan Pamong Praja.
				Jumlah kampung dan kampung adat ramah anak	Kampung	18	20	22	24	26	26	Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kesehatan, Pendidikan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Sekretariat Daerah, 19 Distrik
					Kampung	4	4	4	4	4		

					adat							
			S.16 Meningkatnya peran distrik dalam pelayanan kepada masyarakat	% Distrik yang efektif berperan dalam penyediaan data dan informasi, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan SDM		6	10	15	17	19	19	
				% distrik yang berperan dalam penyediaan data dan informasi		4	3	2	1	0	0	
				% distrik yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat		4	3	1	0	0	0	
				% distrik yang berperan dalam pelatihan		5	3	1	1	0	0	
6	M6. Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	T6. Memelihara daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	3.383,00	50	50	50	50	50	3.633,00	Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan perumahan dan kawasan pemukiman, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan
			S17. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	Hasil pengukuran indeks kualitas air	1	5	5	5	5	5	5	Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Hasil pengukuran indeks kualitas udara	0							Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	0							Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan.
			S18. Terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan	Timbulan sampah yang ditangani	%	15	16	17	18	19	19	Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 19 Distrik

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Pernyataan strategi juga dapat mengubah kalimat negatif masalah menjadi kalimat positif untuk dijadikan sebagai strategi. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022 dapat dirumuskan sebagai berikut.

Strategi-1 : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan untuk seluruh wilayah dengan pembelajaran yang memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan semua pihak yang didukung oleh sarana-prasarana yang memadai.

Pendidikan adalah pilar utama dalam meningkatkan kualitas manusia. Salah satu kelemahan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah ini adalah kurang optimalnya tenaga pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran untuk menghasilkan keluaran yang berkualitas. Karena itu, kecukupan tenaga pendidik yang menjalankan proses pembelajaran berkualitas pada setiap distrik/kampung merupakan tantangan yang harus dipenuhi. Seiring dengan itu, ketersediaan sarana-prasarana pendidikan yang memadai diupayakan terpenuhi secara proporsional sesuai kebutuhan setiap distrik/kampung guna memenuhi standar pelayanan minimal urusan pendidikan. Kecukupan tenaga pendidik yang berkualitas serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada gilirannya terorientasikan

untuk tidak hanya memaknai pendidikan sebagai pengajaran pengetahuan ilmiah yang universal, tetapi juga sebagai penggalian karakteristik asli dalam bentuk pengetahuan/kearifan lokal untuk diaktualkan dalam kurikulum pendidikan muatan lokal dan berinteraksi dalam kehidupan lokal dan dunia luar. Dengan itu, SDM yang dilahirkan dapat mengaktualkan jati dirinya sebagai orang Jayapura-Papua sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan yang bersentuhan dengan dirinya. Sehingga untuk tercapainya hasil keluaran pendidikan yang berkualitas diperlukan pelibatan semua *stakeholder* termasuk orang tua dan masyarakat.

Strategi-2 : Promosi pola hidup sehat secara bersinergi dengan pemenuhan standar pelayanan kesehatan minimal yang didukung oleh kecukupan sarana-prasarana dan tenaga kesehatan

Pembangunan kesehatan untuk peningkatan kualitas manusia dipahami dalam dua dimensi yang bersinergi yakni mendorong pola hidup sehat dalam masyarakat dan melayani masyarakat yang menghadapi masalah kesehatan. Promosi pola hidup sehat merupakan strategi pencegahan melalui kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan strategi penanggulangan dengan fokus pada upaya pencapaian standar pelayanan minimal. Strategi ini diharapkan dapat menangani dengan akurat realitas masalah kesehatan yang spesifik di Kabupaten Jayapura yakni masalah kesehatan yang tercakup dalam standar pelayanan minimal serta masalah spesifik lainnya seperti penyakit malaria, kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, hipertensi, diabetes melitus, tubercolosis, gangguan jiwa berat dan HIV/AIDS serta pengelolaan potensi obat asli.

Strategi-3: Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja dan pelaku usaha

Peningkatan kualitas manusia juga dapat ditempuh melalui pengembangan kompetensi atas sumberdaya manusia yang ada. Salah satu masalah di Kabupaten Jayapura adalah adanya ketertinggalan kompetensi teknis dan kompetensi kewirausahaan penduduk asli dari penduduk pendatang. Karena itu diperlukan upaya sistematis dan terfokus pada peningkatan kompetensi teknis dan kewirausahaan atas penduduk asli tersebut, agar dapat bersinergi dengan penduduk pendatang dalam memajukan perekonomian daerah.

Peningkatan kompetensi teknis dan kewirausahaan tersebut akan menjadi salah satu perhatian dalam menguatkan posisi distrik sebagai pusat pelatihan, dimana pada pusat distrik perangkat daerah menempatkan aparatnya untuk melatih SDM dari berbagai kampung dan kampung adat pada distrik tersebut, sehingga dengan keterampilan dan keahlian yang diperoleh warga kampung dan kampung adat dapat lebih berdaya dalam mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki.

Strategi-4: Penguatan masyarakat hukum adat melalui pemberian pengakuan terhadap kelembagaan adat yang sudah ada

Fokus dari strategi ini adalah pemberian pengakuan kepada masyarakat hukum adat sejalan dengan kewenangan yang diberikan melalui Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dalam pengakuan itu, masyarakat telah memiliki kelembagaan adat yang didalamnya tercakup aturan, struktur dan wilayah. Dengan pengakuan itu, masyarakat adat sebagai orang asli akan mendapatkan spirit baru untuk terlibat dalam pembangunan. Termasuk dalam strategi ini adalah pengakuan hak komunal masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya pada wilayah hukum adat tersebut.

Strategi-5 : Pengembangan kampung adat dalam penyelenggaraan fungsi pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, desa adat dapat dikembangkan sesuai karakteristik dan potensi daerah. Kabupaten Jayapura memiliki karakteristik dan potensi untuk mengembangkan kampung adat karena dalam tatanan masyarakat terdapat struktur masyarakat adat, kesatuan nilai-nilai adat yang dianut dan hak-hak setiap suku atau klen. Kampung adat yang dimaksud memiliki karakteristik beranggotakan masyarakat adat dari wilayah yang dihuni, masih memberlakukan aturan-aturan adat bagi anggotanya, memiliki pola kepemimpinan menurut sistem kepemimpinan yang dianut dalam struktur masyarakat adat, memiliki kesatuan geneologis, memiliki kesatuan teritorial dan/atau kesatuan geneologis teritorial, dan memiliki hak ulayat tradisional. Bentuk pemerintahan pada kampung adat sesuai dengan sistem kepemimpinan adat yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat sepanjang kenyataannya masih ada

dan diakui. Dengan pembentukan dan pengembangan kampung adat maka peran masyarakat hukum adat diharapkan mendapatkan spirit yang lebih nyata untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Strategi-6 : Pengembangan ekonomi kerakyatan

Perekonomian Kabupaten Jayapura ditopang oleh perkembangan usaha ekonomi yang ditunjang oleh kekuatan modal besar terutama pada sektor perkebunan, perdagangan dan industri di satu sisi, dan pada sisi lainnya berkembang ekonomi kerakyatan pada bidang usaha pertanian dan perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat serta usaha mikro dan usaha kecil. Pengembangan ekonomi kerakyatan difokuskan pada penguatan inovasi dan teknologi tepat guna, modal usaha dan jiwa kewirausahaan dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk berbagai usaha ekonomi kerakayatan, termasuk pengembangan tanaman bahan pangan yang sesuai dengan sistem sosial budaya pangan masyarakat yakni pengembangan sagu dan ubi-ubian sebagai basis ketahanan pangan masyarakat serta pengembangan pariwisata berbasis keunikan budaya dan alam pada level kampung atau kampung adat.

Strategi-7 : Pengembangan infrastruktur wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelayakan

Penyediaan infrastruktur wilayah merupakan hak warga masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. Untuk itu, perlu dilakukan penyediaan dan peningkatan layanan infrastruktur di wilayah kota dan kampung secara memadai, efisien, efektif, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berkelayakan. Pemenuhan dan peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran aktif swasta dan masyarakat. Cakupan utama penyediaan infrastruktur wilayah adalah sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara dalam meningkatkan konektivitas antar distrik/kampung serta antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Cakupan lain adalah pemenuhan infrastruktur perumahan dan pemukiman untuk mewujudkan rumah tinggal dan pemukiman layak huni.

Strategi-8 : Perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi secara beriringan dengan penguatan distrik sebagai pusat aktivitas

Ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik yang memuaskan telah semakin tinggi dan berkonsekuensi pada diperlukannya perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi secara terus menerus. Perbaikan tatakelola terkait dengan penerapan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan secara internal birokrasi maupun dalam interkoneksinya dengan masyarakat sipil dan dunia usaha. Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah pembaharuan dan perubahan mendasar secara terus menerus terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada aspek-aspek yang terkait dengan kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Dalam konteks Kabupaten Jayapura, substansi perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi ini selain terkait dengan eksistensi perangkat daerah pada level kabupaten juga terkait dengan eksistensi distrik yang secara geografis yang memiliki rentang kendali yang terhambat kondisi geografis dalam efektivitas pelayanannya. Konteks spesifik lain terkait kehadiran pemerintah daerah/birokrasi adalah pemeliharaan Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3) dalam masyarakat serta penanganan gangguan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap anak.

Distrik sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan memiliki posisi strategis dalam mensinergikan kekuatan pelayanan pada level perangkat daerah dengan potensi keberdayaan masyarakat pada level kampung dan kampung adat. Dengan posisi strategis itu distrik diposisikan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelatihan SDM dan pusat data/informasi pembangunan. Melalui penguatan distrik, perangkat daerah menempatkan aparatnya di setiap distrik, sementara itu warga kampung dan kampung adat datang ke pusat distrik untuk belajar dan mendapatkan pelayanan dari PD baik melalui UPTD maupun melalui aparat PD yang ditugaskan di distrik. Dengan strategi ini PD dominan beroperasi pada level distrik sementara pemerintahan kampung dan kampung adat beroperasi melalui RPJMK, RKPK dan APBK.

Strategi-9 ; Peningkatan kelestarian dan daya dukung lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goal's (SDGs) menempatkan aspek lingkungan sebagai pilar utama dalam menopang aspek ekonomi dan aspek sosial. Asas dari pembangunan berkelanjutan adalah terpenuhinya kebutuhan generasi

sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi berikutnya baik atas sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. Meskipun Kabupaten Jayapura masih dominan diliputi oleh pepohonan serta vegetasi dari berbagai jenis tetapi tetap saja kelestarian dan daya dukung lingkungan pesisir, danau, dataran rendah dan dataran tinggi tersebut memerlukan strategi yang tepat untuk memeliharanya. Salah satu fokusnya adalah pemanfaatan sumberdaya alam yang mematuhi arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW, selain itu juga upaya langsung dalam memantau dan melakukan tindakan pemeliharaan terhadap kualitas lingkungan hidup daerah mencakup pengukuran dan pemantauan terhadap indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Sebagian dari wilayah Kabupaten Jayapura merupakan perkotaan yang padat serta merupakan pintu gerbang Papua dengan keberadaan bandara Sentani, maka menjadi tuntutan menjaga kebersihan dan keindahan kota melalui penanganan sampah dalam kaidah-kaidah ekologis dan keberlanjutan serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

6.2. Arah Kebijakan

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, arah kebijakan dalam RPJMD adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan prioritas yang berbeda setiap tahun bukan berarti bahwa program/kegiatan pembangunan operasional pada PD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan.

Berdasarkan pemahaman demikian maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jayapura selama periode 2017-2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

(1) Arah kebijakan pembangunan tahun 2018.

Prioritas pembangunan pada tahun 2018 telah ditetapkan pada tahun sebelumnya dan penyesuaian dengan visi-misi kepada daerah dilakukan pada penyusunan APBD

perubahan. Tema pembangunan pada tahun ini adalah “*Pemberdayaan masyarakat adat dengan didukung oleh perbaikan kualitas manusia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat*”. Secara keseluruhan prioritas kebijakan pembangunan pada tahun ini diarahkan kepada:

1. Pemenuhan tenaga pendidik;
2. Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan;
3. Pelatihan kompetensi teknis pemanfaatan sumberdaya lokal berbasis distrik;
4. Pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
5. Penguatan regulasi kampung adat;
6. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan untuk ketahanan pangan;
7. Pembinaan koperasi dan UMKM;
8. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
9. Penataan perumahan;
10. Pengembangan distrik sebagai pusat aktivitas pembangunan dan pelayanan;
11. Pemberdayaan masyarakat kampung dan kampung adat dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman;
12. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran;
13. Pengukuran kualitas udara, air dan tutupan lahan;
14. Penanganan sampah perkotaan.

(2) Arah kebijakan pembangunan tahun 2019

Tema pembangunan pada tahun ini adalah “*Pengembangan kampung adat secara berkesinambungan dengan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan dengan didukung oleh peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah*”. Secara keseluruhan prioritas kebijakan pembangunan pada tahun ini diprioritaskan kepada:

1. Perbaikan kualitas tenaga pendidik;
2. Promosi pola hidup sehat;
3. Pelatihan kompetensi teknis pemanfaatan sumberdaya lokal berbasis distrik;

4. Pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
5. Penetapan dan pembinaan tatakelola kampung adat;
6. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan untuk ketahanan pangan;
7. Pembinaan koperasi dan UMKM;
8. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
9. Penataan perumahan;
10. Pengembangan distrik sebagai pusat aktivitas pembangunan dan pelayanan;
11. Pemberdayaan masyarakat kampung dan kampung adat dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman;
12. Pembinaan kampung dan kampung adat ramah anak;
13. Pemantauan kualitas udara, air dan tutupan lahan;
14. Penanganan sampah perkotaan.

(3) Arah kebijakan pembangunan tahun 2020.

Pada tahun 2020 di Provinsi Papua akan dilaksanakan Pekan Olah Raga Nasional dan Kabupaten Jayapura menjadi bagian dari penyelenggaraan tersebut. Karena itu sebagian upaya pembangunan akan mendukung even ini, terutama dalam hal ketertiban dan ketenteraman untuk terwujudnya tatanan sosial yang ramah kepada berbagai kontingen daerah serta dukungan infrastruktur transportasi, perhubungan dan penginapan. Tema pembangunan pada tahun ini adalah *“Perwujudan ketertiban, ketenteraman dan tatanan sosial yang ramah sebagai manifestasi manusia berkualitas dengan didukung oleh perbaikan infrastruktur wilayah”*. Secara keseluruhan prioritas kebijakan pembangunan pada tahun ini diarahkan kepada:

1. Pemenuhan sarana-prasarana pendidikan;
2. Pemenuhan sarana-prasarana kesehatan;
3. Pengembangan kewirausahaan berbasis distrik;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan;
5. Pembinaan tatakelola dan fungsi kampung adat dalam pembangunan;
6. Pengembangan industri dan perdagangan;

7. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekologi;
8. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana perhubungan darat, udara, perairan;
9. Penataan pemukiman;
10. Perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi;
11. Penanganan gangguan ketertiban, ketenteraman dan keindahan secara partisipatif;
12. Pembinaan kampung dan kampung adat ramah anak;
13. Pemeliharaan kualitas udara, air dan tutupan lahan;
14. Penanganan sampah perkotaan.

(4) Arah kebijakan pembangunan tahun 2021

Tema pembangunan pada tahun ini adalah “*Pemantapan pelayanan masyarakat berbasis distrik dengan didukung oleh pemberdayaan masyarakat adat dan pengembangan kampung adat secara berkelanjutan*”. Secara keseluruhan prioritas pembangunan pada tahun ini diarahkan kepada:

1. Perbaikan proses belajar-mengajar;
2. Pemenuhan tenaga kesehatan;
3. Pengembangan kewirausahaan berbasis distrik;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan;
5. Pembinaan tatakelola dan fungsi kampung adat dalam pembangunan;
6. Pengembangan industri dan perdagangan;
7. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekologi;
8. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana perhubungan darat, udara dan perairan;
9. Penataan perumahan dan pemukiman;
10. Perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi;
11. Penanganan gangguan ketertiban, ketenteraman dan keindahan secara partisipatif;
12. Pemantapan sensitivitas gender dalam perencanaan dan penganggaran;
13. Pemeliharaan kualitas udara, air dan tutupan lahan;
14. Penataan kebersihan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan keindahan kota.

(5) Arah kebijakan pembangunan tahun 2022

Tahun ini adalah akhir periode RPJMD sehingga lebih merupakan pemantapan atas berbagai pencapaian dan mengejar target-target sasaran yang belum tercapai. Tema pembangunan pada tahap ini adalah *“Pemantapan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dengan didukung oleh pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam dalam tatanan sosial yang ramah”*. Secara keseluruhan prioritas pembangunan pada tahun ini diarahkan kepada:

1. Pengembangan pendidikan vokasional;
2. Akselerasi pencapaian standar pelayanan minimal;
3. Pemantapan kewirausahaan berbasis distrik;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan;
5. Pembinaan tatakelola dan fungsi kampung adat dalam pembangunan;
6. Pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan;
7. Peningkatan daya saing produk K-UMKM untuk dipasarkan pada even wisata;
8. Pemeliharaan jalan dan jembatan;
9. Penataan perumahan dan pemukiman;
10. Pemantapan distrik sebagai pusat aktivitas pembangunan dan pelayanan;
11. Penanganan gangguan ketertiban, ketenteraman dan keindahan secara partisipatif;
12. Pemantapan kampung dan kampung adat ramah anak;
13. Pemeliharaan kualitas udara, air dan tutupan lahan;
14. Pemantapan kebersihan, keindahan kota dan RTH.

Uraian arah kebijakan bila dihubungkan dengan masing-masing tujuan dan sasaran serta misi yang dikontribusinya maka dapat dilihat sebagai berikut (Tabel 6.1).

Tabel 6.1
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jayapura 2018-2022

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2018	2019	2020	2021	2022
	Misi-1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia							
	Meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan untuk seluruh wilayah dengan pembelajaran yang memperhatikan kearifan lokal dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	Pemenuhan tenaga pendidik	Perbaikan kualitas tenaga pendidik	Pemenuhan sarana-prasarana pendidikan	Peningkatan proses belajar-mengajar	Peningkatan mutu layanan pendidikan
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Promosi pola hidup sehat secara bersinergi dengan pemenuhan standar pelayanan kesehatan minimal yang didukung oleh kecukupan sarana-prasarana dan tenaga kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan	Promosi pola hidup sehat	Pemenuhan sarana-prasarana kesehatan	Pemenuhan tenaga kesehatan	Akselerasi pencapaian standar pelayanan minimal
		Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja dan Pelaku Usaha	Pelatihan kompetensi teknis pemanfaatan sumberdaya lokal berbasis distrik	Pelatihan kompetensi teknis pemanfaatan sumberdaya lokal berbasis distrik	Pengembangan kewirausahaan berbasis distrik	Pengembangan kewirausahaan berbasis distrik	Pemantapan kewirausahaan berbasis distrik

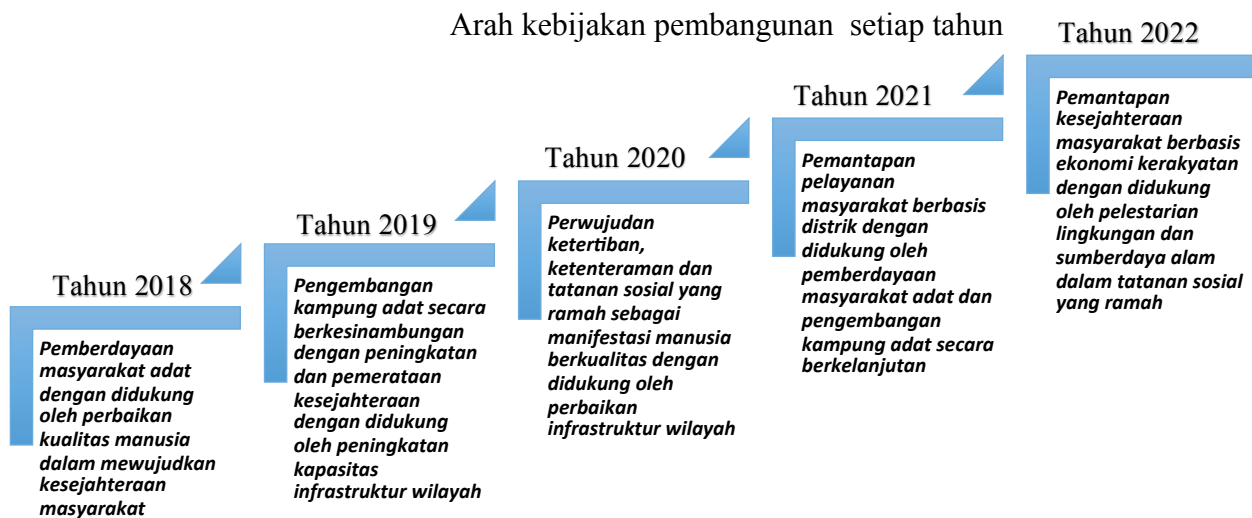
Misi-2: Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat								
Meningkatkan keberdayaan masyarakat hukum adat dan perkembangan kam-pung adat	Meningkatnya partisipasi masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pembangunan	Penguatan masyarakat hukum adat melalui pemberian pengakuan terhadap kelembagaan adat yang sudah ada	Pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat	Pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat	Peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan	
	Berkembangnya fungsi-fungsi kampung adat dalam penyelenggaraan pembangunan	Pengembangan kampung adat dalam penyelenggaraan fungsi pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah	Penguatan regulasi kampung adat	Penetapan dan pembinaan tatakelola kampung adat	Pembinaan tatakelola dan fungsi kampung adat dalam pembangunan	Pembinaan tatakelola dan fungsi kampung adat dalam pembangunan	Pembinaan tatakelola dan fungsi kampung adat dalam pembangunan	
Misi-3: Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan								
Meningkatkan produksi dan produktivitas perekonomian rakyat	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, industri dan perdagangan	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan untuk ketahanan pangan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan untuk ketahanan pangan	Pengembangan industri dan perdagangan	Pengembangan industri dan perdagangan	Pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan	
	Meningkatnya peran koperasi, usaha kecil dan usaha menengah serta pariwisata dalam perekonomian rakyat		Pembinaan koperasi dan UMKM	Pembinaan koperasi dan UMKM	Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekologi	Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekologi	Peningkatan daya saing produk UMKM untuk dipasarkan pada even wisata	
Misi-4: Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah								

	Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur transportasi dan perhubungan	Pengembangan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelayakan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana perhubungan darat, udara, perairan	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana perhubungan darat, udara dan perairan	Pemeliharaan jalan dan jembatan
		Meningkatnya jangkauan dan kelayakan infrastruktur pemukiman dan perumahan		Penataan perumahan	Penataan perumahan	Penataan pemukiman	Penataan pemukiman	Penataan perumahan dan pemukiman
Misi-5: Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik								
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi secara beriring dengan penguatan distrik sebagai pusat pelayanan	Pengembangan distrik sebagai pusat aktivitas pembangunan dan pelayanan	Pengembangan distrik sebagai pusat aktivitas pembangunan dan pelayanan	Perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi	Perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi	Pemantapan distrik sebagai pusat aktivitas pembangunan dan pelayanan
		Meningkatnya kualitas ketertiban, ketenteraman dan keindahan dalam lingkungan sosial kema-sarakatan		Pemberdayaan masyarakat kampung dan kampung adat dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman	Pemberdayaan masyarakat kampung dan kampung adat dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman	Penanganan gangguan ketertiban, ketenteraman dan keindahan secara partisipatif	Penanganan gangguan ketertiban, ketenteraman dan keindahan secara partisipatif	Penanganan gangguan ketertiban, ketenteraman dan keindahan secara partisipatif
		Berkembangnya sensi-tivitas gender dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan		Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran	Pembinaan kampung dan kampung adat ramah anak	Pembinaan kampung dan kampung adat ramah anak	Pemantapan sensitivitas gender dalam perencanaan dan penganggaran	Pemantapan kampung dan kampung adat ramah anak

	Misi-6: Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam							
	Memelihara daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kelestarian dan daya dukung lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan	Pengukuran kualitas udara, air dan tutupan lahan	Pemantauan kualitas udara, air dan tutupan lahan	Pemeliharaan kualitas udara, air dan tutupan lahan	Pemeliharaan kualitas udara, air dan tutupan lahan	Pemeliharaan kualitas udara, air dan tutupan lahan
		Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kawasan perkotaan		Penanganan sampah perkotaan	Penanganan sampah perkotaan	Penanganan sampah perkotaan	Penataan kebersihan dan keindahan kota	Pemantapan kebersihan dan keindahan kota

Berdasarkan deskripsi prioritas arah kebijakan setiap tahun maka tema/fokus pembangunan lima tahun.

Gambar 6.1.

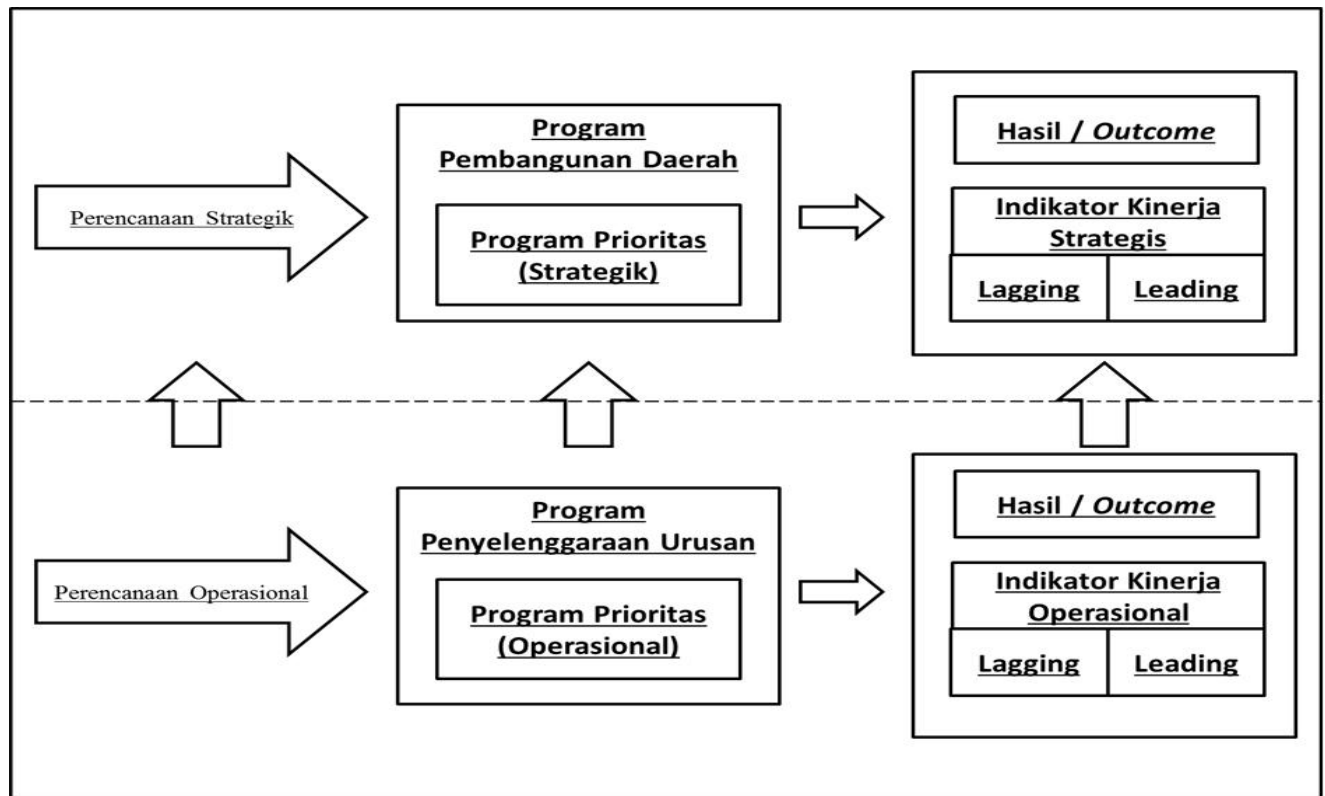


6.3. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam RPJMD ini, program pembangunan daerah diprioritaskan karena posisinya yang strategic dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam arsitektur kinerja RPJMD terdapat kategori program lain yakni program penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas disebabkan oleh posisinya yang operasional. Adapun arsitektur program RPJPM antara yang strategis dengan penyelenggaraan urusan dapat digambarkan sebagai berikut.

Kabupaten Jayapura 2017-2022 dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 6.2
Arsitektur Kinerja RPJMD antara kinerja Strategis dengan Operasional



Berdasarkan pemahaman itu maka rumusan program pembangunan daerah Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada Tabel 6.2. Pada tabel 6.2 diperlihatkan program pembangunan daerah apa saja yang akan berkontribusi sasaran dan tujuan pada masing-masing misi yang relevan.

Tabel 6.2
Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Jayapura 2017-2022

Misi , Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir		Perangkat Daerah Terkait
			2017	2018		2019		2020		2021		2022				
			Target	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
M1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia																
T1: Meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,5	70,9		71,3		71,7		72,1		72,5		72,5		Perangkat Daerah Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
S1: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan		Angka rata-rata lama sekolah (thn)	9,53	9,7		9,9		10,25		10,55		11		11		Perangkat Daerah Pendidikan
		Angka harapan lama sekolah (thn)	13,79	14,4		14,65		14,75		14,9		15		15		Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
		Angka melek huruf (%)	98,16	98,55		98,6		98,65		98,7		98,8		98,8		Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
	P1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	46,14	46,78	2.997.000.000	47	3.296.700.000	47,78	3.626.370.000	48	3.880.215.900	48,25	4.268.237.490	48,25	18.068.523.390	Dinas Pendidikan
	P1.2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD dan SMP	81,48	82,5	18.557.379.000	85,13	19.485.247.950	86,5	20.459.510.348	86,88	21.482.485.865	87,4	22.556.610.158	87,4	102.541.233.320	Dinas Pendidikan
	P1.3. Program Pendidikan Non Formal	% Penduduk buta huruf yang mendapatkan pendidikan kesetaraan	97,21	98,16	805.000.000	98,55	500.940.000	98,6	551.034.000	98,65	589.606.380	98,7	648.567.018	98,7	3.095.147.398	Dinas Pendidikan
	P1.4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% guru berpendidikan sarjana	79,99	80	11.519.268.600	85,25	15.219.730.460	85	16.741.703.506	90	18.415.873.857	95	20.257.461.242	95	82.154.037.665	Dinas Pendidikan
S2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan		Angka Harapan Hidup	66,4	66,9		67,3		67,7		67,9		68		68	0	Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan

																dan Kawasan Pemukiman.
	P2.1. Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	% Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	47	55	138.948.200	60	660.000.000	63	925.000.000	65	1.220.000.000	70	550.000.000	70	3.493.948.200	Dinas Kesehatan
	P2.2. Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	% Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	85	88	2.945.803.000	91	3.050.000.000	93	3.150.000.000	96	3.260.000.000	100	3.250.000.000	100	15.655.803.000	Dinas Kesehatan
	P2.3. Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	% Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	35	50	550.000.000	55	580.000.000	60	600.000.000	65	720.000.000	70	850.000.000	70	3.300.000.000	Dinas Kesehatan
	P2.4. Program Pelayanan Kesehatan Balita	% Anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	68	76	100.000.000	84	220.000.000	92	220.000.000	100	335.000.000	100	175.000.000	100	1.050.000.000	Dinas Kesehatan
	P2.5. Program Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	% Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90	95	80.000.000	97	120.000.000	100	150.000.000	100	220.000.000	100	250.000.000	100	820.000.000	Dinas Kesehatan
	P2.6. Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	% Warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	10	20	214.000.000	30	250.000.000	40	300.000.000	50	330.000.000	60	350.000.000	60	1.444.000.000	Dinas Kesehatan
	P2.7. Program Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	% Warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	5	10	100.000.000	10	240.000.000	15	170.000.000	25	250.000.000	30	300.000.000	30	1.060.000.000	Dinas Kesehatan
	P2.8. Program Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	% Penderita hipertensi mendapatkan	2	<16.68	100.000.000	<16.68	250.000.000	<16.68	300.000.000	<16.68	350.000.000	<16.68	400.000.000	<16.68	1.400.000.000	Dinas Kesehatan

		pelayanan kesehatan sesuai standar														
	P2.9. Program Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	% Penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10	50.000.000	15	150.000.000	20	200.000.000	25	250.000.000	25	650.000.000	Dinas Kesehatan
	P2.10. Program Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	% ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	5	10	114.000.000	15	150.000.000	20	200.000.000	25	250.000.000	30	300.000.000	30	1.014.000.000	Dinas Kesehatan
	P2.11. Program Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	% Orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	463.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	500.000.000	100	2.463.000.000	Dinas Kesehatan
	P2.12. Program Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	% Orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar Prevalensi HIVr	2	<2,3	206.357.000	<2,3	250.000.000	<2,3	275.000.000	<2,3	300.000.000	<2,3	250.000.000	<2,3	1.281.357.000	Dinas Kesehatan
S3. Meningkatnya daya saing Sumber Daya/tenaga kerja Manusia		Tingkat Pengangguran Terbuka	14,63	14,63		14,5		14,03		13,5		10,99		10,99		Perangkat Daerah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sosial, Pendidikan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Lingkup Ekonomi
	P3.1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang dilatih kompetensi teknis dan kewirausahaan	100	376	1.450.000.000	677	1.595.000.000	752	1.754.500.000	802	1.929.950.000	852	2.122.945.000	852	8.852.395.000	Dinsnaker
	P3.1. Program Peningkatan Kualitas pelaku UKM	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan	100	200	1.450.000.000	300	1.595.000.000	400	1.754.500.000	500	1.929.950.000	600	2.122.945.000	600	8.852.395.000	Dinas Koperasi IKM

		pelatihan kewirausahaan													
M2: Mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat adat														0	
T2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat hukum adat dan perkembangan kampung adat		% masyarakat hukum adat (MHA) / Dewan Adat Suku (DAS) yang terpelihara dalam pengakuan wilayah adat suku (%)	100	100		100		100		100		100		100	0 Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretariat Daerah, Lingkungan Hidup, Sekretariat Dewan.
		Jumlah kampung adat yang telah ditetapkan (dgn perbub/perda)	4	4		5		5		6		8		8	0 Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretariat Daerah, Lingkungan Hidup, Sekretariat Dewan
S4. Meningkatkan partisipasi masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pembangunan		Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sumber daya komunalnya mendapatkan sertifikasi.	4	4		4		4		4		5		6	0 Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretariat Daerah, Lingkungan Hidup, Sekretariat Dewan
		Jumlah masyarakat hukum adat yang efektif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kampung/kampung adat dan daerah	9	9		9		9		9		9		9	0 Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lingkungan Hidup, Sekretariat Dewan
		% karya seni dan kearifan lokal masyarakat adat yang	5	5		5		5		5		5		5	0 Perangkat Daerah Kebudayaan dan Pariwisata, DPMK, Litbang, Kominfo, Pendidikan

		dikembangkan.														
	P.4.1 Program penataan hak komunal masyarakat hukum adat	Jumlah unit lahan adat yang disertifikasi				5	5.207.878.900	7	5.728.666.790	9	6.801.533.469	11	7.481.686.816	11	28.590.564.975	Sekretariat Daerah dan Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan pemukiman
	P.4.2 Program Pengembangan partisipasi Masyarakat Adat	Jumlah masyarakat hukum adat yang efektif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kampung/kampung adat dan daerah	9	9	202.736.339.200	9	212.873.156.160	9	223.516.813.968	9	234.692.654.666	9	246.427.287.400	9	1.120.246.251.394	Dinas Pemberdayaan Kampung
	P.4.3 Program Apresiasi Kebudayaan Masyarakat Adat	Jumlah karya seni dan kearifan lokal masyarakat adat yang diinventarisasi, didokumentasikan dan dipertunjukkan kepada khalayak	5		3.370.799.000	5	5.207.878.900	7	5.728.666.790	9	6.801.533.469	11	7.481.686.816	11	28.590.564.975	Pariwisata
S.5 Berkembangnya fungsi-fungsi kampung adat dalam penyelenggaraan pembangunan		Jumlah kampung adat yang menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	4	4		8		8		8		6		32	0	Perangkat Daerah Pemberdayaan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat Daerah, 19 Distrik
	P5.1. Program Pengembangan Kampung Adat	Jumlah kampung adat yang efektif menjalankan fungsi pemerintahan	19	19	4.455.339.000	21	6.900.872.900	22	7.590.960.190	24	9.725.334.903	24	9.000.088.394	24	37.672.595.387	Dinas Pemberdayaan Kampung

		pembangunan dan pelayanan kepada warga kampung adatnya													
Misi-3: Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan														0	
T3. Meningkatkan produksi dan produktivitas perekonomian rakyat		Pertumbuhan ekonomi	8,54	8,6		8,66		8,72		8,78		8,84		8,84	0 Lingkup Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah, BP2TSP.
		Pengeluaran PDRB/kapita	9,65	10,14		10,64		11,17		11,73		12,32		12,32	0 Lingkup Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah, BP2TSP.
		% penduduk di atas garis kemiskinan	65,29	65,31		65,33		65,35		65,37		65,39		65,39	0 Perangkat Daerah Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Lingkup Ekonomi
S6.Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, industri dan perdagangan		Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	16,31	16,21		16,11		16,01		15,91		15,81		15,71	0 Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	22,23	22,68		23,13		23,58		24,03		24,48		24,93	0 Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	12,22	12,67		13,12		13,57		14,02		14,47		14,92	0 Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi,
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	12,22	12,67		13,12		13,57		14,02		14,47		14,92	0 Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi, Bappeda
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap	4,57	5,02		5,47		5,92		6,37		6,82		7,27	0 Perangkat Daerah Dinas perdagangan, Koperasi UKM, BPKAD, Bappeda

	P6.1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	PDRB Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura	12.462,00	13.708,00	4.962.587.000	15.709,00	5.458.845.700	16.587,00	6.004.730.270	18.246,00	6.465.898.889	20.070,00	7.112.488.778	20.070,00	30.004.550.637	Dinas TPH
		Jumlah produksi perkebunan	2.946,00	3.122,15	1.171.500.000	3.277,74	1.288.650.000	3.605,51	1.417.515.000	4.146,34	1.530.371.454	4.975,59	1.715.193.150	4.975,59	7.123.229.604	Dinas Peternakan Perkenunan
	P.6.2. Program Peningkatan Produksi Peternakan	Populasi ternak	1.876.072,00	1.936.472,00	5.789.730.000	1.988.320,00	6.368.703.000	2.010.150	7.005.573.300	##### ####	7.495.963.431	##### #####	8.245.559.774	2.093.700,00	34.905.529.505	Dinas Peternakan Perkenunan
	P.6.3. Program Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya	13.255,00	13.653,00	5.317.910.250	14.050,00	6.849.701.275	14.448	7.534.671.403	14.846,00	10.234.358.278	15.243,00	11.257.794.106	15.243,00	41.194.435.311	Dinas Kelautan dan Perikanan
	P.6.4. Program Peningkatan Produksi Industri Kerajinan	Cakupan bina kelompok pengrajin	50	2	3.110.200.000	4	8.421.220.000	4	10.645.242.000	4	12.642.766.200	4	13.895.142.145	4	48.714.570.345	Dinas Koperasi dan UMKM
	P.6.5. Program Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	2	2	380.000.000	2	10.418.000.000	2	21.024.104.695	2	20.000.000.000	2	5.541.184.600	2	57.363.289.295	Dinas Koperasi dan UMKM
S7. Meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pariwisata dalam perekonomian rakyat		% koperasi aktif	64,35	66,52		68,7		70,87		73,04		75,22		75	0	Dinas Koperasi dan UMKM
		% usaha mikro dan kecil	0,57	0,6		65		70		75		80		80	0	Dinas Koperasi dan UMKM
		% kontribusi pariwisata dalam PAD	0,05	0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		80	0	Dinas Pariwisata, Bappenda, DPMK.
		Jumlah wisatawan mancanegara dan domestik	121.000	121.000		122.000		122.000		152.000		123.000		123.000		
	P7.1. Program Pengembangan Koperasi	% koperasi yang dibina	0,64	0,65	518.500.000	0,72	570.350.000	0,81	627.385.000	0,9	2.608.301.950	0,95	3.369.132.145	0,95	7.693.669.095	Dinas Koperasi dan UMKM
	P7.2. Program Pengembangan usaha mikro dan kecil yang dibina	% usaha mikro dan kecil yang dibina	0,64	0,65	3.210.000.000	0,72	11.431.000.000	81,00%	9.666.000.000	0,9	13.511.150.000	0,95	13.641.265.000	0,95	51.459.415.000	Dinas Koperasi dan UMKM
	P.7.3 Program Pengembangan	Jumlah kampung dan	5	2	1.400.200.000	4	2.540.220.000	2	2.794.242.000	2	3.073.666.200	2	3.381.032.820	2	13.189.361.020	Dinas Pariwisata

	Kampung Wisata	kampung adat yang menjadi tujuan wisatawan (kampung/kampung adat wisata)														
	P.7.4 Program Festival Seni Budaya	Jumlah pengunjung Festival seni budaya	130.753,00	5.041,00	5.245.000.000	5.021,00	5.769.500.000	5.041	6.346.450.000	5.021,00	6.790.701.500	25.144,00	7.469.771.650	25.144,00	31.621.423.150	Dinas Pariwisata
S.8.Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial		% PMKS yang terlayani	90	90		90		90		90		90		90		
		% korban bencana yang mendapatkan jaminan sosial	100	100		100		100		100		100		100		
	P8.1 Program rehabilitasi sosial dasar	% penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100	100		100		100		100		100		100		
		% anak terlantar diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100	100		100		100		100		100		100		
		% lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100	100		100		100		100		100		100		
		% tunas sosial terlantar diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100	100		100		100		100		100		100		
	P.8.2 Program	% korban	100	100		100		100		100		100		100		

	perlindungan dan jaminan sosial tanggap darurat korban bencana	bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial														
Misi-4: Mendorong peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah																
T4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0008	0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008		0,0008	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan pertanahan, pehubungan.
S9. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur transpor-tasi dan perhubungan		% jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	0,52	0,54		0,55		0,56		0,06		0,58		0,6	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan pertanahan, pehubungan.
		Jumlah arus penumpang angkutan umum (pengguna terminal, pelabuhan dan bandara)	210,17 KM	1,2 KM		1,5 KM		1,5 KM		1,5 KM		1,5 KM		217,37	0	Dinas Perhubungan , Pariwisata, Disperindag, BP2TSP.
		Jumlah terminal, pelabuhan dan bandara terpelihara	26	27		29		31		31		33		33	0	Dinas Perhubunagn, Bappeda
	P9.1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan kabupaten yang terbangun (km)	210,17 KM	17 KM	29.365.159.000	17 KM	30.916.758.645	17 KM	35.008.434.510	17 KM	37.809.277.960	17 KM	59.700.000.000	17 KM	192.799.630.115	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	P9.2. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan kabupaten yang diperbaiki	210,17 KM	1,2 KM	1.980.354.000	1,5 KM	3.220.701.000	1,5 KM	4.492.771.100	1,5 KM	4.942.048.210	1,5 KM	7.019.909.655	1,5 KM	21.655.783.965	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	P9.3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah terminal, pelabuhan dan bandara yang	26	27	21.251.324.800	29	21.352.457.280	31	23.487.703.008	31	25.131.842.219	33	27.645.026.440	33	118.868.353.747	Dinas Perhubunagn

	P9.4 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	terbangun Jumlah terminal, pelabuhan dan bandara terpelihara	26	1	300.000.000	2	300.000.000	2	306.000.000	2	321.300.000	2	337.365.000	2	1.564.665.000	Dinas Perhubungan
S10. Meningkatnya kapasitas pelayanan air minum dan penanganan limbah		% Rumah berakses air bersih	50	55		60		65		70		75		75		
		% Rumah yang bersanitasi	50	55		60		65		70		75		75		
	P10.1. Program pengembangan kinerja pengolahan air minum dan air limbah	% penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman		55	13.754.800.000	60	17.754.800.000	65	21.530.280.000	70	24.778.308.000	75	30.256.138.800	75	108.074.326.800	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		% rumah yang dilayani dalam pengelolaan air limbah domestik		55	4.000.000.000	60	9.200.000.000	65	10.120.000.000	70	11.132.000.000	75	12.245.200.000	75	46.697.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
S11. Meningkatnya jangkauan dan kelayakan infrastruktur pemukiman dan perumahan		Rasio rumah layak huni	26	1		2		2		2		2		2	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial
		Rasio pemukiman layak huni	49,09%	50		52		54		56,00		60		60	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial
	P10.1. Program Pelayanan Perumahan bagi korban bencana dan relokasi	Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi untuk korban bencana		39	13.754.800.000	50,73	17.754.800.000	61,52	21.530.280.000	70,8	24.778.308.000	86,45	30.256.138.800	33	108.074.326.800	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Jumlah masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang difasilitasi		100		100		100		100		100		100		

		rumah layak huni														
	P10.2. Program Penataan Pemukiman	Jumlah pemukiman kumuh yang ditata		4	7.775.473.653	4	13.553.021.018	4	14.608.323.120	4	16.069.155.432	4	16.069.132.500	4	68.075.105.724	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
S12. meningkatnya jangkauan dan fungsi infrastruktur komunikasi		% distrik yang berfungsi sebagai basis data elektronik (smart district)	50	50		100		100		100		100		100	0	Kominfo, setda, BKPSDM, Dispora, Perpustakaan, BPBD, Kesbangpol, 19 Distrik
	P12.1 Program Komunikasi dan Informasi	Jumlah Distrik yg terakses internet dan berfungsi sebagai pusat data	18	18	2.000.000.000	19	3.200.000.000	19	3.520.000.000	19	2.589.400.000	19	2.848.340.000	19	14.157.740.000	
M.5 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik															0	
T5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	0	Perangkat Daerah Inspektorat dan semua PD
S13. Meningkatnya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan		Nilai LAKIP/SAK IP	CC	B		B		B		A		A		A	0	Perangkat Daerah Setda, Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Semua PD
		Indeks kepuasan masyarakat	68	68		75		75		80		85		85,00	0	Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, P3KA, Capil, BPPTSP, Wajib Dasar, Satpol PP, PMK, BPKAD, Bapenda, Bappeda
	P13.1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	100	100	2.254.882.630	100	1.780.370.893	100	2.958.407.982		2.958.407.982		4.315.046.195		14.267.115.683	Bappeda
	P13.2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Program dan kegiatan yang tidak terlaksana	10	9	8.594.366.658	8	9.453.803.324	7	10.399.183.656	6	11.127.126.512	5	12.239.839.163	5	51.814.319.313	BPKAD
	P13.3 Program	% OPD	100		3.262.215.	100	4.088.43	100	4.497.280	100	4.947.008.	100	5.441.70	100	22.236.648.	Inspektorat

	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	dengan pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja yang memenuhi standar			000		6.500		.150		165		8.982		797	
S14. Meningkatnya kualitas ketertiban, ketenteraman dan keindahan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) (%)	80	80		80		80		80		80		80	0	Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan politik, Satpol PP, BP2STP, Capil, BPBD, Pengendalian Penduduk dan KB
	P14.1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) (%)	80	80	841.787.500	80	925.966.250	80	1.018.562.875	80	1.089.862.276	80	1.198.848.504	80	5.075.027.405	Satpol PP
S15. Berkembangnya sensitivitas gender dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan		Rasio KDRT	0,06	0,06		0,04		0,04		0,03		0,03		0,03	0	Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Satuan Polisi dan Pamong Praja.
		Jumlah kampung dan kampung adat ramah anak	Kampung	18		20		22		24		26		26	0	Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kesehatan, Pendidikan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Sekretariat Daerah, 19 Distrik
			Kampung adat	4		4		4		4		4			0	
	P15.1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak/perempuan;	Jumlah kampung dan kampung adat ramah anak	18	18	1.080.000.000	20	1.188.000.000	22	1.306.800.000	24	1.398.276.000	26	1.538.103.600	26	6.511.179.600	Dinas PPPA
	P15.2 Program Peningkatan Peran	Persentase Perempuan	5,47	6	2.125.000.000	7	2.337.500.000	8	2.571.250.000	8	2.751.237.500	8	3.026.361.250	8	12.811.348.750	Dinas PPPA

	serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;	dalam jabatan publik														
S.16 Meningkatnya peran distrik dalam pelayanan kepada masyarakat		% Distrik yang efektif berperan dalam penyediaan data dan informasi, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan SDM		6		10		15		17		19		19		
		% distrik yang berperan dalam penyediaan data dan informasi		4		3		2		1		0		0		
		% distrik yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat		4		3		1		0		0		0		
		% distrik yang berperan dalam pelatihan		5		3		1		1		0		0		
	P16.1 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Distrik	Jumlah distrik yang berkinerja sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelatihan dan pusat data	-	6	18.996.528.100	10	21.943.672.230	15	21.943.672.230	17	23.040.855.842	19	24.192.898.634	19	110.117.627.036	19 Distrik
		Jumlah distrik yang berkinerja sebagai pusat data		4		3		2		1		0		0		
		Jumlah distrik yang berkinerja sebagai pusat pemberdayaan		4		3		1		0		0		0		
		Jumlah		5		3		1		1		0		0		

		distrik yang berkinerja sebagai pusat pelatihan														
M6. Melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam															0	
T6. Memelihara daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	3.383,00	50		50		50		50		50		3.633,00	0	Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan perumahan dan kawasan pemukiman, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan
S17. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup		Hasil pengukuran indeks kualitas air	1	5		5		5		5		5		5	0	Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Hasil pengukuran indeks kualitas udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan.
	P17.1 Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran	Jumlah titik pemantauan kualitas air, udara dan tanah	24	24	437.008.000	25	480.708.800	25	528.779.680	25	565.794.258	25	622.373.683	25	2.634.664.421	Dinas Linkungan Hidup
S18. Terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan		Volume sampah yang dikumpulkan dan diolah (3R)	42 Ton	42	1.611.215.500	42	8.772.337.050	42	4.331.976.755	42	4.717.577.308	42	7.452.736.641	42	26.885.843.253	Dinas Linkungan Hidup

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Jayapura berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan rencana program prioritas, maka dibutuhkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya

7.1. Kerangka pendanaan

Kerangka pendanaan tahunan untuk masing-masing program adalah bersifat indikatif, artinya hanya memberikan panduan umum mengenai kebijakan pengalokasian anggaran sehingga tetap dapat disesuaikan dengan dinamika kondisi keuangan daerah. Hal lain yang juga dapat disesuaikan pada saat pelaksanaannya nanti adalah Perangkat Daerah (PD) penanggungjawab untuk masing-masing program.

Kapasitas Riil Kabupaten Jayapura selama periode 2017-2022 untuk mendanai kegiatan Pembangunan dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2018-2022

No Kode	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN					
2.1	Belanja Tidak Langsung	723.283.957.003	748.698.826.863	823.068.709.550	904.875.580.504	1.014.863.138.555
2.1.1	Belanja Pegawai	457.685.091.803	486.469.368.443	535.116.305.288	588.627.935.816	647.490.729.398
2.1.2	Belanja Bunga		-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	5.951.880.000	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	33.285.175.000	29.969.500.000	32.966.450.000	36.263.095.000	59.889.404.500
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.756.620.000	3.520.000.000	3.872.000.000	4.259.200.000	4.685.120.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	5.304.151.000	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	206.301.039.200	223.739.958.420	246.113.954.262	270.725.349.688	297.797.884.657
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	570.257.493.429,00	676.368.181.105	748.514.470.458,16	829.359.641.624,74	889.425.157.493,37
2.2.1	Belanja Pegawai	71.942.151.587	79.136.366.746	87.050.003.420	95.755.003.762	105.330.504.139
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	325.146.524.474	387.661.176.921	426.427.294.614	469.070.024.075	500.977.026.482
2.2.3	Belanja Modal	173.168.817.368	209.570.637.438	235.037.172.435	264.534.613.788	283.117.626.873

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (dikelola tahun 2017)

7.2. Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi dan Misi

Seluruh rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh masing-masing PD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan setiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagaimana diuraikan di atas bahwa program-program prioritas terdiri dari program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah dan program untuk pemenuhan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas per urusan wajib mengikat
Kabupaten Jayapura 2018-2022

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab
			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	105.949.379.029	100	113.709.097.982	100	124.245.985.145	100	130.474.830.331	100	142.669.575.680	Semua PD
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	38.088.122.823	100	52.259.003.465	100	49.233.604.052	100	55.221.425.394	100	56.806.407.336	Semua PD
1.01 . 1.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan dispilin	100	100	3.469.839.000	100	4.470.380.950	100	4.730.223.170	100	4.964.134.333	100	5.383.133.318	Semua PD
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya	100	100	10.802.684.059	100	12.142.793.262	100	13.182.115.139	100	13.828.370.896	100	15.020.951.647	Semua PD
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	2.217.329.000	100	2.321.625.450	100	2.536.974.892	100	2.663.823.636	100	2.911.669.547	Semua PD

Tabel 7.3
Indikasi Rencana Program Prioritas per urusan yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Jayapura 2018-2022

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				277.611.219.300		320.153.931.432	0	365.103.662.713	0	431.148.744.710	0	438.412.435.090	
1.01 . 1.01.01	Urusan Pendidikan				37.558.691.000		41.685.208.980		44.879.467.481		54.986.404.685		53.910.920.860	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	1.971.379.400	100	2.069.948.370	100	2.276.943.207	100	2.390.790.367	100	2.629.869.404	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	1.177.000.000	100	1.235.850.000	100	1.359.435.000	100	1.427.406.750	100	1.570.147.425	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan dispilin	100	100	142.000.000	100	149.100.000	100	164.010.000	100	172.210.500	100	189.431.550	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya	100	100	532.162.000	100	558.770.100	100	614.647.110	100	645.379.466	100	709.917.412	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	177.102.000	100	185.957.100	100	204.552.810	100	214.780.451	100	236.258.496	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APM PAUD	46,14	46,78	2.997.000.000	47	3.296.700.000	47,78	3.626.370.000	48	3.880.215.900	48	4.268.237.490	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkat APM SD dan SMP	81,475	82,5	18.557.379.000	85,1	19.485.247.950	86,5	20.459.510.348	86,88	26.482.485.865	87	22.556.610.158	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	Meneurunya Angka Melek Huruf	98,16	98,55	455.400.000	98,6	500.940.000	98,65	551.034.000	98,7	589.606.380	99	648.567.018	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang tamat S1 pelatihan dan ujian sertifikasi	79,99	80	2.489.968.600	82,25	4.238.965.460	85	4.662.862.006	90	5.129.148.207	95	5.642.063.027	Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah insentif Guru kontrak dan guru daerah terpencil yang terbayar	250	100	9.029.300.000	100	9.932.230.000	100	10.925.453.000	100	14.017.998.300	100	15.419.798.130	Dinas Pendidikan
1.01 . 4.05.01 . 22	Program Penjaring Putra Putri Asli Kabupaten Jayapura	Jumlah mahasiswa P5 yang dibiayai mahasiswa + ASN	91 Orang	105	6.000.000.000	122	6.000.000.000	112	6.600.000.000	137	6.000.000.000	##	6.000.000.000	Dinas Pendidikan
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan				62.837.605.000		65.257.987.715		69.936.654.012		69.848.322.532		74.084.728.778	
1.02 . 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi	% adminisrasi perkantoran vane	100	100	1.550.877.400	100	1.654.671.270	100	1.820.138.397	100	1.911.145.317	100	2.102.259.849	Dinas Kesehatan

. 01	Perkantoran	terpenuhi												
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	186.500.000	100	195.825.000	100	215.407.500	100	226.177.875	100	248.795.663	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin			25.000.000	160 Set	144.000.000	80 Set	40.000.000		42.000.000		44.100.000	Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	100	100	718.044.300	100	753.946.515	100	829.341.167	100	870.808.225	100	957.889.047	Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	22.600.000	100	23.730.000	100	26.103.000	100	27.408.150	100	30.148.965	Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	% ASN yang dilayani dalam hal purna tugas	100	100	15.000.000	100	15.750.000	100	17.325.000	100	18.191.250	100	20.010.375	Dinas Kesehatan
	Program pengawasan obat dan makanan	Presentase Sarana Distribusi pangan dan bahan kimia yang diperiksa dan memenuhi syarat	70	72		225	100.000.000	227	120.000.000	250	150.000.000	240	120.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Jumlah Puskesmas yang mengembangkan Taman Obat Keluarga	0			26	80.000.000	30	90.000.000	36	100.000.000	90	140.000.000	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan pelayanan Kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan anak balita	71.77	76		149	220.000.000	117	220.000.000	165	355.000.000	120	175.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Jumlah Poslan sia yang aktif				70	240.000.000	43	170.000.000	65	250.000.000	76	300.000.000	Dinas Kesehatan
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan masyarakat	Jumlah usaha makanan produksi rumah tangga yang memenuhi syarat				200	100.000.000			100	80.000.000			Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang terpenuhi	86 Sarkes	86	5.221.084.000	86	5.743.192.400	86	6.317.511.640	86	6.759.737.455	86	7.435.711.200	Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	% pelayanan puskesmas yang melaksanakan pelayanan secara maksimal	19 PKM	19	36.942.649.500	19	36.942.649.500	19	38.789.781.975	19	36.942.649.500	19	38.789.781.975	Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kali	3	208.235.000	3	218.646.750	3	240.511.425	3	252.536.996	3	277.790.696	Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	% balita yang mendapat asupan Gizi	80%	80	574.750.000	80	632.225.000	80	695.447.500	80	744.128.825	80	818.541.708	Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan pengembangan Lingkungan Kesehatan	19 Distrik	19	40.625.000	19	44.687.500	19	49.156.250	19	52.597.188	19	57.856.906	Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	% Penanggulangan Penyakit Menular	95%	95	1.864.357.500	95	2.050.793.250	95	2.255.872.575	95	2.413.783.655	95	2.655.162.021	Dinas Kesehatan
1.02 .	Program Standarisasi	% Pelayanan	80%	80	140.000.000	80	147.000.000	80	161.700.000	80	169.785.000	80	186.763.500	Dinas

1.02.01 .23	Pelayanan Kesehatan	Kesehatan												Kesehatan
1.02 1.02.01 .24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	% masyarakat miskin yang terlayani	98%	90	241.921.000	90	266.113.100	90	292.724.410	90	313.215.119	90	344.536.631	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.01 .25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah unit sarana prasarana kesehatan yang di bangun	86 Unut	3	14.188.013.100	3	15.606.814.410	3	17.167.495.851	4	18.025.870.644	2	18.927.164.176	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.01 .28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah dokter yang mendapat insentif	58 Oraag	58	243.000.000	58	267.300.000	58	294.030.000	58	314.612.100	58	346.073.310	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.01 .32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	% ibu melahirkan selamat dan anak lahir hidup	90%	90	138.948.200	90	152.843.020	90	168.127.322	90	179.896.235	90	197.885.858	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.01 .33	Program Registrasi dan Akreditasi Bidang Kesehatan	Jumlah puskesmas yang ter registrasi dan terakreditasi	2 Faskes	2	50.000.000	2	52.500.000	2	57.750.000	2	60.637.500	2	66.701.250	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.01 .34	Program Peningkatan Manajemen Kesehatan	% Manajemen Pelayanan Kesehatan	100%	100	466.000.000	100	489.300.000	100	538.230.000	100	565.141.500	100	621.655.650	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Yowari				54.250.770.000		57.340.217.661		62.207.441.996		65.500.238.129		71.094.617.775	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.02 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	10.612.565.541	100	11.143.193.818	100	12.257.513.200	100	12.870.388.860	100	14.157.427.746	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.02 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	1.671.682.397	100	1.755.266.517	100	1.930.793.169	100	2.027.332.827	100	2.230.066.110	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.02 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100	100	441.000.000	100	463.050.000	100	509.355.000	100	534.822.750	100	588.305.025	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.02 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya	100	100	300.000.000	100	315.000.000	100	346.500.000	100	363.825.000	100	400.207.500	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.02 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	50.000.000	100	52.500.000	100	57.750.000	100	60.637.500	100	66.701.250	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.02 .16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pelayanan Masyarakat Miskin	98%	98	4.167.480.590	98	4.584.228.649	98	5.042.651.514	98	5.395.637.120	98	5.935.200.832	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.02 .26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Jumlah gedung yang di bangun	8 Gedung	2	16.510.427.252	2	17.335.948.615	2	18.202.746.045	2	19.112.883.348	2	20.068.527.515	Dinas Kesehatan
1.02 1.02.02 .27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Jumlah gedung yang dipelihara/ Rehab	8 Gedung	8	3.370.702.620	1	3.707.772.882	8	4.078.550.170	8	4.364.048.682	8	4.800.453.550	Dinas Kesehatan
1.02	Program kemitraan	% mitra yankes yang	100%	100	17.126.911.600	100	17.983.257.180	100	19.781.582.898	100	20.770.662.043	100	22.847.728.247	Dinas

1.02.02 .28	peningkatan pelayanan kesehatan	bekerjasama												Kesehatan
1.03 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				67.129.720.300		77.630.085.810		102.315.624.832		124.576.633.405		134.194.831.271	
1.03 1.03.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	3.536.839.400	100	3.713.681.370	100	3.712.631.370	100	3.711.528.870	100	3.710.371.245	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	890.518.100	100	935.044.005	100	1.028.548.406	100	1.079.975.826	100	1.187.973.408	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100	100	87.700.000	100	92.085.000	100	101.293.500	100	106.358.175	100	116.993.993	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	100	100	22.000.000	100	23.100.000	100	25.410.000	100	26.680.500	100	29.348.550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu			20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01 .07	Program Peningkatan Kesejahteraan PNS/Purna Tugas	% ASN yang dilayani dalam hal purna tugas	100	100	2.100.000		2.205.000	100	2.425.500	100	2.546.775	100	2.801.453	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01 .15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Panjang Jalan dan jembatan yang terbangun	618,68	619,7	29.365.159.000	620,7	30.916.758.645	621,68	48.092.000.000	622,68	65.916.758.645	624	70.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01 .18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah panjang jalan dan jembatan yang dipelihara	210,17	225,2	1.980.354.000	240,2	3.220.701.000	255,17	6.381.736.050	270,17	7.019.909.655	285	7.019.909.655	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01 .23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumah sarana dan prasarana kebinaragaman yang tersedia	2	3 unit	102.436.000	1	107.557.800	1	118.313.580	1	124.229.259	6	136.652.185	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01 .24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara	3.843	3.843	9.493.105.000	3.843	9.967.760.250	3.843	10.964.536.275	3.843	11.512.763.089	###	12.664.039.398	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01 .27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	% pemenuhan air minum dan pengolahan air limbah	654	654	4.000.000.000	654	9.200.000.000	654	10.120.000.000	654	11.132.000.000	654	12.245.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01 .30	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Cakupan pemenuhan air bersih di pedesaan	64.131	1.346	13.587.687.800	###	14.267.072.190	5346	15.693.779.409	7346	17.263.157.350	##	18.989.473.085	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01 .31	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen Tata Ruang yang tersedia	3 Dokumen	1	864.170.000	1	950.587.000	1	1.045.645.700	1	1.118.840.899	1	1.230.724.989	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01 .34	Program Lingkungan Sehat Perumahan	% perumahan lingkungan sehat	1368	1515	2.377.651.000	1662	2.496.533.550	1809	2.746.186.905	1956	2.883.496.250	##	3.171.845.875	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01 .35	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Cakupan pengembangan wilayah perbatasan	1	1	800.000.000	1	800.000.000	1	880.000.000	1	968.000.000	1	1.035.760.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 1.03.01	Program pengendalian banjir	% Pengendalian banjir				90	916.000.000	90	1.007.600.000	90	1.108.360.000	90	1.219.196.000	Dinas Pekerjaan Umum dan

.36														Penataan Ruang
1.03 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				156.250.000		171.875.000		189.062.500		207.968.750		228.765.625	
1.03 . 4.07.01 . 31	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Pentaan Ruang	1 Dokumen	1	156.250.000	1	171.875.000	1	189.062.500	1	207.968.750	1	228.765.625	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.04 . 1.04.01	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman				36.418.703.000		56.716.752.892		63.188.428.181		91.102.199.887		78.437.962.125	
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	1.514.787.764	100	1.590.527.152	100	1.749.579.867	100	1.837.058.861	100	2.020.764.747	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	3.303.616.000	100	7.621.561.300	100	3.983.717.430	100	8.244.136.320	100	4.668.549.951	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100	100	41.300.000	100	43.365.000	100	47.701.500	100	50.086.575	100	55.095.233	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya			25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	60.000.000	100	63.000.000	100	69.300.000	100	72.765.000	100	80.041.500	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	% ketersediaan rumah layak huni yang terbangun	65%	65	11.500.000.000	70	15.500.000.000	72	22.050.000.000	74	24.255.000.000	76	24.255.000.000	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 21	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	% pengembangan ketenagalistrikan	450	70	1.461.994.400	70	1.535.094.120	70	1.688.603.532	70	1.773.033.709	70	1.950.337.079	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 22	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	% rehabilitas jalan dan jembatan pedesaan	64.131	1.346	4.717.973.653	###	7.189.771.018	5346	7.908.748.120	7346	10.000.000.000	##	8.699.600.000	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 23	Program Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	Jumlah panjang pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	3.2 Km	3,2	3.057.500.000	3,2	11.363.250.000	3,2	12.699.575.000	3,2	15.969.532.500	3	7.369.532.500	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 .	Program penyelesaian	Jumlah penyelesaian	3 Kasus	3	2.331.731.183	3	2.564.904.301	3	2.821.394.731	3	3.018.892.363	3	3.320.781.599	Dinas

1.04.01 . 25	konflik-konflik pertanahan	konflik-konflik pertanahan												Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 26	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Jumlah sistem pendaftaran tanah	1 sistem	1	7.350.000.000	1	8.085.000.000	1	8.893.500.000	1	24.516.045.000	1	24.516.045.000	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 27	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh	1	1	300.000.000	1	330.000.000	1	363.000.000	1	388.410.000	1	427.251.000	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 . 1.04.01 . 29	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	% luas tanah yang bersertifikat	2	3	754.800.000	3	830.280.000	3	913.308.000	3	977.239.560	3	1.074.963.516	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 . 1.06.01	Dinas Sosial				2.254.800.000	8	2.254.800.000	8	2.480.280.000	8	2.728.308.000	8	3.001.138.800	
1.04 . 1.06.01 . 30	Program pengembangan perumahan rakyat dan penyediaan air bersih	Jumlah sarana perumahan rakyat dan air bersih	100 Unit	8	2.254.800.000	8	2.254.800.000	8	2.480.280.000	8	2.728.308.000	8	3.001.138.800	Dinas Sosial
1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja				5.569.540.000		6.890.106.375		6.479.117.013		6.823.444.121		7.505.788.533	
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	2.713.732.500	100	2.870.419.125	100	3.157.461.038	100	3.315.334.089	100	3.646.867.498	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	959.280.000	100	2.007.244.000	100	1.107.968.400	100	1.163.366.820	100	1.279.703.502	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	290.049.000	100	304.551.450	100	335.006.595	100	351.756.925	100	386.932.617	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya	100%	100	152.781.000	100	160.420.050	100	176.462.055	100	185.285.158	100	203.813.674	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu			20.000.000		15.930.000		16.726.500		17.562.825		18.440.966	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	% keamanan lingkungan yang kondusif	100%	100	841.787.500	100	925.966.250	100	1.018.562.875	100	1.089.862.276	100	1.198.848.504	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	% pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%	100	233.735.000	100	245.421.750	100	269.963.925	100	283.462.121	100	311.808.333	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.01 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	% pemberdayaan ketertiban dan keamanan	70%	100	170.405.000	100	178.925.250	100	196.817.775	100	206.658.664	100	227.324.530	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Cakupan penyakit masyarakat	90%	90	187.770.000	90	197.158.500	90	216.874.350	90	227.718.068	90	250.489.874	Satuan Polisi Pamong Praja

1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial				5.435.140.000		6.206.897.000		6.827.586.700		9.375.225.202		9.953.681.324	
1.06 . 1.06.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	1.801.315.000	100	1.891.380.750	100	2.080.518.825	100	2.184.544.766	100	2.402.999.243	Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	347.300.000	100	364.665.000	100	401.131.500	100	421.188.075	100	463.306.883	Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100	100	62.500.000	100	65.625.000	100	72.187.500	100	75.796.875	100	83.376.563	Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya	100	100	18.000.000	100	18.900.000	100	20.790.000	100	21.829.500	100	24.012.450	Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	29.339.700	100	30.806.685	100	33.887.354	100	35.581.721	100	39.139.893	Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 .15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	% kesejahteraan bagi masyarakat KAT dan PMKS	50%	55	1.192.379.440	57	1.251.998.412	60	1.377.198.253	60	3.590.663.982	65	3.590.663.982	Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 .16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	% pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	50%	55	822.105.860	57	863.211.153	60	949.532.268	60	997.008.882	65	1.096.709.770	Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 .17	Program pembinaan anak terlantar	% pembinaan anak terlantar	70%	75	217.800.000	75	228.690.000	75	251.559.000	80	264.136.950	80	290.550.645	Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 .18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	% pembinaan para penyandang cacat dan trauma	60%	65	353.000.000	65	370.650.000	70	407.715.000	70	428.100.750		470.910.825	Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 .21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	% pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial	70%	70	591.400.000	70	1.120.970.000	70	1.233.067.000	70	1.356.373.700	70	1.492.011.070	Dinas Sosial

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Kode	URAIAN URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab	
			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp		Rp
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				103.694.360.440		128.841.971.429		152.258.574.572		172.509.916.963		170.496.010.209	
2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				5.672.965.000		6.662.905.725		7.329.196.298		8.875.636.670		9.763.200.337	
2.01 . 2.01.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	998.764.400	100	1.074.952.620	100	1.182.447.882	100	1.241.570.276	100	1.365.727.304	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01 . 2.01.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	469.000.000	100	492.450.000	100	541.695.000	100	568.779.750	100	625.657.725	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01 . 2.01.01 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan dispilin	100	100	44.800.000	100	47.040.000	100	51.744.000	100	54.331.200	100	59.764.320	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya			25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01 . 2.01.01 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	9.551.100	100	10.028.655	100	11.031.521	100	11.583.097	100	12.741.406	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01 . 2.01.01 .15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang kualitas dan produktivitas	60 Orang	50	1.450.000.000	50	2.095.000.000	50	2.304.500.000	50	3.534.950.000	50	3.888.445.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01 . 2.01.01 .16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Cangkupan informasi pekerjaan	3 Informasi	3	479.500.000	3	527.450.000	3	580.195.000	3	620.808.650	3	682.889.515	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01 . 2.01.01 .17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	% Penyelesaian Kasus Tenaga Kerja	98%	98	308.529.500	98	339.382.450	98	373.320.695	98	399.453.144	98	439.398.458	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01 . 2.01.01 .18	Program transmigrasi lokal	Jumlah dokumen Kajian transmigrasi lokal	1 Dokumen	1	1.887.820.000	1	2.076.602.000	1	2.284.262.200	1	2.444.160.554	1	2.688.576.609	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.02 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4.439.716.000		5.827.951.800		6.310.746.980		8.656.749.329		6.222.424.262	
2.02 . 2.02.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	644.816.000	100	698.056.800	100	767.862.480	100	806.255.604	100	886.881.164	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	328.000.000	100	344.400.000	100	378.840.000	100	397.782.000	100	437.560.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan dispilin	100	100	51.900.000	100	54.495.000	100	59.944.500	100	62.941.725	100	69.235.898	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya			20.000.000		240.000.000		252.000.000		264.600.000		277.830.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	70.000.000	100	73.500.000	100	80.850.000	100	84.892.500	100	93.381.750	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 .15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah anak dan perempuan yang berkualitas	140 Orang	140	670.000.000	145	737.000.000	145	810.700.000	145	867.449.000	130	954.193.900	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 .16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah orang berkualitas di dalam kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	70 Orang	70	410.000.000	80	1.451.000.000	80	1.496.100.000	80	3.530.827.000	80	583.909.700	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 .17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah perempuan yang mempunyai kualitas hidup yang baik	30 Orng	30	60.000.000	35	66.000.000	30	72.600.000	30	77.682.000	30	85.450.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 .18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah orang yang berperan serta kesetaraan gender	816 Orang	816	2.125.000.000	816	2.337.500.000	816	2.571.250.000	816	2.751.237.500	816	3.026.361.250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 . 2.02.01 .19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah orang yang mengembangkan kesetaraan gender dan Anak	501 Orang	500	60.000.000	500	66.000.000	500	72.600.000	500	77.682.000	##	85.450.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.03 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan				3.954.505.000		5.776.856.350		4.704.541.985		6.000.088.117		6.600.096.928	
2.03 . 2.03.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	1.130.023.000	100	1.291.524.150	100	1.420.676.565	100	1.491.710.393	100	1.640.881.433	Dinas Ketahanan Pangan
2.03 . 2.03.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	187.200.000	100	196.560.000	100	216.216.000	100	227.026.800	100	249.729.480	Dinas Ketahanan Pangan
2.03 . 2.03.01 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	19.200.000	100	20.160.000	100	22.176.000	100	23.284.800	100	25.613.280	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya			100.000.000		120.000.000		126.000.000		132.300.000		138.915.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.03 . 2.03.01 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	25.560.000	100	26.838.000	100	29.521.800	100	30.997.890	100	34.097.679	Dinas Ketahanan Pangan
2.03 . 2.03.01 .18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Luas lahan pertanian/perkebunan sebagai produksi	1340 Ha	1380	2.492.522.000	1420	4.241.774.200	1460	3.015.951.620	1500	4.227.068.233	##	4.649.775.057	Dinas Ketahanan Pangan
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				12.083.056.000		22.232.237.725		30.937.867.498		33.448.993.479		25.426.994.376	
2.05 . 2.05.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	9.166.950.000	100	10.307.797.500	100	11.338.577.250	100	12.108.786.113	100	13.319.664.724	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang	11	1	365.427.500	4	7.493.198.875	1	4.924.924.763	1	5.266.079.121	1	5.792.687.033	Dinas Lingkungan Hidup

. 02	Aparatur	terpenuhi												
	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin			90.000.000		101.050.000		106.102.500		111.407.625		116.978.006	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			250.000.000		300.000.000		315.000.000		330.750.000		347.287.500	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	10.100.000	100	10.605.000	100	11.665.500	100	12.248.775	100	13.473.653	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang tertangani	42 Ton	42	1.311.215.500	42	1.442.337.050	50	1.586.570.755	50	1.697.630.708	50	1.867.393.779	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pengendalian dan pencemaran yang tertangani	24	2	274.758.000	2	802.233.800	2	332.457.180	2	355.729.183	2	391.302.101	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cangkupan perlindungan konservasi sumber daya alam	100%	100	100.000.000	100	610.000.000	100	121.000.000	100	129.470.000	100	142.417.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 20	Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah titik pengendalian polusi yang tertangani	24	24	162.250.000	25	178.475.000	25	196.322.500	25	210.065.075	25	231.071.583	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Cangkupan RTH	100%	100%	352.355.000	100%	1.387.590.500	100%	12.426.349.550	100%	13.668.984.505	##	3.668.984.505	Dinas Lingkungan Hidup
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				4.040.534.240		4.380.991.244		4.819.090.368		5.127.045.148		5.639.749.663	
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	1.060.159.400	100	1.139.417.370	100	1.253.359.107	100	1.316.027.062	100	1.447.629.769	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	157.000.000	100	164.850.000	100	181.335.000	100	190.401.750	100	209.441.925	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100	100	24.500.000	100	25.725.000	100	28.297.500	100	29.712.375	100	32.683.613	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	5.269.000	100	5.532.450	100	6.085.695	100	6.389.980	100	7.028.978	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	% penduduk yang memiliki data kependudukan	60%	65	2.768.605.840	75	3.545.466.424	85	3.350.013.066	95	4.584.513.981	97	3.942.965.379	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung				7.312.076.000		7.947.214.750		8.741.936.225		9.276.387.552		12.906.026.307	
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	1.501.977.000	100	1.608.575.850	100	1.769.433.435	100	1.857.905.107	100	2.043.695.617	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2.07 . 2.07.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang	100%	100	329.400.000	100	345.870.000	100	380.457.000	100	399.479.850	100	439.427.835	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung

2.07 . 2.07.01 . 03	Aparatur	terpenuhi												
2.07 . 2.07.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	57.000.000	100	59.850.000	100	65.835.000	100	69.126.750	100	76.039.425	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.188	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2.07 . 2.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	3.000.000	100	3.150.000	100	3.465.000	100	3.638.250	100	4.002.075	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kampung yang diberdayakan	144	0	1.025.000.000		1.127.500.000	4	1.240.250.000	4	1.284.275.000	4	4.114.702.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2.07 . 2.07.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah kampung yang mengikuti lembaga ekonomi pedesaan	144	144	267.000.000	144	293.700.000	144	323.070.000	144	355.377.000	144	390.914.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah kampung yang mendukung pembangunan desa	144 Kamp/kel	144	1.251.752.000	144	1.376.927.200	144	1.514.619.920	144	1.620.643.314	144	1.782.707.646	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2.07 . 2.07.01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Jumlah kampung yang meningkatkan kapasitas aparatur	144 Kamp/kel	144	450.000.000	144	495.000.000	144	544.500.000	144	582.615.000	144	640.876.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2.07 . 2.07.01 . 20	Program Pengembangan data dan informasi Pedesaan	Jumlah dokumen informasi pedesaan	1 Dokumen	1	218.360.000	1	240.196.000	1	264.215.600	1	282.710.692	1	310.981.761	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2.07 . 2.07.01 . 21	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan kampung/desa	Jumlah dokumen keuangan kampung	3 Dokumen	3	2.178.587.000	3	2.396.445.700	3	2.636.090.270	3	2.820.616.589	3	3.102.678.248	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
	Program Pemberdayaan Masyarakat Adat	Jumlah masyarakat hukum adat yang efektif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kampung/ kampung adat dan daerah	9	9	9	9	1.000.000.000	9	1.000.000.000	9	3.000.000.000	9	1.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
	Program Pengembangan Masyarakat Adat	Jumlah kampung adat yang efektif menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada warga kampung adatnya	9	9	9	9	1.000.000.000	9	1.000.000.000	9	3.000.000.000	9	1.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2.08 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				7.454.570.000		8.141.566.800		8.955.723.480		9.555.615.511		10.511.177.062	
2.08 . 2.08.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	993.516.500	100	1.043.192.325	100	1.147.511.558	100	1.204.887.135	100	1.325.375.849	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	76.450.000	100	80.272.500	100	88.299.750	100	92.714.738	100	101.986.211	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan	100%	100	37.500.000	100	39.375.000	100	43.312.500	100	45.478.125	100	50.025.938	Dinas Pengendalian Penduduk dan

. 03		disipilin												Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			120.000.000		207.000.000		217.350.000		228.217.500		239.628.375	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	61.737.500	100	64.824.375	100	71.306.813	100	74.872.153	100	82.359.368	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 15	Program Keluarga Berencana	Jumlah orang Pemakai Apsetor KB	19944 Orang	50	200.000.000	50	220.000.000	50	242.000.000	50	258.940.000	50	284.834.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	cangkupan kesehatan reproduksi remaja	14000	14000	50.000.000	###	55.000.000	14200	60.500.000	14300	64.735.000	##	71.208.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Jumlah masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	60	80	94.600.000	100	104.060.000	100	114.466.000	100	122.478.620	100	134.726.482	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah tenaga pendamping yang berkualitas yang tersedia	50 Orang	50	50.000.000	50	55.000.000	50	60.500.000	50	64.735.000	50	71.208.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 25	Program meningkatnya dukungan sarana pelayanan KB	Jumlah sarana dukungan pelayanan KB	30 Unit	3	543.576.000	3	597.933.600	3	657.726.960	3	703.767.847	3	774.144.632	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 26	Program Meningkatnya Dukungan Sarana Penyuluhan KB	jumlah dukungan sarana penyuluhan KB	1	0	700.000.000	2	770.000.000	2	847.000.000	2	906.290.000	2	996.919.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 27	Program Meningkatnya Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan	% dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan	100%	100	4.647.190.000	100	5.111.909.000	100	5.623.099.900	100	6.016.716.893	100	6.618.388.582	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan				26.105.419.800		28.496.652.030		33.346.317.233		33.439.238.335		36.783.162.168	
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	2.613.025.000	100	2.743.676.250	100	3.018.043.875	100	3.168.946.069	100	3.485.840.676	Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	1.471.100.000	100	1.544.655.000	100	1.699.120.500	100	1.784.076.525	100	1.962.484.178	Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	144.720.000	100	151.956.000	100	167.151.600	100	175.509.180	100	193.060.098	Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100	104.000.000	100	109.200.000	100	120.120.000	100	126.126.000	100	138.738.600	Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	53.350.000	100	56.017.500	100	61.619.250	100	64.700.213	100	71.170.234	Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Prasarana dan Fasilitas perhubungan	11 Unit	8	1.840.000.000	8	2.024.000.000	8	2.226.400.000	8	2.382.248.000	8	2.620.472.800	Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas	Jumlah Prasarana Fasilitas LLAJ yang dipelihara	11 Unit	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	129.470.000	1	142.417.000	Dinas Perhubungan

	LLAJ													
2.09 . 2.09.01 .17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah layanan angkutan yang baik	410	49	12.193.543.000	340	13.412.897.300	340	14.754.187.030	340	15.786.980.122	##	17.365.678.134	Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 .18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan	0	3	2.161.781.800	19	2.377.959.980	19	2.615.755.978	19	2.798.858.896	18	3.078.744.786	Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 .19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	% pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang baik	0	76	290.000.000	6.17%	319.000.000	6174%	350.900.000	6174%	375.463.000	##	413.009.300	Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 .20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang layak beroperasi	0	6	77.900.000	9	85.690.000	9	94.259.000	9	100.857.130	9	110.942.843	Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 .21	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan Laut	1 Unit	1	5.056.000.000	1	5.561.600.000	1	8.117.760.000		6.546.003.200	1	7.200.603.520	Dinas Perhubungan
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				10.371.380.000		13.231.181.500		16.354.299.650		18.137.171.163		14.450.888.279	
2.10 . 2.10.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	2.329.880.000	100	2.866.374.000	100	3.153.011.400	100	3.310.661.970	100	3.641.728.167	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	746.700.000	100	784.035.000	100	862.438.500	100	905.560.425	100	996.116.468	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100	100	39.000.000	100	40.950.000	100	45.045.000	100	47.297.250	100	52.026.975	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			400.000.000		445.000.000		467.250.000		490.612.500		515.143.125	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	31.150.000	100	32.707.500	100	35.978.250	100	37.777.163	100	41.554.879	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 .15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	cakupan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	700 orang	1.116	2.066.500.000	1.768	2.273.150.000	2.020	2.500.465.000	2.025	2.675.497.550	##	2.943.047.305	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 .18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Jumlah SDM bidang komunikasi dan informasi	600 Orang	100	1.951.950.000	200	2.147.145.000	100	2.361.859.500	100	2.527.189.665	##	2.779.908.632	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 .20	Program pengembangan data/informatika/statistik daerah	Jumlah media masa yang tersedia	35 Media massa	35	99.400.000	35	109.340.000	35	120.274.000	35	128.693.180	35	141.562.498	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 .21	Program Komunikasi dan Informasi	Jumlah dokumen data/informatika/statistik daerah	1 Dokumen	1	2.000.000.000	1	4.200.000.000	1	6.420.000.000	1	7.589.400.000	1	2.848.340.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 .22	Program Pengembangan dan Implementasi E-Gov	Jumlah dokumen OAP	1Dokumen	1	706.800.000	1	777.480.000	1	855.228.000	1	915.093.960	1	1.006.603.356	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11 . 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah				5.146.205.400		7.599.690.670		10.359.659.737		18.244.664.424		18.269.130.866	
2.11 . 2.11.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	1.017.108.400	100	1.099.463.820	100	1.209.410.202	100	1.269.880.712	100	1.396.868.783	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.11 .	Program Peningkatan	% kebutuhan sarana	100%	100	89.587.000	100	94.066.350	100	103.472.985	100	108.646.634	100	119.511.298	Dinas Koperasi Usaha

2.11.01.02	Sarana dan Prasarana Aparatur	prasarana aparatur yang terpenuhi												Mikro, Kecil dan Menengah
2.11.03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	48.600.000	100	51.030.000	100	56.133.000	100	58.939.650	100	64.833.615	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			30.000.000		93.000.000		97.650.000		102.532.500		107.659.125	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.11.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	37.410.000	100	39.280.500	100	43.208.550	100	45.368.978	100	49.905.875	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	% pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100%	100	1.500.000.000	100	1.650.000.000	100	1.815.000.000	100	4.942.050.000	100	3.136.255.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah SDM Pengelola UKM	100 Orang	50	195.000.000	50	214.500.000	50	235.950.000	50	252.466.500	50	277.713.150	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	jumlah Kelembagaan Koperasi yang Kualitas	105 UKM	105	518.500.000	105	570.350.000	105	627.385.000	105	2.671.301.950	105	3.438.432.145	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.11.19	Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan	Jumlah binaan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan	105 UKM	25	1.710.000.000	20	3.881.000.000	20	6.269.100.000	20	8.896.010.000	20	9.785.611.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.11.3.02.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				1.400.200.000		1.540.220.000		1.694.242.000		1.863.666.200		2.050.032.820	
2.11.3.02.01.19	Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan	Jumlah binaan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan	50 KLPK	10	1.400.200.000	10	1.540.220.000	10	1.694.242.000	10	1.863.666.200	10	2.050.032.820	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.12.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				3.841.780.000		4.118.849.000		4.530.733.900		4.798.400.915		5.278.241.007	
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	1.493.880.000	100	1.594.824.000	100	1.754.306.400	100	1.842.021.720	100	2.026.223.892	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	546.800.000	100	574.140.000	100	631.554.000	100	663.131.700	100	729.444.870	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	44.000.000	100	46.200.000	100	50.820.000	100	53.361.000	100	58.697.100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	32.500.000	100	34.125.000	100	37.537.500	100	39.414.375	100	43.355.813	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	% Promosi dan Kerjasama Investasi	100%	100	522.070.000	100	574.277.000	100	631.704.700	100	675.924.029	100	743.516.432	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.	Program Peningkatan	% Pelayanan Perizinan	100%	100	1.000.930.000	100	1.101.023.000	100	1.211.125.300	100	1.295.904.071	100	1.425.494.478	Dinas Penanaman

2.12.01 .18	Pelayanan Perizinan Terpadu	Terpadu												Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12. 2.12.01 .19	Peningkatan Akses Informasi Pelayanan Perizinan	% Akses Informasi Pelayanan Perizinan yang lebih baik	100%	100	176.600.000	100	194.260.000	100	213.686.000	100	228.644.020	100	251.508.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13 . 2.13.01	Dinas Pemuda dan Olahraga				4.742.250.000		5.103.148.000		5.613.462.800		5.954.048.122		6.549.452.934	
2.13 . 2.13.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	1.318.300.000	100	1.415.715.000	100	1.557.286.500	100	1.635.150.825	100	1.798.665.908	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	670.000.000	100	703.500.000	100	773.850.000	100	812.542.500	100	893.796.750	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	90.000.000	100	94.500.000	100	103.950.000	100	109.147.500	100	120.062.250	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.188	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	73.240.000	100	76.902.000	100	84.592.200	100	88.821.810	100	97.703.991	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 .15	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	% Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	100%	100	85.000.000	100	89.250.000	100	98.175.000	100	103.083.750	100	113.392.125	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 .16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah peran serta kepemudaan dalam organisasi	23	23	300.000.000	25	330.000.000	25	363.000.000	30	388.410.000	35	427.251.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 .20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	jumlah masyarakat terbina dalam Pemasyarakatan Olah Raga	3	5	1.520.000.000	7	1.672.000.000	7	1.839.200.000	7	1.967.944.000	10	2.164.738.400	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 .21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga	341	343	655.710.000	346	721.281.000	349	793.409.100	352	4.848.947.737	##	5.333.842.511	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.16 . 3.02.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				5.245.000.000		5.769.500.000		6.346.450.000		6.790.701.500		7.469.771.650	
2.16 . 3.02.01 .16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	jumlah kekeayaan Budaya yang dikelola	8	42	2.750.000.000	42	3.025.000.000	42	3.327.500.000	42	3.560.425.000	42	3.916.467.500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16 . 3.02.01 .17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah sanggar budaya yang di kelola untuk mengikuti event	37 Sanggar	22	2.495.000.000	5	2.744.500.000	24	3.018.950.000	24	3.230.276.500	24	3.553.304.150	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.17 . 2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				344.353.700	5	378.789.070		416.667.977		445.834.735		490.418.209	
2.17 . 2.18.01 .19	Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	Jumlah orang yang membaca di Perpustakaan	650	24	344.353.700	24	378.789.070	24	416.667.977	24	445.834.735	24	490.418.209	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				1.540.349.300		1.634.216.765		1.797.638.442		1.895.675.764		2.085.243.340	
2.18 . 2.18.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	812.709.300	100	874.344.765	100	961.779.242	100	1.009.868.204	100	1.110.855.024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 .	Program Peningkatan	% kebutuhan sarana	100%	100	312.840.000	100	328.482.000	100	361.330.200	100	379.396.710	100	417.336.381	Dinas Perpustakaan

2.18.01.02	Sarana dan Prasarana Aparatur	prasarana aparatur yang terpenuhi												dan Kearsipan
2.18.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	42.800.000	100	44.940.000	100	49.434.000	100	51.905.700	100	57.096.270	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100	15.000.000	100	15.750.000	100	17.325.000	100	18.191.250	100	20.010.375	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu			20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18.01.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	% sistem administrasi kearsipan yang baik	100%	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	129.470.000	100	142.417.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	% dokumen/arsip daerah yang baik	100%	100	95.000.000	100	104.500.000	100	114.950.000	100	122.996.500	100	135.296.150	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18.01.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	% kualitas pelayanan informasi	100%	100	142.000.000	100	156.200.000	100	171.820.000	100	183.847.400	100	202.232.140	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3. Urusan Pilihan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab
			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	
3	Urusan Pilihan				38.216.813.850		53.854.890.083		77.180.933.785		79.635.436.686		68.706.271.510	
3.01 . 3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan				7.321.991.100		8.587.320.143		9.446.052.157		12.228.421.568		13.451.263.725	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	1.224.680.850	100	1.312.164.893	100	1.443.381.382	100	1.515.550.451	100	1.667.105.496	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	410.000.000	100	430.500.000	100	473.550.000	100	497.227.500	100	546.950.250	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	58 Stell	0	44.100.000	58	46.305.000	58	48.620.250	58	51.051.263	58	53.603.826	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya			25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	5.000.000	100	5.250.000	100	5.775.000	100	6.063.750	100	6.670.125	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	% pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	3,50%	4,4	339.400.000	4,5	373.340.000	4,9	410.674.000	5,25	439.421.180	5,25	483.363.298	Dinas Kelautan dan Perikanan

	pesisir													
3.01 . 3.01.01 .20	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah budidaya perikanan	579 Ton	682	3.836.360.250	888	4.836.360.250	1094	5.319.996.275	1300	5.851.995.903	1506	6.437.195.493	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 . 3.01.01 .21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah perikanan tangkap	13.255 Ton	13653	1.481.550.000	14050	1.629.705.000	14448	1.792.675.500	14486	3.918.162.785	15423	4.309.979.064	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.02 . 3.02.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				4.938.329.000	100	6.873.185.400		7.560.503.940		10.234.352.077		11.257.787.284	
3.02 . 3.02.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	878.686.800	100	1.027.621.140	100	1.130.383.254	100	1.186.902.417	100	1.305.592.658	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02 . 3.02.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	164.043.200	100	172.245.360	100	189.469.896	100	198.943.391	100	218.837.730	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02 . 3.02.01 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	30.000.000	100	31.500.000	100	34.650.000	100	36.382.500	100	40.020.750	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya			100.000.000		134.000.000		140.700.000		147.735.000		155.121.750	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02 . 3.02.01 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	6.800.000	100	7.140.000	100	7.854.000	100	8.246.700	100	9.071.370	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02 . 3.02.01 .15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah pemasaran pariwisata	100	37	350.000.000	131	385.000.000		423.500.000		453.145.000		498.459.500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02 . 3.02.01 .16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata	104	4	3.370.799.000	34	5.207.878.900	39	5.728.666.790	34	8.301.533.469	277	9.131.686.816	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02 . 3.02.01 .17	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan	166	10	38.000.000	10	41.800.000	10	45.980.000	10	49.198.600	10	54.118.460	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.03 . 3.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura				9.654.711.750		10.582.712.890		13.517.234.179		14.543.254.415		15.997.579.857	
3.03 . 3.03.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	611.150.700	100	746.708.235	100	821.379.059	100	862.448.011	100	948.692.813	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03 . 3.03.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	30.000.000	100	31.500.000	100	34.650.000	100	36.382.500	100	40.020.750	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Peningkatan Disiplin Aparaur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin			127.500.000		133.875.000		140.568.750		147.597.188		154.977.047	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			100.000.000		114.000.000		119.700.000		125.685.000		131.969.250	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	8.250.000	100	8.662.500	100	9.528.750	100	10.005.188	100	11.005.706	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	% Kesejahteraan Petani	100%	100%	64.000.000		70.400.000	100	77.440.000	100	82.860.800		91.146.880	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Jumlah Luasan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1340 Ha	1380	2.809.650.000	1420	3.090.615.000	1460	3.399.676.500	1500	3.637.653.855	1540	4.001.419.241	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	% Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan	100%	100	61.074.050	100	67.181.455	100	73.899.601	100	79.072.573	100	86.979.830	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah Jenis penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1 Jenis	100	3.837.587.000	6	4.221.345.700	3	4.643.480.270	7	4.968.523.889	8	5.465.376.278	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi pertanian/perkebunan	12426 Ton	6	1.125.000.000	15079	1.237.500.000	16587	3.237.500.000	18246	3.561.250.000	20070	3.917.375.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 26	Program Peningkatan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan	Jumlah Kelompok Sumber Daya Pertanian/Perkebunan	10 Klpk	13708	1.008.000.000	12	1.108.800.000	15	1.219.680.000	18	1.305.057.600	21	1.435.563.360	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03 . 3.03.02	Dinas Perkebunan dan Peternakan			10	9.663.680.000		10.563.991.300		16.620.390.430		14.615.929.968		13.643.629.521	
3.03 . 3.03.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	683.557.150	100	717.735.008	100	789.508.508	100	828.983.934	100	911.882.327	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	550.126.750	100	577.633.088	100	635.396.396	100	667.166.216	100	733.882.838	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	67.150.000	100	70.507.500	100	77.558.250	100	81.436.163	100	89.579.779	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya		5 Orang	0	9 Orang	137.000.000	9 Orang	137.000.000		137.000.000		137.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	20.300.100	100	21.315.105	100	23.446.616	100	24.618.946	100	27.080.841	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Program peningkatan kesejahteraan petani	Cakupan peningkatan kesejahteraan petani	38 Kelompok	0	0	9 Kelompok	65.000.000	9 Kelompok	65.000.000	9 Kelompok	65.000.000	9 Kelompok	65.000.000	Dinas Perkebunan dan

														Peternakan
	Program Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pemantauan keamanan pangan asal ternak	39 Masjid	20 Masjid	10.000.000	25 Masjid	15.000.000	30 Masjid	20.000.000	35 Masjid	30.000.000	39 Masjid	50.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Jumlah Dokumen Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	1 Dokumen	1	99.635.000	1	109.598.500	1	120.558.350	1	128.997.435	1	141.897.178	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Peternakan	Jumlah aneka produk pangan asal ternak	0	0	0	0	0	9 Unit peralatan dan 1 paket bahan	174.000.000	1 Paket bahan	54.000.000	9 Unit peralatan dan 1 paket bahan	174.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1 Kali	1	47.500.000	1	52.250.000	1	57.475.000	1	61.498.250	1	67.648.075	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	% penerapan teknologi pertanian/perkebunan	100%	100	347.945.000	100	382.739.500	100	2.421.013.450	100	2.663.114.795	100	495.532.831	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi pertanian/perkebunan	2946 Ton	3122,15	823.555.000	3277,74	905.910.500	3605,51	3.996.501.550	4146,34	1.066.256.659	4975,59	1.172.882.324	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	% pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	100%	100	110.560.000	100	121.616.000	100	133.777.600	100	143.142.032	100	157.456.235	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	1649,1 ton	1838,6	5.789.730.000	1995,1	6.368.703.000	2043,8	7.005.573.300	2102,4	7.495.963.431	2198,1	8.245.559.774	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah pemasaran hasil produksi peternakan	1 Kali	1	90.050.000	1	99.055.000	1	108.960.500	1	116.587.735	1	128.246.509	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	% Penerapan Teknologi Peternakan	100%	100	411.750.000		452.925.000		498.217.500		533.092.725		586.401.998	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 26	Program Peningkatan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan	Jumlah Sumber Daya Pertanian/Perkebunan	2 Unit	2	621.821.000	2	684.003.100	2	752.403.410	2	805.071.649	2	885.578.814	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.06 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				1.258.465.000		11.384.311.500		23.587.047.345		21.137.348.636		6.792.268.099	
3.06 . 3.07.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	3 Kali	3	298.465.000	12	328.311.500	10	361.142.650	10	386.422.636	10	425.064.899	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.07.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah efisiensi perdagangan dalam negeri	5 Unit	1	380.000.000	1	10.418.000.000	1	22.524.104.695	1	20.000.000.000	1	5.541.184.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 .	Program UPTD	Jumlah UPTD yang	1 UPTD	1	580.000.000	1	638.000.000	1	701.800.000	1	750.926.000	1	826.018.600	Dinas

3.07.01 . 20		berkualitas												Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				5.379.637.000		5.863.368.850		6.449.705.735		6.876.130.022		7.563.743.024	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	863.524.200	100	1.011.700.410	100	1.112.870.451	100	1.168.513.974	100	1.285.365.371	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	42.008.400	100	44.108.820	100	48.519.702	100	50.945.687	100	56.040.256	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	16.800.000	100	17.640.000	100	19.404.000	100	20.374.200	100	22.411.620	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapaasitasnya			100.000.000		145.000.000		152.250.000		159.862.500		167.855.625	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	62.304.400	100	65.419.620	100	71.961.582	100	75.559.661	100	83.115.627	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah kapasitas iptek sistem produksi	100 Orang	5	550.000.000	100	605.000.000	100	665.500.000	100	712.085.000	100	783.293.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah kelompok industri kecil dan menengah	7 Klpk	7	1.760.000.000	5	1.936.000.000	5	2.129.600.000	5	2.278.672.000	5	2.506.539.200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah Kelompok kemampuan Teknologi Industri	5 Klpk	30	885.000.000	7	973.500.000	7	1.070.850.000	7	1.145.809.500	7	1.260.390.450	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.07 . 3.07.01 . 21	Program pembinaan dan pendampingan pelaku usaha ekonomi kerakyatan	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan pelaku usaha ekonomi kerakyatan	50 Orang		1.100.000.000	50	1.210.000.000	60	1.331.000.000	70	1.424.170.000	80	1.566.587.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Kode	URAIAN URUSAN, ORGANISASI DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab
			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				150.735.099.839		167.592.146.153		189.134.487.074		204.585.413.095		220.809.553.106	
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah				43.305.076.000		45.878.883.510		50.466.771.861		53.187.850.450		58.506.635.495	
4.01 . 4.01.03 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	21.234.047.300	100	22.400.749.665	100	24.640.824.632	100	25.872.865.863	100	28.460.152.449	Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	12.844.500.000	100	13.486.725.000	100	14.835.397.500	100	15.577.167.375	100	17.134.884.113	Sekretariat Daerah
	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan dispilin			100.000.000		750.000.000		787.500.000		826.875.000		868.218.750	Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya	100	100	434.000.000	100	455.700.000	100	501.270.000	100	526.333.500	100	578.966.850	Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	521.454.500	100	547.527.225	100	602.279.948	100	632.393.945	100	695.633.339	Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 .16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	% Peningkatan Pelayanan Kedinasa Kepala Daerah	100	100	4.357.800.000	100	4.793.580.000	100	5.272.938.000	100	5.642.043.660	100	6.206.248.026	Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 .17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Pengembangan Pengelolaa Keuangan	100	100	146.072.000	100	160.679.200	100	176.747.120	100	189.119.418	100	208.031.360	Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 .22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	% Meningkatnya Kinerja kinerja Pengawasan	100	100	202.150.000	100	222.365.000	100	244.601.500	100	261.723.605	100	287.895.966	Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 .24	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masvarakat	% Pengananan Pengaduan Masyarakat	80%	80	347.799.500	80	382.579.450	80	420.837.395	80	450.296.013	80	495.325.614	Sekretariat Daerah

4.01 . 4.01.03 . 26	Program penataan peraturan perundang-undangan	Cakupan Penataan Peraturan Perundang-undangan	8	10	1.549.448.800	8	1.704.393.680	8	1.874.833.048	8	2.006.071.361	8	2.206.678.497	Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 27	Program penataan daerah otonomi baru	Cakupan Penataan Otonomi Baru	144	144	355.838.400	144	391.422.240	147	430.564.464	147	460.703.976	147	506.774.374	Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	Jumlah Distrik yg dilakukan pembinaan	19	19	132.127.500	19	145.340.250	19	159.874.275	19	171.065.474	19	188.172.022	Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 41	Program penataan dan penyelesaian masalah-masalah daerah	M% penyelesaian Daerah	90	90	355.891.500	90	391.480.650	90	430.628.715	90	460.772.725	90	506.849.998	Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 42	Program peningkatan dan pengembangan administrasi kesekretariatan	% Pengembangan Administrasi Sekretariat	100	100	514.226.500	100	565.649.150	100	622.214.065	100	665.769.050	100	732.345.955	Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.03 . 54	Program perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	209.720.000	100	230.692.000	100	253.761.200	100	271.524.484	100	298.676.932	Sekretariat Daerah
4.01 . 4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				25.180.800.000		27.277.975.500		30.005.773.050		31.911.719.285		35.102.891.213	
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	4.994.660.800	100	5.244.393.840	100	5.768.833.224	100	6.057.274.885	100	6.663.002.374	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	1.881.554.200	100	1.975.631.910	100	2.173.195.101	100	2.281.854.856	100	2.510.040.342	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01 . 4.01.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100	100	272.150.000		285.757.500	100	314.333.250	100	330.049.913	100	363.054.904	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kpsitasnya	100	100	1.134.500.000	100	1.191.225.000	100	1.310.347.500	100	1.375.864.875	100	1.513.451.363	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01 . 4.01.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	135.225.000	100	141.986.250	100	156.184.875	100	163.994.119	100	180.393.531	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4.01 . 4.01.04 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	% Peningkatan kapasitas DPRD	25	25	15.813.410.000	25	17.394.751.000	25	19.134.226.100	25	20.473.621.927	25	22.520.984.120	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01 . 4.01.04 . 26	Program penataan peraturan perundang-undangan	Cakupan Penataan Peraturan perundang Undangan	8	10	949.300.000	8	1.044.230.000	9	1.148.653.000	9	1.229.058.710	9	1.351.964.581	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01 . 4.01.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				4.581.746.400		5.411.158.720		5.674.305.900		6.043.267.695		6.369.625.772	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	1.793.346.400	100	1.883.013.720	100	1.793.346.400	100	1.883.013.720	100	1.793.346.400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	615.000.000	100	645.750.000	100	710.325.000	100	745.841.250	100	820.425.375	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.01 . 4.01.05 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	44.000.000	100	46.200.000	100	50.820.000	100	53.361.000	100	58.697.100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.01 . 4.01.05 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapahtasnya	100%	100	100.000.000	100	105.000.000	100	115.500.000	100	121.275.000	100	133.402.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.01 . 4.01.05 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	22.900.000	100	24.045.000	100	26.449.500	100	27.771.975	100	30.549.173	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.01 . 4.01.05 . 33	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Cakupan Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	100%	100	127.300.000	100	140.030.000	100	154.033.000	100	164.815.310	100	181.296.841	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.01 . 4.01.05 . 35	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	% Pencegahan Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100%	100	875.000.000	100	962.500.000	100	1.058.750.000	100	1.132.862.500	100	1.246.148.750	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.01 . 4.01.05 . 36	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	100	253.146.000	100	778.460.600	100	856.306.660	100	941.937.326	100	1.036.131.059	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.01 . 4.01.05 . 37	Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	Cakupam Kedaruratan dan Logistrk Bencana	100%	100	277.935.000	100	305.728.500	100	336.301.350	100	359.842.445	100	395.826.689	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.01 . 4.01.05 .55	Program pengendalian banjir	% Penanggulangan Banjir	30%	30	473.119.000	30	520.430.900	30	572.473.990	30	612.547.169	30	673.801.886	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.01 . 4.01.06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				4.538.640.000		4.846.914.400		5.331.605.840		5.637.555.854		6.201.311.439	
4.01 . 4.01.06 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	2.622.492.000	100	2.858.616.600	100	3.144.478.260	100	3.301.702.173	100	3.631.872.390	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.01 . 4.01.06 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	180.300.000	100	189.315.000	100	208.246.500	100	218.658.825	100	240.524.708	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	72 Stel	-	0	32 Stel	52.000.000	32 Stel	52.000.000	32 Stel	52.000.000	32 Stel	52.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya	5 Orang	-	100.000.000	8 Orang	120.000.000	8 Orang	120.000.000	8 Orang	120.000.000	8 Orang	120.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.01 . 4.01.06 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	9.000.000	100	9.450.000	100	10.395.000	100	10.914.750	100	12.006.225	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemeliharaan Ketertiban dan Pencegahan tindak Kriminal	% Terciptanya dan terpeliharanya situasi dan kondisi daerah yang kondusif	160 org/2 keg	30 org/ 2 keg	448.000.000	120 org/2 keg	830.000.000	120 org/2 keg	830.000.000	120 org/2 keg	830.000.000	120 org/2 keg	830.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.01 . 4.01.06 .43	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	% Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	64.735.000	100	71.208.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.01 . 4.01.06 .45	Program pengembangan wawasan kebangsaan	% Pengembangan Kenyamanan Lingkungan	70%	70	448.000.000	70	492.800.000	70	542.080.000	70	580.025.600	70	638.028.160	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.01 . 4.01.06 .46	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	60%	60	69.000.000	60	75.900.000	60	83.490.000	60	89.334.300	60	98.267.730	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.01 . 4.01.06 .47	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	% Pemberdayaan masyarakat menjaga Ketertiban dan keamanan	70%	70	169.000.000	70	185.900.000	70	204.490.000	70	218.804.300	70	240.684.730	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.01 . 4.01.06	Program pendidikan politik	Cakupan pendidikan Politik Masyarakat	60%	65	359.500.000	65	395.450.000	65	434.995.000	65	465.444.650	65	511.989.115	Badan Kesatuan

. 49	masyarakat													Bangsa dan Politik
4.01 . 4.01.06 . 51	Program pembinaan kesatuan bangsa	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3 Kali	3	497.348.000	3	547.082.800	3	601.791.080	3	643.916.456	3	708.308.101	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.01 . 4.01.06 . 52	Program pembinaan sosial politik	Jumlah Pembinaa Politik	6 Kali	6	34.000.000	6	37.400.000	6	41.140.000	6	44.019.800	6	48.421.780	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.01 . 4.01.10	Distrik Sentani Timur				871.000.000		1.221.750.000		1.343.925.000		1.631.106.050		1.794.216.655	
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	554.100.000	100	608.055.000	100	668.860.500	100	702.303.525	100	772.533.878	Distrik Sentani Timur
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	114.900.000	100	120.645.000	100	132.709.500	100	139.344.975	100	153.279.473	Distrik Sentani Timur
4.01 . 4.01.10 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100	100	33.000.000	100	34.650.000	100	38.115.000	100	40.020.750	100	44.022.825	Distrik Sentani Timur
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya			100.000.000		100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500	Distrik Sentani Timur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu			25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Distrik Sentani Timur
4.01 . 4.01.10 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan pemanfaatan teknologi	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	25.894.000	100	28.483.400	Distrik Sentani Timur
	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	-			-	-	300.000.000	#####	330.000.000	-	563.000.000	###	619.300.000	Distrik Sentani Timur
4.01 . 4.01.10 . 30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah kelompok social yg di bina	3	3	100.000.000	3	110.000.000	3	121.000.000	3	129.470.000	3	142.417.000	Distrik Sentani Timur
4.01 . 4.01.10 . 31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	% pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	1 Bulan	12	24.000.000	12	26.400.000	12	29.040.000	12	31.072.800	12	34.180.080	Distrik Sentani Timur
4.01 . 4.01.11	Distrik Sentani				1.462.815.100		1.852.397.105		2.037.636.816		2.367.606.221		2.604.366.843	
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	534.165.100	100	560.873.355	100	616.960.691	100	647.808.725	100	712.589.598	Distrik Sentani

	Perkantoran													
4.01 . 4.01.11 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	541.700.000	100	568.785.000	100	625.663.500	100	656.946.675	100	722.641.343	Distrik Sentani
4.01 . 4.01.11 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	40.625.000	100	42.656.250	100	46.921.875	100	49.267.969	100	54.194.766	Distrik Sentani
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			140.500.000		100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500	Distrik Sentani
4.01 . 4.01.11 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	17.500.000	100	18.375.000	100	20.212.500	100	21.223.125	100	23.345.438	Distrik Sentani
4.01 . 4.01.11 .26	Program penataan peraturan perundang-undangan	% penataan perundang-undangan	100%	100	5.700.000	100	6.270.000	100	6.897.000	100	7.379.790	100	8.117.769	Distrik Sentani
4.01 . 4.01.11 .28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pembinaan pemerintahan umum Distrik	50%	50	100.000.000	50	410.000.000	50	451.000.000	50	696.100.000	50	765.710.000	Distrik Sentani
4.01 . 4.01.11 .29	Program peningkatan perekonomian rakyat di distrik	% peningkatan perekonomian rakyat di distrik	100%	100	3.075.000	100	3.382.500	100	3.720.750	100	3.981.203	100	4.379.323	Distrik Sentani
4.01 . 4.01.11 .30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah kelompok masyarakat yg dibina	3 Lembaga	3	134.050.000	100	147.455.000	100	162.200.500	100	173.554.535	100	190.909.989	Distrik Sentani
4.01 . 4.01.11 .31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	% Pembinaan masyarakat keamanan dan ketertiban distrik	12 Bln	12	86.000.000	3	94.600.000	3	104.060.000	3	111.344.200	3	122.478.620	Distrik Sentani
4.01 . 4.01.12	Distrik Sentani Barat				769.920.000		1.114.162.250		1.225.578.475		1.506.852.786		1.657.538.065	
4.01 . 4.01.12 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	541.950.000		569.047.500		625.952.250		657.249.863		722.974.849	Distrik Sentani Barat
4.01 . 4.01.12 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	70.000.000	100	73.500.000	100	80.850.000	100	84.892.500	100	93.381.750	Distrik Sentani Barat
4.01 . 4.01.12 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	40.000.000	100	42.000.000	100	46.200.000	100	48.510.000	100	53.361.000	Distrik Sentani Barat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			49.500.000		51.975.000		54.573.750		57.302.438		60.167.559	Distrik Sentani Barat

	<i>Daya Aparatur</i>													
4.01 . 4.01.12 .06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	<i>Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu</i>	100%	100	3.045.000	100	3.197.250	100	3.516.975	100	3.692.824	100	4.062.106	Distrik Sentani Barat
4.01 . 4.01.12 .28	<i>Program pembinaan pemerintahan umum distrik</i>	<i>% pembinaan pemerintahan Distrik</i>	100%	100	19.675.000	100	321.642.500	100	353.806.750	100	589.187.425	100	648.106.168	Distrik Sentani Barat
4.01 . 4.01.12 .30	<i>Program pembinaan sosial kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah lembaga social yang dibina</i>	3 <i>Lembaga</i>	3	71.250.000	3	78.375.000	3	86.212.500	3	92.247.375	3	101.472.113	Distrik Sentani Barat
4.01 . 4.01.12 .31	<i>Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik</i>	<i>% pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Distrik</i>	12 Bln	12	24.000.000	12	26.400.000	12	29.040.000	12	31.072.800	12	34.180.080	Distrik Sentani Barat
4.01 . 4.01.13	<i>Distrik Ebungfauw</i>				807.000.000		1.158.125.000		1.273.937.500		1.559.875.825		1.715.863.408	
4.01 . 4.01.13 .01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi</i>	100	100	555.600.000	100	583.380.000	100	641.718.000	100	673.803.900	100	741.184.290	Distrik Ebungfauw
4.01 . 4.01.13 .02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi</i>	100	100	9.900.000	100	10.395.000	100	11.434.500	100	12.006.225	100	13.206.848	Distrik Ebungfauw
4.01 . 4.01.13 .03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	<i>% ASN yang memenuhi aturan disiplin</i>	100	100	20.000.000	100	21.000.000	100	23.100.000	100	24.255.000	100	26.680.500	Distrik Ebungfauw
4.01 . 4.01.13 .05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya</i>	1 orang	1	6.000.000	1	6.300.000	1	6.930.000	1	7.276.500	1	8.004.150	Distrik Ebungfauw
	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	<i>Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu</i>			30.000.000		30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750	Distrik Ebungfauw
4.01 . 4.01.13 .28	<i>Program pembinaan pemerintahan umum distrik</i>	<i>% pembinaan pemerintahan umum Distrik</i>	100%	100	14.500.000	100	315.950.000	100	347.545.000	100	582.299.500	100	640.529.450	Distrik Ebungfauw
4.01 . 4.01.13 .30	<i>Program pembinaan sosial kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah lembaga sosial yg masyarakat dibina</i>	3 <i>Lembaga</i>	3	186.600.000	3	205.260.000	3	225.786.000	3	241.591.020	3	265.750.122	Distrik Ebungfauw
4.01 . 4.01.13 .31	<i>Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik</i>	<i>Jumlah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Distrik</i>	12 Bln	12	14.400.000	12	15.840.000	12	17.424.000	12	18.643.680	12	20.508.048	Distrik Ebungfauw
4.01 . 4.01.14	<i>Distrik Waibu</i>				918.000.000		1.270.586.500		1.397.645.150		1.688.905.523		1.857.796.075	

4.01 . 4.01.14 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	602.570.000	100	632.698.500	100	695.968.350	100	730.766.768	100	803.843.444	Distrik Waibu
4.01 . 4.01.14 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	140.000.000	100	147.000.000	100	161.700.000	100	169.785.000	100	186.763.500	Distrik Waibu
4.01 . 4.01.14 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	39.150.000	100	41.107.500	100	45.218.250	100	47.479.163	100	52.227.079	Distrik Waibu
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			4.500.000		4.725.000		4.961.250		5.209.313		5.469.778	Distrik Waibu
4.01 . 4.01.14 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	2.550.000	100	2.677.500	100	2.945.250	100	3.092.513	100	3.401.764	Distrik Waibu
4.01 . 4.01.14 .28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pembinaan pemerintahan umum Distrik	100%	100	45.230.000	100	349.753.000	100	384.728.300	100	623.201.130	100	685.521.243	Distrik Waibu
4.01 . 4.01.14 .30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah kelompok social masyarakat yang dibina	3 Lembaga	3	78.500.000	3	86.350.000	3	94.985.000	3	101.633.950	3	111.797.345	Distrik Waibu
4.01 . 4.01.14 .31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	Jumlah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Distrik	12 Bln	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.100.000	12	12.947.000	12	14.241.700	Distrik Waibu
4.01 . 4.01.15	Distrik Depapre				1.074.678.000		1.439.653.400		1.583.618.740		1.886.324.332		2.074.956.765	
4.01 . 4.01.15 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	699.506.000	100	734.481.300	100	807.929.430	100	848.325.902	100	933.158.492	Distrik Depapre
4.01 . 4.01.15 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	99.600.000	100	104.580.000	100	115.038.000	100	120.789.900	100	132.868.890	Distrik Depapre
4.01 . 4.01.15 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	23.100.000	100	24.255.000	100	26.680.500	100	28.014.525	100	30.815.978	Distrik Depapre
4.01 . 4.01.15 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	5	18.742.000	5	19.679.100	5	21.647.010	5	22.729.361	5	25.002.297	Distrik Depapre
4.01 . 4.01.15 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	8.900.000	100	9.345.000	100	10.279.500	100	10.793.475	100	11.872.823	Distrik Depapre

	capaian kinerja dan keuangan													
4.01 . 4.01.15 .28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pembinaan pemerintahan Umum Distrik	100%	100	43.630.000	100	347.993.000	100	382.792.300	100	621.071.530	100	683.178.683	Distrik Depapre
4.01 . 4.01.15 .30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah lembaga social masyarakat yg di bina	3 Lembaga	3	175.200.000	3	192.720.000	3	211.992.000	3	226.831.440	3	249.514.584	Distrik Depapre
4.01 . 4.01.15 .31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	Jumlah pembinaan keamanan dan ketertiban Distrik	12 Bln	12	6.000.000	12	6.600.000	12	7.260.000	12	7.768.200	12	8.545.020	Distrik Depapre
4.01 . 4.01.16	Distrik Raveni Rara				1.024.400.000		1.390.833.790		1.529.917.169		1.835.140.702		2.018.654.772	
4.01 . 4.01.16 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	689.624.100	100	724.105.305	100	796.515.836	100	836.341.627	100	919.975.790	Distrik Raveni Rara
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi			19.800.000		25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625	Distrik Raveni Rara
	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin			78.750.000		82.687.500		86.821.875		91.162.969		95.721.117	Distrik Raveni Rara
4.01 . 4.01.16 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kpsitasnya	100%	100	19.800.000	100	20.790.000	100	22.869.000	100	24.012.450	100	26.413.695	Distrik Raveni Rara
4.01 . 4.01.16 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	10.700.100	100	11.235.105	100	12.358.616	100	12.976.546	100	14.274.201	Distrik Raveni Rara
4.01 . 4.01.16 .28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% Pembinaan pemerintahan umum Distrik	100%	100	134.000.000	100	447.400.000	100	492.140.000	100	741.354.000	100	815.489.400	Distrik Raveni Rara
4.01 . 4.01.16 .29	Program peningkatan perekonomian rakyat di distrik	Jumlah lembaga perekonomian rakyat yg di bina	2 Lembaga	2	30.725.000	2	33.797.500	2	37.177.250	2	39.779.658	2	43.757.623	Distrik Raveni Rara
4.01 . 4.01.16 .30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah lembaga social masyarakat yang dibina	3 Lembaga	100	83.500.100	100	91.850.110	100	101.035.121	100	108.107.579	100	118.918.337	Distrik Raveni Rara
4.01 . 4.01.16 .31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	Jumlah pembinaan keamanan dan ketertiban Masyarakat Distrik	12 Bln	3	26.000.700	3	28.600.770	3	31.460.847	3	33.663.106	3	37.029.417	Distrik Raveni Rara
4.01 . 4.01.16	Pembinaan perencanaan dan	Meningkatnya Kemanan Distrik	12 Bln	12	30.050.000	12	33.055.000	12	36.360.500	12	38.905.735	12	42.796.309	Distrik Raveni Rara

. 56	pelaksanaan pembangunan													
4.01 . 4.01.17	Distrik Kemtuk				895.830.000		1.249.271.500		1.374.198.650		1.665.591.683		1.832.150.851	
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	398.760.000	100	444.948.000	100	489.442.800	100	513.914.940	100	565.306.434	Distrik Kemtuk
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	282.000.000	100	296.100.000	100	325.710.000	100	341.995.500	100	376.195.050	Distrik Kemtuk
	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin			25.000.000		32.000.000		33.600.000		35.280.000		37.044.000	Distrik Kemtuk
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			0		170.000.000		178.500.000		187.425.000		196.796.250	Distrik Kemtuk
4.01 . 4.01.17 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	17.070.000	100	17.923.500	100	19.715.850	100	20.701.643	100	22.771.807	Distrik Kemtuk
4.01 . 4.01.17 . 27	Program penataan daerah otonomi baru	Jumlah penataan kampong otonom	11 Kampung	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	32.367.500	1	35.604.250	Distrik Kemtuk
4.01 . 4.01.17 . 28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pemerintahan umum Distrik yg terbina	100%	100	55.000.000	100	360.500.000	100	396.550.000	100	636.205.000	100	699.825.500	Distrik Kemtuk
4.01 . 4.01.17 . 30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah lembaga social asyarakat yg terbina	3 Lembaga	3	81.000.000	3	89.100.000	3	98.010.000	3	104.870.700	3	115.357.770	Distrik Kemtuk
4.01 . 4.01.17 . 31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	% pembinaan keamanan dan ketertiban Distrik	12 Bln	12	12.000.000	12	13.200.000	12	14.520.000	12	15.536.400	12	17.090.040	Distrik Kemtuk
4.01 . 4.01.18	Distrik Kemtuk Gresi				1.052.590.000		1.413.719.500		1.555.091.450		1.654.113.423		1.819.524.765	
4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	477.058.000	100	500.910.900	100	551.001.990	100	578.552.090	100	636.407.298	Distrik Kemtuk Gresi
4.01 . 4.01.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	356.432.000	100	374.253.600	100	411.678.960	100	432.262.908	100	475.489.199	Distrik Kemtuk Gresi
4.01 . 4.01.18 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	46.100.000	100	48.405.000	100	53.245.500	100	55.907.775	100	61.498.553	Distrik Kemtuk Gresi
	Program	% SDM aparatur yang			5.250.000		5.512.500		5.788.125		6.077.531		6.381.408	Distrik Kemtuk

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	ditingkatkan kapasitasnya												Gresi
4.01 . 4.01.18 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	3.000.000	100	3.150.000	100	3.465.000	100	3.638.250	100	4.002.075	Distrik Kentuk Gresi
4.01 . 4.01.18 . 28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pemerintahan umum Distrik yg terbina	100%	100	18.000.000	100	319.800.000	100	351.780.000	100	386.958.000	100	425.653.800	Distrik Kentuk Gresi
4.01 . 4.01.18 . 30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah lembaga social masyarakat yg dibina	3 Lembaga	3	140.000.000	3	154.000.000	3	169.400.000	3	181.258.000	3	199.383.800	Distrik Kentuk Gresi
4.01 . 4.01.18 . 31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	% pembinaan keamanan dan ketertiban Masyarakat Distrik	12 Bln	12	12.000.000	12	13.200.000	12	14.520.000	12	15.536.400	12	17.090.040	Distrik Kentuk Gresi
4.01 . 4.01.19	Distrik Namblong				722.300.000		774.455.590		851.901.149		902.259.852		992.485.837	
4.01 . 4.01.19 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	318.738.200	100	387.175.110	100	425.892.621	100	447.187.252	100	491.905.977	Distrik Namblong
4.01 . 4.01.19 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	32.750.000	100%	34.387.500	100%	37.826.250	100%	39.717.563	##	43.689.319	Distrik Namblong
	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin			25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Distrik Namblong
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			15.000.000		15.750.000		16.537.500		17.364.375		18.232.594	Distrik Namblong
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu			20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125	Distrik Namblong
4.01 . 4.01.19 . 28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pembinaan pemerintahan umum Distrik	100%	100%	40.711.800	3	344.782.980	3	379.261.278	3	617.187.406	3	678.906.146	Distrik Namblong
4.01 . 4.01.19 . 30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah lembaga social yg dibina	3 Lembaga	3	280.100.000		308.110.000		338.921.000		362.645.470		398.910.017	Distrik Namblong
4.01 . 4.01.20	Distrik Nimboran				979.440.000		1.335.082.000		1.468.590.200		1.762.492.140		1.938.741.354	
4.01 . 4.01.20	Program Pelayanan	% adminisrasi perkantoran yang	100%	100	477.290.000	100	527.404.500	100	580.144.950	100	609.152.198	100	670.067.417	Distrik

. 01	Administrasi Perkantoran	terpenuhi												Nimboran
4.01 . 4.01.20 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	315.000.000	100	330.750.000	100	363.825.000	100	382.016.250	100	420.217.875	Distrik Nimboran
4.01 . 4.01.20 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	22.750.000	100	23.887.500	100	26.276.250	100	27.590.063	100	30.349.069	Distrik Nimboran
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Distrik Nimboran
4.01 . 4.01.20 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	6.000.000	100	6.300.000	100	6.930.000	100	7.276.500	100	8.004.150	Distrik Nimboran
4.01 . 4.01.20 . 28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pembinaan pemerintahan umum Distrik	100%	100	20.500.000	100	322.550.000	100	354.805.000	100	590.285.500	100	649.314.050	Distrik Nimboran
4.01 . 4.01.20 . 30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga social kemasyarakatan	3 Lembaga	3	97.300.000	3	107.030.000	3	117.733.000	3	125.974.310	3	138.571.741	Distrik Nimboran
4.01 . 4.01.20 . 31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	% pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Distrik	12 Bln	12	15.600.000	12	17.160.000	12	18.876.000	12	20.197.320	12	22.217.052	Distrik Nimboran
4.01 . 4.01.21	Distrik Nimbokrang				838.301.000	100	886.921.675		975.613.843		1.027.640.057		1.130.404.063	
4.01 . 4.01.21 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	480.584.000	100	525.613.200	100	578.174.520	100	607.083.246	100	667.791.571	Distrik Nimbokrang
4.01 . 4.01.21 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	177.762.000	100	186.650.100	100	205.315.110	100	215.580.866	100	237.138.952	Distrik Nimbokrang
4.01 . 4.01.21 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	18.750.000	100	19.687.500	100	21.656.250	100	22.739.063	100	25.012.969	Distrik Nimbokrang
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125	Distrik Nimbokrang
4.01 . 4.01.21 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	7.092.500	100	7.447.125	100	8.191.838	100	8.601.429	100	9.461.572	Distrik Nimbokrang

4.01 . 4.01.21 .28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pembinaan pemerintahan umum Distrik	100%	100	87.112.500	100	395.823.750	100	435.406.125	100	678.946.738	100	746.841.411	Distrik Nimbokrang
4.01 . 4.01.21 .30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah pembinaan social kemasyarakatan	3 Lembaga	3	39.000.000	3	42.900.000	3	47.190.000	3	50.493.300	3	55.542.630	Distrik Nimbokrang
4.01 . 4.01.21 .31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	% pembinaan masyarakat Distrik	12 Bln	12	8.000.000	12	8.800.000	12	9.680.000	12	10.357.600	12	11.393.360	Distrik Nimbokrang
4.01 . 4.01.22	Distrik Gresi Selatan				978.800.000		1.340.345.000		1.474.379.500		1.774.147.795		1.951.562.575	
4.01 . 4.01.22 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	569.200.000	100	629.160.000	100	692.076.000	100	726.679.800	100	799.347.780	Distrik Gresi Selatan
4.01 . 4.01.22 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	97.800.000	100	102.690.000	100	112.959.000	100	118.606.950	100	130.467.645	Distrik Gresi Selatan
4.01 . 4.01.22 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	13.700.000	100	14.385.000	100	15.823.500	100	16.614.675	100	18.276.143	Distrik Gresi Selatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapahtasnya			30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.188	Distrik Gresi Selatan
4.01 . 4.01.22 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	16.000.000	100	16.800.000	100	18.480.000	100	19.404.000	100	21.344.400	Distrik Gresi Selatan
4.01 . 4.01.22 .28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pembinaan pemerintahan Distrik	100%	100	95.000.000	100	404.500.000	100	444.950.000	100	689.445.000	100	758.389.500	Distrik Gresi Selatan
4.01 . 4.01.22 .30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah lembaga social yg di bina	3 Lembaga	3	121.100.000	3	133.210.000	3	146.531.000	3	156.788.170	3	172.466.987	Distrik Gresi Selatan
4.01 . 4.01.22 .31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	% pembinaan keamanan dan ketertiban Distrik	12 Bln	12	36.000.000	12	39.600.000	12	43.560.000	12	46.609.200	12	51.270.120	Distrik Gresi Selatan
4.01 . 4.01.23	Distrik Demta				972.930.000		1.328.481.500		1.461.329.650		1.754.619.303		1.310.361.968	
4.01 . 4.01.23 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	538.140.000	100	591.297.000	100	650.426.700	100	682.948.035	100	751.242.839	Distrik Demta
4.01 . 4.01.23	Program Peningkatan	% kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%	100	240.090.000	100	252.094.500	100	277.303.950	100	291.169.148	100	320.286.062	Distrik Demta

. 02	Sarana dan Prasarana Aparatur	yang terpenuhi												
4.01 . 4.01.23 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	30.000.000	100	31.500.000	100	34.650.000	100	36.382.500	100	40.020.750	Distrik Demta
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Distrik Demta
4.01 . 4.01.23 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	1.600.000	100	1.680.000	100	1.848.000	100	1.940.400	100	2.134.440	Distrik Demta
4.01 . 4.01.23 . 28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pemerintahan Umum Distrik yg terbina	100%	100	10.500.000	100	311.550.000	100	342.705.000	100	576.975.500	100	634.673.050	Distrik Demta
4.01 . 4.01.23 . 30	Program pembinaan sosial masyarakat	Jumlah lembaga social masyarakat yang dibina	3 Lembaga	3	109.600.000	3	120.560.000	3	132.616.000	3	141.899.120	3	156.089.032	Distrik Demta
4.01 . 4.01.23 . 31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	% pembinaan keamanan dan ketertiban	12 Bln	12	18.000.000	12	19.800.000	12	21.780.000	12	23.304.600	12	25.635.060	Distrik Demta
4.01 . 4.01.24	Distrik Yokari				938.900.000		1.296.225.000		1.425.847.500		1.719.389.795		1.271.230.175	
4.01 . 4.01.24 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	523.800.000	100	597.240.000	100	656.964.000	100	689.812.200	100	758.793.420	Distrik Yokari
4.01 . 4.01.24 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	140.000.000	100	147.000.000	100	161.700.000	100	169.785.000	100	186.763.500	Distrik Yokari
4.01 . 4.01.24 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	22.500.000	100	23.625.000	100	25.987.500	100	27.286.875	100	30.015.563	Distrik Yokari
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Distrik Yokari
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu			20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125	Distrik Yokari
4.01 . 4.01.24 . 28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pemerintahan umum Distrik yg terbina	100%	100	20.000.000	100	322.000.000	100	354.200.000	100	589.620.000	100	648.582.000	Distrik Yokari

4.01 . 4.01.24 . 30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah lembaga social masyarakat yg dibina	3 Lembaga	3	169.600.000	3	186.560.000	3	205.216.000	3	219.581.120	3	241.539.232	Distrik Yokari
4.01 . 4.01.24 . 31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	% pembinaan keamanan dan ketertiban Distrik	12 Bln	12	18.000.000	12	19.800.000	12	21.780.000	12	23.304.600	12	25.635.060	Distrik Yokari
4.01 . 4.01.25	Distrik Unurum Guay				959.900.000		1.334.645.000		1.468.109.500		1.786.389.475		1.965.028.423	
4.01 . 4.01.25 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	330.980.000	100	368.529.000	100	405.381.900	100	425.650.995	100	468.216.095	Distrik Unurum Guay
4.01 . 4.01.25 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	35.000.000	100	36.750.000	100	40.425.000	100	42.446.250	100	46.690.875	Distrik Unurum Guay
4.01 . 4.01.25 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	18.920.000	100	19.866.000	100	21.852.600	100	22.945.230	100	25.239.753	Distrik Unurum Guay
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya			20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125	Distrik Unurum Guay
4.01 . 4.01.25 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	20.000.000	100	21.000.000	100	23.100.000	100	24.255.000	100	26.680.500	Distrik Unurum Guay
4.01 . 4.01.25 . 28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pembinaan pemerintahan Umum Distrik	100%	100	425.000.000	100	767.500.000	100	844.250.000	100	1.128.675.000	100	1.241.542.500	Distrik Unurum Guay
4.01 . 4.01.25 . 30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah lembaga social masyarakat yg dibina	3 Lembaga	3	80.000.000	3	88.000.000	3	96.800.000	3	103.576.000	3	113.933.600	Distrik Unurum Guay
4.01 . 4.01.25 . 31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	% pembinaan keamanan dan ketertiban Masyarakat	12 Bln	12	30.000.000	12	33.000.000	12	36.300.000	12	38.841.000	12	42.725.100	Distrik Unurum Guay
4.01 . 4.01.26	Distrik Yapsi				792.540.000		1.142.087.000		1.256.295.700		977.411.765		1.075.152.942	
4.01 . 4.01.26 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	424.440.000	100	471.912.000	100	519.103.200	100	545.058.360	100	599.564.196	Distrik Yapsi
4.01 . 4.01.26 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	120.400.000	100	126.420.000	100	139.062.000	100	146.015.100	100	160.616.610	Distrik Yapsi
4.01 .	Program	% ASN yang memenuhi	100	100	21.900.000	100	22.995.000	100	25.294.500	100	26.559.225	100	29.215.148	Distrik Yapsi

4.01.26.03	peningkatan disiplin aparatur	aturan disiplin												
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Distrik Yapsi
4.01.4.01.26.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	2.400.000	100	2.520.000	100	2.772.000	100	2.910.600	100	3.201.660	Distrik Yapsi
4.01.4.01.26.28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pembinaan pemerintahan umum Distrik	100%	100	60.000.000	100	366.000.000	100	402.600.000	100	642.860.000	100	707.146.000	Distrik Yapsi
4.01.4.01.26.30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah lembaga social masyarakat yang terbina	3 Lembaga	3	128.400.000	3	141.240.000	3	155.364.000	3	166.239.480	3	182.863.428	Distrik Yapsi
4.01.4.01.26.31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	% pembinaan keamanan dan ketertiban Distrik	12 Bln	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.100.000	12	12.947.000	12	14.241.700	Distrik Yapsi
4.01.4.01.27	Distrik Kaureh				1.067.540.000		1.440.545.500		1.584.600.050		1.897.925.147		2.087.717.661	
4.01.4.01.27.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	365.620.000	100	410.151.000	100	451.166.100	100	473.724.405	100	521.096.846	Distrik Kaureh
4.01.4.01.27.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	249.000.000	100	261.450.000	100	287.595.000	100	301.974.750	100	332.172.225	Distrik Kaureh
4.01.4.01.27.03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100	100	31.350.000	100	32.917.500	100	36.209.250	100	38.019.713	100	41.821.684	Distrik Kaureh
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Distrik Kaureh
4.01.4.01.27.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	100	4.000.000	100	4.200.000	100	4.620.000	100	4.851.000	100	5.336.100	Distrik Kaureh
4.01.4.01.27.28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pembinaan pemerintahan umum Distrik	100%	100	223.000.000	100	545.300.000	100	599.830.000	100	859.813.000	100	945.794.300	Distrik Kaureh
4.01.4.01.27.30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah lembaga social yg dibina	3 Lembaga	3	145.570.000	3	160.127.000	3	176.139.700	3	188.469.479	3	207.316.427	Distrik Kaureh
4.01.	Program	% pembinaan	12 Bln	12	24.000.000	12	26.400.000	12	29.040.000	12	31.072.800	12	34.180.080	Distrik Kaureh

4.01.27 .31	pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	keamanan dan ketertiban												
4.01 . 4.01.28	Distrik Airu				1.359.644.000		1.438.876.200		1.582.763.820		1.667.347.011		1.834.081.712	
4.01 . 4.01.28 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	722.644.000	100	806.026.200	100	886.628.820	100	930.960.261	100	1.024.056.287	Distrik Airu
4.01 . 4.01.28 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	348.000.000	100	365.400.000	100	401.940.000	100	422.037.000	100	464.240.700	Distrik Airu
4.01 . 4.01.28 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	19.000.000	100	19.950.000	100	21.945.000	100	23.042.250	100	25.346.475	Distrik Airu
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya			25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656	Distrik Airu
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu			20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125	Distrik Airu
4.01 . 4.01.28 .28	Program pembinaan pemerintahan umum distrik	% pembinaan pemerintahan Umum Distrik	100%	100	140.000.000	100	454.000.000	100	499.400.000	100	749.340.000	100	824.274.000	Distrik Airu
4.01 . 4.01.28 .30	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah lembaga social masyarakat yang dibina	3 Lembaga	3	36.000.000	3	39.600.000	3	43.560.000	3	46.609.200	3	51.270.120	Distrik Airu
4.01 . 4.01.28 .31	Program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat distrik	% pembinaan dan keamanan masyarakat Distrik	12 Bln	12	49.000.000	12	53.900.000	12	59.290.000	12	63.440.300	12	69.784.330	Distrik Airu
	Inspektorat				5.245.606.280		6.196.527.430		7.316.180.173		7.944.209.751		8.738.630.727	
4.02 . 4.02.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100	100	1.197.305.152	100	1.288.670.410	100	1.417.537.451	100	1.488.414.323	100	1.637.255.755	Inspektorat
4.02 . 4.02.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100	100	209.500.000	100	219.975.000	100	241.972.500	100	254.071.125	100	279.478.238	Inspektorat
4.02 . 4.02.01 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100	100	18.000.000	100	18.900.000	100	20.790.000	100	21.829.500	100	24.012.450	Inspektorat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya			30.000.000		45.000.000		47.250.000		49.612.500		52.093.125	Inspektorat

4.02 . 4.02.01 . 06	Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	17.984.400	100	18.883.620	100	20.771.982	100	21.810.581	100	23.991.639	Inspektorat
4.02 . 4.02.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Pengawasan Kegiatan OPD	52 OPD	54	3.262.215.000	54	4.088.436.500	54	4.997.280.150	54	5.497.008.165	54	6.046.708.982	Inspektorat
4.02 . 4.02.01 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah SDM Pemeriksa yang mengikuti peningkatan	20 Orang	20	510.601.728	20	561.661.901	20	617.828.091	20	661.076.057	20	727.183.663	Inspektorat
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				13.197.813.320		13.793.096.606		17.880.406.267		19.201.601.815		22.160.717.311	
4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	2.363.209.800	100	2.512.870.290	100	2.764.157.319	100	2.902.365.185	100	3.192.601.703	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	289.131.820	100	303.588.411	100	933.947.252	100	350.644.615	100	885.709.076	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	98.100.000	100	103.005.000	100	113.305.500	100	118.970.775	100	130.867.853	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya			30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.188	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	109.519.300	100	114.995.265	100	126.494.792	100	132.819.531	100	146.101.484	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	Jumlah Data dan Informasi	200 Buku	200	1.160.133.960	200	1.276.147.356	200	1.403.762.092	200	2.502.025.438	##	2.752.227.982	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Kerja sama Pembangunan	3 Kali	3	783.500.000	3	861.850.000	3	1.948.035.000	3	1.112.397.450	3	1.223.637.195	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Dokumen	1	516.000.500	1	567.600.550	1	624.360.605	1	668.065.847	1	734.872.432	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Jumlah Dokumen Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar	1 Dokumen	1	198.000.000	1	217.800.000	1	239.580.000	1	256.350.600	1	281.985.660	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah SDM Perencana yg mengikuti pelatihan	48 Orag	48	197.038.400	48	216.742.240	48	238.416.464	48	455.105.616	48	500.616.178	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencana	6 Dokumen	5	4.799.914.840	5	4.699.906.324	5	6.277.896.956	5	7.238.772.185	5	8.501.604.718	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah Dokumen Perencana Pembangunan Ekonomi	5 Dokumen	5	796.219.450	5	875.841.395	5	963.425.535	5	1.059.768.088	5	1.165.744.897	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	Jumlah Dokumen Perencana Sosial Budaya	2 Dokumen	2	676.126.100	2	743.738.710	2	818.112.581	2	875.380.462	2	962.918.508	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 30	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2 Kali	2	920.919.150	2	1.013.011.065	2	1.114.312.172	2	1.192.314.024	2	1.311.545.426	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 31	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen PerencanaTata Ruang	1 Dokumen	1	260.000.000	1	286.000.000	1	314.600.000	1	336.622.000	1	370.284.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				14.735.574.000		15.916.864.333		17.267.645.765		18.346.171.683		19.915.191.087	
4.04 . 4.04.01	Program Pelayanan	% adminisrasi perkantoran yang	100%	100	3.497.824.942	100	3.672.716.189	100	3.856.351.999	100	4.049.169.598	100	4.251.628.078	Badan Pengelola

. 01	Administrasi Perkantoran	terpenuhi												Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	618.204.956	100	649.115.204	100	681.570.964	100	715.649.512	100	751.431.988	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	95.000.000	100	99.750.000	100	104.737.500	100	109.974.375	100	115.473.094	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100	226.130.000	100	237.436.500	100	249.308.325	100	261.773.741	100	274.862.428	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	151.506.800	100	159.082.140	100	167.036.247	100	175.388.059	100	184.157.462	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan PD	52	54	8.594.366.658	54	9.453.803.324	54	10.399.183.656	54	11.127.126.512	54	12.239.839.163	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.01 . 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan PD	54 OPD	54	212.728.000	54	234.000.800	54	257.400.880	54	275.418.942	54	302.960.836	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.01 . 20	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Cakupan Pemeliharaan dan Pengelolaan Arsip	54 OPD	54	83.138.000	54	91.451.800	54	100.596.980	54	107.638.769	54	118.402.645	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.01 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	% Pemanfaatan Tehnologi Informasi	100%	100	1.256.674.644	100	1.319.508.376	100	1.451.459.214	100	1.524.032.175	100	1.676.435.392	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.02	Badan Pengelola Pendapatan Daerah				7.243.607.739		7.740.548.743		8.514.603.618		9.005.557.938		9.906.113.731	
4.04 . 4.04.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	2.579.043.030	100	2.707.995.182	100	2.978.794.700	100	3.127.734.435	100	3.440.507.878	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

4.04 . 4.04.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	1.193.265.000	100	1.252.928.250	100	1.378.221.075	100	1.447.132.129	100	1.591.845.342	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	62.125.000	100	65.231.250	100	71.754.375	100	75.342.094	100	82.876.303	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100	661.774.759	100	694.863.497	100	764.349.847	100	802.567.339	100	882.824.073	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	52.187.600	100	54.796.980	100	60.276.678	100	63.290.512	100	69.619.563	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.02 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	% Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100	1.484.982.350	100	1.633.480.585	100	1.796.828.644	100	1.922.606.649	100	2.114.867.313	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.02 . 21	Program Pendapatan	Cakupan Capaian PAD	100%	100	1.210.230.000	100	1.331.253.000	100	1.464.378.300	100	1.566.884.781	100	1.723.573.259	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				10.651.374.000		11.368.842.700		15.505.726.970		16.637.272.944		14.542.555.410	
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	1.853.220.500	100	1.945.881.525	100	2.140.469.678	100	2.247.493.161	100	2.472.242.478	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05 . 4.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	809.953.500	100	850.451.175	100	935.496.293	100	982.271.107	100	1.080.498.218	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05 . 4.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	% ASN yang memenuhi aturan disiplin	100%	100	58.000.000	100	60.900.000	100	66.990.000	100	70.339.500	100	77.373.450	Badan Kepegawaian

														dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05 . 4.05.01 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% SDM aparatur yang ditingkatkan kapsitasnya	100%	100	4.200.000.000	100	4.410.000.000	100	4.851.000.000	100	5.093.550.000	100	5.602.905.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05 . 4.05.01 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	100	32.200.000	100	33.810.000	100	37.191.000	100	39.050.550	100	42.955.605	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05 . 4.05.01 .15	Program pendidikan kedinasan	Cakupan Pendidikan Kedinasan	100%	100	200.000.000	100	220.000.000	100	242.000.000	100	258.940.000	100	284.834.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05 . 4.05.01 .17	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah Aparatur	80 Orang	80	3.216.750.000	80	3.538.425.000	80	6.892.267.500	80	7.581.494.250	80	4.581.198.848	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05 . 4.05.01 .18	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	% Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan	100%	100	281.250.000	100	309.375.000	100	340.312.500	100	364.134.375	100	400.547.813	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.07 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				3.568.334.000		4.733.170.700		4.300.487.770		5.605.066.799		6.434.046.014	
4.07 . 4.07.01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% adminisrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100	965.254.000	100	1.013.516.700	100	1.114.868.370	100	1.170.611.789	100	1.287.672.967	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07 . 4.07.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	% kebutuhan sarana prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100	575.000.000	100	603.750.000	100	664.125.000	100	697.331.250	100	767.064.375	Badan Penelitian dan Pengembangan

	<i>Aparatur</i>													Daerah
4.07 . 4.07.01 .03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	<i>% ASN yang memenuhi aturan disiplin</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	43.750.000	<i>100</i>	45.937.500	<i>100</i>	50.531.250	<i>100</i>	53.057.813	<i>100</i>	58.363.594	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07 . 4.07.01 .05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>% SDM aparatur yang ditingkatkan kapahtasnya</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	40.000.000	<i>100</i>	42.000.000	<i>100</i>	46.200.000	<i>100</i>	48.510.000	<i>100</i>	53.361.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07 . 4.07.01 .06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	<i>Jumlah laporan kinerja keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	15.930.000	<i>100</i>	16.726.500	<i>100</i>	18.399.150	<i>100</i>	19.319.108	<i>100</i>	21.251.018	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07 . 4.07.01 .26	<i>Program penelitian dan pengembangan pemerintahan umum</i>	<i>Jumlah Dokumen Penelitian Pemerintahan Umum</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>4</i>	1.179.200.000	<i>4</i>	1.297.120.000	<i>4</i>	1.426.832.000	<i>4</i>	1.526.710.240	<i>4</i>	1.679.381.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07 . 4.07.01 .27	<i>Program penelitian dan pengembangan kelembagaan dan aparatur</i>	<i>Jumlah Dokumen Penelitian Kelembagaan Aparatur</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1</i>	118.000.000	<i>1</i>	129.800.000	<i>1</i>	142.780.000	<i>1</i>	152.774.600	<i>1</i>	168.052.060	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07 . 4.07.01 .28	<i>Program penelitian dan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Penelitian Ekonomi dan Keuangan</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2</i>	631.200.000	<i>2</i>	1.584.320.000	<i>2</i>	836.752.000	<i>2</i>	1.936.752.000	<i>2</i>	2.398.900.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan cerminan dan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari Program Perangkat Daerah sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/ hasil) dari kegiatan (*output*/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1 sebagai berikut:

Tabel. 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten
Jayapura 2018-2022

No	Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Terkait
			2018	2019	2020	2021	2022		
			Target	Target	Target	Target	Target		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,5	70,9	71,3	71,7	72,1	72,5	72,5	Perangkat Daerah Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2	Angka Harapan Hidup	66,4	66,9	67,3	67,7	67,9	68	68	Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
3	Pertumbuhan ekonomi	8,54	8,6	8,66	8,72	8,78	8,84	8,84	Lingkup Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah, BP2TSP.
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	14,63	14,63	14,5	14,03	13,5	10,99	10,99	Perangkat Daerah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sosial, Pendidikan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Lingkup Ekonomi
5	% penduduk di atas garis kemiskinan	65,29	65,31	65,33	65,35	65,37	65,39	65,39	Perangkat Daerah Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Lingkup Ekonomi
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Perangkat Daerah Inspektorat dan semua PD
7	% Masyarakat adat yang mendapatkan pengakuan	9	9	9	9	9	9	9	Sekretariat Daerah
8	% kampung adat yang ditetapkan oleh PERDA	0	4	4	4	4	4	20	Sekretariat Daerah
9	Indeks kepuasan masyarakat	68	68	75	75	80	85	85	Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang P3KA, Capil, BPPTSP, Wajib Dasar, Satpol PP, PMK, BPKAD, Bapenda, Bappeda
10	% distrik yang berfungsi sebagai pusat data sebagai pemberdayaan dan pelatihan	0	6	10	15	17	19	19	Sekretariat Daerah

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merujuk kepada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai perubahan dari Permendagri 13 Tahun 2010, pada aspek-aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian 483 indicator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian 483 indicator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap

tahunnya, Proyeksi target capaian pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah dapat dilihat pada tabel 8,2

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jayapura

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	9,04	9,54	10,04	10,54	11,04	11,54	11,54
2	Laju inflasi	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
3	PDRB per kapita	65,59	65,89	66,19	66,49	66,79	67,09	67,09
4	Indeks Gini	0,110	-0,090	-0,290	-0,490	-0,690	-0,890	-0,890
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia							
6	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)							
7.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	0,89	0,87	0,85	0,83	0,81	0,79	0,79
8.	Rasio kesenjangan kemiskinan	12,99	12,49	11,99	11,49	10,99	10,49	10,49
9.	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	36,00%	34,00%	32,00%	30,00%	28,00%	26,00%	126,00%
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,50	70,90	71,30	71,70	72,10	72,50	72,50
11.	Angka melek huruf	70,57	98,55	98,6	98,65	98,7	98,8	98,8
12.	Angka rata-rata lama sekolah	9,53	9,7	9,9	10,25	10,55	11	11
13.	Angka usia harapan hidup	66,40	66,9	67,3	67,7	67,9	68	68
14.	Persentase balita gizi buruk	0,06	<3.67	<3.67	<3.67	<3.67	<3.67	<3.68
15.	Prevalensi balita gizi kurang	1,11	<10	<10	<10	<10	<10	<11
16.	Cakupan Desa Siaga Aktif	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25
17.	Angka partisipasi angkatan kerja	96	110,06	90,70	105,06	85,70	100,06	100,06
18.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	100	100	100	100	100	100	101
19.	Tingkat pengangguran terbuka	10,92	10,67	10,42	10,17	9,92	9,67	9,67
20.	Rasio penduduk yang bekerja	13.266	14.762	16.258	17.754	19.250	20.746	20.746
21.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja(Ribu)	11.509,54	12.559,54	13.609,54	14.659,54	15.709,54	16.759,54	16.759,54
22.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05	90,05
23.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	56,23	58,53	60,83	63,13	65,43	67,73	67,73

24.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		39,10	-5,00	34,10	-10,00	29,10	29,10
25.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM walapun Kosong)							
26.	Persentase PAD terhadap pendapatan	8,10	8,08	8,51	8,98	9,46	9,92	10,92
27.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,46	83,2	83,5	84	84,5	85	86
29.	Penguatan cadangan pangan	8 Ton	8 Ton	9 Ton	10 Ton	12 Ton	15 Ton	16 Ton
30.	Penanganan daerah rawan pangan	9 kelompok	10 kelompok	12 kelompok	14 kelompok	15 kelompok	16 kelompok	17 kelompok
31.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99
32.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	4,20						
33.	Produksi sektor pertanian	13.708,00	15.709,00	16.587,00	18.246,00	20.070,00	20.070,45	20.070,45
34.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	6,12	6,44	6,76	7,08	7,40	7,72	7,72
35.	Produksi sektor perkebunan	2.946,00	3.122,15	3.277,74	3.605,51	4.146,34	4.975,19	4.975,19
36.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	296,09	282,82	269,55	256,28	243,01	229,74	230,74
37.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
38.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
39.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	7,02	7,39	7,76	8,13	8,50	8,87	8,87
40.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	12,22	12,92	13,62	14,32	15,02	15,72	15,72
41.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,97	12,26	12,12	12,41	12,27	12,56	12,56
42.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4,57	4,90	4,74	5,07	4,91	5,24	5,24
43.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	88,71	88,71	88,71	88,71	88,71	88,71	88,71
44.	Pertumbuhan Industri	100	100	100	100	100	100	100
45.	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	0	0	0	0	0	0	0
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu)	9.684	9.715	9.746	9.777	9.808	9.839	9.840
2.	Nilai tukar petani	96.85	96.85	96.85	96.85	96.85	96.85	96.85
3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita		9.774.000	121.000	9.895.000	242.000	10.016.000	10.016.000
4.	Produktivitas total daerah							
5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	139	139	139	139	139	139	139

6.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	67.161,75	67.298,75	67.435,75	67.572,75	67.709,75	67.846,75	67.983,75
7.	simpanan di bank umum (jt)	415.634.960	436.992.410	458.349.860	479.707.310	501.064.760	522.422.210	522.422.210
8.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR (jt)	2.628.818	2.752.118	2.875.418	2.998.718	3.122.018	3.245.318	3.245.318
9.	Angka kriminalitas yang tertangani	30,00	32,00	35,20	38,72	42,59	46,85	51,54
10.	Rasio ketergantungan	32,32	32,11	31,90	31,69	31,48	31,27	32,27
	Layanan Urusan Wajib Dasar							
	Dinas Pendidikan							
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	65,56	70,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
2	Angka partisipasi kasar	46,14	46,78	47,00	47,78	48,00	48,25	48,25
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	23,41	24,00	24,25	24,50	24,80	25,00	25,00
4	Angka Partisipasi Murni							
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,30	95,00	95,25	95,00	95,57	96,00	96,00
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	68,65	70,00	75,00	77,50	78,00	78,79	78,79
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	73,22	74,00	74,50	75,00	75,50	76,00	76,00
8	Angka partisipasi sekolah							
9	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	96,25	96,5	96,75	96,85	96,9	97	97
11	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	94,75	94,85	94,9	95	95,15	95,25	95,25
12	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	90,75	90,85	90,95	91	91,15	91,25	91,25
13	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	3,75	3,50	3,25	3,15	3,10	3,00	3,00
14	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	5,25	5,15	5,10	5,00	4,85	4,75	4,75
15	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	9,05	9	8,85	9,75	4,85	4,75	4,75
16	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
17	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	95,63	96,00	97,00	90,00	99,00	100	100
18	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	87,41	87,75	87,80	87,85	87,90	87,95	87,95
19	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,42	96,50	97,00	98,00	99,00	100	100
20	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93,06	93,25	93,50	93,75	94,25	94,50	94,50
21	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	80,00	82,50	85,75	86,72	88,72	90,00	90,00
22	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (pak jhon)	80,00	82,45	87,25	88,78	95,00	95,00	95,00
23	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	45,83	46,00	46,50	47,00	47,50	48,00	48,00

24	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	22,09	23	23,5	24	24,5	25,75	25,75
25	Rasio guru/murid Sekolah pendidikan dasar	38,63	38	37,5	37	36,5	36	36
26	Rasio guru/murid Sekolah pendidikan Menengah	61,37	60	55	50	45	40	40
27	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
28	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
29	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	98,80	98,90	99,00	99,15	99,20	99,25	99,25
30	Angka melek huruf penduduk usia 15□24 tahun, perempuan dan laki□laki	98,39	98,42	98,60	98,75	98,80	99,00	99,00
31	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,16	98,25	98,3	98,35	98,40	98,45	98,45
32	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	79,99	80,00	82,25	85,00	90,00	95,00	96,00
	Dinas Kesehatan							
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	22,70	<23	<23	<23	<23	<23	<23
2	Angka kelangsungan hidup bayi							
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	24,92	<30	<30	<30	<30	<30	<30
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	21,10	<23	<23	<23	<23	<23	<23
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	188,8	<250	<240	<235	<230	<220	<220
6	Rasio posyandu per satuan balita	15,00	<20	<20	<20	<20	<20	<20
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,82	0,82	0,85	0,87	0,9	1	1
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
9	Rasio dokter per satuan penduduk	347,39	347,39	347,39	347,39	347,39	347,39	347,39
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	4160	4160	4162	4162	4162	4164	4164
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	20,8	25	30	35	40	45	45
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85,00	88	91	93	96	100	100
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	81,94	85	85	85	90	95	95
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)							
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	97,50

	campak							
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk							
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	40	50	60	70	80	90	90
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100	100	100
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	820	850	860	830	800	750	750
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	20	20	18	16	14	10	10
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam program DOTS	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	78	80	82	84	86	88	88
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani	95	95	97	98	100	100	100
26	Angka kejadian Malaria	170	130	110	90	70	50	50
27	Tingkat kematian akibat malaria	0,95	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Blm Survey						
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	90	90,5	91	91,5	92	92,5	93
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2,18	<2.3	<2.3	<2.3	<2.3	<2.3	<2.4
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Blm Survey						
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Blm Survey						
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	80	90	95	100	100	100	100
34	Cakupan kunjungan bayi	70	77	84	92	100	100	100
35	Cakupan puskesmas	100	100	100	100	100	100	100
36	Cakupan puskesmas pembantu	44,60	44,83	45,06	45,29	45,52	45,75	45,75
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	47,30	55,00	60,00	63,00	65,00	70,00	71,00
38	Cakupan pelayanan nifas	61,00	65,00	70,00	75,00	80,00	90,00	90,00

39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	60,00
40	Cakupan pelayanan anak balita	66	76	84	92	100	100	100
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	95,15	95,15	95,15	100	100	100	100
		16.310						
42	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	90	95	97	100	100	100	100
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	100	100
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,52	0,54	0,55	0,57	0,58	0,60	0,60
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	18,71	17,27	15,83	14,39	12,95	11,51	11,51
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	33,97	36,45	38,93	41,41	43,89	46,37	46,37
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,97	0,00	1,13	1,29	1,45	1,62	1,62
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,32	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	4,49	4,97	5,45	5,93	6,42	6,90	6,90
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	0,98		1,14	1,3	1,460	1,63	1,63
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	0	0	0	0	0	0	0
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	12.977		13.977	149.777	15.977	17.977	17.978
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100
13	Rasio Jaringan Irigasi	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
14	Persentase penduduk berakses air minum	49,81	51,36	52,91	54,46	56,01	57,56	57,56

15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	49,81	51,36	52,91	54,46	56,01	57,56	57,56
16	Persentase areal kawasan kumuh		0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	11	2	4	2	2	2	2
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0	0	0	0	0	0	0
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
	Penataan Ruang:							
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	2	2	2	2	2	2	2
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	0				5	5	5
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,019
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	0	0	0
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	Ketaatan terhadap RTRW	83	85	87	89	91	93	93
	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman							
1	Rasio rumah layak huni	0,2685	0,2694	0,2715	0,2743	0,2777	0,2817	0,2817
2	Rasio permukiman layak huni	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	33.896	34.691	35.661	36.751	37.951	39.271	39.271
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	35	43	52	62	74	89	89
5	Persentase pemukiman yang tertata	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102	0,0102
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0	0	0,0167	0,0167	0,0167	0,0167	0,0167
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0,1180	0,1157	0,1134	0,1112	0,1090	0,1069	0,1069
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	13,33	20,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja							
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100	100	100
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							

1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20,00	23,33	25,00	26,67	28,00	30,91	30,91
	Sekretariat Daerah							
1	Persentase Penegakan PERDA	20%	20%	20%	20%	20%	20%	120%
	Dinas Sosial							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	6,64	6,93	7,73	8,69	9,86	11,32	11,32
2	Persentase PMKS yang tertangani	9,42	10,13	11,17	12,42	13,94	15,84	15,84
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	5,32	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,50
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	95,45	95,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	0	-	-	-	-	-	-
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	32,33	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	11,69	11,69	12,00	12,25	12,50	12,75	12,75
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	221	218	200	186	175	150	150
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	90	82	66	53	50	50
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0,05	0,08	0,15	0,27	0,39	0,5	0,5
4	Keselamatan dan perlindungan	22	30	35	42	49	60	60
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	6.679	7.000	7.060	7.150	7.500	8.000	8.000
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	-			0	0	0	0
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	89	100	125	140	149	160	160
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan		60	67	72	78	80	80

9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50	50	75	100	150	200	200
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		176	352	352	352	352	352
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	50	150	250	300	300	300	300
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,030	0,080	0,130	0,180	0,230	0,280	0,330
	Transmigrasi							
1	Persentase transmigran swakarsa/lokal	0,00	200	300	300	0	0	0
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,47	6	7	8	8	8	8
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	49,37	49,37	49,37	49,37			
4	Rasio KDRT	0,023	0,058	0,058	0,044	0,029	0,029	0,029
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	0	0	0	0	0	0
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	20	20	20	23	25	25	25
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	0,32	0,32	0,024	0,024	0,016	0,016	0,016
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	54,55	58,68	66,66	75,86	88,88	88,88	88,88
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	-	0	0	0	0	0	0
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	25,0	40,00	53,30	40,00	70,00	70,00	70,00
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	25,00	40	53,33	40	70	70	70
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50,00	50	46,666	46,666	80	80	80
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50,00	50	46,666	46,666	80	80	80
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	90,20	90,22	90,24	90,26	90,28	90,3	90,3
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	91,09						
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	73,58	73,58	73,58	73,58	73,58	73,58	73,58
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	40,65	40,80	40,95	41,10	41,25	41,40	41,40

18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	18.314	18.314	18.314	18.314	18.314	18.314	18.314
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian	18,92	19,67	20,42	21,17	21,92	22,67	22,67
	Dinas Ketahanan Pangan							
1	Ketersediaan pangan utama	332,25	333,5	333,4	334,5	334,5	335	335
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita							
3	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari):	2324 kg kal/kap/hari	2340 kal/kap/hari	2350 kal/kap/hari	2350.5 kal/kap/hari	2400 kal/kap/hari	2500 kal/kap/hari	2501 kal/kap/hari
4	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):	77.05 gram/kap/hari	76.24 gram/kap/hari	77 gram/kap/hari	83 gram/kap/hari	83.5 gram/kap/hari	83.88 gram/kap/hari	83.88 gram/kap/hari
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100	100	100	100	101
	Dinas Pertanian, Perumahan dan Kawasan Pemukiman							
1	Persentase luas lahan bersertifikat	0,0134	0,0057	0,0063	0,0069	0,0074	0,008	
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	-	0	0	0	0	0	
3	Penyelesaian izin lokasi	95	100	100	100	100	100	
	Dinas Lingkungan Hidup							
1	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan							
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	tidak ada		2		2		
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	tidak ada	1	1	1	1	1	1
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	tidak ada	1	1	1	1	1	1
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	tidak ada	1	1	1	1	1	1
12	Penetapan hak MHA	tidak ada	1	1	1	1	1	1

13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	tidak ada	100	100	100	100	100	100
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana MHA	tidak ada	0	0	4	4	4	4
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	tidak ada	2	2	2	2	2	2
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	repangmuaif	ada	ada	ada	ada	ada	ada
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	-	100	100	100	100	100	100
18	Timbulan sampah yang ditangani	8448 M3	9000	10000	12000	15000	20000	20000
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	42 ton	43 ton	44 ton	45 ton	46 ton	47 ton	48 ton
20	Persentase cakupan area pelayanan	607 Ha	608	609	610	611	612	612
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani		85	85	85	85	85	85
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang- undangan	tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	0,51	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	0,95
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,61	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95	0,95
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,9
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	50,00	55	60	65	70	75	75
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	61	75	80	85	90	95	95
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung							
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100	100	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89	1,00	1,00
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1	1	1	1	1	1	1
4	Persentase LSM aktif	1	1,39	2,08	2,78	3,47	4,17	4,17
5	Persentase LPM Berprestasi	17	17,36	17,36	17,36	17,36	17,36	17,36
6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Posyandu aktif	65	70,14	75,11	80,09	85,07	90,05	90,05

8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	-	25	25	25	25	25	25
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,76	1,78	1,80	1,82	1,84	1,86	1,86
2	Total Fertility Rate (TFR)							
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	40,74	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		0	0	1,85	3,70	3,70	3,70
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	2	2	2	2	2
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4	4	4	4	4	4
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	25	25	29	33	36	40	40
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	2	2	2	2	2	2
9	Ratio Akseptor KB	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	49,59	59,68	69,76	79,84	89,92	100,00	100,00
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	5.324	5.287	5.250	5.213	5.176	5.139	5.139
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	35,70	28,56	21,42	14,28	7,14	0,00	0,00
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	50,41	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2,59	3,40	3,98	4,10	4,19	4,02	4,02
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	4,17	3,21	2,49	1,94	1,49	1,49
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	61,11	63,54	65,93	68,31	70,65	72,97	72,97

17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	87,50	86,69	86,50	86,32	86,14	85,97	85,97
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	65,28	67,14	66,20	66,20	65,28	64,38	64,38
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	-	5,26	5,26	5,26	10,53	10,53	10,53
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	-	26,32	52,63	52,63	26,32	26,32	26,32
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	100	100
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri							
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	72,92	83,33	90,28	94,44	94,44	94,44	94,44
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	29.334	29.921	30.519	31.130	31.752	32.387	32.387
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	62,50	68,75	75,00	81,25	87,50	93,75	93,75
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	46,22	46,45	46,68	46,91	47,14	47,37	47,37
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	10.878	9.878	8.878	7.878	6.878	5.878	5.878
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100	100	100
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	72.986	73.186	73.386	73.586	73.786	73.986	73.986
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	23	23	23	23	23	23
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

	Dinas Perhubungan							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.483.686	2.068.164	2.284.584	3.572.895	2.357.767	2.607.870	2.607.870
2	Rasio ijin trayek	0,008	0,006	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
3	Jumlah uji kir angkutan umum	660	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	11	8	8	8	11	12	12
5	Persentase layanan angkutan darat	0,69	0,69	0,69	0,72	0,72	0,72	0,72
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	5	21,56	28,60	9,40	9,66	5,60	5,60
7	Pemasangan Rambu- rambu	47,33	17,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,03	0,0302	0,0288	0,0275	0,0262	0,0250	0,0250
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	732.816	769.456,80	807.929,64	848.326,12	1.696.652,29	1.781.484,91	1.781.484,91
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (ribu)	6.491	6.815	7.156	7.514	7.889,61	8.284	8.284
	Dinas Komunikasi dan Informatika							
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	31,58	42,11	57,89	73,68	84,21	100,00	100,00
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,32	0,39	0,45	0,52	0,60	0,70	1,70
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	77,95	80,20	82,50	85,20	87,50	88,50	88,50
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	35	37	40	43	45	50	50
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	69	70	72	74	76	78	78
	Dinas Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif	64,35	66,52	68,70	70,87	73,04	75,22	75,22
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	75,00	75,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3	Persentase BPR/LKM aktif	56,99	60,01	65,00	69,99	75,01	80,01	80,01
4	Persentase Usaha Mikro kecil dan menengah	57	60	65	70	75	80	80
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu							
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	25	28	31	35	40	45	45
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (jt)	1.433,0	1.533	1.643	1.762	1.901	2.056	2.056
3	Rasio daya serap tenaga kerja	251,52	224	203	180	158	141	141
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	12,0	7,0	7,2	7,5	7,9	8,200	8,200
	Dinas Pemuda dan Olahraga							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	56,00	53,00	58,00	60,00	67,00	70,00	70,00

2	Persentase wirausaha muda	17,00	19,00	19,00	20,00	23,00	24,00	24,00
3	Cakupan pembinaan olahraga	8,00	14,00	18,00	18,00	25,00	25,00	25,00
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	52,00	63,00	67,00	67,00	74,00	74,00	74,00
5	Cakupan pembinaan atlet muda	5,26	5,00	4,89	4,60	4,44	4,17	4,17
6	Jumlah atlet berprestasi	32	8	8	8	8	8	72
7	Jumlah prestasi olahraga	1	5	6	7	8	9	9
8	Jumlah sarana dan Prasarana	341	343	346	349	352	355	355
	Statistik							
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	Buku "kabupaten dalam angka"	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	Buku "PDRB"	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
	Persandian							
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	54	54	54	54	54	54	54
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	5	5	6	6	6	6
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	7	7	7	7	7	7	7
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	33	34	35	35	35	35	35
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-		7	0	0	7	14
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah							
	Perpustakaan							
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	321	300	350	380	400	450	2.201
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,73	0,77	0,89	0,89	0,86	0,90	0,90
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	321	450	500	800	1000	3000	6.071
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	9.236	10.000	12.000	12.500	12.500	13.500	13.500
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	-	0	0	0	0	0	
	Kearsipan							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1,00			44,00	5,00	6,00	55,00
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	2	2	2	2	2	10
	Layanan Urusan Pilihan							
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
1	Kunjungan wisata	101	100	100	100	100	100	101
2	Lama kunjungan Wisata	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-6
3	PAD sektor pariwisata	105.000.000	130.000.000	140.000.000	120.000.000	160.000.000	170.000.000	170.000.000

	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura							
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	16,21	16,11	16,01	15,91	15,81	15,71	15,71
3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	4,20	4,48	4,43	4,71	4,66	4,94	4,94
4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi Produksi	6,12	6,28	6,44	6,60	6,76	6,92	6,92
5	Kontribusi kelompok petani terhadap PDRB	309,36	309,36	309,36	309,36	309,36	309,36	309,36
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5,93	5,94	6	6,01	6,02	6,05	6,05
7	Cakupan bina kelompok petani		10	12	15	18	21	21
	Kehutanan							
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1	1	1	1	1	1	1
2	Kerusakan Kawasan Hutan	4,83	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84
3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	45	45	45	45	45	45	45
	Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	86,20	86,45	86,70	86,95	87,20	87,45	87,45
2	Rasio ketersediaan daya listrik	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	0,98
3	Persentase pertambangan tanpa ijin	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
4	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan							
	Perdagangan							
1	Ekspor Bersih Perdagangan	42006.1 ton	3727.6 ton	1756.62 ton	1179 ton	43266.3 ton	43266.3 ton	
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Perindustrian	50	30	50	60	70	80	80
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	28,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Transmigrasi							
1	Persentase transmigran swakarsa/lokal	0,00	200	300	300	0	0	800
	Dinas Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi Perikanan	97,30	99,71	99,71	99,71	99,71	99,72	99,72
2	Konsumsi Ikan	94	98	98	98	98	98	98
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	52	50	53	55	56	58	58
4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	98	99	99	99	99	99	99
5	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada dalam batasan biologis yang aman	66	66	67	67	68	69	69
6	Rasio Kawasan Lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05
7	Nilai Tukar Nelayan	102	103	104	105	106	107	107
8	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	12,22	12,67	13,12	13,57	14,02	14,47	15,47
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							

1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	95	95	95	95	95	95	95
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100	100	100
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	5	5	5	5	5	5	5
3	Persentase SILPA terhadap APBD	5	5	5	5	5	5	5
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	5	5	5	5	5	5	5
5	Persentase belanja pendidikan (20%)		20	20	20	20	20	20
6	Persentase belanja kesehatan (10%)		10	10	10	10	10	10
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	65,98	60	60	60	60	60	60
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	34,02	40	40	40	40	40	40
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia								
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	321 JP	397,5 JP	321 JP	255 JP	397,5 JP	397,5 JP	397,5 JP
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,83	3,44	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	11,05	2,73	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32	40	40	40	40	40	40
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	610	693	693	693	693	693	693
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	76						
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	80	100	110	120	130	140	140
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	20,59	23,53	26,47	29,41	32,35	35,29	35,29
3	Penerapan SIDA:	50	60	70	80	90	100	100
4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di	0	0	0	0	0	0	0

	daerah.							
	Inspektorat							
	Pengawasan							
1	Persentase tindak lanjut temuan	61,00	63,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
2	Persentase pelanggaran pegawai	0,08	0,08	0,15	0,08	0,08	0,08	0,08
3	Jumlah temuan BPK	70	60	65	66	67	70	70
	Sekretariat DPRD							
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber Data : dikelola Bappeda tahun 2017

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Jayapura
Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2018-2022

NO	TUJUAN, TARGET DAN INDIKATOR SDG s	TAHUN						
		Satauan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua tempat							
1	Persentase penduduk yang hidup bawah \$1,25 per kapita per hari (PPP)	%	0,91	0,84	0,77	0,7	0,63	0,56
2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dibedakan	%	2,57	2,24	1,91	1,58	1,25	0,92
3	• Indeks kedalaman kemiskinan	%	12,99	12,49	11,99	11,49	10,99	10,49

	Target 1B. Menjamin hak atas lahan dan akses keuangan di daerah perdesaan dan menjamin sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana							
4	Jumlah korban bencana alam yang meninggal dunia	%	2	0	0	0	0	0
6	Persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha	%	15,17	17,74	20,31	22,88	25,45	28,02
Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan mencanangkan pertanian berkelanjutan								
	Target 3B. Memastikan cakupan universal pada kesehatan yang berkualitas, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan seksual dan reproduksi, keluarga berencana, imunisasi rutin, dan kesehatan mental, menurut prioritas tertinggi untuk pelayanan kesehatan dasar		Kemenkes	5 Tahunan	Provinsi			
7	Persentase balita yang menerima imunisasi lengkap	%	66	76	84	92	100	100
8	Tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR)	%	49,59	59,68	69,76	79,84	89,92	100,00
9	Fasilitas program kesehatan jiwa di RS dan Puskesmas		Kemenkes	(survei	Provinsi			
	• Persentase pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap PDB	%	9,78	9,95	10,12	10,29	10,44	10,62
	• Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan paket pelayanan dasar	%	78	80	82	84	86	88
	• Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat, tenaga farmasi, kesehatan masyarakat, keterampilan fisik, keteknisian medis, dan tenaga gizi)	%	4160	4160	4162	4162	4162	4164
	• Persentase anak berumur 1 tahun yang diimunisasi campak	%	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50
	• Cakupan pelayanan antenatal, setidaknya 1 dan 4 kali kunjungan	%	80	82	84	86	88	90

	• Cakupan perawatan nifas (1kunjungan)	%	61,00	65,00	70,00	75,00	80,00	90,00
	• Persentase pemberian Fe3 ibu hamil	%	47,30	55,00	60,00	63,00	65,00	70,00
	• Persentase pemberian ASI eksklusif 6 bulan pertama kelahiran	%						
	• Proporsi balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang Tepat	%	80,23	81,72	83,21	84,70	86,19	87,68
	• Proporsi balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	70,00	72,17	74,34	76,51	78,68	80,85
	• Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (% thd PNB)	%	9,78	9,95	10,12	10,29	10,44	10,44
	• Persentase penduduk dengan fasilitas cuci tangan dasar di rumah tidak sehat seperti penggunaan tembakau sebanyak 30 persen dan penggunaan alkohol yang berbahaya sebanyak 20 persen							
10	Skor pola pangan harapan (PPH)	%	70,5	71,25	72	72,75	73,5	74,25
11	Prevalensi perokok saat ini penduduk usia 15 tahun ke atas	%	45	44,77	44,54	44,31	44,08	43,85
	• Proporsi penduduk umur ≥10 tahun dengan aktivitas fisik kurang	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	• Proporsi konsumsi buah dan sayur penduduk umur ≥10 tahun menurut jumlah porsi dalam seminggu (blm ada data)	%						
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua								
	Target 4A. Semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas							
12	Persentase anak yang mengikuti pendidikan prasekolah							
	• Persentase balita terlantar	%	0,90	0,83	0,76	0,69	0,62	0,55

	Target 4B. Semua anak perempuan dan anak laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang ber-fokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus sekolah menjadi nol							
Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan								
	Target 5A. Mencegah dan menghilangkan kekerasan terhadap individu, khususnya perempuan dan anak							
13	Persentase wanita yang mengalami tindak kejahatan dan dilaporkan ke polisi	%	4	3,73	3,46	3,19	2,92	2,65
14	Persentase wanita umur 20-24 tahun yang berstatus kawin/hidup bersama atau berstatus kawin/hidup bersama sebelum berusia 18 tahun	%	5	4,61	4,22	3,83	3,44	3,05
	Target 5C. Mencapai kesehatan seksual dan reproduksi dengan semua hak-haknya, dan mensosialisasikan program penurunan kelahiran dengan cara yang efisien dan sukarela. (Provinsi dan nasional)							
15	Tingkat kebutuhan pelayanan KB yang terpenuhi		0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
16	Angka Kelahiran Total							
	• Usia rata-rata ibu saat kelahiran anak pertama		19	19	19	19	19	19
Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi secara Berkelanjutan								
	Target 6A. Memastikan akses universal terhadap sumber daya air dan sanitasi untuk semua di berbagai tempat (Provinsi dan nasional)							
17	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	%	70	72,17	74,34	76,51	78,68	80,85
18	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak,		40	42,27	44,54	46,81	49,08	51,35
	• Persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan tidak memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki/SPAL.		75	77,57	80,14	82,71	85,28	87,85

	Target 6B. Memastikan kualitas air yang aman dan penggunaan air yang efisien untuk saat ini dan yang akan datang							
	Tujuan 7. Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan, dan Modern							
	Target 7A. Menjamin energi bersih untuk semua, dan meningkatkan efisiensi energi dengan target untuk tahun 2020, 2030, dan 2050 (Provinsi dan nasional)							
19	Persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar (listrik, gas/ elpiji, gas kota, dan minyak tanah) untuk memasak		45	47,76	50,52	53,28	56,04	58,8
	Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua							
	Target 8A. Menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menyediakan laporan terintegrasi hingga 2020							
	Target 8B. Setiap negara mendorong terciptanya pekerjaan yang layak dengan tingkat pendapatan yang lebih baik bagi semua							
	Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi							
	Target 9A. Menjamin akses universal ke jasa infrastruktur jalan dan komunikasi mobile dan broadband (Provinsi dan nasional)							
20	Langganan broadband telepon genggam per 100 penduduk, menurut perkotaan/ pedesaan	ITU	Tahunan	Nasional	-			
	Persentase rumah tangga dengan akses internet di perdesaan	35	37	40	43	45	50	
	Target 9C. Menciptakan lapangan kerja di sektor industri yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap kontribusi sektor industri terhadap PDB secara berkelanjutan							
	Tujuan 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara							

	Target 10A. Mengurangi hingga setengahnya proporsi rumah tangga yang pendapatannya kurang dari setengah median pendapatan nasional (Provinsi dan nasional)							
21	Persentase rumahtangga dengan pendapatan di bawah 50% dari median pendapatan ("kemiskinan relatif") akses		13,49	13,12	12,39	11,66	10,93	10,2
	Koefisien Gini		0,110	-0,090	-0,290	-0,490	-0,690	-0,890
	Target 10B. Mencapai keuangan publik internasional dan domestik yang memadai untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu proporsi BPR terhadap pendapatan nasional bruto sebesar 0,7 persen untuk semua negara berpendapatan tinggi							
Tujuan 11. Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan								
	Target 11A. Meningkatkan standar hidup di pemukiman kumuh dan memperluas lapangan kerja di perkotaan							
22	Persentase penduduk perkotaan tinggal di daerah kumuh	%	2,00	1,96	1,92	1,88	1,84	1,80
	Target 11B. Memastikan akses universal yang aman dan layak terhadap lingkungan dan layanan dasar perkotaan termasuk perumahan, sanitasi dan pengelolaan limbah dan transportasi yang rendah karbon (Provinsi dan nasional)							
23	Persentase rumah tangga di perkotaan menurut perlakuan terhadap sampah		98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan								
	Target 12A. Menjamin kerugian makanan yang rendah dan melaporkan kontribusi masing-masing negara terhadap lapisan atmosfer							
	Target 12B. Menjamin pemerintahan dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang berkelanjutan, terpadu dan transparan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian SDGs							

	Tujuan 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya						
	Target 13A. Mendekarbonasi sistem energi, menjamin energi bersih untuk semua, dan meningkatkan efisiensi energi dengan target 2020, 2030 dan 2050						
	Target 13B. Mengurangi emisi GRK yang tidak berhubungan dengan energi melalui praktik perbaikan di bidang pertanian, kehutanan, pengelolaan sampah dan industri						
	Target 13C. Menjamin investasi dan pengukuran ketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim						
	Tujuan 14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan						
	Target 14A. Menjamin ekosistem kelautan yang aman, dan membutuhkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk membayar biaya sosial akibat polusi dan penggunaan jasa ekosistem laut						
	Tujuan 15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati						
	Target 15A. Menahan konversi hutan dan lahan basah menjadi lahan pertanian (Provinsi dan nasional)						
	Target 15B. Mengelola hutan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan						
	Target 15C. Berpartisipasi dan mendukung pengaturan regional dan global untuk menginventarisir, memantau dan melindungi jasa ekosistem darat paling lambat pada 2020 (Provinsi dan nasional)						
	Tujuan 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan						
	Target 16A. Memberikan dukungan untuk negara yang sangat rentan dan negara kurang berkembang untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi negara-negara, termasuk kekerasan dan konflik (nasional)						

	Target 16B. Pemerintah (pusat dan daerah) dan perusahaan-perusahaan besar mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menyediakan laporan terpadu pada tahun 2020, manajemen sumber daya yang transparan, dan reformasi peraturan internasional untuk mencapai tujuan							
	Target 16C. Memantau dan mengakhiri diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi atas etnis, agama, kecacatan, asal negara, dan status sosial (nasional)							
24	Persentase balita yang memiliki akta kelahiran		0,70	0,75	0,80	0,85	0,95	0,95
Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan								
	Target 17A. Mereformasi peraturan internasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Provinsi dan nasional)							
	Target 17B. Tersedianya laporan keuangan yang cukup dari domestik maupun internasional, termasuk kontribusi ODA terhadap pendapatan nasional sebanyak 0,7 persen untuk seluruh negara berpendapatan tinggi (Provinsi dan nasional)							
	Target 17C. Memperkuat sarana dan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (Provinsi dan nasional)							

Sumber Data : dikelola Bappeda tahun 2017

BAB IX

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program pemerintah daerah. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Jayapura periode 2017-2022.

9.1. Pedoman Transisi

Tahun 2022 merupakan tahun transisi pemerintahan Kabupaten Jayapura untuk itu diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada tahun 2022, sehingga rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) maupun rencana kerja perangkat daerah Renja PD tahun 2022 harus disusun pada tahun 2021.

Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktifitas dan capaian program pembangunan daerah. Program pembangunan pada tahun 2022 melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu setiap perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2022 tetap mengacu pada program-program kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

Dokumen RPJMD ini menjadi pedoman dasar dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang menjadi landasan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD setiap tahunnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Papua dan RPJMN dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Dengan adanya dokumen RPJMD ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, oleh karena itu seluruh PD dilingkup pemerintah Kabupaten Jayapura wajib menyusun renstra tahun 2017-2022 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan prioritas dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD tahun

- 2017-2022 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya yang ditetapkan oleh kepala PD dan disahkan oleh Bupati.
2. RPJMD sebagai pedoman penyusunan Renstra PD, dan Renstra PD sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
 3. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura berkewajiban menyebar luaskan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 kepada masyarakat dan DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka menjangkau aspirasi/reses ke daerah pemilihannya.
 4. Lembaga Eksekutif dan Legislatif dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;
 5. Bupati dan Wakil Bupati Jayapura dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 dengan menggerakkan secara optimal seluruh potensi dan kekuatan daerah;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022.
 7. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabarannya ke dalam Renstra dan Renja PD.
 8. Dokumen ini diklasifikasi sebagai dokumen publik, maka Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) berkewajiban memberikan peluang yang luas untuk diakses oleh masyarakat, sehingga dapat dicapai derajat pemahaman yang sama dalam menjalankan, menilai, dan menikmati hasil-hasil pembangunan.
 9. Dokumen RPJMD menjadi pedoman dasar dalam melakukan monitoring secara periodik, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi kinerja pembangunan tahunan dalam rangka LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati dan Wakil Bupati) tahunan dan evaluasi kinerja pembangunan lima tahunan dalam rangka LAMJ (Laporan Akhir Masa Jabatan) Bupati dan Wakil Bupati Jayapura.
 10. Dalam hal pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 menunjukkan adanya hal-hal yang perlu disesuaikan dengan

mempertimbangkan berbagai hal yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Jayapura dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Kemudian, hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Jayapura untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

11. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, maka perubahan tersebut tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan target RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan.
12. Dalam pelaksanaannya dilakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara berkala guna menjamin tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura.